



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; maka sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang dilanjutkan secara sinergis oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;

- b. BAB II : Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV : Determinan Kemiskinan Daerah;
 - e. BAB V : Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. BAB VI : Tinjauan Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
 - g. BAB VII : Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah;
 - h. BAB VIII : Sistem Monitoring dan Evaluasi; dan
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan, dan sumber

pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 3 Desember 2021

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 3 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
NIP. 19680517 198903 1 009

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
A. Latar Belakang	I.1
B. Dasar Hukum	I.4
C. Maksud dan Tujuan.....	I.7
D. Sasaran	I.8
E. Ruang Lingkup	I.8
F. Sistematika	I.9
BAB II KONDISI UMUM DAERAH	II.1
A. Aspek Geografis dan Demografis	II.I
1. Kondisi Geografis	II.1
2. Kondisi Topografi	II.3
3. Kondisi Geologi	II.5
4. Kondisi Demografis	II.8
5. Kondisi Pandemi Covid-19	II.12
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.13
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemetaan Ekonomi.....	II.13
a. Pertumbuhan Ekonomi.....	II.13
b. Produk Domestik Regional Bruto.....	II.15
c. PDRB Per Kapita	II.18
d. Inflasi.....	II.20
2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II.20
a. Angka Harapan Hidup	II.22
b. Harapan Lama Sekolah	II.24
c. Rata-Rata Lama Sekolah	II.25
d. Pengeluaran Per Kapita	II.27
BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH	III.1
A. Kondisi Kemiskinan	III.1
1. Kemiskinan	III.1
2. Kemiskinan Ektrem.....	III.16
3. Dimensi Penanggulangan Kemiskinan	III.18

a.	Bidang Ketenagakerjaan.....	III.18
b.	Bidang Pendidikan	III.30
c.	Bidang Kesehatan.....	III.37
d.	Bidang Infrastruktur Dasar	III.47
e.	Bidang Ketahanan Pangan.....	III.53
f.	Bidang Sosial.....	III.61
Bab IV	PRIORITAS PROGRAM	IV.1
A.	Perspektif Hukum Penanggulangan Kemiskinan	IV.1
1.	Undang-Undang.....	IV.1
2.	Peraturan Pemerintah	IV.4
3.	Peraturan Presiden.....	IV.5
4.	Intruksi Presiden	IV.7
B.	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional	IV.14
C.	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah	IV.29
D.	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan	IV.40
E.	Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan	IV.54
1.	Kinerja Pendapatan Daerah	IV.55
2.	Kinerja Belanja Daerah.....	IV.61
3.	Kinerja Pembiayaan Daerah.....	IV.66
F.	Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan.....	IV.68
1.	Bidang Ketenagakerjaan.....	IV.69
2.	Bidang Pendidikan	IV.97
3.	Bidang Kesehatan	IV.106
4.	Bidang Infrastruktur Dasar.....	IV.130
5.	Bidang Ketahanan Pangan	IV.146
6.	Bidang Sosial	IV.167
G.	Sistem Monitoring dan Evaluasi.....	IV.196
1.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	IV.197
2.	Metode Pemantauan dan Evaluasi	IV.198
BAB V	LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN . V.1	
A.	Lokasi Prioritas Tingkat Kecamatan Program Penanggulangan Kemiskinan	V.3

B. Lokasi Prioritas Tingkat/Kelurahan Program

Penanggulangan Kemiskinan	V.4
1. Kecamatan Bojong.....	V.4
2. Kecamatan Buaran.....	V.6
3. Kecamatan Doro.....	V.7
4. Kecamatan Kaje n	V.8
5. Kecamatan Kandangserang.....	V.10
6. Kecamatan Karanganyar	V.11
7. Kecamatan Karangdadap	V.13
8. Kecamatan Kedungwuni	V.14
9. Kecamatan Kesesi	V.15
10. Kecamatan Le bakbarang.....	V.17
11. Kecamatan Paninggaran	V.18
12. Kecamatan Petungkriono	V.19
13. Kecamatan Siwalan.....	V.21
14. Kecamatan Sragi	V.22
15. Kecamatan Talun	V.24
16. Kecamatan Tirto.....	V.25
17. Kecamatan Wiradesa.....	V.26
18. Kecamatan Wonokerto.....	V.28
19. Kecamatan Wonopringgo.....	V.29
BAB VI PENUTUP.....	VI.1

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2020.....	I.1
Tabel I.2	Tingkat Kemiskinan Tahun 2020.....	I.3
Tabel 2.1	Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten Atau Kota Sekitar Tahun 2020	II.2
Tabel 2.2	Jumlah Desa dan Kelurahan Per Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Dengan Tingkat Kesejahteraan	II.2
Tabel 2.3	Tingkat Kesejahteraan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Topografi.....	II.3
Tabel 2.4	Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Pekalongan.....	II.4
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Desil 1-4 Bermata Pencaharian di Sektor Pertanian Pada Daerah Aluvium	II.5
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Desil 1-4 Bermata Pencaharian di Sektor Pertanian Pada Daerah Aluvium Facies Gunung Api.....	II.6
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Desil 1-4 Bermata Pencaharian di Sektor Kehutanan dan Pertanian Lain Pada Daerah Gunung Api Kwarter Tua	II.7
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Desil 1-4 Bermata Pencaharian di Sektor Kehutanan dan Pertanian Lain dan Perkebunan Pada Daerah Miosen Facies Sedimen	II.8
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (jiwa)	II.9
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (jiwa)	II.9

Tabel 2.11	Kepadatan Penduduk Kabupaten Pekalongan Per Kecamatan Tahun 2020.....	II.11
Tabel 2.12	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.13
Tabel 2.13	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016- 2020.....	II.14
Tabel 2.14	Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	II.14
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2016-2020.....	II.15
Tabel 2.16	Distribusi PDRB Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016-2020	II.16
Tabel 2.17	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) Tahun 2016-2020	II.18
Tabel 2.18	Distribusi PDRB Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (%) Tahun 2016-2020	II.18

Tabel 2.19	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II.19
Tabel 2.20	Perbandingan Inflasi Antara Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II.20
Tabel 3.1	Komoditi Makanan dan Bukan Makanan Yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Jawa Tengah, Maret 2020.....	III.5
Tabel 3.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020	III.6
Tabel 3.3	Angka Penduduk yang Bekerja Pada Sektor-Sektor Rentan Guncangan Covid Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	III.19
Tabel 3.4	Pendapatan Rata-Rata Beberapa Sektor Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020.....	III.20
Tabel 3.5	Kinerja Indikator Pendukung Bidang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	III.29
Tabel 3.6	Kinerja Indikator Pendukung Bidang Pendidikan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	III.37
Tabel 3.7	Kinerja Indikator Pendukung Bidang Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan	

	Kabupaten	Pekalongan	Tahun	2016-	
				2020.....	III.44
Tabel 3.8	Kinerja	Indikator	Pendukung	Bidang	
	Infrastruktur	Dasar	Dalam	Rangka	
	Penanggulangan			Kemiskinan	
	Kabupaten	Pekalongan	Tahun	2016-	
				2020.....	III.53
Tabel 3.9	Kinerja	Indikator	Pendukung	Bidang	
	Ketahanan	Pangan	Dalam	Rangka	
	Penanggulangan			Kemiskinan	
	Kabupaten	Pekalongan	Tahun	2016-	
				2020.....	III.60
Tabel 3.10	Kinerja	Indikator	Pendukung	Bidang	
	Sosial	Dalam	Rangka	Penanggulangan	
	Kemiskinan	Kabupaten	Pekalongan		
	Tahun	2016-2020.....			III.68
Tabel 4.1	Target	Penurunan	Angka	Kemiskinan	
	di Jawa	Tengah	(RPJMD	Jawa	Tengah
	Tahun	2018-2023).....			IV.30
Tabel 4.2	Sasaran	Kemiskinan	WP	Petanglong	
	RPJMD	Jawa	Tengah	Tahun	2018-
				2023.....	IV.40
Tabel 4.3	Sasaran,	Strategi	dan	Arah	Kebijakan
	Terkait	Dengan	Misi	1, 5 dan 7
					IV.41
Tabel 4.4	Target	Indikator	Sasaran	Peningkatan	
	Kesejahteraan	Masyarakat	Kabupaten		
	Pekalongan	Tahun	2016-2021	IV.51
Tabel 4.5	Rata-rata	Pertumbuhan	Realisasi		
	Pendapatan	Daerah	Kabupaten		
	Pekalongan	Tahun	2016 – 2020	IV.56
Tabel 4.6	Perkembangan	Pendapatan	Daerah		
	Pendapatan	Daerah	Kabupaten		
	Pekalongan	Tahun	2016 - 2020		
	(Rupiah)			IV.60

Tabel 4.7	Persentase Belanja Pekalongan Tahun 2016-2020 (%).....	Pertumbuhan Daeran	Realisasi Kabupaten	IV.62
Tabel 4.8	Perkembangan Kabupaten 2020 (Rp.000)	Belanja Pekalongan	Daerah Tahun 2016-	IV.65
Tabel 4.8	Perkembangan Kabupaten (Rupiah)	Pembiayaan Pekalongan	Daerah 2016-2020	IV.68
Tabel 4.9	Tujuan Kabupaten 2026.....	Penanggulangan Pekalongan	Kemiskinan Tahun 2021-	IV.68
Tabel 4.10	Sasaran Ketenagakerjaan Kemiskinan Tahun 2021-2026.....	Akhir Kabupaten	Bidang Penanggulangan Pekalongan	IV.70
Tabel 4.11	Rencana Kemiskinan Kabupaten 2026.....	Aksi Bidang Pekalongan	Daerah Penanggulangan Ketenagakerjaan Tahun 2021-	IV.85
Tabel 4.12	Rencana Kemiskinan Kabupaten 2026.....	Aksi Bidang Pekalongan	Daerah Penanggulangan Pendidikan Tahun 2021-	IV.101
Tabel 4.14	Sasaran Penanggulangan Kabupaten 2026.....	Akhir Pekalongan	Bidang Kesehatan Kemiskinan Tahun 2021-	IV.106
Tabel 4.15	Rencana Kemiskinan Kabupaten 2026.....	Aksi Bidang Pekalongan	Daerah Penanggulangan Kesehatan Tahun 2021-	IV.116
Tabel 4.16	Sasaran Dasar	Akhir Penanggulangan	Bidang Infrastruktur Kemiskinan	

	Kabupaten	Pekalongan	Tahun	2021-	
				2026.....	IV.130
Tabel 4.17	Rencana	Aksi	Daerah	Penanggulangan	
	Kemiskinan		Bidang	Infrastruktur	
	Dasar	Kabupaten	Pekalongan	Tahun	
				2021-2026	IV.136
Tabel 4.18	Sasaran	Akhir	Bidang	Ketahanan	
	Pangan	Penanggulangan		Kemiskinan	
	Kabupaten	Pekalongan	Tahun	2021-	
				2026.....	IV.146
Tabel 4.19	Rencana	Aksi	Daerah	Penanggulangan	
	Kemiskinan		Bidang	Ketahanan	
	Pangan	Kabupaten	Pekalongan	Tahun	
				2021-2026	IV.154
Tabel 4.20	Sasaran	Akhir	Bidang	Sosial	
	Penanggulangan			Kemiskinan	
	Kabupaten	Pekalongan	Tahun	2021-	
				2026.....	IV.168
Tabel 4.21	Rencana	Aksi	Daerah	Penanggulangan	
	Kemiskinan		Bidang	Sosial	
				Kabupaten	
				Pekalongan Tahun 2021-2026	IV.174
Tabel 5.1	Jumlah	Rumah	Tangga	Berdasarkan	
	Status	Kesejahteraan	40%	Terendah	
	dan	Kecamatan	di	Kabupaten	
				Pekalongan.....	V.2
Tabel 5.2	Prioritas	Intervensi	Wilayah	Tingkat	
	Kecamatan			Penanggulangan	
	Kemiskinan	Kabupaten	Pekalongan.....		V.4
Tabel 5.3	Prioritas	Intervensi	Wilayah	Tingkat	
	Desa/Kelurahan			Penanggulangan	
	Kemiskinan	Kecamatan	Bojong.....		V.5
Tabel 5.4	Prioritas	Intervensi	Wilayah	Tingkat	
	Desa/Kelurahan			Penanggulangan	
	Kemiskinan	Kecamatan	Buaran.....		V.7.

Tabel 5.5	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Doro.....	Intervensi	Wilayah Penanggulangan	Tingkat	V.8
Tabel 5.6	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Kajen	Intervensi	Wilayah Penanggulangan	Tingkat	V.9
Tabel 5.7	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kandangserang	Intervensi	Wilayah Penanggulangan Kecamatan	Tingkat	V.11
Tabel 5.8	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Karanganyar	Intervensi	Wilayah Penanggulangan	Tingkat	V.12
Tabel 5.9	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Karangdadap.....	Intervensi	Wilayah Penanggulangan	Tingkat	V.14
Tabel 5.10	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Kedungwuni.....	Intervensi	Wilayah Penanggulangan	Tingkat	V.15
Tabel 5.11	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Kesesi.....	Intervensi	Wilayah Penanggulangan	Tingkat	V.16
Tabel 5.12	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Lebakbarang.....	Intervensi	Wilayah Penanggulangan	Tingkat	V.18
Tabel 5.13	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Paninggaran	Intervensi	Wilayah Penanggulangan	Tingkat	V.19
Tabel 5.14	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Petungkriono.....	Intervensi	Wilayah Penanggulangan	Tingkat	V.21
Tabel 5.15	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Siwalan.....	Intervensi	Wilayah Penanggulangan	Tingkat	V.22

Tabel 5.16	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Siwalan.....	Intervensi	Wilayah	Tingkat Penanggulangan	V.23
Tabel 5.17	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Talun	Intervensi	Wilayah	Tingkat Penanggulangan	V.25
Tabel 5.18	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Tirto.....	Intervensi	Wilayah	Tingkat Penanggulangan	V.26
Tabel 5.19	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Wiradesa.....	Intervensi	Wilayah	Tingkat Penanggulangan	V.27
Tabel 5.20	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Wonokerto.....	Intervensi	Wilayah	Tingkat Penanggulangan	V.29
Tabel 5.30	Prioritas Desa/Kelurahan Kemiskinan Kecamatan Wonopringgo.....	Intervensi	Wilayah	Tingkat Penanggulangan	V.30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kabupaten Pekalongan.....	II.1
Gambar 2.2	Peta Kabupaten Pekalongan.....	II.3
Gambar 2.3	Peta Kabupaten Pekalongan.....	II.11
Gambar 2.4	Perbandingan Capaian IPM Antara Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II.11
Gambar 2.5	Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II.22
Gambar 2.6	Perbandingan Capaian Angka Harapan Hidup Antara Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II.23
Gambar 2.7	Perbandingan Capaian AHH Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II.23
Gambar 2.8	Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Antara Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II.24
Gambar 2.9	Perbandingan Capaian HLS Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II.25
Gambar 2.10	Perbandingan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Antara Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II.26

Gambar 2.11	Perbandingan Kabupaten Kabupaten/Kota 2016-2020	Capaian Pekalongan Sekitar	RLS Dengan Tahun	II.26
Gambar 2.12	Perbandingan Per Kapita Pekalongan, dan Nasional Tahun 2016-2020.....	Capaian Antara Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020.....	Pengeluaran Kabupaten Tengah,	II.27
Gambar 2.13	Perbandingan Per Kapita Dengan Tahun 2016-2020	Capaian Kabupaten Kabupaten/Kota	Pengeluaran Pekalongan Sekitar	II.28
Gambar 3.1	Garis (Rp/Kapita/Bulan) 2016-2020	Nasional	Kemiskinan Tahun	III.2
Gambar 3.2	Garis (Rp/Kapita/Bulan) Kategori Perkotaan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015- 2020		Kemiskinan Menurut Pedesaan Tahun 2015- 2020	III.3
Gambar 3.3	Garis (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota di Tengah Tahun 2020 (Maret)	Provinsi Jawa	Kemiskinan	III.4
Gambar 3.4	Persentase Provinsi Jawa Tengah dan Tahun 2016-2020 (%)	Penduduk Tengah dan	Miskin Nasional	III.7
Gambar 3.5	Rata-Rata Penduduk di Provinsi Jawa Tengah 2020 (%)	Kinerja Miskin Kabupaten/Kota Tengah	Penurunan Tahun	III.7
Gambar 3.6	Perkembangan Kabupaten 2016-Maret (Rp/Kapita/Bulan).....	Garis Pekalongan	Kemiskinan Tahun 2020	III.8

Gambar 3.7	Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Maret 2020	III.9
Gambar 3.8	Persentase Pnduduk Miskin Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 - Maret 2020	III.9
Gambar 3.9	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan Maret 2020 (jiwa)	III.10
Gambar 3.10	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 - Maret 2020	III.11
Gambar 3.11	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan Maret 2020	III.11
Gambar 3.12	Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 - Maret 2020	III.12
Gambar 3.13	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan Maret 2020	III.13
Gambar 3.14	Gambaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Pekalongan di Masa Pandemi Covid-19	III.14
Gambar 3.15	Fungsi Linier Persentase Penduduk Miskin Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2016-2021	III.14
Gambar 3.16	Prediksi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan (Hasil Peramalan ke 5) Pada Maret 2020 berdasarkan Fungsi Linier Persentase Penduduk Miskin Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2016-2020	III.15

Gambar 3.17	Jumlah Rumah Tangga Dalam Kelompok Dengan Kondisi 10% terendah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	III.18
Gambar 3.18	Perkembangan Angka Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020	III.18
Gambar 3.19	Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)-Indikator Utama Bidang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	III.22
Gambar 3.20	Kinerja Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja-Indikator Utama Bidang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	III.23
Gambar 3.21	Segmentasi Ekonomi Informal. Chen (2007)	III.24
Gambar 3.22	Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah-Indikator Utama Bidang Pendidikan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	III.32
Gambar 3.23	Kinerja Harapan Lama Sekolah-Indikator Utama Bidang Pendidikan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	III.33
Gambar 3.24	Kinerja Angka Harapan Hidup-Indikator Utama Bidang Kesehatan	

	Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	III.39
Gambar 3.25	Hubungan antara kemiskinan dan kesehatan.....	III.41
Gambar 3.26	Capaian Kawasan Permukiman Kumuh-Indikator Utama Bidang Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2020	III.48
Gambar 3.27	Kinerja Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani-Indikator Utama Bidang Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020	III.49
Gambar 3.28	Cakupan Infrastruktur Sanitasi Tahun 2020.....	III.50
Gambar 3.28	Cakupan Infrastruktur Air Minum Tahun 2020.....	III.50
Gambar 3.29	Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH)-Indikator Utama Bidang Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	III.56
Gambar 3.30	Kepemilikan Jaminan Kesehatan	III.62
Gambar 3.31	Kepemilikan Jaminan Sosial.....	III.63
Gambar 3.32	Kinerja Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial-Indikator Utama Bidang Sosial Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2020	III.64

Gambar 4.1	Visi Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin	IV.18
Gambar 4.2	Lima Strategi Pelaksanaan Misi Nawa Cita dan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045.....	IV.19
Gambar 4.3	Strategi Pembangunan SDM	IV.20
Gambar 4.4	Agenda Pembangunan sebagai Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020 – 2024	IV.21
Gambar 4.5	Sasaran Makro Pembangunan 2020 – 2024.....	IV.22
Gambar 4.6	Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).....	IV.23
Gambar 4.7	Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	IV.24
Gambar 4.8	Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan.....	IV.25
Gambar 4.9	Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....	IV.26
Gambar 4.10	Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas	IV.27
Gambar 4.11	Tujuan 5 : Kesetaraan Gender.....	IV.28
Gambar 4.12	Skema Strategi Pencapaian Misi 3 Tujuan 1 RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023	IV.34
Gambar 4.13	Skema Strategi Pencapaian Misi 3 Tujuan 2 RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023	IV.39
Gambar 4.14	Pendekatan Laboratorium Kemiskinan Kabupaten Pekalongan	IV.53
Gambar 4.15	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan	IV.54
Gambar 4.16	Prinsip-Prinsip Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan	IV.54
Gambar 4.17	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Trilyun Rupiah)	IV.55

Gambar 4.18	Derajat Kabupaten	Desentralisasi Pekalongan	Fiskal Tahun	2016-2020 (%).....	IV.57
Gambar 4.19	Rasio Daerah	Ketergantungan Kabupaten	Keuangan Pekalongan	Tahun 2016-2020	IV.58
Gambar 4.20	Proporsi Terhadap	Unsur Total	Pendapatan Pendapatan	Daerah Daerah	Tahun 2016-2020 IV.58
Gambar 4.21	Perubahan Daerah	Klasifikasi	Belanja		IV.61
Gambar 4.22	Perkembangan Kabupaten	Belanja Pekalongan	Daerah Tahun	2016-2020 (Triyun Rupiah)	IV.62
Gambar 4.23	Rasio	Belanja	Operasi	Terhadap Total Belanja Tahun 2016-2020 (%).....	IV.64
Gambar 4.24	Rasio	Belanja	Modal	Terhadap Total Belanja Tahun 2015-2020 (%).....	IV.64
Gambar 4.25	Perkembangan Pembiayaan	Kabupaten	Penerimaan Pekalongan	Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	IV.67
Gambar 4.26	Perkembangan Pembiayaan	Kabupaten	Pengeluaran Pekalongan	Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	IV.67
Gambar 4.27	Theory of Change Prioritas Kemiskinan Ketenagakerjaan	(ToC)	Program Penanggulangan Bidang Kabupaten	Pekalongan	IV.71
Gambar 4.28	Theory of Change Prioritas Kemiskinan	(ToC)	Program Penanggulangan Bidang Pendidikan	Kabupaten Pekalongan	IV.99
Gambar 4.29	Theory of Change Prioritas	(ToC)	Program Penanggulangan		

	Kemiskinan	Bidang	Kesehatan	
	Kabupaten Pekalongan			IV.106
Gambar 4.29	Theory of Change (ToC) Program	Prioritas	Penanggulangan	
	Kemiskinan	Bidang	Infrastruktur	
	Dasar Kabupaten Pekalongan			IV.131
Gambar 4.30	Theory of Change (ToC) Program	Prioritas	Penanggulangan	
	Kemiskinan	Bidang	Ketahanan	
	Pangan Kabupaten Pekalongan			IV.147
Gambar 4.31	Theory of Change (ToC) Program	Prioritas	Penanggulangan	
	Kemiskinan	Bidang	Sosial	
	Kabupaten Pekalongan			IV.169
Gambar 4.31	Fokus dan Indikator Pemantauan			IV.198
Gambar 4.32	Model Pernyataan Kondisi “If-Then”			IV.199
Gambar 4.33	Gap Analysis	Antara	Capaian	
	Kinerja Dengan Target Kinerja			IV.202
Gambar 4.34	Langkah-Langkah	Pelaksanaan	Gap	
	Analysis			IV.203
Gambar 4.35	Tabel	Kriteria	Notifikasi	
	Kinerja			IV.204
Gambar 5.1	Jumlah	Rumah	Tangga	
	Berdasarkan	Status	Kesejahteraan	
	50%	Terendah	Kabupaten	
	Pekalongan			V.1
Gambar 5.2	Jumlah	Rumah	Tangga	
	Berdasarkan	Status	Kesejahteraan	
	50% Terendah	dan	Kecamatan di	
	Kabupaten Pekalongan			V.2
Gambar 5.3	Grafik	Prioritas	Intervensi	
	Tingkat	Kecamatan	Penaggulangan	
	Kemiskinan Kabupaten Pekalongan			V.3
Gambar 5.4	Grafik	Prioritas	Intervensi	
	Tingkat		Desa/Kelurahan	

	Penanggulangan	Kemiskinan	
	Kecamatan Bojong.....		V.5
Gambar 5.5	Grafik Prioritas	Intervensi Wilayah	
	Tingkat	Desa/Kelurahan	
	Penanggulangan	Kemiskinan	
	Kecamatan Buaran		V.6
Gambar 5.6	Grafik Prioritas	Intervensi Wilayah	
	Tingkat	Desa/Kelurahan	
	Penanggulangan	Kemiskinan	
	Kecamatan Doro.....		V.7
Gambar 5.7	Grafik Prioritas	Intervensi Wilayah	
	Tingkat	Desa/Kelurahan	
	Penanggulangan	Kemiskinan	
	Kecamatan Kajen.....		V.9
Gambar 5.8	Grafik Prioritas	Intervensi Wilayah	
	Tingkat	Desa/Kelurahan	
	Penanggulangan	Kemiskinan	
	Kecamatan Kandangserang		V.10
Gambar 5.9	Grafik Prioritas	Intervensi Wilayah	
	Tingkat	Desa/Kelurahan	
	Penanggulangan	Kemiskinan	
	Kecamatan Karanganyar		V.12
Gambar 5.10	Grafik Prioritas	Intervensi Wilayah	
	Tingkat	Desa/Kelurahan	
	Penanggulangan	Kemiskinan	
	Kecamatan Karangdadap.....		V.13
Gambar 5.11	Grafik Prioritas	Intervensi Wilayah	
	Tingkat	Desa/Kelurahan	
	Penanggulangan	Kemiskinan	
	Kecamatan Kedungwuni.....		V.14
Gambar 5.12	Grafik Prioritas	Intervensi Wilayah	
	Tingkat	Desa/Kelurahan	
	Penanggulangan	Kemiskinan	
	Kecamatan Kesesi.....		V.14

Gambar 5.13	Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Lebakbarang.....	V.17
Gambar 5.14	Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Panninggaran.....	V.19
Gambar 5.15	Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Petungkriono.....	V.20
Gambar 5.16	Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Siwalan.....	V.21
Gambar 5.17	Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Sragi.....	V.23
Gambar 5.18	Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Talun	V.24
Gambar 5.19	Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Tirto.....	V.25
Gambar 5.20	Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Wiradesa.....	V.27
Gambar 5.21	Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan	

	Penanggulangan	Kemiskinan	
	Kecamatan Wonokerto.....		V.28
Gambar 5.22	Grafik	Prioritas	Intervensi
	Tingkat		Wilayah
	Penanggulangan		Desa/Kelurahan
			Kemiskinan
	Kecamatan Wonopringgo.....		V.29

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. Perspektif Hukum Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan penanggulangan kemiskinan, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Adapun Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan; keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang salah satunya ialah persoalan kemiskinan. Praktis bahwa melalui Undang-Undang ini pula secara eksplisit pemerintah bertugas untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 19 telah mengatur bahwa Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Adapun berdasarkan Pasal 20 Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- 1) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- 2) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- 3) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan

hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan

- 4) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Berdasarkan hal di atas, terdapat catatan bahwa Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud di atas menjadi tanggung jawab Menteri. Adapun Pemerintah Provinsi belum diatur untuk dilibatkan. Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sudah sangat rinci mengatur terkait pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 29 mengatur tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- 1) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 2) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- 3) memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- 4) memelihara taman makam pahlawan; dan
- 5) melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin ini lahir salah satunya adalah untuk menanggulangi kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi masalah bersama. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Adapun Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada perseorangan; keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat.

Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) pengembangan potensi diri;
- 2) bantuan pangan dan sandang;
- 3) penyediaan pelayanan perumahan;
- 4) penyediaan pelayanan kesehatan;
- 5) penyediaan pelayanan pendidikan;
- 6) penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- 7) bantuan hukum; dan/atau
- 8) pelayanan sosial.

Pada Pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa Penanganan fakir miskin dapat dilakukan melalui:

- 1) pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- 2) peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
- 3) jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
- 4) kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
- 5) koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, dimana dalam Pasal 41 ayat (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin. Adapun peran serta masyarakat tersebut dilakukan oleh:

- 1) badan usaha;
- 2) organisasi kemasyarakatan;
- 3) perseorangan;
- 4) keluarga;
- 5) kelompok;
- 6) organisasi sosial;
- 7) yayasan;
- 8) lembaga swadaya masyarakat;
- 9) organisasi profesi; dan/atau
- 10) pelaku usaha.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan bidang sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berkaitan dengan kewenangan daerah dalam penanggulangan kemiskinan, daerah diberikan kewenangan untuk menangani kemiskinan dimana hal tersebut merupakan urusan bidang sosial.

Adapun urusan bidang sosial merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang sosial merupakan urusan pemerintahan wajib. Artinya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Peraturan Pelaksana Pasal 8, 11, 12, 18, 35, 45 dan 50 Undang-Undang Nomor 11 Nomor 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 ini mengatur bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan; keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat. Adapun Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- 1) Kemiskinan;
- 2) ketelantaran;
- 3) kecacatan;
- 4) keterpencilan;
- 5) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- 6) korban bencana; dan/atau
- 7) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 3 mengatur bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial; Jaminan Sosial; Pemberdayaan Sosial; dan Perlindungan Sosial. *Pertama*, bahwa berdasarkan Pasal 4, Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. *Kedua*, berdasarkan Pasal 10 Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi serta menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. *Ketiga*, berdasarkan Pasal 15 pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Keempat* berdasarkan Pasal 28 Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Peraturan Pelaksana Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin).

3. Peraturan Presiden

- a. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan muncul didasarkan atas tiga pertimbangan. *Pertama* bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; *Kedua*, bahwa dalam

upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan; dan *Ketiga* bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Pasal 1 angka (1) menegaskan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka (2) ditegaskan bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pasal 3 mengatur bahwa Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Adapun berdasarkan Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- 1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- 2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

- 3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
 - 4) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- b. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 jo Nomor 96 tahun 2015 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan muncul didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Kedua, bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan upaya-upaya penajaman program perlindungan sosial.

Pasal 2 mengatur bahwa untuk mempercepat program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menetapkan program perlindungan sosial yang meliputi: a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera; b. Program Indonesia Pintar; dan c. Program Indonesia Sehat. Adapun berdasarkan Pasal 6 diatur bahwa pendanaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah ikut serta dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan.

4. Instruksi Presiden

- a. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota .

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota disebutkan dalam Pasal 26 Permendagri ini bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permendagri No. 53 Tahun 2020 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan. Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Permendagri ini dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penanggulangan kemiskinan di daerah, serta dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota..

TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas koordinasi perumusan kebijakan,

perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan RPKD dan rencana aksi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 2) koordinasi penyusunan rancangan RPKD provinsi dan RPKD Kabupaten/Kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- 3) koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- 4) fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- 5) penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- 6) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- 7) harmonisasi penyusunan RPKD antara RPKD Provinsi dan RPKD Kabupaten/Kota; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Dalam Pasal 6 hingga pasal Pasal 8, disebutkan susunan keanggotaan TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota yang melibatkan unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Susunan keanggotaan sendiri terdiri atas penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, serta kelompok pengelola program meliputi 1) koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat; 2) koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan. Termasuk keanggotaan TKPK yang terdiri dari: 1) kepala dan unsur Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan; 2) perwakilan masyarakat; 3) perwakilan dunia usaha; dan 4) pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam Permendagri No. 53 Tahun 2020 disebutkan dalam Pasal 9 hingga Pasal 12 bahwa dalam membantu pelaksanaan

tugas TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Sekretariat TKPK Provinsi berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan dan Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.

Susunan keanggotaan Sekretariat TKPK Provinsi dan Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota, terdiri dari kepala, wakil kepala dan anggota meliputi 1) kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan 2. unsur dari Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat TKPK Provinsi dan Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- 1) memberikan dukungan administrasi teknis;
- 2) menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- 3) menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- 4) memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.

Tata kerja TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan dan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Agenda kerja tahunan dimaksud memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Provinsi atau TKPK Kabupaten/Kota yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dipimpin oleh Ketua TKPK Provinsi dan Ketua TKPK Kabupaten/Kota.

Penyelarasan kerja antara TNP2K, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 hingga Pasal 21. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui strategi dan program. Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

- 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- 2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

- 3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- 4) sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan dengan Sasaran penerima manfaat berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan. Program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- 1) program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- 2) program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- 3) program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Permendagri No. 53 Tahun 2020, pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui direktur jenderal yang membidangi bina pembangunan daerah Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur melalui Wakil Gubernur. Pembinaan sebagaimana dimaksud dibebankan pada APBN dan APBD Provinsi dilakukan melalui pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam hal pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 bahwa Gubernur melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi kepada Wakil Presiden melalui Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. No. 39 Tahun 2012 jo. No. 15 Tahun 2016 Jo. No. 13 Tahun 2013, Jo. No. 123 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Garis besar Permen-permen ini adalah sebagai berikut: bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Resiko sosial yang dimaksud adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan sosial ada yang dapat direncanakan dan ada yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang dapat direncanakan, dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD, berdasarkan usulan dari calon penerima dan atau usulan kepala SKPD. Jumlah pagu usulan kepala SKPD maksimal 50% dari usulan dari calon penerima (tata caranya diatur dengan Perkada)

Sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ini tidak boleh melebihi pagu anggaran bantuan sosial yang dapat direncanakan.

Anggota/kelompok masyarakat calon penerima bantuan adalah:

- 1) individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) selektif; hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- 2) memenuhi persyaratan penerima bantuan meliputi:
 - memiliki identitas yang jelas; dan
 - berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
 - bersifat sementara dan tidak terus menerus, bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Namun alam Keadaan tertentu dapat berkelanjutan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) Rehabilitasi sosial yaitu untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) Perlindungan sosial yaitu untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) Pemberdayaan sosial yaitu untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) Jaminan sosial yaitu skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) Penanggulangan kemiskinan yaitu kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) Penanggulangan bencana yang merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 2) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Perangkat daerah yang terkait dengan kegiatan bantuan sosial ini adalah Perangkat Daerah yang mengampu urusan-urusan:

- 1) Sosial
- 2) Penanggulangan Bencana
- 3) Pendidikan
- 4) Kesehatan
- 5) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 6) Pertanian
- 7) Perikanan dan Kelautan
- 8) Dan lainnya yang terkait dengan tujuan pemberian bantuan sosial

B. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Secara nasional, kebijakan penurunan angka kemiskinan dapat dilihat dari perencanaan jangka panjang nasional dan pejabarannya dalam perencanaan jangka menengah yang bersifat lima tahunan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPNas) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPNas)

2005-2025, bahwa visi pembangunan nasional untuk 20 tahun ke depan adalah :

“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, ditetapkan melalui penjabaran 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Melalui misi kelima yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, arah pembangunan baik pusat dan daerah ditujukan dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Konteks mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan ini dalam rangka peningkatan kesejahteraan secara merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan pemerataan pembangunan secara merata dan berkeadilan adalah:

1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
3. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Untuk mencapai tingkat pemerataan dan berkeadilan dalam pembangunan, arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
2. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.
3. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem nomor induk kependudukan (NIK). Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.
4. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang sudah disempurnakan bersama sistem perlindungan sosial nasional (SPSN) yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pendanaan serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas. secara bertahap sehingga Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas.
5. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien; (2)

penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) pembangunan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

6. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (asset management) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin
7. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Tahapan perencanaan pembangunan dalam RPJP Nasional terbagi atas 4 tahapan perencanaan jangka menengah atau yang biasa disebut RPJM, terdiri dari RPJM ke-1 untuk periode 2005 – 2009, RPJM ke-2 untuk periode 2010 – 2014, RPJM ke-3 periode 2015-2019 dan RPJM ke-4 untuk periode 2020 – 2024.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

**Gambar 4.1 Visi Misi
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin**



Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai

tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawa Cita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Gambar 4.2 Lima Strategi Pelaksanaan Misi Nawa Cita dan Pencapaian Sasaran Visi Indonesia 2045



Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu strategi dalam arahan pembangunan SDM melalui strategi layanan dasar dan

perlindungan sosial. Strategi layanan dasar dan perlindungan sosial dalam RPJMN 2020-2024, sebagai berikut:

1. Tata Kelola Kependudukan
2. Perlindungan Sosial
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda.

Gambar 4.3 Strategi Pembangunan SDM



Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan.

Gambar 4.4 Agenda Pembangunan sebagai Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020 – 2024



Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Pengentasan kemiskinan merupakan agenda ke 3, yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Dalam sasaran makro pembangunan 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024, pada tahun 2024 tingkat kemiskinan diharapkan

menurun 6,0-7,0%. Tentunya dalam pencapaian tingkat kemiskinan secara Nasional tersebut, membutuhkan sinergitas dan komitmen upaya penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gambar 4.5 Sasaran Makro Pembangunan 2020 – 2024



Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Kebijakan nasional lainnya terkait penanggulangan kemiskinan tertuang dalam **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Gambar 4.6 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)



Sumber : <http://sdgs.bappenas.go.id/>

Adapun empat pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs di Indonesia yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17.
3. Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15.
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

SDGs Inonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial sangat erat kaitannya dengan pencapaian pembangunan dalam bidang penanggulangan kemiskinan, yang mencakup tujuan (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; dan (5) Kesetaraan Gender sangat erat kaitannya dengan pencapaian pembangunan dalam bidang penanggulangan kemiskinan.

Tujuan (1) Tanpa Kemiskinan berbicara tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.

Gambar 4.7 Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan



MENGENTASKAN
SEGALA BENTUK
KEMISKINAN
DI MANA PUN

- Tujuan 1 menggunakan berbagai sudut pandang untuk menggambarkan kemiskinan, dan karenanya membutuhkan berbagai tanggapan yang terkoordinasi. Pemerintah daerah berada pada posisi yang ideal untuk dapat mengidentifikasi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dengan lebih dekat, dan memberikan sumber daya dan pelayanan untuk membantu membebaskan mereka dari kemiskinan secara tepat sasaran.
- Tanggung jawab pemerintah daerah sebagai mitra utama untuk mencapai tujuan 1 terkait pelayanan dasar yang bersifat lokal, seperti air dan sanitasi.
- Pemerintah Daerah dapat memainkan peran penting untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan strategi pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan dan membangun ketahanan masyarakat terhadap potensi-potensi bencana.

TARGET YANG BERKAITAN
DENGAN PEMERINTAH DAERAH

1.1 pada tahun 2030, **MENGENTASKAN KEMISKINAN EKSTRIM** untuk seluruh masyarakat di dunia, yaitu masyarakat yang hidup di bawah \$1.25 per hari

1.2 pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak segala usia yang hidup dalam **SEGALA DIMENSI KEMISKINAN** berdasarkan pengertian nasional

1.4 pada tahun 2030, menjamin bahwa seluruh laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber pendapatan, juga terhadap pelayanan dasar kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak dan pelayanan finansial termasuk keuangan mikro

1.5 pada tahun 2030, **MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT MISKIN** dan yang berada dalam situasi rentan, serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap kejadian-kejadian ekstrim terkait perubahan iklim maupun bencana dan tekanan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya

Sumber : United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC)

Tujuan (2) Tanpa Kelaparan berbicara tentang menjamin bahwa semua orang dapat menikmati makanan yang aman dan bernutrisi sepanjang tahun.

Gambar 4.8 Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan

**MENGAKHIRI
KELAPARAN**

**MENCAPAI KETAHANAN PANGAN
DAN MENINGKATKAN GIZI
DAN Mendukung pertanian
BERKELANJUTAN.**

- Pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah daerah di Kawasan perdesaan, khususnya lahan dan air, menyokong ketahanan pangan untuk wilayah sekitarnya kemiskinan, dan karenanya membutuhkan berbagai tanggapan yang terkoordinasi. Pemerintah daerah dapat mendukung produksi pertanian dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat pasar dan infrastruktur transportasi demi memajukan rantai pangan lokal.
- Di kawasan perkotaan, pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat mampu membeli dan memasak makanan yang aman, terjangkau dan bergizi. Perencanaan kota memiliki andil yang besar dalam pengurangan limbah dan ketahanan pangan dengan memfasilitasi pengangkutan dan penyimpanan makanan yang efektif, akses terhadap air bersih dan sanitasi.
- Pemerintah daerah dapat menggunakan sekolah dan layanan kesehatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi malnutrisi pada anak.
- Pemerintah daerah kawasan perdesaan dapat mengelola sumber daya kolektif dan memperbaiki kepemilikan tanah agar mampu melindungi hak-hak kelompok masyarakat miskin.

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 pada tahun 2030, **MENGAKHIRI KELAPARAN** dan menjamin akses terhadap kualitas pangan yang baik bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, sepanjang tahun

2.2 pada tahun 2030, **MENGAKHIRI SEGALA BENTUK MALNUTRISI**, termasuk mencapai target-target yang telah disepakati secara internasional mengenai pertumbuhan balita serta menguraikan kebutuhan gizi untuk remaja putri, ibu hamil dan menyusui, dan manula

2.3 pada tahun 2030, **mengandakan produktivitas pertanian dan pendapatan PRODUSEN MAKANAN BERSKALA MIKRO**, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui **AKSES YANG TERJAMIN DAN SETARA** terhadap tanah, sumberdaya produksi lainnya, **PENGETAHUAN**, layanan finansial, **PASAR** dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah serta lapangan pekerjaan non-pertanian

Sumber : United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC)

Tujuan (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera berbicara tentang membantu masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur.

Gambar 4.9 Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera



**MENJAMIN
KEHIDUPAN SEHAT
DAN MENDUKUNG KESEJAHTERAAN
BAGI SEMUA DI SEGALA USIA**

- Penyediaan air bersih dan sanitasi yang difasilitasi Pemerintah Daerah sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu, anak, dan bayi. Pemerintah daerah di kawasan perkotaan khususnya harus waspada terhadap tingkat kematian anak yang tidak kian menurun. Pemerintah daerah dapat menangani permasalahan ini melalui program perbaikan permukiman kumuh dan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin perkotaan terhadap pelayanan dasar.
- HIV/AIDS semakin dipahami sebagai sebuah permasalahan pemerintahan daerah. Kawasan perkotaan seringkali bertindak sebagai penghubung penyebaran HIV/AIDS karena kepadatan penduduknya yang tinggi, pusat sarana transportasi dan besarnya keberadaan kelompok rentan. Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, membiasakan kegiatan terkait HIV/AIDS di seluruh departemen, serta mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanganan. Telah banyak pula pemerintah daerah yang menyediakan pendidikan, informasi, dan layanan untuk mencegah HIV/AIDS.
- Pemerintah daerah dapat menggunakan perencanaan kota dan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara, menelihara gaya hidup sehat dan mencegah kematian akibat kecelakaan lalu lintas.
- Pemerintah daerah dapat berkontribusi kepada pengurangan angka kematian akibat polusi air dan tanah melalui manajemen sumber daya alam yang efektif dan perlindungan terhadap lingkungan.

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 pada tahun 2030, mengurangi rasio **KEMATIAN IBU** menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran

3.2 pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi lahir dan balita

3.3 pada tahun 2030, mengakhiri epidemic **AIDS, tuberculosis malaria**, dan penyakit tropis lainnya, melawan hepatitis, penyakit yang **DITULARKAN LEWAT AIR** dan penyakit menular lainnya

3.6 pada tahun 2020, mengurangi separuh angka kematian dan luka-luka akibat **KECELAKAAN LALU LINTAS**

3.7 pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan **LAYANAN PERAWATAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI**, termasuk untuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional

3.9 pada tahun 2030, mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta **PENCEMARAN DAN POLUSI** udara, air, dan tanah

Sumber : United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC)

Tujuan (4) Pendidikan Berkualitas berbicara tentang membantu masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.

Gambar 4.10 Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas

MENJAMIN
PENDIDIKAN YANG INKLUSIF
DAN SETARA SECARA KUALITAS
DAN MENDUKUNG KESEMPATAN
BELAJAR SEUMUR HIDUP BAGI SEMUA.

- Pendidikan, khususnya pada tingkat dasar, merupakan tanggung jawab langsung dari pemerintah daerah di banyak negara. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting dalam membantu pencapaian tujuan 4.
- Pemerintah daerah berada pada posisi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dialami masyarakat untuk bersekolah.
- Pemerintah daerah dapat memadukan program pelatihan teknis dan kejuruan ke dalam strategi pengembangan ekonomi lokal, memastikan bahwa pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan peluang kerja.
- Kedudukan yang dimiliki pemerintah daerah secara khusus memungkinkan untuk menjangkau individu dan masyarakat yang rentan dan termarginalisasi serta memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan.

TARGET YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 pada tahun 2030, pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan **PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH** gratis, setara dan berkualitas

4.2 pada tahun 2030, pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap **PENGEMBANGAN MASA KANAK-KANAK AWAL** yang berkualitas, **PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH**

4.3 pada tahun 2030, menjamin **AKSES YANG SETARA BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI** terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas

4.4 pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah remaja dan dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk **KEAHLIAN TEKNIS DAN KEJURUAN**, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta dapat berwirausaha

4.5 pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin **AKSES YANG SAMA TERHADAP SEMUA TINGKATAN PENDIDIKAN** dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan

4.7 pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pelajar mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, melalui **PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mementingkan budaya perdamaian dan antikekerasan, kependudukan global serta apresiasi terhadap keragaman budaya dan kontribusi budaya

4.a **MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN MUTU FASILITAS PENDIDIKAN** yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua

Sumber : United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC)

Tujuan (5) Kesetaraan Gender berbicara tentang mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan memiliki kesempatan, peran dan partisipasi yang sama dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan.

Gambar 4.11 Tujuan 5 : Kesetaraan Gender



MENCAPAI KESETARAAN
GENDER
DAN MEMBERDAYAKAN SEMUA
PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN.

TARGET YANG BERKAITAN
DENGAN PEMERINTAH DAERAH

- Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai contoh bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penyediaan pelayanan yang tidak mendiskriminasi penduduknya dan praktik kerja yang adil.
- Pemerintah daerah berada pada garis terdepan dalam mengidentifikasi dan menangani kekerasan dan perilaku yang membahayakan perempuan. Perencanaan kota (khususnya melalui pengadaan dan pengelolaan ruang terbuka publik) dan kebijakan daerah merupakan alat penting dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah daerah memiliki peran yang harus dipenuhi dalam penyediaan layanan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.
- Pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan bagi perempuan dalam memperoleh kepemilikan dan hak guna lahan.
- Meningkatkan peran perempuan dalam pemerintahan daerah merupakan prioritas utama dalam memberdayakan perempuan, selain memenuhi hak perempuan pada hakikatnya, juga karena pemerintah daerah seringkali merupakan langkah awal menuju jenjang karir yang lebih tinggi. Keberadaan perempuan sebagai pemimpin dalam pemerintahan daerah dapat mematahkan stereotype gender dan menginspirasi anak-anak perempuan lainnya.
- Pemerintah daerah dapat mengupayakan kesetaraan gender dalam seluruh bidang pekerjaannya untuk menangkal berbagai hambatan dalam pemberdayaan perempuan.

5.1 mengakhiri **SEGALA BENTUK DISKRIMINASI** terhadap semua perempuan dan anak perempuan di manapun

5.2 menghapuskan segala bentuk **KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN** dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan perempuan, pelecehan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya

5.3 menghapuskan semua kebiasaan yang membahayakan, seperti pemikahan dini, anak dan paksa serta sunat pada perempuan

5.4 menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan rumah tidak dibayar melalui **PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK, INFRASTRUKTUR, DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL** serta **MENDORONG ADANYA TANGGUNG JAWAB BERSAMA** dalam rumah tangga keluarga sebagai hal yang wajar

5.5 memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan **PADA TIAP JENJANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN** DALAM KEHIDUPAN UMUM, EKONOMI, DAN POLITIK

5.a membuka perbaikan untuk memberikan perempuan **HAK YANG SAMA** terhadap **SUMBERDAYA EKONOMI** dan juga akses terhadap **KEPILIKAN DAN KONTROL ATAS LAHAN** serta bentuk-bentuk kekayaan lain, layanan finansial, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum negara

5.c mengangkat dan menguatkan **KEBIJAKAN YANG JELAS SERTA PENEGAKKAN PERUNDANG-UNDANGAN** untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua tingkat

Sumber : *United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC)*

C. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang **mandiri, maju, sejahtera, dan lestari** sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan sasaran pokok yang ingin dicapai adalah sebagai berikut 1) Terwujudnya sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya 2) Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. 3). Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga pelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan 4). Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, 5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD 2018-2023 secara jelas tertuang dalam misi ke 3 yaitu **“Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”**. Misi ketiga ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu:

1. kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata; dan
2. menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan.

Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari tujuan ini adalah angka kemiskinan, Indeks Gini, pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks Williamson. Untuk itu sasaran yang ingin dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan ini adalah:

1. meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah;
2. menurunnya pengangguran terbuka; dan

3. meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.

Target penurunan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan RPJMD 2018-2023, pada akhir periode ditargetkan menjadi sebesar 7,48% hingga 6,48%, seperti terlihat pada gambar tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Penurunan Angka Kemiskinan di Jawa Tengah (RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,64 ¹⁾	2,64 ¹⁾	2,76	2,88	3,00	3,12	3,24	3,24
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Nilai SAKIP	Angka	75,94	80,18	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,66	3,43	3,45	3,47	3,48	3,49	3,50	3,50
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	na	na	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	29,00
			Indeks Sistem Merit	Angka	na	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata		Angka Kemiskinan	%	12,23	11,19	10,57-9,57	9,81-8,81	9,05-8,05	8,27-7,27	7,48-6,48	7,48-6,48

Sumber: RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, hal V-11

Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2018 merupakan penurunan tertinggi selama kurun waktu lima tahun, bahkan menjadi provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Penurunan ini juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil meskipun tidak tumbuh tinggi sebagaimana provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semakin berkualitas dan inklusif.

Untuk itu, pembangunan ekonomi Jawa Tengah lima tahun kedepan juga didorong untuk semakin inklusif dan berkualitas. Artinya bahwa pembangunan ekonomi Jawa Tengah diarahkan untuk semakin banyak melibatkan masyarakat utamanya pelaku ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah, dan terintegrasi dengan usaha besar, sehingga diharapkan masyarakat akan mendapatkan manfaat atas kontribusi mereka. Kapabilitas individual ataupun kelompok

masyarakat akan semakin meningkat dan merata secara bersama-sama sehingga akan mempersempit kesenjangan antar pelaku ekonomi. Disisi lain, pembangunan ekonomi ke depan juga harus tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial dan budaya yang diukur dari nilai-nilai sosial, kearifan hidup bersama alam, kelembagaan sosial dan budaya hidup masyarakat.

Dengan pembangunan ekonomi yang semakin berkualitas dan inklusif, diharapkan akan berdampak pada percepatan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Upaya tersebut diperkuat dengan dukungan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk bekerja bersama dan gotong royong dalam mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah. Dalam rangka pencapaian Tujuan kesatu Misi 3 adalah menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata, dengan sasaran meliputi: 1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah serta kelompok rentan lainnya; dan 2) menurunnya pengangguran terbuka. Strategi yang dilakukan adalah:

1. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya, dengan upaya diantaranya:
 - a. meningkatkan akses pendidikan berupa Beasiswa Siswa Miskin (BSM), penyelenggaraan SMK Negeri Boarding School, penyelenggaraan SMK Negeri Semi Boarding di kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi, Sekolah Tanpa Sekat, fasilitasi uji kompetensi siswa SMK, pemantapan pendidikan karakter, serta vokasi bidik miskin;
 - b. peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pola hidup bersih dan sehat dan rumah sakit tanpa dinding;
 - c. stimulan lumbung pangan pada daerah rawan pangan dan pemberian bantuan sumber pangan lainnya;
 - d. bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni (RSLH) dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik. Bantuan stimulan RSLH untuk menumbuhkan kembali gotong royong masyarakat; memperluas akses pembiayaan; serta sinergi penanganan dengan pusat, provinsi, kabupaten/kota, CSR, Baznas, dan lainnnya;
 - e. pemberian Kartu Jateng Sejahtera, dan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS melalui peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak

- produktif dan terlantar, penyiapan bimbingan sosial bagi fakir miskin, serta peningkatan peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial;
- f. kepemilikan dan kemudahan perolehan dokumen administrasi kependudukan;
 - g. meningkatkan penggunaan MKJP melalui advokasi kepada masyarakat, kemitraan dengan perusahaan, TNI, Polri, dan ormas, serta dengan upaya pengembangan Kampung KB.
2. Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat) melalui:
- a. Keperantaraan akses masyarakat terhadap modal dan jaminan kredit modal, teknologi, pasar, dan manajemen usaha, diantaranya dengan menyambungkan informasi tentang program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25, Ultra Mikro/UMi) bagi KUMKM;
 - b. Pengembangan startup wirausaha baru melalui pelatihan keterampilan usaha produktif berbasis sumber daya lokal/permintaan pasar/wirausaha pemula dan pelatihan penumbuhan wirausaha baru termasuk bagi pemuda, perempuan rentan dan penumbuhan ekonomi pesantren (ekotren);
 - c. Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat terutama pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, industri kreatif dan usaha kecil termasuk peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam rumah tangga (ekonomi rumah tangga); peningkatan peran dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes); peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia).
3. Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui peningkatan dan perluasan pengelolaan basis data, dan basis spasial dengan pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu; penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, didukung pendampingan yang kontinyu, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan; pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat miskin yang belum memperoleh intervensi program penanggulangan kemiskinan; peningkatan peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial; serta mengkonsolidasikan dan mensinergikan program kerja seluruh

pemangku kepentingan dalam satu lembaga Satuan Tugas Pengentasan Kemiskinan.

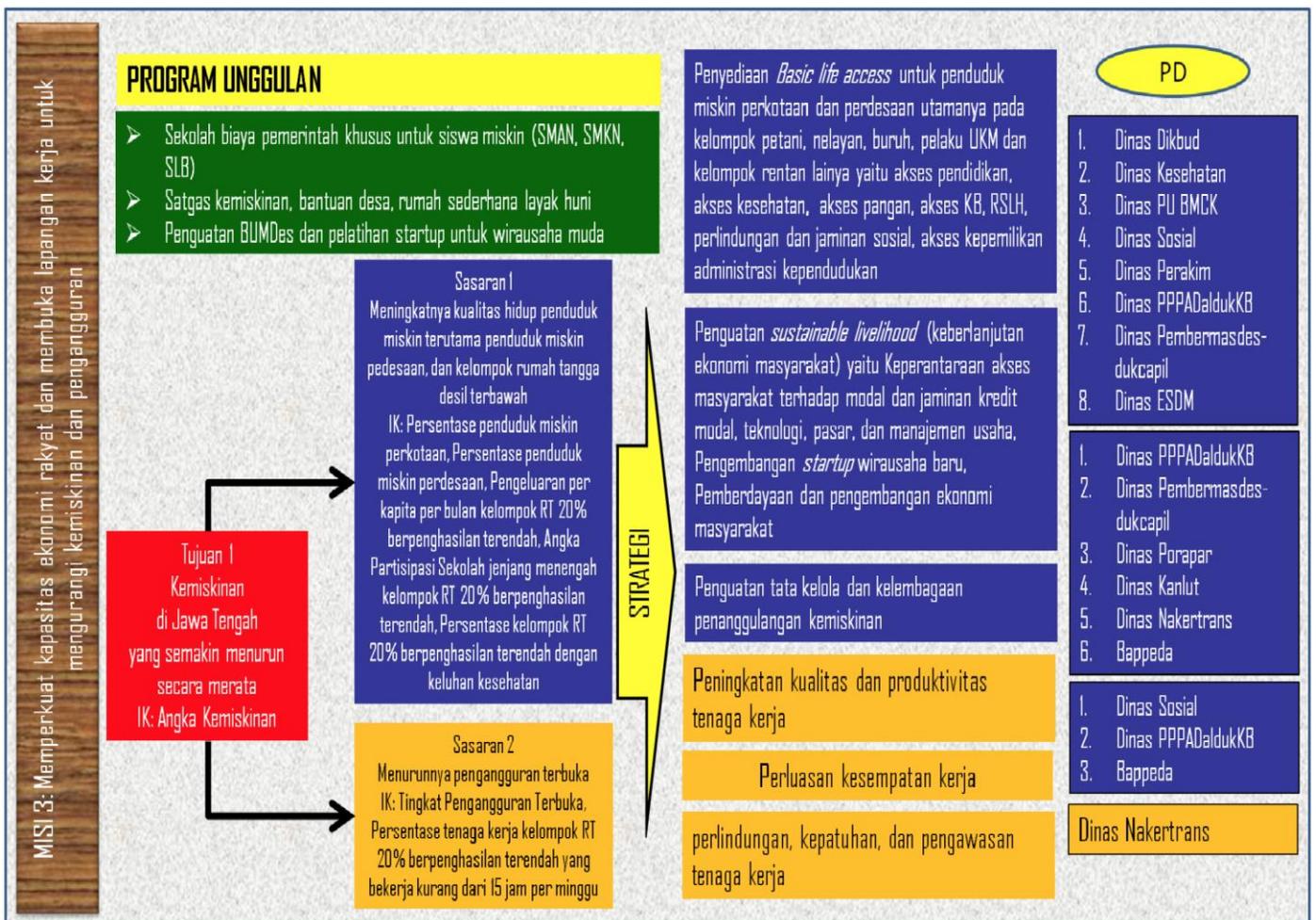
4. Menurunkan pengangguran melalui upaya:
 - a. peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, daya saing, dan jiwa kewirausahaan tinggi, yang link and match dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan perekonomian kedepan melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, dan penguatan program link and match melalui pengembangan dan penyelarasan kurikulum SMK dengan industri Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI);
 - b. perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi utamanya investasi industri padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan industri dengan supply chain dari UMKM lokal, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum;
 - c. peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

Strategi tersebut didukung dengan program unggulan daerah yaitu:

- a. Satgas kemiskinan, yang secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan sasaran penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam hal pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan penanggulangan kemiskinan;
- b. Bantuan desa, merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- c. Rumah sederhana layak huni, dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat;

- d. Penguatan BUMDes, melalui peningkatan peran, dan produktivitas BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui lembaga keuangan milik desa;
- e. Pelatihan startup untuk wirausaha muda, merupakan program daerah untuk mendorong penumbuhan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja;
- f. Sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB), merupakan sekolah yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh.

Gambar 4.12 Skema Strategi Pencapaian Misi 3 Tujuan 1 RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023



Sumber: RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, hal VI-7

Tujuan kedua misi ketiga adalah menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis

potensi unggulan, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai dengan kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, melalui:
 - 1) Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Kemampuan petani pada aspek on-farm dilakukan melalui penerapan teknologi berbasis kearifan lokal termasuk mekanisasi pertanian dan pengembangan pertanian organik. Selain itu untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian (off-farm), usaha tani diarahkan melalui pengolahan hasil pertanian potensi lokal kawasan perdesaan dan fasilitasi akses pemasaran serta permodalan;
 - 2) Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani. Kelembagaan diarahkan untuk mengelola usaha pada skala lebih besar berbasis korporasi;
 - 3) Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep "agriculture estate", yaitu pendampingan dan pengembangan usaha tani melalui integrasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai dengan potensi lokal kawasan;
 - 4) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya.
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui:
 - 1) Peningkatan kapasitas nelayan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan, peningkatan teknologi dan akses permodalan, serta asuransi nelayan;
 - 2) Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap dan air payau, melalui peningkatan fasilitas pelabuhan dan teknologi dalam penangkapan ikan;
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan;
 - 4) Perbaikan tata niaga perikanan.
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar menuju 6.000 m³ dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan dilakukan melalui perwujudan sistem logistik daerah yang menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendek rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok melalui cadangan pangan dan stabilisasi harga, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar.
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui:
 - 1) pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja, yang tersebar merata di seluruh wilayah Jawa Tengah;
 - 2) peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri melalui standarisasi produk dan inovasi produk;
 - 3) pengembangan inovasi teknologi produksi, agar tingkat efisiensi industri dapat menjadi lebih baik;
 - 4) penguatan industri kecil dan menengah yang mencakup didalamnya aspek modal, pemasaran, dan standarisasi produk melalui program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25), program standarisasi produk yang dapat meningkatkan nilai tambah produk;
 - 5) pengembangan bahan baku industri substitusi impor melalui pengembangan industri yang menghasilkan produk antara yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri lain;
 - 6) penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dalam rangka mendukung pengembangan UMKM melalui peningkatan, pendampingan, pembinaan dan pengawasan dengan tujuan koperasi dan UMKM dapat berkembang dan berjalan baik;
 - 7) integrasi antar sektor pendukung urusan industri melalui keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan keterkaitan ke depan (forward linkage).
- f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah yaitu kekhasan geografis, yang dilakukan melalui pengembangan desa ekowisata sebagai upaya menyelaraskan pendekatan ekologi dan ekonomi. Disamping itu, juga dikembangkan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah, khususnya pada kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi melalui program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan pemasaran pariwisata. Pengembangan

pariwisata perlu memperhatikan industri dan ekonomi kreatif dengan mengembangkan pariwisata sebagai ruang temu budaya masyarakat dan berdaya dukung hasil-hasil produksi masyarakat setempat. Hal ini diimplementasikan dengan strategi utamanya sebagai berikut:

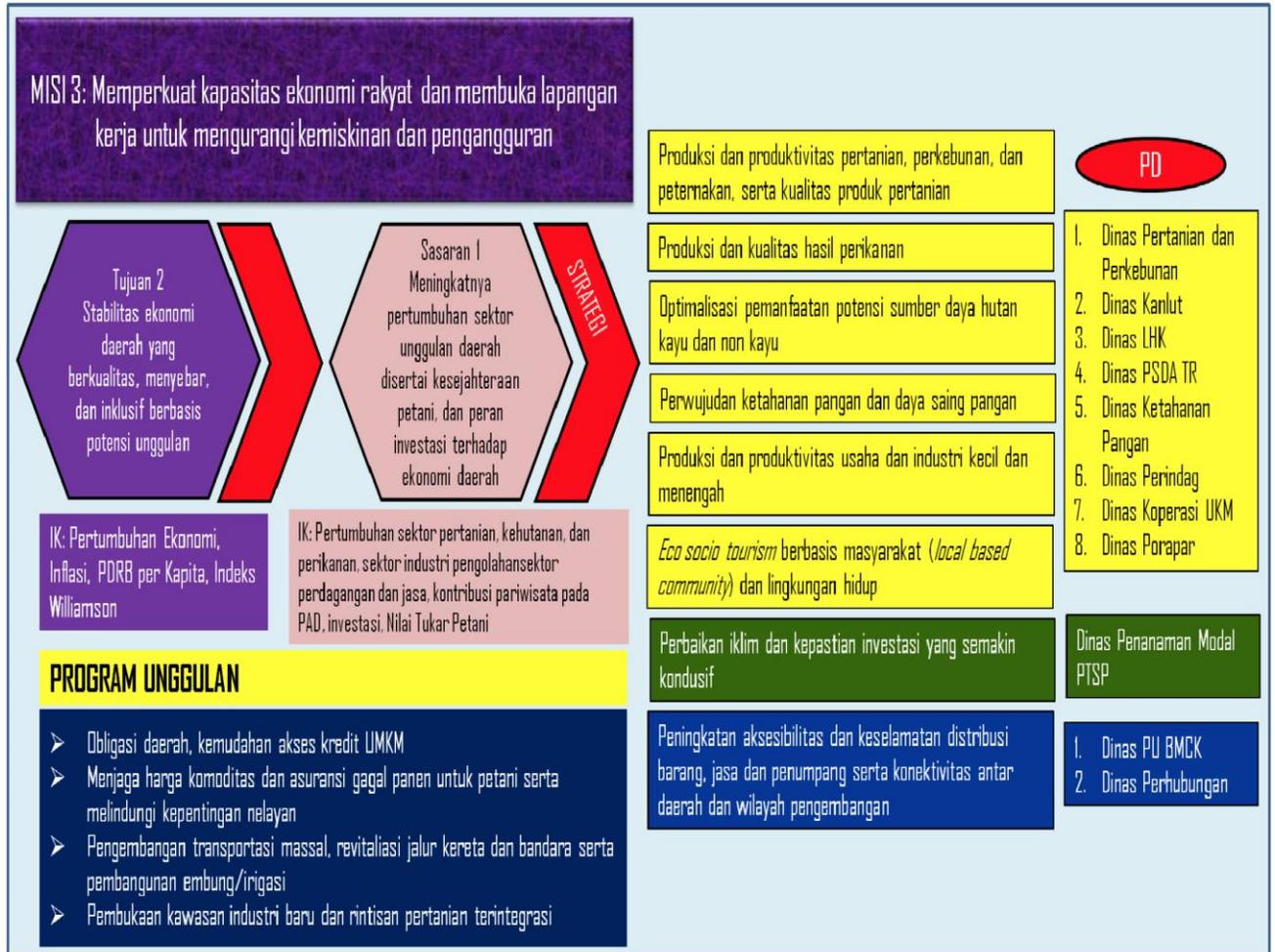
- 1) Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;
 - 2) Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata;
 - 3) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;
 - 4) Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;
 - 5) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui: 1) Perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka; 2) Pengembangan digital investment promotion; 3) Mendorong perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usaha.
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan. Upaya yang akan dilakukan antara lain peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan dan terminal; peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan Nasional dan Kabupaten/Kota; konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur, Barlingmascakeb, Subosukowonosraten, dan Purwomanggung, serta pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe B; peningkatan jalan provinsi di daerah perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY; serta menghubungkan kawasan pengembangan industri dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmascakeb, Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor.

Program unggulan daerah yang mendukung pada tujuan kedua misi ketiga ini yaitu:

- a. Obligasi daerah, merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi di luar Pendapatan Asli Daerah;

- b. Kemudahan akses kredit UMKM merupakan program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan;
- c. Menjaga harga komoditas yaitu program untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; intervensi dan penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa;
- d. Asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya;
- e. Melindungi kepentingan nelayan merupakan program untuk memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar;
- f. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara, yang dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD; fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah;
- g. Pembangunan embung/irigasi dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri;
- h. Pembukaan kawasan industri baru melalui afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- i. Rintisan pertanian terintegrasi merupakan konsep integrasi vertikal hulu hilir, integrasi holistik, pertanian terintegrasi sektoral (mayor sektoral) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh), serta integrasi berbasis organisasi pertanian, yang dikembangkan antara lain melalui pengembangan agriculture estate, integrasi dibawah tegakan, zero waste, agrowisata, minapadi, dan pertanian organik.

Gambar 4.13 Skema Strategi Pencapaian Misi 3 Tujuan 2 RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023



Sumber: RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, hal VI-11

Dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Pengembangan wilayah Petanglong untuk Tahun 2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00% sampai dengan 5,60%, Angka Kemiskinan pada kisaran 4,5% sampai dengan 9,13%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,05% sampai dengan 5,55% serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 70,60 sampai dengan 75,13. WP Petanglong meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Secara detail sasaran kemiskinan WP Petanglong dapat dilihat pada Gambar Tabel berikut.

**Tabel 4.2 Sasaran Kemiskinan WP Petanglong
RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pekalongan	8.36 - 9.36	7.67 - 8.67	6.98 - 7.98	6.29 - 7.29	5.60 - 6.60
2	Batang	8,01 -8,51	7,67 - 8,14	7,32 - 7,82	6,70 - 7,20	5,14 - 5,64
3	Kota Pekalongan	5.45 - 6.45	5.15 - 6.15	4.85 - 5.85	4.55 - 5.55	4.25 - 5.25

Sumber: RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, hal VII-29

D. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 didalamnya memuat visi pembangunan daerah yaitu : “ Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 8 misi yaitu :

1. Mewujudkan daya saing daerah
2. Mewujudkan Kehidupan ekonomi masyarakat yang berkualitas
3. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
5. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan
6. Mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas
7. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat
8. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta beriman dan bertaqwa terhadap Yuhana Yang Maha Esa.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan terlihat secara eksplisit dalam visi pembangunan daerah jangka panjang tersebut yaitu dicantumkannya kata “sejahtera” sebagai cita-cita dalam pembangunan jangka panjang. Pengertian sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil), sosial dan spiritual atau telah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir batin, adil dan merata. Masyarakat sejahtera dapat diukur oleh berbagai indikator. Beberapa indikator yang sering digunakan adalah tingkat pendapatan ekonomi masyarakat, tingkat pengeluaran masyarakat, tingkat kemampuan daya beli, serta tingkat kemiskinan.

Berdasarkan Perda tersebut, tahapan perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan saat ini memasuki RPJMD tahap III (Tahun 2015 – 2019). Arah pembangunan yang ada dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 telah ditetapkan visi sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, telah ditetapkan 7 Misi pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 melalui rumusan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan;
2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik;
4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
6. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah;
7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah.

Terkait dengan penanggulangan kemiskinan tercermin dalam misi 1, 5 dan 7. Adapun sasaran, strategi dan arah kebijakan berkaitan dengan misi 1, 5 dan 7 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Terkait Dengan Misi 1, 5 dan 7**

No	MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan	1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak. 2) Menurunnya angka gizi buruk.	a) Optimalisasi pelaksanaan posyandu. b) Peningkatan Puskesmas Layak Persalinan a) Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK), balita gizi	(1) Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin; (2) Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar

No	MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	perikanan.		kurang dan balita gizi buruk dari keluarga kurang mampu.	dan rujukan serta pemerataan tenaga medis.
		3) Menurunnya angka kesakitan penduduk.	a) Peningkatan kesadaran masyarakat akan hidup sehat dan cerdas. b) Peningkatan Pola Perilaku Hidup bersih dan sehat	
		4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda	a) Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan; b) <u>Penerbitan Kartu Kajian Sehat sebagai jaminan kesehatan, persalinan, khitan dan santunan kematian. *)</u> c) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan kesehatan	
		5) Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.	a) Optimalisasi pelayanan KB.	
		6) Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal.	a) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal	
		7) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh	a) Penguatan akses dan mutu pendidikan; b) <u>Penerbitan Kartu Kajian Cerdas sebagai jaminan</u>	

No	MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan.	<u>pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah; *)</u>	partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan; (4) Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan pemberian bantuan siswa miskin dan atau berprestasi.
		8) Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal.	a) Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal.	
		9) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penempatan tenaga pendidik.	a) Penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi. b) Penempatan dan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	
		10) Meningkatnya minat baca masyarakat.	a) Peningkatan budaya baca masyarakat; b) Penyediaan tenaga perpustakaan dan kearsipan yang memenuhi standar kompetensi. c) Peningkatan sarana layanan perpustakaan dan kearsipan	(1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan SDM layanan perpustakaan dan kearsipan.
		11) Meningkatnya kesempatan kerja..	a) Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. b) Peningkatan kapasitas dan keterampilan pencari kerja. c) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. d) Peningkatan pelayanan transmigrasian	(1) Menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja;

No	MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		12) Meningkatnya penanganan PMKS.	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan perlindungan, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS. b) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 	(1) Memfasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
		13) Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.	a) Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni, olah raga dan event-event kebudayaan lokal;	(1) <u>Melestarikan seni dan budaya;</u> *)
		14) Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah	a) Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang seni dan budaya;	
		15) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim.	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat; b) Peningkatan koordinasi antar <i>stakeholder</i> dalam penanggulangan bencana. c) Peningkatan kemampuan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi dalam penanggulangan bencana d) Peningkatan sarana prasarana pengendalian banjir, penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai; 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana (mitigasi/pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi). (2) Melakukan rekayasa/penataan sosial dan lingkungan untuk menghadapi fenomena banjir rob; *)

No	MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		16) Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM	<p>a) <u>Peningkatan ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, fasilitas kebutuhan pemodalan, menambah jaringan dan pembangunan pasar-pasar baru dan hak paten; *)</u></p> <p>b) Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal;</p> <p>c) Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster.</p>	<p>(1) <u>Mendorong Pertumbuhan Koperasi dan UMKM*);</u></p> <p>(2) Mengembangkan kelembagaan, kualitas SDM, dan akses permodalan koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal;</p> <p>(3) Memperkuat jejaring sentra dan klaster.</p>
		17) Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Produktivitas Industri Kecil.	<p>a) Peningkatan kualitas SDM IKM ;</p> <p>b) Peningkatan Iptek sistem produksi.</p> <p>c) Peningkatan fasilitasi bagi pelaku industri kecil dalam permodalan, pelatihan dan pembinaan.</p>	(1) Meningkatkan produktivitas industri Kecil dan Menengah;
		18) Meningkatnya aktivitas perdagangan.	<p>a) Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan berbasis teknologi informasi (IT).</p> <p>b) Peningkatan promosi produk perdagangan</p>	(1) Mengembangkan iklim perdagangan yang kondusif.
		19) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PAD.	<p>a) Optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan destinasi wisata;</p> <p>b) Peningkatan sarana dan prasarana</p>	(1) Meningkatkan pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata;

No	MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>penunjang pariwisata.</p> <p>c) Peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata melalui pokdarwis</p>	
		20) Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya lingkungan	<p>a) Penyediaan benih unggul, pengairan, pupuk (organik dan anorganik) tenaga penyuluh pertanian dan bantuan peralatan pertanian (traktor, pompa air, tangki semprot dan lain-lain). *)</p> <p>b) Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian yang berwawasan lingkungan;</p> <p>c) Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal;</p> <p>d) Pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta antisipasi rawan bencana alam;</p> <p>e) Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian;</p> <p>f) Peningkatan sarana prasarana pertanian.</p> <p>g) Peningkatan produksi, populasi, pemasaran dan pengendalian penyakit ternak.</p> <p>h) Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan.</p>	<p>(1) Mendorong kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian; *)</p> <p>(2) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan.</p> <p>(3) Mendorong pertumbuhan budidaya ikan air tawar dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. *)</p> <p>(4) Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;</p>
		21) Meningkatnya	a) Peningkatan	(1) Meningkatkan

No	MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		ketahanan pangan masyarakat.	<p>diversifikasi dan konsumsi melalui sumber daya lokal;</p> <p>b) Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat</p> <p>c) Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan;</p>	ketahanan pangan berbasis sumber daya local
5	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan	26) Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.	<p>a) <u>Percepatan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan listrik dan bantuan aspal dan semen *)</u>;</p> <p>b) Peningkatan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;;</p> <p>c) Peningkatan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik;</p>	<p>(1) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kuantitas jalan dan jembatan;</p> <p>(2) Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (akses wisata, pembangunan perkotaan dan perdesaan, jalan kabupaten dan daerah rawan bencana);</p>
		27) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas	<p>a) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi;</p> <p>b) <u>Pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi</u></p>	(1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan

No	MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pertanian..	<u>jaringan irigasi tingkat usaha tani dan embung;</u> c) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi berbasis pemberdayaan.	
		28) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di Perdesaan	a) Peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa untuk peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan	(1) Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan
		29) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi.	a) Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik; b) Peningkatan prasarana sarana keselamatan transportasi;	(1) Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota sekitar;
		30) Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dasar permukiman.	a) Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan lingkungan permukiman. b) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman c) <u>Pembangunan sumur bor dan sumur dalam serta embung baru. *)</u> d) Peningkatan cakupan pelayanan air bersih, air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan;	(1) Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana dasar permukiman (2) <u>Menjamin ketersediaan air bersih; *)</u> (3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana serta sistem penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

No	MISI	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		31) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	a) Peningkatan dan pengembangan kondisi sarana prasarana lingkungan hidup; b) <u>Penanaman kembali 1 juta pohon untuk kelestarian lingkungan. *)</u> c) Pembangunan Petungkriyono sebagai kawasan Cultural Techno Forestry Park	(1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
7	Misi 7 : Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah	32) Meningkatnya iklim investasi daerah dengan meningkatkan inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi daerah 33) Meningkatnya realisasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal	a) <u>Peningkatan mekanisme pelayanan perijinan melalui SOP, perizinan online, perizinan dengan jemput bola, fasilitas pengaduan, SDM aparatur yang handal, penyederhanaan prosedur dan koordinasi antar lembaga dan dukungan infrastruktur; *)</u> b) Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah. c) <u>Penyediaan 1.600 hektar lahan investasi; *)</u>	(1) Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global. (2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; (3) <u>Membuka kesempatan investasi*)</u>

Keterangan : *) 12 Mandat Rakyat

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal dirumuskan dua belas agenda prioritas yang disebut **Dua Belas Mandat Rakyat**, yaitu :

1. Penerbitan **Kartu Kajian Sehat** (Jaminan Kesehatan, Persalinan, Khitan, Santunan Kematian) dan **Kartu Kajian Cerdas** (Gratis pendidikan dasar dan Menengah).
2. Subsidi biaya pendidikan di perguruan tinggi.
3. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan percepatan pembangunan infrastruktur (Jalan, jembatan, pasar, jaringan listrik bantuan aspal dan semen) dan jaminan ketersediaan air bersih melalui: menambah jumlah sumur bor dan sumur dalam, pembangunan embung baru.

4. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di daerah atas, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan wiyata bakti, guru dan guru madrasah (MI, MTs dan MA), guru MDA/TPQ/TPA; pengasuh pondok pesantren; Takmir masjid serta guru ngaji (ustadz).
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian melalui: ketersediaan benih unggul, pengairan, pupuk (organik dan anorganik) tenaga penyuluh pertanian dan bantuan peralatan pertanian (traktor, pompa air, tangki semprot dan lain-lain).
6. Mendorong Pertumbuhan UMKM melalui: ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, fasilitas kebutuhan pemodal, menambah jaringan dan pembangunan pasar-pasar baru dan hak paten.
7. Membuka kesempatan investasi melalui: kemudahan perijinan, jaminan keamanan, ketersediaan tenaga terampil, dukungan infrastruktur, menyediakan 2.000 hektar lahan investasi untuk menciptakan 100.000 lapangan kerja baru serta melindungi hak-hak normatif buruh.
8. Mendorong pertumbuhan budidaya ikan air tawar dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan: ketersediaan BBM, kualitas pelayanan TPI, pembangunan dermaga dan pengerukan sungai jamban dan wonokerto serta pembangunan pabrik es balok.
9. Melakukan rekayasa/penataan sosial dan lingkungan untuk menghadapi fenomena banjir-rob.
10. Menanamkan kembali 1 juta pohon untuk kelestarian lingkungan.
11. Melestarikan Seni dan Budaya.
12. Mewujudkan Birokrasi yang melayani, disiplin dan bersih.

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Pekalongan, target peningkatan pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,00% dari kondisi pada tahun 2015 sebesar 4,78%, laju inflasi ditetapkan pada tahun 2021 menjadi sebesar 3-4% dari kondisi pada tahun 2015 sebesar 3,42%, penurunan angka kemiskinan ditetapkan pada tahun 2021 menjadi sebesar 7,10% dengan kondisi pada tahun 2015 sebesar 12,58%. Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,37% ditahun 2021 dengan kondisi tahun 2015 sebesar 5,10%. Target yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Pekalongan tahun 2016-2021 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.4 Target Indikator Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021

No	Indikator	Target Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,90	5,10	5,25	5,45	5,80	6,00
2	PDRB ADH Berlaku Th 2010 (Juta Rp)	17.699.129,64	18.943.515,96	20.206.971,53	21.480.798,60	22.766.413,82	24.065.358,25
3	PDRB ADH Konstan Th 2010 (Juta Rp)	13.799.558,41	14.394.182,68	14.988.806,95	15.583.431,23	16.178.055,50	16.772.679,78
4	PDRB Per Kapita	20.135.995	21.483.561	22.831.128	24.178.694	25.526.261	26.873.827
5	Laju Inflasi (%)	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,89	10,99	9,98	9,02	8,07	7,10
7	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	67,55	67,80	68,10	68,25	68,45	68,60
8	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,79	105,18	105,56	105,94	106,33	106,71
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,80	4,68	4,49	4,40	4,36	4,37
10	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan (%)	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Penyelenggaraan Wisata Religi dan Heritage (%)	100	100	100	100	100	100

Dalam rangka pencapaian target kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 pada akhir periode ditargetkan menjadi sebesar 7,10%. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Kabupaten Pekalongan memberikan catatan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan selama ini masih bersifat business as usual, sentralistik, eksklusif dan miskin inovasi, serta tidak berbasis data dan problem yang jelas. Berdasarkan catatan hasil evaluasi tersebut dibutuhkan terobosan jitu, yaitu Pemerintah Kabupaten Pekalongan menginisiasi inovasi pengentasan kemiskinan dalam bentuk Laboratorium Kemiskinan.

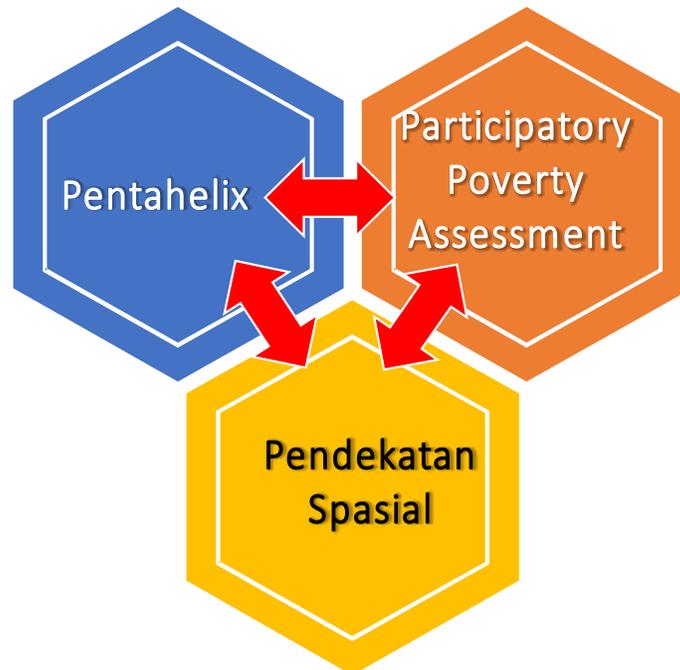
Laboratorium kemiskinan merupakan inovasi baru pengentasan kemiskinan dengan ruang lingkup wilayah tingkat kabupaten. Laboratorium kemiskinan memberikan perbedaan pendekatan penanggulangan kemiskinan, yaitu pelibatan semua pihak (pentahelix), berbeda dengan penanganan kemiskinan sebelumnya yang cenderung berjalan sendiri-sendiri dan sporadis.

Konsep pentahelix dalam Laboratorium kemiskinan, yaitu kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan kelompok masyarakat peduli. Keterlibatan seluruh pihak sudah dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

1. Pemerintah Kabupaten mensinergikan seluruh perangkat daerah yang difokuskan pada desa yang merupakan sasaran laboratorium kemiskinan.
2. Pemerintah Desa menyusun perencanaan dan penganggaran desa yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dengan asistensi TKPKD Kabupaten Pekalongan.
3. Dunia usaha melalui pelaksanaan dana CSR.
4. Perguruan tinggi melalui Universitas Membangun Desa dengan Konsep Tri Dharma baik KKN Tematik maupun Desa Binaan.
5. Kelompok masyarakat peduli baik secara individu maupun kelembagaan berpartisipasi melalui program kegiatan pada masing-masing kelembagaan.

Laboratorium kemiskinan menggunakan dasar data Basis Data Terpadu (BDT) atau saat ini disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Laboratorium kemiskinan juga menggunakan pendekatan topografi wilayah, serta dipertajam dengan PPA (Participatory Poverty Assessment). PPA sebagai perwujudan menempatkan si miskin sebagai subjek dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Gambar 4.14 Pendekatan Laboratorium Kemiskinan Kabupaten Pekalongan



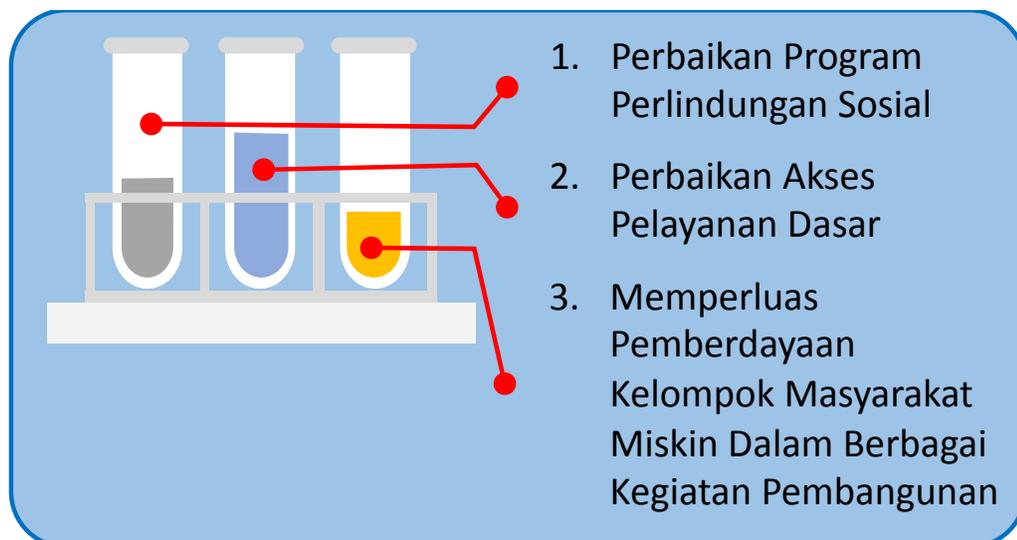
Laboratorium kemiskinan sebagai bentuk ikhtiar percepatan pengentasan kemiskinan, menempatkan si miskin sebagai subjek, membangun kolaborasi antar stakeholders (helix), menjadi desa miskin sebagai laboratorium dengan basis data yang jelas dan mencoba menghidupkan kembali social capital di tengah masyarakat.

Desa/Kelurahan di Kabupaten Pekalongan berjumlah 285 desa/kelurahan, secara topografi berada di wilayah pesisir, perkotaan dan pegunungan. Secara umum kemiskinan pada wilayah pesisir berpenghidupan dari sumber laut, wilayah perkotaan berpenghidupan dari industri dan jasa, dan wilayah pegunungan berpenghidupan dari hasil pertanian. Desa sebagai Pilot Laboratorium Kemiskinan, yaitu Desa Botosari (Pegunungan), Desa Kertijayan (Perkotaan) dan Desa Mulyorejo (pesisir). Laboratorium kemiskinan mendemonstrasikan kolaborasi antar helix di Kabupaten Pekalongan berjalan baik, konsisten, berkelanjutan, dan kebersamaan/sinergi dalam pengentasan kemiskinan, serta menumbuhkan kepedulian sebagai prasyarat terbentuknya social capital dan si miskin sebagai subjek, termasuk fokus dan keseriusan dari sisi perencanaan dan penganggaran.

Dalam rangka menggenjot Laboratorium Kemiskinan sebagai specific grant secara mikro dengan pemanfaatan basis data terpadu dan cara pandang kemiskinan yang holistic (bukan hanya masalah

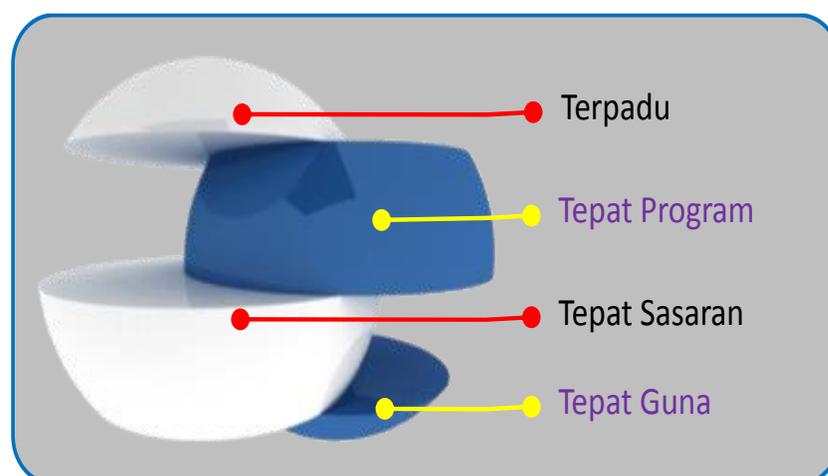
sosial dan ekonomi, tetapi termasuk budaya) dan mewujudkan Kabupaten Pekalongan semakin baik, maka strategi penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara bertahap, yaitu:

Gambar 4.15 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan



Langkah-langkah kebijakan yang dituangkan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan pada dimensi kemiskinan diarahkan pada strategi penanggulangan kemiskinan dengan prinsip-prinsip penanggulangan kemiskinan melalui Laboratorium Kemiskinan, sebagai berikut:

Gambar 4.16 Prinsip-Prinsip Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan

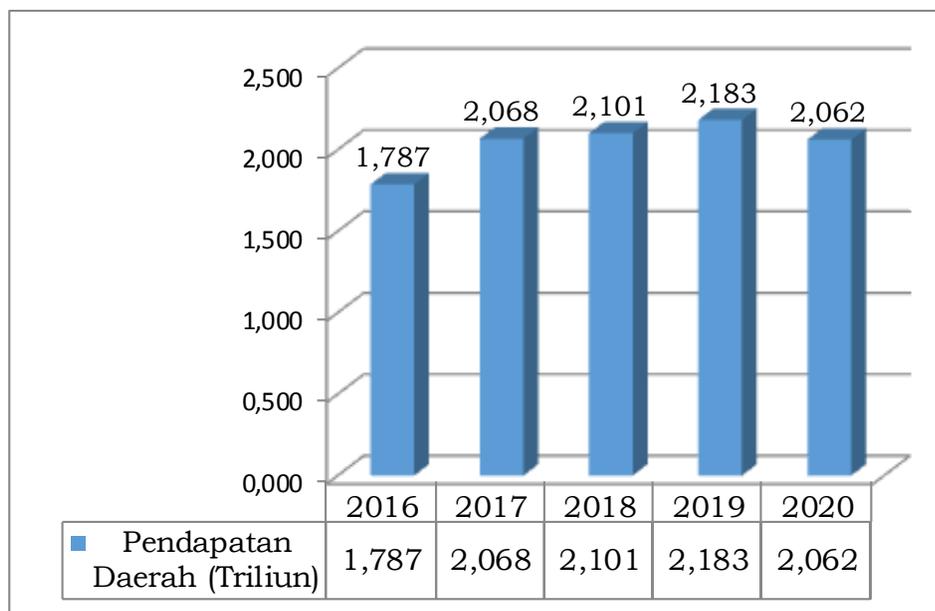


E. Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan

1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan dari 1,787 trilyun rupiah tahun 2016 menjadi 2,182 trilyun rupiah tahun 2020. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4.17 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Trilyun Rupiah)



BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2021, Data di Olah

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun terakhir sebesar 3,91%. Persentase pendapatan asli daerah selama tahun 2016-2020 sebesar 2,51%. Jika dilihat tren pertumbuhan PAD menunjukkan kecenderungan fluktuatif, tertinggi pada tahun 2019 sebesar 9,66% dan terendah pada tahun 2017 sebesar -1,67%.

Dana transfer pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, tertinggi pada tahun 2017 sebesar 8,50% dan terendah di tahun 2020 sebesar -8,70%. Dana transfer bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan selama 5 tahun terakhir sebesar 0,71%.

Lain-lain pendapatan yang sah selama tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan fluktuatif, tertinggi pada tahun 2017

sebesar 62,91% dan terendah pada tahun 2020 sebesar -1,25%. Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan selama 5 tahun terakhir sebesar 17,45%.

Pertumbuhan APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

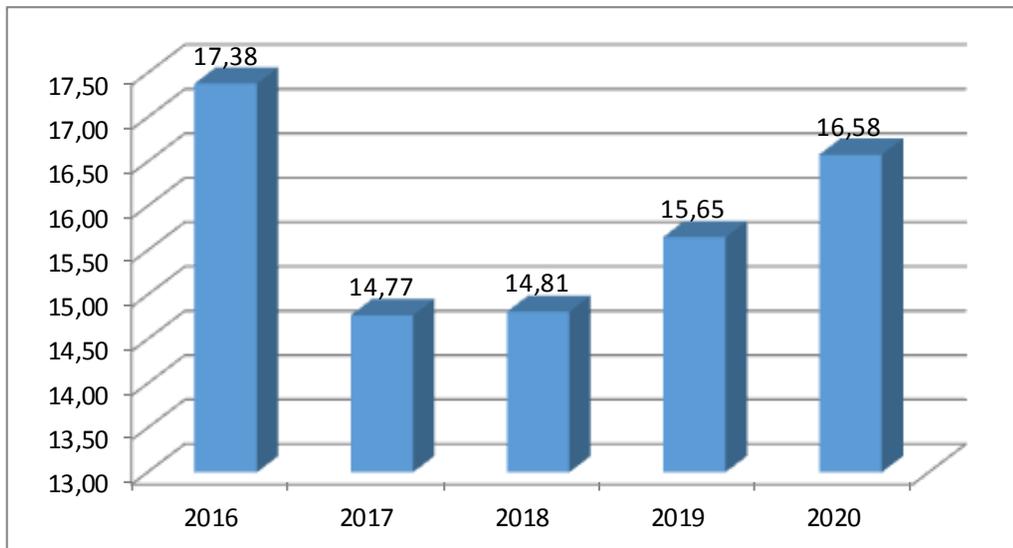
Tabel 4.5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Persentase Realisasi (%)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	
1	Pendapatan Asli Daerah	-1,67	1,93	9,66	0,13	2,51
1.1	Hasil Pajak Daerah	16,01	38,31	19,57	-5,08	17,20
1.2	Hasil Retribusi Daerah	16,03	18,44	26,00	-0,78	14,92
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29,23	-2,03	135,66	-41,58	30,32
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	-5,69	-5,64	2,03	5,03	-1,07
2	Dana Perimbangan	8,50	0,42	2,62	-8,70	0,71
2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-10,93	-11,57	-17,88	42,72	0,58
2.2	Dana Alokasi Umum	-1,76	0,53	6,46	-9,15	-0,98
2.3	Dana Alokasi Khusus	54,12	1,14	-5,96	-10,77	9,63
2.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	16,62	11,98	-0,06	-8,98	4,89
2.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	77,85	-24,12	-24,97	3,40	20,52
3	Lain-Lain Pendapatan yg Sah	62,91	4,65	3,49	-1,25	17,45
3.1	Pendapatan Hibah	778,17	260,31	13,51	6,92	264,73
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	47,27	56,26	-69,38	-56,07	-5,48
	JUMLAH PENDAPATAN	15,70	1,62	3,87	-5,55	3,91

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun terakhir berada pada kisaran 14,77 - 17,38%. Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

desentralisasi. Derajat desentralisasi tahun 2020 sebesar 16,58%, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal Kabupaten Pekalongan termasuk pada tingkat desentralisasi fiskal kurang. Perkembangan derajat desentralisasi Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

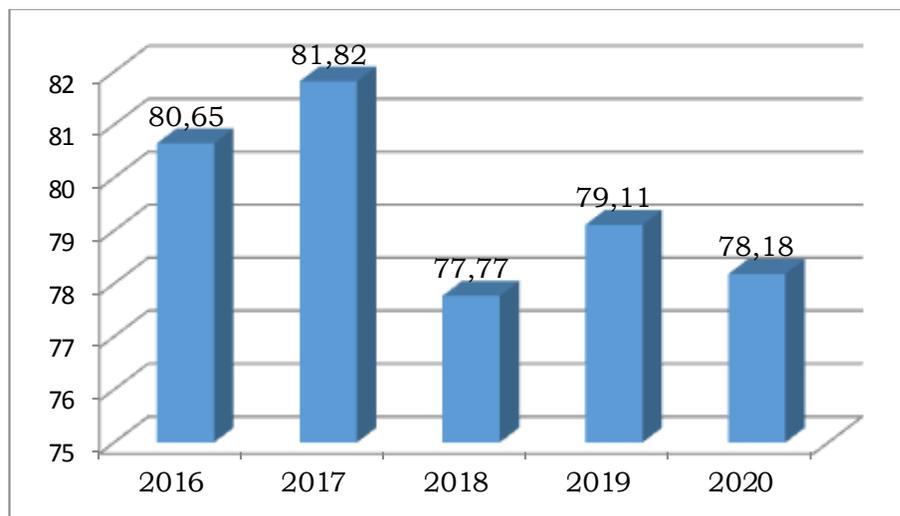
Gambar 4.18 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (%)



BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2021, Data di Olah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Tahun 2020 rasio ketergantungan keuangan sebesar 78,18% menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 79,11%. Meskipun menurun rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Pekalongan terhadap pemerintah pusat dan provinsi termasuk kategori sangat tinggi dengan rasio diatas 50%. Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

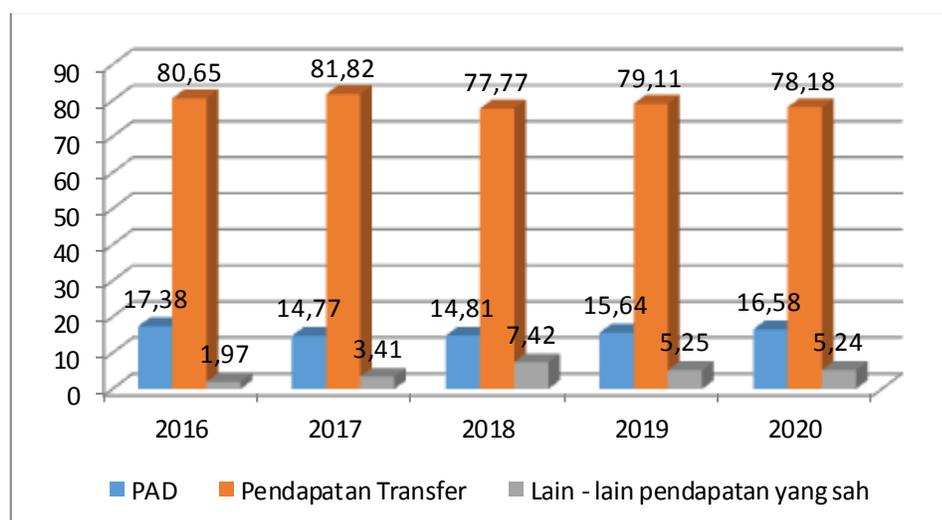
Gambar 4.19 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020



BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2021, Data di Olah

Dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah, unsur-unsur pendapatan daerah dengan proporsi terbesar adalah dana perimbangan dengan kisaran antara 77,77% hingga 81,82% antara tahun 2016 hingga 2020. Sementara itu pendapatan asli daerah berkisar antara 14,82% hingga 17,38%. Adapun lain-lain pendapatan yang sah berkisar antara 16,47% hingga 27,56%. Secara rinci perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.20 Proporsi Unsur Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020



BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2021, Data di Olah

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut ini.

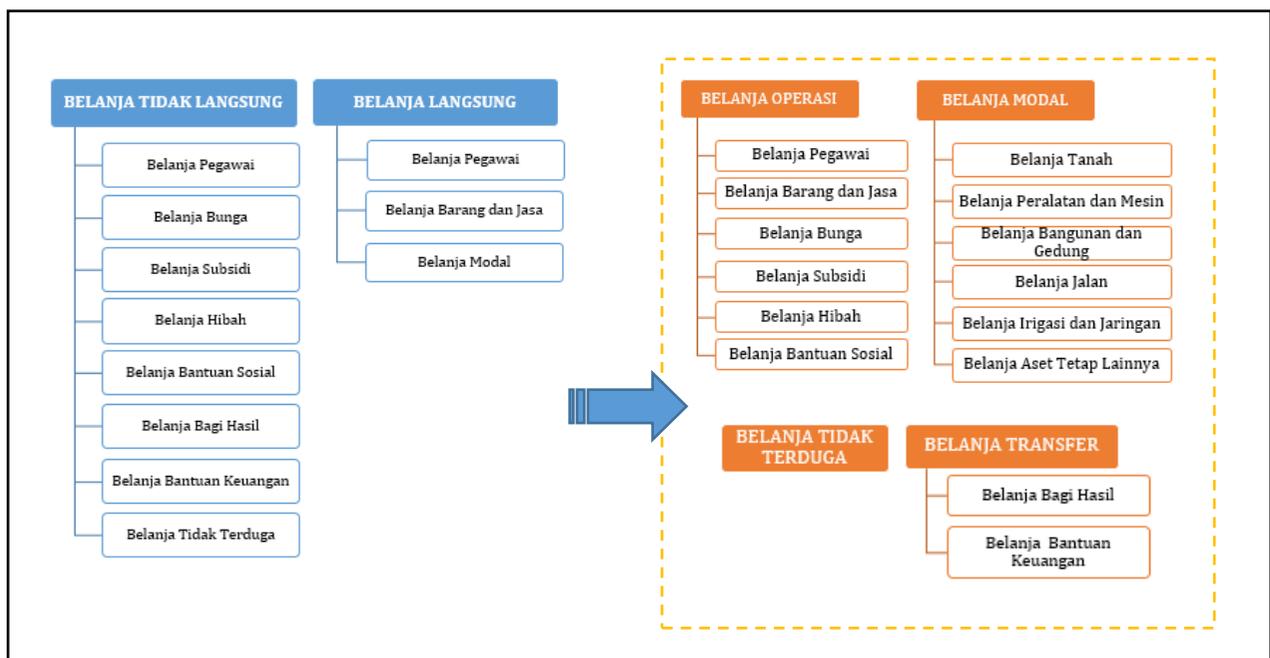
Tabel 4.6 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 - 2020 (Rupiah)

No	Uraian	Realisasi Keuangan Daerah					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pendapatan Asli Daerah	310.572.582	305.394.299	311.288.144	341.344.416	341.786.559	2,51
1.	1 Hasil Pajak Daerah	40.771.237	47.296.813	65.416.345	78.217.365	74.247.140	17,20
1.	2 Hasil Retribusi Daerah	7.395.615	8.583.645	10.166.247	12.809.087	12.708.738	14,92
1.	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.809.131	7.506.942	7.354.576	17.331.867	10.124.616	30,32
1.	4 Lain-lain PAD yang Sah	256.594.599	242.006.900	228.350.975	232.986.096	244.706.065	-1,07
2	Dana Transfer	1.182.370.555	1.282.878.564	1.288.217.218	1.321.954.447	1.206.915.408	0,71
2.	1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	33.291.841	29.653.264	29.222.396	21.533.683	30.732.286	0,58
2.	2 Dana Alokasi Umum	926.571.243	910.294.366	915.154.037	974.248.885	885.145.414	-0,98
2.	3 Dana Alokasi Khusus	222.507.471	342.930.934	346.840.786	326.171.879	291.037.708	9,63
3	Lain-Lain Pendapatan yg Sah	294.408.538	479.634.989	501.943.940	519.472.090	512.981.597	17,45
3.	1 Pendapatan Hibah	2.550.859	22.400.806	80.711.266	91.613.302	97.954.838	264,73
3.	2 Dana Darurat	-	-	-	-	-	
3.	3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	84.684.003	98.757.216	110.590.263	110.523.017	100.595.200	4,89
3.	4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	174.527.576	310.399.175	235.517.071	294.328.778	304.324.192	20,52
3.	5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	32.646.100	48.077.793	75.125.339	23.006.993	10.107.367	-5,48
	JUMLAH PENDAPATAN	1.787.351.675	2.067.907.852	2.101.449.302	2.182.770.952	2.061.683.564	3,91

2. Kinerja Belanja Daerah

Penyajian belanja daerah masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

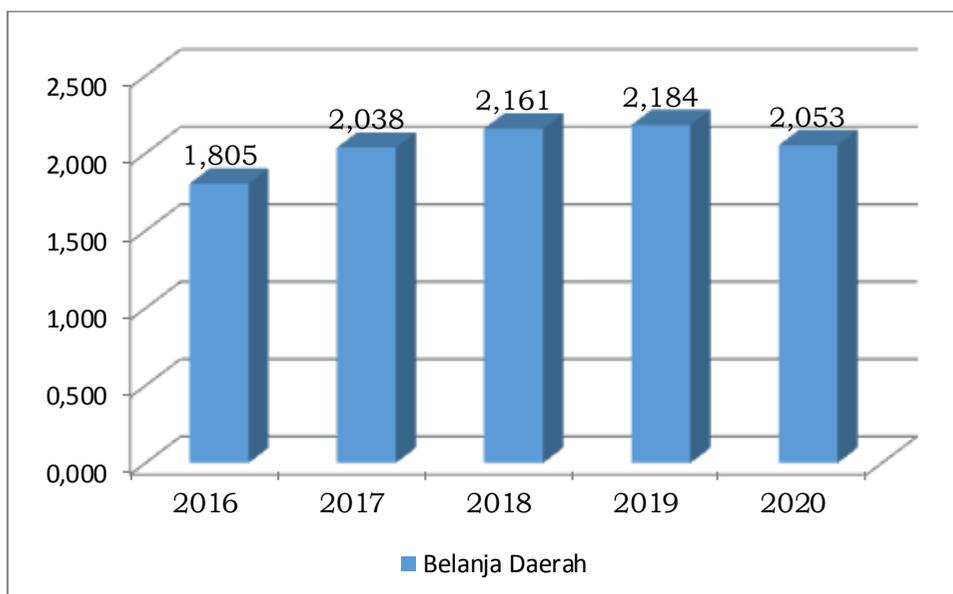
Gambar 4.21 Perubahan Klasifikasi Belanja Daerah



BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2021, Data di Olah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 5 tahun terakhir (2015-2019). Pada tahun 2015 sebesar 1,606 trilyun rupiah meningkat menjadi 2,814 trilyun rupiah. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2015-2019 selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4.22 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Triyun Rupiah)



BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2021, Data di Olah

Rata-rata peningkatan belanja Kabupaten Pekalongan dalam 5 tahun terakhir sebesar 9,49%. Persentase kenaikan belanja tertinggi terjadi di tahun 2017 yaitu sebesar 12,89%, dan terendah tahun 2019 sebesar 1,05%. Komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan fluktuaktif. Tertinggi tahun 2016 sebesar 15,09%. Selama 5 tahun terakhir rata-rata belanja tidak langsung sebesar 9,78%. Pada tahun 2020 Belanja tidak langsung mencapai -11,65%. Komponen Belanja Langsung menunjukkan perkembangan yang fluktuaktif. Belanja langsung tertinggi di tahun 2017 sebesar 12,89%. Rata-rata pertumbuhan belanja langsung sebesar 9,78%.

Perkembangan persentase belanja daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

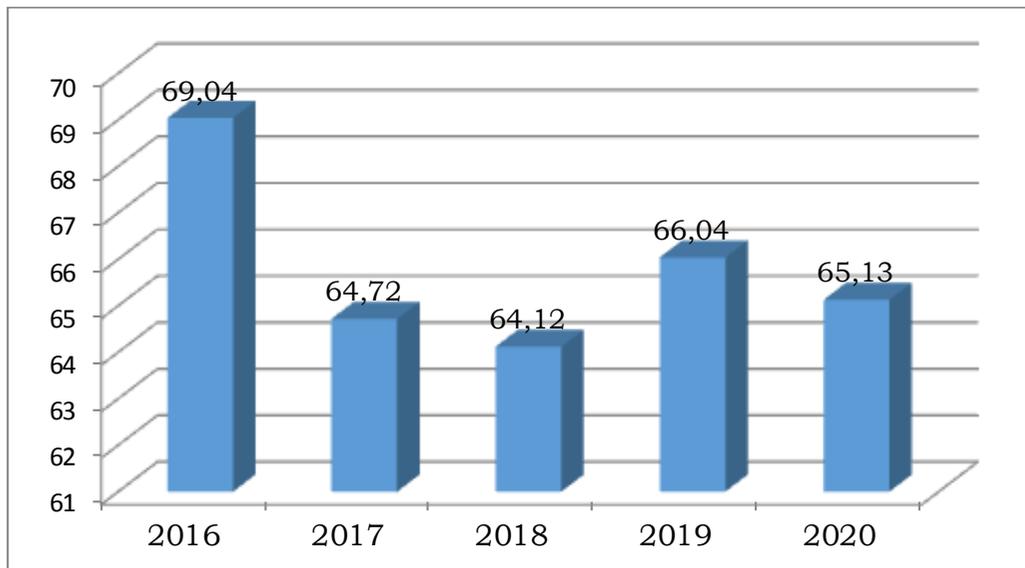
Tabel 4.7 Persentase Pertumbuhan Realisasi Belanja Daeran Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
A	Belanja Operasi	5,87	5,07	4,07	-1,36	3,41
1	Belanja Pegawai	-3,06	2,41	5,11	-5,22	-0,19
2	Belanja Barang dan Jasa	35,15	15,82	1,65	-4,38	12,06
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	3,16	-37,81	15,99	162,02	35,84
5	Belanja Bantuan Sosial	480,93	50,24	-12,88	-8,08	127,55
B	Belanja Modal	41,56	28,09	-19,99	-30,62	4,76

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1	Belanja Modal Tanah	1.945,88	-51,57	161,35	-74,63	496,26
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-26,97	7,12	13,07	12,39	1,40
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-6,41	69,61	37,38	-30,91	17,42
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	93,57	26,00	-37,16	-44,97	9,36
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.173,41	-18,97	-40,76	-39,01	268,67
6	Belanja Modal BLUD	18,44	82,52	-100,00	-	-
C	Belanja tak Terduga	1.300,96	-75,15	118,28	-14,19	332,48
1	Belanja tak Terduga	1.300,96	-75,15	118,28	-14,19	332,48
D	Transfer	16,83	-8,58	14,70	-1,15	5,45
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5,03	16,44	13,01	-25,84	2,16
a.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7,81	21,91	14,76	-25,40	4,77
b.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	-6,05	-6,02	3,68	-28,42	-8,95
2	Transfer Bantuan Keuangan	17,03	-8,96	14,73	-0,68	5,53
1	Transfer Bantuan Keuangan Ke desa	17,06	-9,10	14,92	-0,39	5,62
2	Transfer bantuan Keuangan Lainnya	8,91	0,00	-0,08	-100,00	-22,79
JUMLAH BELANJA		12,95	6,04	1,05	-5,98	3,50

Jika dilihat rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2016-2020 berkisar antara 64,12% menjadi 69,04%. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja diluar program dan kegiatan pembangunan proporsinya relatif besar. Perkembangan selengkapnya rasio belanja operasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut

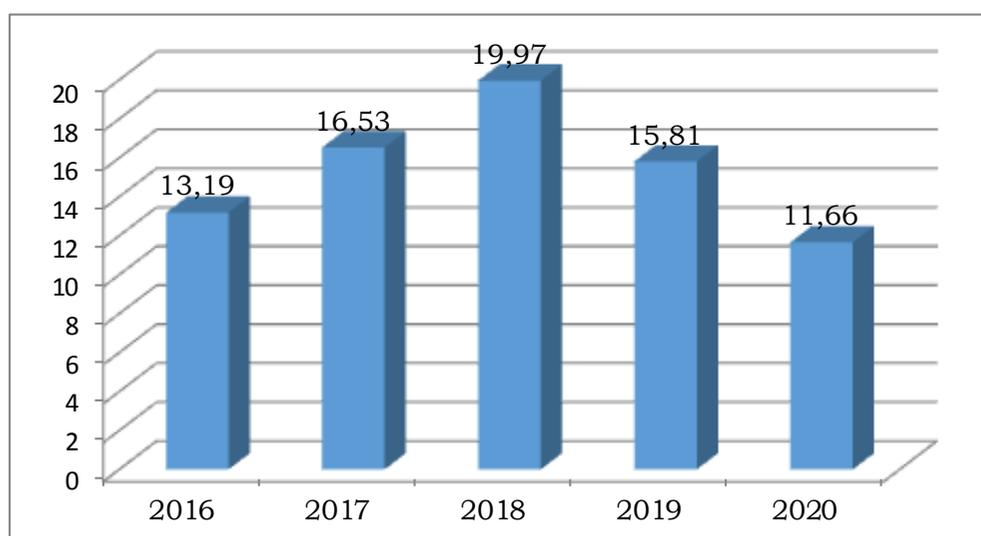
Gambar 4.23 Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Tahun 2016-2020 (%)



BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2021, Data di Olah

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah di Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan fluktuatif. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah tahun 2020 sebesar 11,66%, cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2016 sebesar 13,19%. Perkembangan rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah di Kabupaten Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4.24 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun 2015-2020 (%)



BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2021, Data di Olah

Perincian belanja daerah Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu tahun 2016-2020 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Rp.000)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1	Belanja Operasi	1.245.506.415	1.318.662.172	1.385.548.639	1.441.899.258	1.422.244.907	0,79
1.1	Belanja Pegawai	945.118.848	916.182.468	938.298.816	986.238.927	934.743.679	-2,65
2	Belanja Barang dan Jasa	255.779.849	345.683.053	400.381.256	406.983.972	389.154.355	-
2.2	Belanja Bunga	5.213	-	-	-		37,80
2.2	Belanja Hibah	42.345.305	43.683.976	27.168.517	31.513.710	82.571.723	127,55
2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.257.200	13.112.675	19.700.050	17.162.650	15.775.150	2,16
B	Belanja Modal	237.938.809	336.815.994	431.412.971	345.165.298	239.471.535	5,53
1	Belanja Modal Tanah	336.976	6.894.124	3.338.880	8.726.016	2.213.381	332,48
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.016.848	51.134.776	54.773.203	61.934.637	69.608.029	9,78
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.093.903	48.757.180	82.698.309	113.607.015	78.490.710	15,00
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	98.292.215	190.267.775	239.728.028	150.634.918	82.899.943	12,46
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.679.001	21.380.642	17.324.470	10.262.712	6.259.473	4,76
6	Belanja Modal BLUD	15.519.865	18.381.497	33.550.080	0	0	-
C	Belanja tak Terduga	596.728	8.359.950	2.077.863	4.535.641	3.892.046	
1	Belanja tak Terduga	596.728	8.359.950	2.077.863	4.535.641	3.892.046	
D	Transfer	319.925.644	373.762.853	341.704.958	391.934.592	387.409.224	
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.401.648	5.673.142	6.605.825	7.465.203	5.536.295	
a.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.232.027	4.562.593	5.562.182	6.383.107	4.761.769,15	
b.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.169.621	1.110.549	1.043.643	1.082.096	774.525,51	
c.	Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0			
2	Transfer Bantuan Keuangan	314.523.996	368.089.711	335.099.133	384.469.389	381.872.929	5,53
1	Transfer Bantuan Keuangan Ke desa	313.525.617	367.002.386	333.611.808	383.382.904	381.872.929	5,62
2	Transfer bantuan Keuangan Lainnya	998.379	1.087.325	1.087.325	1.086.485		
JUMLAH BELANJA		1.804.967.597	2.037.600.969	2.160.744.430	2.183.534.790	2.053.055.598	3,50

3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
- b. Pencairan Dana Cadangan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
- f. Penerimaan Piutang Daerah.
- g. Penerimaan Dana Bergulir.
- h. Penerimaan Hasil Penarikan.

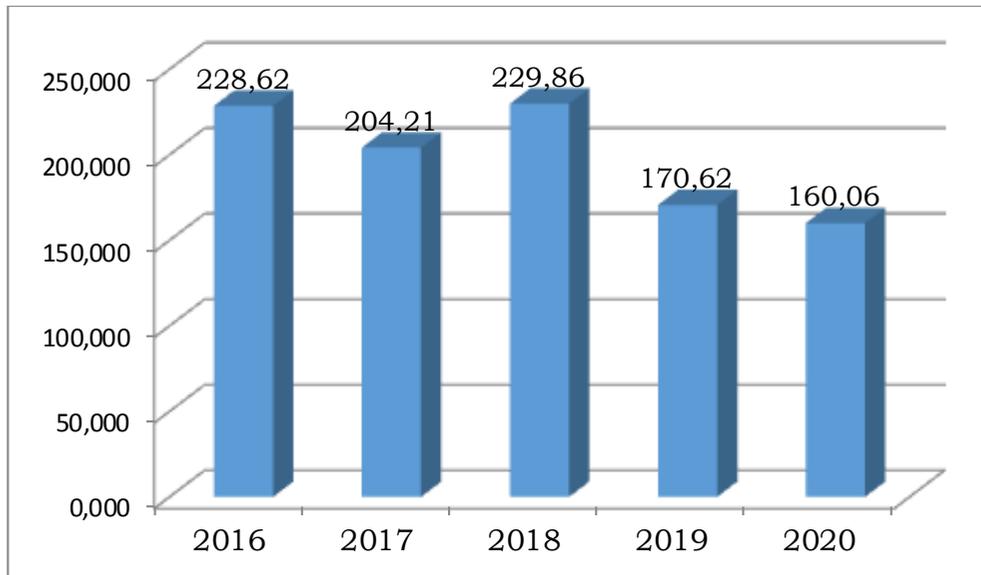
Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perludibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

- a. Pembentukan dana cadangan.
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan yang fluktuaktif. Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Pekalongan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Penerimaan Piutang Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan fluktuaktif, tertinggi tahun 2018 sebesar 229,86milyar rupiah, tetapi tahun 2020 menurun menjadi 160.06 milyar rupiah. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

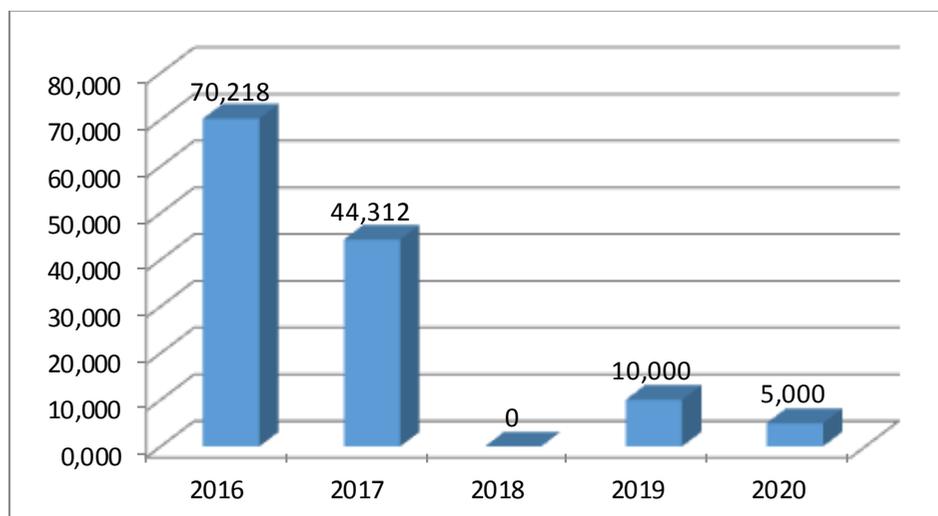
Gambar 4.25 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)



BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2021, Data di Olah

Pengeluaran pembiayaan Daerah merupakan uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Pekalongan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok hutang. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 70,218 milyar rupiah mengalami fluktuasi menjadi 4,431 milyar rupiah pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 turun menjadi 5,00 milyar rupiah. Perkembangan Pengeluaran pembiayaan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.26 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)



BPKD Kabupaten Pekalongan tahun 2021, Data di Olah

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pekalongan 2016-2020 (Rupiah)

No	Uraian	REALISASI (Rp.000)				
		2016	2017	2018	2019	2020*)
A	Penerimaan Pembiayaan	228.623.900	204.206.856	229.856.829	170.620.432	160.068.910
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	228.606.971	203.986.175	203.986.174.937	170.564.364	159.978.997
2	Penerimaan Piutang Daerah	-	1.258	-	-	-
3	Penerimaan Kembali Investasi Data Bergulir	16.929	219.423	69.526	56.068	89.912
B	Pengeluaran Pembiayaan	7.021.802	4.431.161	-	10.000.000	5.000.000
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.935.000	4.431.161	-	10.000.000	5.000.000
2	Pembayaran Pokok Utang	86.802.451	-	-	-	-
JML PEMBIAYAAN NETTO		221.602.097	199.775.695	229.856.829	230.152.103.277	160.620.432.492

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2021

Keterangan :

*) realisasi unaudited

F. Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan, yaitu Menurunkan Angka Kemiskinan dengan indikator Persentase Penduduk Miskin, berikut target penurunan angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026.

Tabel 4.9 Tujuan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Capaian	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Menurunkan Angka Kemiskinan							
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,14	8,89-9,63	9,51-10,73	9,39-10,44	9,27-10,15	9,14-9,86	9,02-9,57

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran penanggulangan kemiskinan sesuai bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan sosial, serta Indikasi prioritas program berdasarkan isu strategis masing-masing bidang hasil analisis prioritas bidang dilihat dari capaian kinerja tahun 2015-2019 serta realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan target tahun 2019 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, termasuk masa pandemi COVID-19. Berikut indikasi program prioritas penanggulangan kemiskinan masing-masing bidang:

1. Bidang Ketenagakerjaan

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, termasuk masa pandemi COVID-19, sebagai berikut:

- a. Rendahnya kapasitas tenaga kerja;
- b. Rendahnya kesejahteraan tenaga;
- c. Rendahnya kesejahteraan anggota koperasi;
- d. Belum optimalnya pengembangan usaha mikro;
- e. Belum optimalnya inovasi produk industri kecil dan menengah;
- f. Belum optimalnya pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
- g. Belum optimalnya inovasi produk hasil produksi perikanan; dan
- h. Belum optimalnya pemberdayaan petani dan peternak.

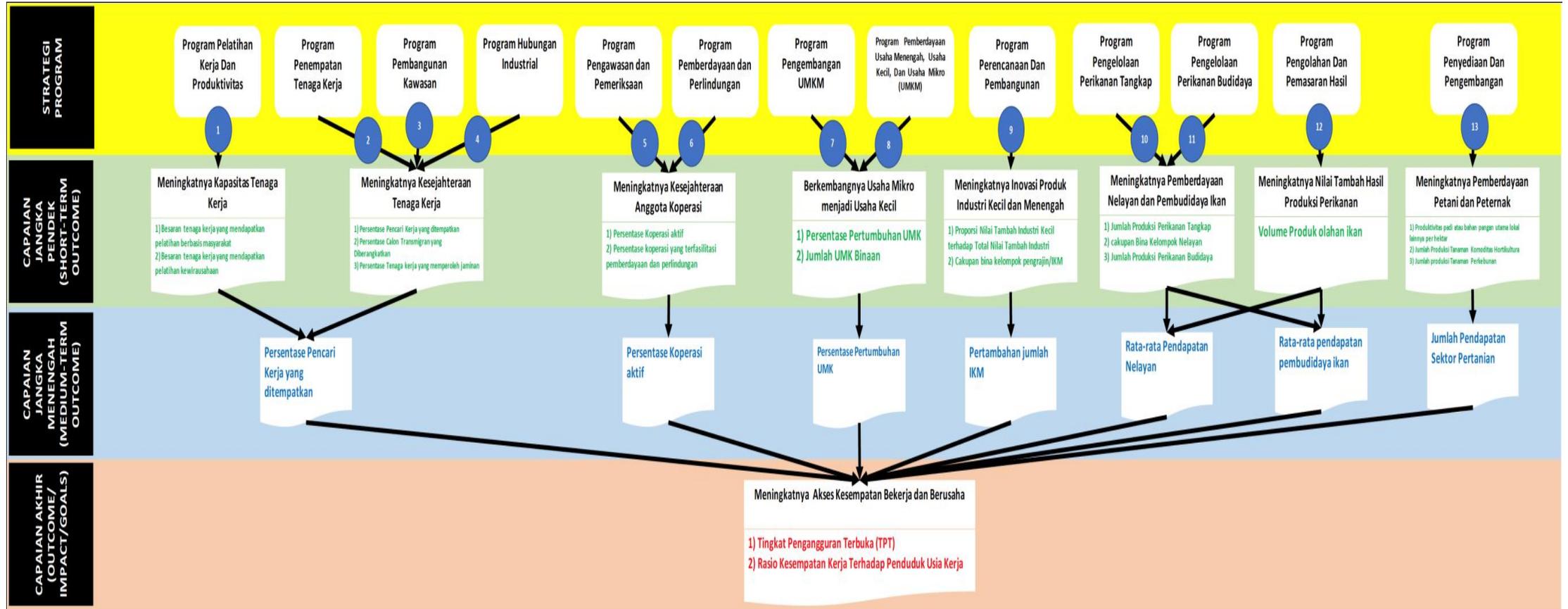
Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan, yaitu Meningkatkan Akses Kesempatan Bekerja dan Berusaha dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026.

**Tabel 4.10 Sasaran Akhir Bidang Ketenagakerjaan
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun
2021-2026**

No	Sasaran Akhir (outcome/ impact/goals)	Capaian	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Akses Kesempatan Bekerja dan Berusaha							
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,97	5,6	5,8	6	6,24	6,46	6,6
2	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	69,23	111,4	126,8	142,1	157,4	172,8	188,1

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan didukung oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja; Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Kelautan dan Perikanan; dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kelima perangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals) melalui 13 Program Prioritas. Berikut Theory of Change (ToC) Bidang Ketenagakerjaan:

**Gambar 4.27 Theory of Change (ToC)
Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan**



13 program prioritas penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome /impact/goals), yaitu:

a. Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja. Program yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Naker dalam rangka mendukung terhadap capaian ultimate goals 1 adalah sebagai berikut:

1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bagi pencari kerja agar dapat bersaing dengan pencari kerja yang lain, termasuk pencari kerja yang berasal dari kabupaten lain maupun pencari kerja yang akan bekerja pada dunia industry diluar Kabupaten Pekalongan. Selain meningkatkan kapasitas pencari kerja, program tersebut juga menyasar kepada masyarakat umum yang berminat untuk mengembangkan wirausaha. Masyarakat didorong untuk berwirausaha sehingga dalam prosesnya tidak menunggu adanya potensi lapangan kerja. Kinerja dari program ini dapat diukur melalui indikator 1) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan 2) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja antara lain:

a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja serta meningkatkan keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh pencari kerja dalam bersaing di dunia kerja. Pelatihan ini dititikberatkan pada pelatihan keterampilan yang banyak dibutuhkan dunia kerja. Informasi tentang kebutuhan tenaga kerja (*supply*) dihimpun melalui informasi lowongan kerja yang diinformasikan kepada Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan, meliputi:

(1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi. Kegiatan ini direncanakan menyasar 1.712 pencari dengan total biaya selama empat tahun (2021-2024) mencapai Rp6.917.536.400 dan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK).

(2) Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan

prasarana lembaga pelatihan kerja. Sub kegiatan ini dilaksanakan sebanyak empat kali dalam setahun dengan total anggaran selama empat tahun (2021-2024) sebanyak Rp 800.000.000.

- b) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah dalam mengukur kualitas tenaga kerja yang dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui sub kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja. Sub kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bojong, Kedungwuni, Kandangserang, Sragi, Kajen, Paninggaran, Lebakbarang, Kajen, Kesesi, Wonopringgo, Karangdadap, Karanganyar, Buaran, Tirto, Wonokerto, Bojong, Talun, Siwalan. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) yang dialokasikan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.375.000.000.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program penempatan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga yang ditempatkan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, diimplementasikan melalui 2 sub kegiatan, yaitu:

(1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Pameran Bursa kerja online (BKO)/Job Fair dilaksanakan disebabkan oleh tingginya masalah pengangguran yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Banyaknya masyarakat yang menganggur selama ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan, antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan pasar kerja. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kesempatan kerja. Kondisi ini ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui penyediaan bursa kerja online. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) yang dialokasikan untuk melaksanakan sub kegiatan ini mencapai Rp1.550.000.000 dengan jumlah sasaran mencapai 18.600 orang.

(2) Job Fair/Bursa Kerja

Job Fair atau Pesta Lowongan Kerja adalah salah satu tempat/wadah bertemunya Pihak HRD Perusahaan (sebagai perekrut/Karyawan) dan Pihak Pelamar (sebagai

pencari kerja) pada sebuah tempat yang telah disediakan oleh pihak Penyelenggara. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) yang dialokasikan untuk kegiatan ini mencapai Rp1.300.000.000 dengan total target sasaran mencapai 12.000 orang.

b) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI). Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) yang dialokasikan dalam kegiatan ini mencapai Rp600.000.000 dengan sasaran sebanyak 150 orang.

3) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Salah satu permasalahan yang paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan terkait dengan kemiskinan adalah pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Terdapat masyarakat di Kabupaten Pekalongan yang tidak memiliki sumberdaya modal, sehingga seringkali bergantung kepada orang lain untuk bekerja. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak dapat bersaing secara optimal di pasar kerja. Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi kesenjangan tersebut adalah dengan melakukan transmigrasi. Transmigrasi bertujuan untuk memindahkan masyarakat yang kurang memiliki kesempatan akses terhadap lapangan kerja agar dapat berkembang di wilayah baru melalui jalur kewirausahaan, baik dalam bentuk berusaha maupun bertani. Transmigran akan memiliki kesempatan yang besar dalam meningkatkan taraf hidupnya karena selain diberikan kesempatan untuk berusaha seringkali juga diberikan bekal keterampilan agar dapat berusaha. Selain itu, pemenuhan terhadap kebutuhan dasar juga telah dipenuhi.

Penyelenggaraan transmigrasi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan melalui 2 (dua) sub kegiatan, meliputi:

a) Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Penyuluhan transmigrasi lokal dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang

berada pada desa/kecamatan yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai mekanisme, tujuan, manfaat dan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan transmigrasi kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengalokasikan anggaran selama empat tahun (2021-2024), dengan total anggaran sebesar Rp721.281.400 untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang menarget kepada 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan.

- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun dengan total anggaran selama empat tahun (2021-2024) sebesar Rp 618.241.200.

- 4) Program Hubungan Industrial

Hubungan Industrial, memiliki kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan ini tidak jarang diakhiri dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja/buruh. PHK itu sendiri pada akhirnya akan berdampak kepada pekerja secara finansial, dimana kemudian pekerja tidak memiliki sumber pendapatan ke depannya yang berpotensi membawa mereka menjadi penyumbang terhadap kemiskinan.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menghindari terjadinya kasus hubungan industrial adalah dengan melaksanakan program Hubungan Industrial. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan, yaitu:

- (1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Sub-Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketaatan perusahaan dalam penyusunan syarat kerja dalam PP dan tata cara pengesahan PP. Total alokasi anggaran selama empat

tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini mencapai Rp824.321.600 dengan sasaran mencapai 361 perusahaan.

(2) Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman HRD di perusahaan dalam pembahasan, penyusunan dan tata cara pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Total alokasi anggaran selama empat tahun (2021-2024) untuk kegiatan ini mencapai Rp1.018.120.000 dengan sasaran sebanyak 220 perusahaan.

b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan, yaitu:

(1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap norma dan peraturan ketenagakerjaan sehingga diharapkan nantinya perselisihan antara perusahaan dengan pekerja/buruh bisa diminimalisir. Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini mencapai Rp824.321.600 dengan sasaran sebanyak 110 perusahaan.

(2) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

Pengertian Bipartit sebagai lembaga adalah sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang tercatat pada instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan. Pembentukan LKS Bipartit bertujuan merwujudkan iklim kerja yang harmonis dan kondusif di perusahaan sebagai upaya meningkatkan kelangsungan usaha dan bekerja serta meningkatkan kemajuan perusahaan dan kesejahteraan pekerja sehingga terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Operasionalisasi LKS Bipartit difasilitasi melalui APBD Kabupaten

Pekalongan dengan total alokasi anggaran selama empat tahun (2021-2024) sebesar Rp824.321.600, dan menysasar sebanyak 44 perusahaan.

- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tersebut dalam rangka mendukung terhadap capaian ultimate goals 1 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan untuk melihat kepatuhan koperasi terhadap legalitas, kepausahaan usaha dan keuangan serta kepatuhan transaksi. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dilaksanakan melalui kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui dua sub kegiatan, yaitu:

- a) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Total anggaranyang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp645.000.000.
- b) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebesar Rp352.136.800.

2) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Adapun Perlindungan koperasi adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku

usaha. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dan sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi. Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi dengan total anggaran selama empat tahun (2021-2024) mencapai Rp82.000.000 dengan sasaran 180 lembaga koperasi.

3) Program Pengembangan UMKM

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam berbagai bidang, termasuk didalamnya adalah Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Permodalan serta Desain dan Teknologi. Program pengembangan UMKM dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dan diimplementasikan melalui sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi. Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) dalam sub kegiatan ini mencapai Rp1.108.302.200 sasaran sebanyak 885 UMKM dari 19 Kecamatan.

4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).

Pemberdayaan UMKM adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan

bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri serta meningkatkan daya saing UMKM. Program Pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) dalam sub kegiatan ini mencapai Rp900.000.000.
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. Sub kegiatan ini bertujuan untuk membangun landscape dan memfasilitasi pemasaran produk usaha UMK melalui UMKM Center. Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) dalam sub kegiatan ini mencapai Rp980.000.000, dengan target sebanyak 200 UMKM dan terbangunnya landscape UMKM center.
 - c) Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro. Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) dalam sub kegiatan ini mencapai Rp800.000.000.
- 5) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Dalam pembangunan ekonomi, sektor industri merupakan leading sector yang akan mendorong sektor-sektor lainnya untuk berkembang. Pembangunan industri diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah, terutama yang berbasis sumber daya lokal dan bersifat intensif tenaga kerja. Pembangunan tersebut harus melalui sebuah mekanisme perencanaan yang matang dan didukung dengan penguatan terhadap unsur dalam industri itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka meningkatkan kualitas industri di wilayahnya dilakukan melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung percepatan kualitas sektor industri, yaitu:

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri. Sub kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelatihan terhadap

UMKM yang telah dilatih melalui sub kegiatan Pengembangan SDM, Inovasi dan Kreatifitas IKM. Pelatihan ini diharapkan akan mencetak 240 pelaku yang handal dan terampil yang berimplikasi pada peningkatan kualitas produk. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) yang dialokasikan dalam sub kegiatan ini adalah sebesar Rp1.700.556.000.

- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi bagi masyarakat pelaku IKM non Agro. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) dalam pelaksanaan kegiatan ini mencapai Rp1.400.000.000 dengan sasaran sebanyak 13 kelompok/sentra.

- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Salah satu bentuk dukungan yang diperlukan oleh pelaku usaha IKM adalah sarana dan prasarana. Sarpras merupakan salah satu unsur penting bagi pelaku IKM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Sub kegiatan ini bertujuan untuk Jumlah IKM yang memfasilitasi sarana dan prasarana usaha dari pelaku IKM agar dapat meningkatkan produksi. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) sub kegiatan ini mencapai Rp1.700.000.000 dengan target sebanyak 12 kelompok/sentra.

- c. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Program yang dilaksanakan oleh Disporapar dalam rangka mendukung terhadap capaian ultimate goals 1 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).

Generasi muda merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tingkat produktivitas tinggi. Hal ini menjadi sebuah potensi bagi Kabupaten Pekalongan untuk memanfaatkan tingkat produktivitas tersebut agar mampu menjawab permasalahan keterbatasan lapangan usaha yang dimiliki melalui peningkatan jiwa kewirausahaan generasi muda. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan dan keterlibatan pemuda dalam berwirausaha utamanya dalam rangka meningkatkan lapangan kerja serta menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Pekalonga. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut di *breakdown* kedalam 4 (empat) sub kegiatan yang masing-masing menasar pada lokus yang potensial, seperti sekolah, desa dan Organisasi Kepemudaan. Sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan jiwa kewirausahaan pemuda adalah sebagai berikut:

- a) Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Kajen, Kab. Pekalongan. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) dari sub kegiatan ini mencapai Rp540.000.000 dengan target sebanyak 420 orang Wirausaha muda dari 3 bidang usaha.
 - b) Enterprenenur go to School. Sub kegiatan tersebut dilaksanakan di 10 sekolah, dengan total anggaran selama empat tahun (2021-2024) mencapai Rp120.000.000 dengan target sebanyak 260 Wirausaha pelajar.
 - c) Pelatihan Wirausaha OKP. Sub kegiatan tersebut dilaksanakan di 19 Kecamatan, dengan total anggaran selama empat tahun (2021-2024) mencapai Rp420.000.000 dengan target sebanyak 540 Wirausaha pemuda.
 - d) Enterprenenur go to Village. Sub kegiatan tersebut dilaksanakan di 19 Kecamatan, dengan total anggaran selama empat tahun (2021-2024) mencapai Rp960.000.000 dengan target sebanyak 820 Pemuda miskin.
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendukung terhadap capaian *ultimate goals* 1 adalah sebagai berikut:
- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Sebagai wilayah yang memiliki sumberdaya air tawar melimpah, Kabupaten Pekalongan memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar. Kondisi geografis yang didukung oleh dataran tinggi, punggung dan pantai memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat sumberdaya air dalam pengembangan usaha perikanan budidaya. Program pengelolaan perikanan budidaya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku budidaya airtawar khususnya ikan lele dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta kualitas budidaya itu sendiri. Penekanan program ini

diarahkan pada peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas produk perikanan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana budidaya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan, yaitu:

- a) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) yang dialokasikan dalam kegiatan ini mencapai Rp780.297.827, dengan sasaran sebanyak 120 orang.
 - b) Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) yang dialokasikan dalam kegiatan ini mencapai Rp464.709.827, dengan sasaran sebanyak 300 orang.
- 3) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Nilai tambah (value added) adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Nilai tambah merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menaikkan harga sebuah komoditas melalui serangkaian tahapan produksi pada sebuah komoditas. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki tingkat produksi perikanan yang cukup tinggi, nilai tambah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nilai tambah yang semakin besar atas produk perikanan khususnya perikanan air tawar dan air payau tentunya dapat berperan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan. Pengolahan hasil perikanan merupakan salah satu bentuk rantai dagang perikanan yang dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan sehingga secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.

Dinas Kelautan dan Perikanan mendorong pembudidaya perikanan, baik tawar maupun payau, untuk membentuk sebuah kelompok yang disebut POKLAHSAR (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan). Kelompok Pengolah Pemasar yang selanjutnya disebut Poklahsar adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok. Poklahsar berfokus tentang penciptaan produk olahan berbahan ikan, baik pada produk setengah jadi maupun produk jadi. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan kualitas produk

anggota POKLAHSAR adalah melalui Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil. Sub kegiatan ini berfokus pada penyediaan sarana sistem rantai dingin komoditas ikan, yaitu penyediaan coolbox. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) yang dialokasikan dalam sub kegiatan ini mencapai Rp196.250.000 dengan jumlah sasaran mencapai 125 kelompok.

e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam rangka mendukung terhadap capaian ultimate goals 1 adalah sebagai berikut:

1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Keberhasilan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketersediaan prasarana yang memadai, kualitas penanganan organisme pengganggu tanaman dan penyediaan bibit/benih unggul yang berkualitas. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam rangka menyelenggarakan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

a) Pengembangan Prasarana Pertanian. Sub Kegiatan ini diarahkan untuk mengidentifikasi prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki lahan persawahan di wilayah sasaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya. Anggaran yang dialokasikan untuk sub kegiatan ini mencapai Rp 260.000.000 dengan cakupan 4 kecamatan per tahun.

b) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Salah satu penyebab terjadinya kegagalan panen pada lahan pertanian adalah adanya bencana pertanian berupa bencana alam maupun perubahan iklim. Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan kegiatan tersebut menyusun 2 sub kegiatan, meliputi:

(1) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan. Dilaksanakan di 3 kecamatan dengan anggaran mencapai Rp 520.000.000.

(2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Dilaksanakan di kecamatan Paninggaran dengan anggaran mencapai Rp 1.490.000.000.

c) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dilaksanakan melalui sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil dengan anggaran mencapai Rp 710.000.000 dalam kurun waktu 4 tahun.

**Tabel 4.11 Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan
Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026**

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah													Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu								
meningkatnya daya saing dan kompetensi tenaga kerja				prosentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi			1,41		1,66		1,96		2,26		2,3		2,4		Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			40	1.354.384.100	45	3.594.384.100	47	4.594.384.000	48	5.352.322.400	50	6.185.054.640	52	6.665.560.104	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			0	0	32	500.000.000	32	550.000.000	34	550.000.000	35	600.000.000	36	660.000.000	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah													Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu								
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Dan Ketrampilan Kompetensi	Balai Latihan Kerja		336	1.354.384.100	428	3.529.384.100	464	4.229.384.000	528	5.002.322.400	564	5.802.554.640	628	6.232.810.104	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
			Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Balai Latihan Kerja, Utamanya Kecamatan Dari Desa Lab Kemiskinan		336	1.354.384.100	528	2.429.384.100	464	2.729.384.000	528	3.002.322.400	564	3.302.554.640	628	3.632.810.104	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
		Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Ko		Jumlah Tenaga Kerja Yang Diukur Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja.			0	0	0	0	4	250.000.000	5	275.000.000	6	302.500.000	7	332.750.000	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		ta																	Tenaga Kerja
			Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diukur Komptensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Tahun 2021 Kec.Bojonegara, Kedungwuni, Kandangserang, Kec.Sragi, Kec.Kajen		0	0	0	0	4	250.000.000	5	275.000.000	6	302.500.000	7	332.750.000	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
					Tahun 2022 Di Kecamatan Paninggaran,Lebakbarang, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Karangdadap														
					Tahun 2023: Kecamatan Karanganyar,Buaran, Kec.Tirto, Wonokerto, Bojong dan Wonopringgo														

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu											
					Tahun 2024: Kecamatan Talun, Karanganyar, Siwalan, Kedungwuni, Karangdada dan Sragi.														
	Program Penempatan Tenaga Kerja			Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan			25		28		30		32		34		35		Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelayanan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			4500	250.000.000	4550	550.000.000	4600	570.000.000	4650	630.000.000	4700	630.000.000	4750	693.000.000	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
			<i>Pelayanan Dan Penyedi</i>	<i>Jumlah pencari kerja yang</i>			4500	250.000.000	4550	350.000.000	4600	360.000.000	4650	380.000.000	4700	380.000.000	4750	385.000.000	<i>Dinas Penanaman</i>

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah													Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu								
			aan Informasi Pasar Kerja Online	mendapatkan Pelayanan Dan Penyediaan informasi Pasar Kerja Online															Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Memanfaatkan Pelayanan Job Fair/Bursa Kerja			0	-	1500	200.000.000	1600	210.000.000	1700	250.000.000	1800	250.000.000	1900	260.000.000	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
		Kegiatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota		prosentase CPMI/PMI yang berangkat dan yang pulang			83,3	100.000.000	83,3	<i>350.000.000</i>	85,7	385.000.000	85,7	423.500.000	86	465.850.000	86	512.435.000	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
			Peningkatan	Jumlah CPMI/PMI			30	<i>100.000.000</i>	30	<i>350.000.000</i>	35	385.000.000	38	423.500.000	40	465.850.000	43	<i>512.435.000</i>	Dinas Penana

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
			<i>Pelindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (Pmi)/Pekerja Migran Indonesia (Pmi)</i>	yang mendapatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar negeri															<i>man Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja</i>
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi			Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan			40		50	331.500.000	50	350.000.000	50	385.000.000	50	423.500.000	50		Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
		Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah		Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Berminat Dan Ditempatkan Pada Transmigrasi Lokal			5		6	331.500.000	6	350.000.000	7	385.000.000	7	423.500.000	8	465.850.000	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu											
		Kabupaten/Kota																	
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah animo transmigran			5		6	331.500.000	6	350.000.000	7	385.000.000	7	423.500.000	8	465.850.000	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
			Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah kecamatan yang Mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi	kecamatan yang ada desa miskin		10	175.000.000	10	178.500.000	12	182.070.000	12	185.711.400					Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial			Persentase Tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial			38,5		39	400.000.000	39,5	420.000.000	40	440.000.000	40	-	41	480.000.000	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu											
				tenaga kerja (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan															u Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
		Kegiatan Pengesahan Peraturan		Jumlah perusahaan memiliki PP, mendaftar PKB, membentuk lembaga kerjasama bipartit (LKS Bipartit)struktur skala upah dan yang mendaftarkan bpjs ketenagakerjaan dan bpjs kesehatan			160	200.000.000	165	604.000.000	170	674.000.000	175	744.000.000	175	814.000.000	180	884.000.000	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
		Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan Yang Di BinteK Penyusunan Syarat Kerja Dalam Pp Dan Tata Cara Pengesahan Pp	Tahun 2021 Kec Buaran		68	200.000.000	68	504.000.000	73	524.000.000	78	544.000.000	83	564.000.000	88	584.000.000	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
					Tahun 2022 Kedungwuni														
					Tahun 2023 Kecamatan Siwalan														
					Tahun 2024 Kecamatan Wiradesa Dan Tahun 2025 Kecamatan Tirto														
			Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Di Bintel Pembahasan, Penyusunan dan Tata Cara Pendaftaran PKB	Tahun 2021 Kecamatan Buaran		30	100.000.000	45	300.000.000	60	306.000.000	85	312.120.000					Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
					Tahun 2022 Kedungwuni														
					Tahun 2023 Kecamatan Siwalan														

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah													Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu								
					Tahun 2024 Kecamatan Wiradesa Dan Tahun 2025 Kecamatan Tirto														
		Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/ Kota		Prosentase jumlah perselisihan yang terselesaikan			95	400.000.000	95	842.000.000	96	882.000.000	97	922.000.000	98	962.000.000	99	1.002.000.000	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,	Jumlah perusahaan yang dibina			20	200.000.000	25	408.000.000	30	428.000.000	35	448.000.000	40	468.000.000	45	488.000.000	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu											
			Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																Pintu, dan Tenaga Kerja
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Adanya Sidang LKS Tripartit Dan Sidang Pengupahan Rekomendasi Oleh Bupati Tentang Usulan UMK			4	200.000.000	4	434.000.000	4	454.000.000	4	474.000.000	4	494.000.000	4	514.000.000	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah												Perangkat Daerah		
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025			Target 2026	
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu
		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota		Jumlah Wirausaha Muda Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Daya Saing			420	450.000.000	480	490.000.000	540	530.000.000	600	570.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah													Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu
			Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaran Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Kajen, Kab. Pekalongan	Wirausaha Muda Budidaya Kopi (Orang)	Petungkrityono	Tlogohendro	20	30.000.000	30	40.000.000	40	50.000.000	50	60.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				
				Wirausaha Muda Batik	Buaran	Kartijaya	20	30.000.000	30	40.000.000	40	50.000.000	50	60.000.000					
				Wirausaha Muda Budidaya Ikan	Tirto	Mulyorejo	20	30.000.000	30	40.000.000	40	50.000.000	50	60.000.000					
			Enterpr eneur Go To School	Wirausaha Pelajar	10 Sekolah	Sma & Smk	50	30.000.000	60	30.000.000	70	30.000.000	80	30.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				
			Pelatihan Wirausaha Okp	Wirausaha Pemuda	19 Kecamatan		120	105.000.000	130	105.000.000	140	105.000.000	150	105.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				
			Enterpr eneur Go To Village	Pemuda Miskin	19 Kecamatan		190	225.000.000	200	235.000.000	210	245.000.000	220	255.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				

2. Bidang Pendidikan

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, termasuk masa pandemi COVID-19, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya layanan pendidikan dasar;
- b. Rendahnya akses anak usia sekolah ke layanan pendidikan terdekat;
- c. Belum optimalnya layanan pendidikan anak usia dini;
- d. Rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- e. Rendahnya minat literasi masyarakat.

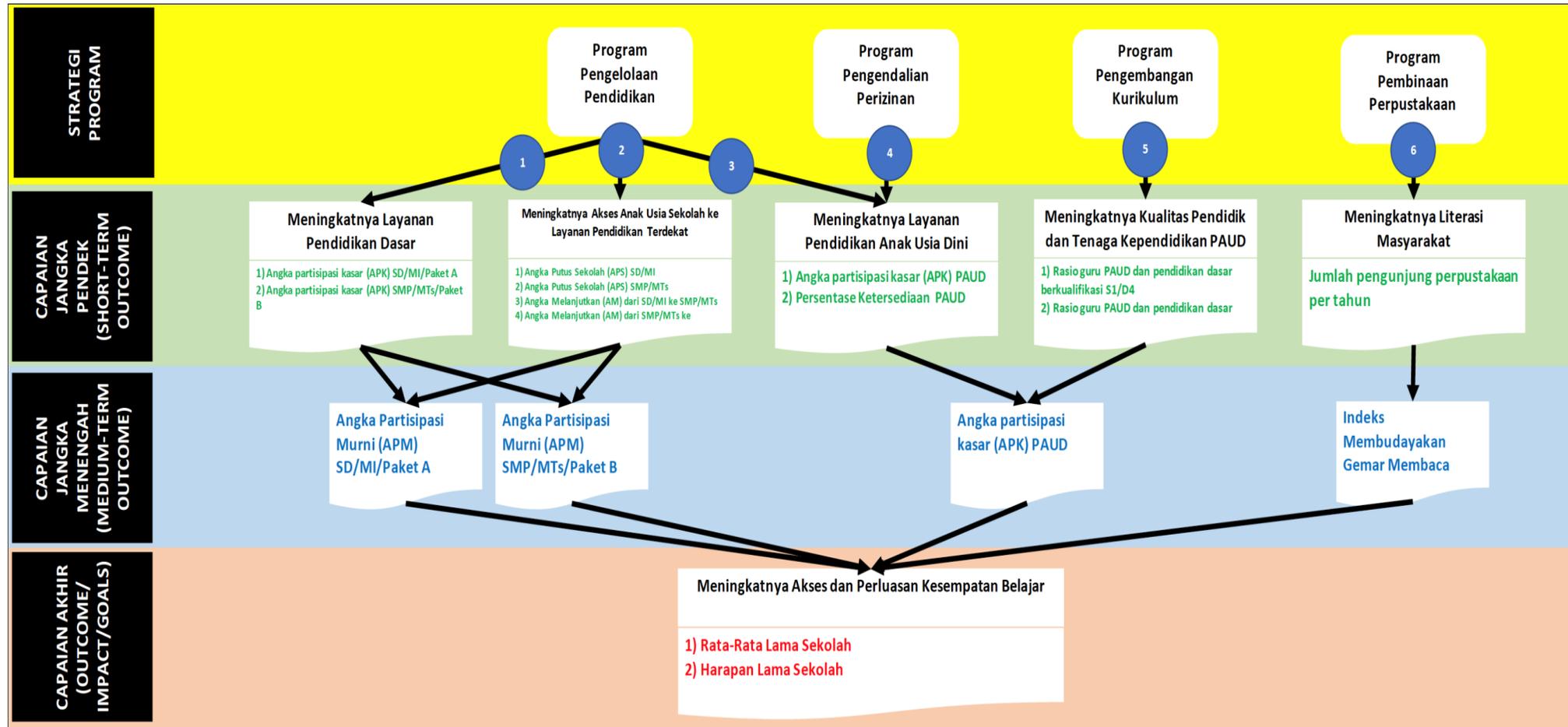
Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, yaitu Meningkatkan Akses dan Perluasan Kesempatan Belajar”dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2024.

**Tabel 4.12 Sasaran Akhir Bidang Pendidikan
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-
2026**

No	Sasaran Akhir (outcome/ impact/goals)	Capaian	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Akses dan Perluasan Kesempatan Belajar							
1	Rata-Rata Lama Sekolah	6,91	6,92	6,98	7,04	7,09	7,14	7,18
2	Harapan Lama Sekolah	12,41	12,46	12,55	12,63	12,69	12,73	12,76

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Keduaperangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals) melalui 4 Program Prioritas. Berikut Theory of Change (ToC) Bidang Pendidikan:

Gambar 4.28 Theory of Change (ToC) Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Kabupaten Pekalongan



4 program prioritas penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals), yaitu:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mendukung terhadap capaian ultimate goals adalah :

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengembangan. Pengelolaan sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dimana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan pendidikan meliputi beberapa tujuan yaitu: 1) untuk meningkatkan dan memaksimalkan segenap sumber daya pendidikan SMP sehingga mampu encapai tujuan pendidikan. 2) sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sekaligus sebagai alat evaluasi penyelenggaraan kegiatan baik selama pengelolaan berlangsung maupun akhir tahun pelajaran.

2) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Pengendalian diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dalam konteks ini berarti mengendalikan dan memastikan bahwa perizinan pendidikan dilakukan sesuai prosedur. Pengendalian perizinan pendidikan memiliki tujuan untuk memastikan dan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan dan jika menemui penyimpangan akan dilakukan upaya untuk mengambil tindakan korektif.

3) Program Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah program perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam rangka mendukung terhadap capaian ultimate goals adalah :

1) Program Pembinaan Perpustakaan

Perpustakaan adalah salah satu sumber belajar yang amat penting. Sebagai sumber belajar keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan. Maka dibutuhkan pembinaan terhadap perpustakaan guna mendorong terciptanya budaya baca dan memotivasi siswa untuk membaca dan memanfaatkan perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Program pembinaan perpustakaan sendiri meliputi pembinaan dalam infrastruktur maupun SDM yang mengelola perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan dalam program pembinaan perpustakaan antara lain:

a) Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten
Pembinaan dilakukan dengan mengembangkan perpustakaan tingkat daerah kabupaten dengan memiliki sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan kepada masyarakat tingkat kewirausahaan. Sebagai wadah yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kadar literasi masyarakat, Perpustakaan Daerah melaksanakan sub kegiatan yaitu, Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial. Anggaran yang dialokasikan dalam sub kegiatan ini dalam waktu 4 tahun mencapai Rp 1.095.043.950 dengan total penerima manfaat sebesar 312 orang.

Tabel 4.1 Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah												Perangkat Daerah		
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025			Target 2026	
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu								
Meningkatnya Layanan Pendidikan Dasar				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A			103,83		103,85		103,87		103,89		103,91		103,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B			100		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program Pengelolaan Pendidikan			Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A			103,83		103,85		103,87		103,89		103,91		103,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B			100		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah										Perangkat Daerah				
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Target 2025		Target 2026	
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
Meningkatnya Layanan Pendidikan Anak Usia Dini				Angka partisipasi kasar (APK) PAUD			71,02		72		87		87		87		87		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Pendidikan			Angka partisipasi kasar (APK) PAUD			71,02		72		87		87		87		87		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan			Persentase Ketersediaan PAUD			71,02		72		87		87		87		87		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi sedang/berat				1.190.090.000	11		1.309.099.000								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun				12.327.677.000	68		13.560.444.700								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah												Perangkat Daerah		
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025			Target 2026	
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu
			Guru PAUD																
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah RA/BA penerima operasional penyelenggaraan pendidikan	109 RA/BA		367.834.000	367.834.000			367.834.000	367.834.000							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD				Angka partisipasi kasar (APK) PAUD			72	73			74	75							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kurikulum			Rasio guru PAUD dan pendidikan dasar berkualifikasi S1/D4															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah												Perangkat Daerah		
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025			Target 2026	
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu								
				Rasio guru PAUD dan pendidikan dasar bersertifikasi Pendidik															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3. Bidang Kesehatan

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, termasuk masa pandemi COVID-19, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya layanan kesehatan dasar bagi bayi dan balita;
- b. Belum optimalnya layanan kesehatan dasar bagi ibu;
- c. Belum optimalnya pengendalian dan penanganan penyakit menular dan tidak menular;
- d. Belum optimalnya layanan Keluarga Berencana dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

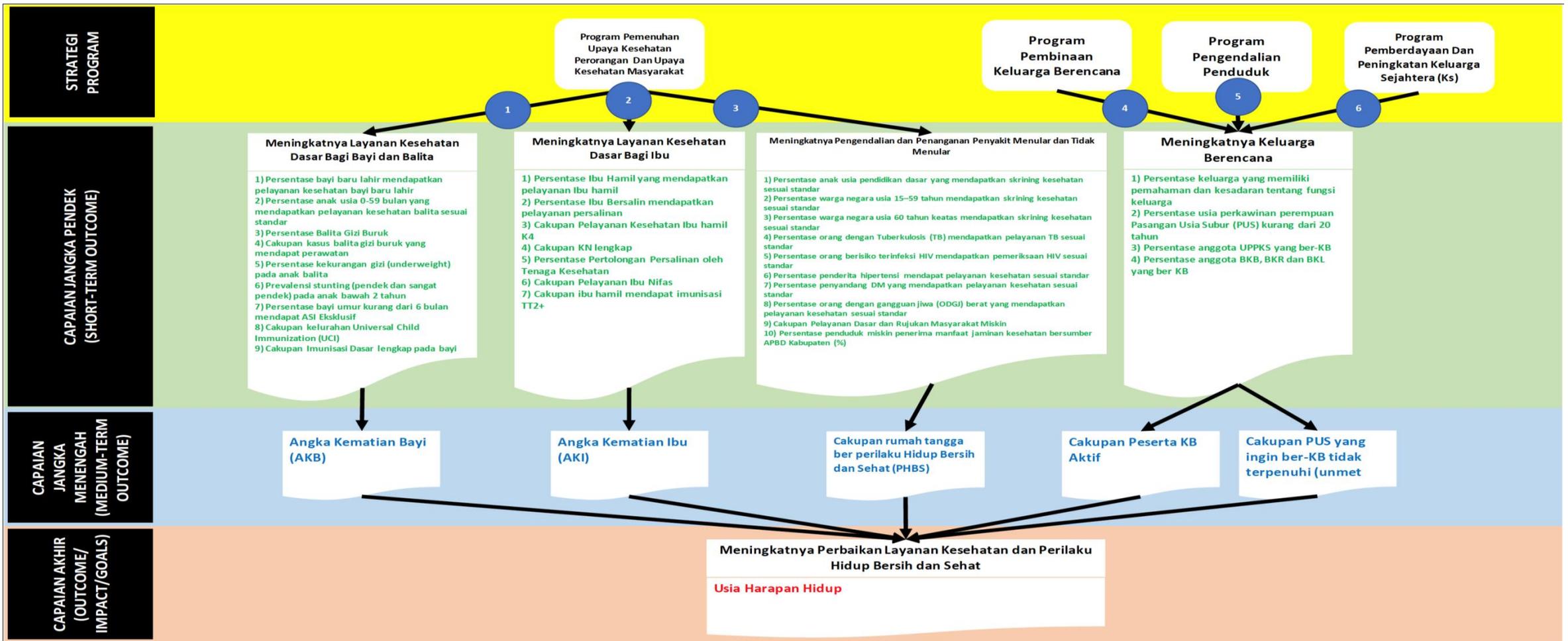
Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan, yaitu “Meningkatnya Perbaikan Layanan Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat” dengan indikator Usia Harapan Hidup. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2024.

**Tabel 4.14 Sasaran Akhir Bidang Kesehatan
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-
2026**

No	Sasaran Akhir (outcome/ impact/goals)	Capaian	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Perbaikan Layanan Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
1	Usia Harapan Hidup	73,69	73,86	74,04	74,48	74,73	75,00	75,30

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan didukung oleh Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kedua perangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals) melalui 4 Program Prioritas. Berikut Theory of Change (ToC) Bidang Kesehatan:

Gambar 4.29 Theory of Change (ToC) Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pekalongan



4 program prioritas penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals), yaitu:

a) Dinas Kesehatan, Program yang dilaksanakan oleh Kesehatan dalam rangka mendukung terhadap capaian ultimate goals adalah :

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Bayi dan Balita)

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dalam program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yaitu:

a) Pelayanan Kesehatan Bayi Terstandar dilaksanakan melalui sub kegiatan Kunjungan Neonatus Lengkap. Kunjungan neonatus adalah pelayanan kesehatan kepada neonatus sedikitnya 3 kali yaitu kunjungan neonatal I (KN1) pada 6 jam sampai dengan 48 jam setelah lahir, kunjungan neonatal II (KN2) pada hari ke 3 s/d 7 hari, kunjungan neonatal III (KN3) pada hari ke 8 – 28 hari. Pelayanan kesehatan diberikan oleh dokter/bidan/perawat, dapat dilaksanakan di puskesmas atau melalui kunjungan rumah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua Sub Kegiatan, yaitu:

a) KN Lengkap

Anggaran yang dialokasikan selama 4 tahun pada sub kegiatan ini mencapai Rp421.009.800 dengan sasaran sebanyak 285 desa.

b) Posyandu Balita dan Distribusi Kapsul Vitamin A

Anggaran yang dialokasikan selama 4 tahun pada sub kegiatan ini mencapai Rp 1.156.000.000 dengan sasaran sebanyak 285 desa.

b) Pelayanan Kesehatan Balita Terstandar. Pelayanan kesehatan balita terstandar dilaksanakan melalui kegiatan posyandu balita dan pemberian kapsul vitamin A. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi yang didalamnya terdapat pemberian kapsul vitamin A kepada balit. Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Perawatan Balita Gizi Buruk, PMT Pemulihan. Alokasi anggaran selama 4 tahun pada sub kegiatan ini mencapai Rp1.156.000.000.

c) Pelayanan Kesehatan Balita Gizi Buruk. Gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan. Gizi buruk disebabkan oleh permasalahan asupan gizi yang kurang dan penyakit infeksi serta permasalahan pelayanan kesehatan dasar yang tidak memadai. Permasalahan gizi buruk masih banyak terjadi di Kabupaten Pekalongan. Pelayanan terhadap balita gizi buruk dilaksanakan melalui 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Perawatan Balita Gizi Buruk melalui PMT Pemulihan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penanganan kuratif kepada balita yang ditemukan dan diidentifikasi sebagai suspect gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan pemulihan. Anggaran yang dialokasikan dalam penanganan gizi buruk sebesar Rp800.000.000 dalam kurun waktu 4 tahun dan menyasar kepada balita di 285 desa di Kabupaten Pekalongan.

d) Pelayanan Kesehatan Balita Underweight. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan skrining terhadap balita yang mengalami berat badan rendah atau underweight. Balita yang mengalami kondisi tersebut akan ditangani melalui pemberian makanan tambahan dan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan anak. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu:

(1) PMT Balita Underweight

Anggaran yang dialokasikan selama 4 tahun pada sub kegiatan ini mencapai Rp900.000.000 dengan sasaran sebanyak 285 desa.

(2) Penimbangan Berat Badan dan Pengukuran Tinggi Badan

Anggaran yang dialokasikan selama 4 tahun pada sub kegiatan ini mencapai Rp900.000.000 dengan sasaran sebanyak 285 desa.

- e) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, terdapat sub kegiatan yaitu Asi Eksklusif. Salah satu bentuk pelayanan terhadap kesehatan ibu dan bayi adalah dengan memastikan bahwa bayi mendapatkan haknya terhadap ASI Eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, dan air putih, serta tanpa tambahan makanan padat, seperti pisang, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan nasi tim, kecuali vitamin dan mineral dan obat. Kegiatan tentang pelayanan kesehatan ibu dan bayi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 500.000.000 dan menyasar kepada 285 desa yang ada di Kabupaten Pekalongan.

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Ibu)

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (ibu) memiliki 6 kegiatan dengan masing-masing terdapat 1 sub kegiatan, yaitu:

a) ANC Ibu hamil

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sub kegiatan ANC Ibu Hamil. Total anggaran pada Sub kegiatan tersebut selama 4 tahun adalah sebesar Rp350.000.000.

b) Puskesmas mampu persalinan 24 jam

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sub kegiatan Puskesmas mampu persalinan 24 jam. Total anggaran pada Sub kegiatan tersebut selama 4 tahun adalah sebesar Rp20.000.000.000.

c) Kunjungan rumah ibu hamil oleh petugas

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sub kegiatan P4K. Total anggaran pada Sub kegiatan tersebut selama 4 tahun adalah sebesar Rp475.000.000.

d) Kunjungan rumah

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sub kegiatan KN. Total anggaran pada Sub kegiatan tersebut selama 4 tahun adalah sebesar Rp466.000.000.

e) Puskesmas mampu persalinan 24 jam

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sub kegiatan Pelayanan persalinan. Total anggaran pada Sub kegiatan tersebut selama 4 tahun adalah sebesar Rp40.000.000.000.

f) Pelayanan kesehatan ibu nifas terstandar

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sub kegiatan, Kunjungan rumah dan KF 1 di Puskesmas. Total anggaran pada Sub kegiatan tersebut selama 4 tahun adalah sebesar Rp475.000.000.

3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan yang masing-masing terdapat 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Daring dan Kunjungan Rumah

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sub kegiatan, Penimbangan BB, pengukuran TB tes fisik kesehatan. Total anggaran pada Sub kegiatan tersebut selama 4 tahun adalah sebesar Rp450.000.000.

b) Kunjungan Rumah

Kegiatan Kunjungan Rumah dilaksanakan melalui sub kegiatan, Penimbangan, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan GDS. Total anggaran pada sub kegiatan tersebut selama 4 tahun adalah sebesar Rp400.000.000.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung terhadap capaian ultimate goals adalah :

1) Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka menyelenggarakan program tersebut, melaksanakan 2 kegiatan.

a) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

- (1) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga). Alokasi anggaran selama 4 tahun pada sub kegiatan ini adalah Rp1.208.420.000 yang dilaksanakan di 5 desa dari 5 kecamatan.
- (2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS). Alokasi anggaran selama 4 tahun pada sub kegiatan ini adalah Rp3.290.000.000 yang dilaksanakan di 3 desa dari 2 kecamatan.
- (3) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS). Alokasi anggaran selama 3 tahun (2022-2024) pada sub kegiatan ini adalah Rp330.000.000.
- (4) Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Tribina merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga. Pembinaan tersebut tidak hanya diarahkan pada penguatan masing-masing unsur dalam keluarga akan tetapi juga diarahkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui UPPKS. Alokasi anggaran selama 4 tahun (2021-2024) pada sub kegiatan ini adalah Rp3.277.500.000 yang dilaksanakan pada 9 desa dari 7 kecamatan.
- (5) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Alokasi anggaran selama 3 tahun (2022-2024) pada sub

kegiatan ini adalah Rp1.131.900.000 yang dilaksanakan pada 5 desa dari 5 kecamatan.

- (6) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Alokasi anggaran selama 3 tahun (2022-2024) pada sub kegiatan ini adalah Rp480.700.000 yang dilaksanakan pada 6 desa dari 5 kecamatan.
 - (7) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Alokasi anggaran selama 4 tahun (2021-2024) pada sub kegiatan ini adalah Rp1.520.000.000 yang dilaksanakan pada 6 desa dari 5 kecamatan.
 - (8) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga). Salah satu isu global yang saat ini sedang dihadapi adalah kasus Stunting. Stunting merupakan permasalahan tumbuh kembang anak yang menyebabkan perkembangan fisik dan pola pikir anak menjadi lambat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pola pengasuhan ibu baduta dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan stunting secara baik dan benar. Alokasi anggaran selama 4 tahun (2021-2024) pada sub kegiatan ini adalah Rp2.455.731.000.
- b) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui 4 sub kegiatan, yaitu:
- (1) Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Alokasi anggaran pada tahun 2022 pada sub kegiatan ini adalah Rp100.000.000 dengan sasaran sebanyak 1 Perbup.

- (2) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Alokasi anggaran selama 3 tahun (2022-2024) pada sub kegiatan ini adalah Rp150.000.000 dengan sasaran sebanyak 50 mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Alokasi anggaran selama 3 tahun (2022-2024) pada sub kegiatan ini adalah Rp150.000.000 dengan sasaran sebanyak 150 mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja. Alokasi anggaran selama 3 tahun (2022-2024) pada sub kegiatan ini adalah Rp150.000.000 dengan sasaran sebanyak 6 kali promosi/sosialisasi.

2) Pembinaan Keluarga Berencana

Terdapat 2 (dua) kegiatan untuk melaksanakan program Pembinaan Keluarga Berencana, yang mana terdapat masing-masing 1 (satu) sub kegiatan pada masing-masing kegiatan tersebut.

- a) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), yang dilaksanakan di 285 Desa dari 19 kecamatan dengan total anggaran selama 4 tahun (2021-2024) sebesar Rp429.000.000.000.
- b) pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Penguatan peranserta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, yang dilaksanakan di 285 Desa dari 19

kecamatan dengan total anggaran selama 4 tahun (2021-2024) sebesar Rp500.000.000.000.

**Tabel 4.15 Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan
Bidang Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026**

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026			
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
Meningkatnya Layanan Kesehatan Dasar Bagi Bayi dan Balita				Angka Kematian Bayi (AKB)			7,63		7,37			7,12		6,86					Dinas Kesehatan	
	Program Pemanuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			1) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			100		100	64.053.000		100	70.458.000	100	77.503.000	100	85.253.000	100	93.778.000	Dinas Kesehatan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu									
		Kegiatan pelayanan kesehatan bayi terstandar		Persentase bayi memperoleh pelayanan kesehatan terstandard			86,57		100	86.641.000	100	95.305.000	100	104.835.000	100	115.378.000	100	126	Dinas Kesehatan
				3) Persentase Balita Gizi Buruk			0,05		0,04		0,04		0,03						Dinas Kesehatan
				4) Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan			100		100		100		100						Dinas Kesehatan
		Kegiatan pelayanan kesehatan balita gizi buruk		Persentase balita gizi buruk memperoleh pelayanan kesehatan	19 kec	285 desa	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000					Dinas Kesehatan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu											
			Perawatan balita gizi buruk, PMT Pemulihan	Jumlah balita gizi buruk dirawat di RS	19 kec	285 desa	38	200.000.000	30	200.000.000	20	200.000.000	10	200.000.000					Dinas Kesehatan
				1) Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita			4,5		4,2	430.200.000	4	400.000.000	3,5	350.000.000	3	300.000.000	2,9	250.000.000	Dinas Kesehatan
				2) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah 2 tahun			13,48		13	500.000.000	13	450.000.000	12	400.000.000	12	350.000.000	11	300.000.000	Dinas Kesehatan
				3) Persentase bayi umur kurang dari 6 bulan mendapat ASI			60		70	50.000.000	70	60.000.000	80	70.000.000	90	80.000.000	95	90.000.000	Dinas Kesehatan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
				Eksklusif															
				4) Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				5) Cakupan Imunisasi Dasar lengkap pada bayi			100		95,60%		95%		95%		95%		95%		Dinas Kesehatan
Meningkatnya Layanan Kesehatan Dasar Bagi Ibu				Angka Kematian Ibu (AKI)			44,33		36,27		28,21		20,15						Dinas Kesehatan
	Program Pemanuhan Upaya Keseha			1) Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan			100		100	60.000.000	100	66.000.000	100	15.575.000.000	100	72.600.000	100	79.860.000	Dinas Kesehatan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
	tan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Ibu hamil															
		Kegiatan ANC Ibu hamil		Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil terstandar	19 kec	285 desa	100		100	60.000.000	100	66.000.000	100	72.600.000	100	79.860.000	100	87.864.000	Dinas Kesehatan
			ANC Ibu hamil	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil terstandar	19 kec	285 desa	100		100	60.000.000	100	66.000.000	100	72.600.000	100	79.860.000	100	87.864.000	Dinas Kesehatan
				2) Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			100		100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	Dinas Kesehatan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		Kegiatan Puskesmas mampu persalinan 24 jam		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	19 kec	285 desa	100		100	4.00 0.00 0.00 0	Dinas Kesehatan								
			Puskesmas mampu persalinan 24 jam	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	19 kec	285 desa	100		100	4.00 0.00 0.00 0	Dinas Kesehatan								
			P4K	Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil	19 kec	285 desa	100	100.000.000	100	1.00 0.00 0.00 0	100	125.000.000	100	150.000.000					Dinas Kesehatan
				1) Cakupan KN lengkap			100		100				100						Dinas Kesehatan
		Kegiatan kunjungan rumah		Persentase pelayanan kesehatan bayi	19 kec	285 desa	100		100	64.0 53.0 00	100	70.4 58.0 00	100	77.5 03.0 00	100	85.2 53.0 00	100	93.7 78.0 00	Dinas Kesehatan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
			KN	Persentase pelayanan kesehatan bayi	19 kec	285 desa	100		100	64.0 53.0 00	100	70.4 58.0 00	100	77.5 03.0 00	100	85.2 53.0 00	100	93.7 78.0 00	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pengendalian dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular				Cakupan rumah tangga ber perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)			78%		80%	555.000.000	81%	582.750.000	82%	611.887.500	83%	642.481.875	84%	674.605.969	Dinas Kesehatan
	Program Pemanuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			1) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					100	65.000.000	100	69.000.000	100	72.555.000	100	76.420.000	100	78.660.000	Dinas Kesehatan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		Kegiatan daring dan kunjungan rumah		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan layanan kesehatan	19 kec				100	65.000.000	100	69.000.000	100	72.555.000	100	76.420.000	100	78.660.000	Dinas Kesehatan
			Penimbangan BB, pengukuran TB tes fisik kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan layanan kesehatan					100	65.000.000	100	69.000.000	100	72.555.000	100	76.420.000	100	78.660.000	Dinas Kesehatan
				1) Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			73,8		100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000	Dinas Kesehatan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
				2) Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			58,8		100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000	Dinas Kesehatan
				3) Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			88,7		100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000	Dinas Kesehatan
				4) Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100		100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000	Dinas Kesehatan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu											
Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana																			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA BERENCANA																		

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
	SEJAH TERA (KS)																		
			2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1) Tersedianya Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting	Tirto, Wonoringgo	Jeruk sari, Karangjampo, Wonorejo	10	180.000	10	190.000	10	200.000	10	210.000					

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah													Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu
			2.14.04. 2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Biaya operasional bagi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tirto, Sragi, Kedungwuni, Bojong, dan Buaran	Jeruk sari, Krasakengen, Salakbrojo, Sumurjombango, Watusalam, Coprayan			686	137.200	687	171.750	687	171.750					

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
			2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1) Terlaksananya Pameran UPPKS			1	10.000	1	20.000	1	225.000	1	25.000					

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
				2) Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kelembagaan Forum GenRe	Tirto, Sragi, Kedungwuni, Bojong, dan Buaran.	Jeruk sari, Krasakengen, Salakbrojo, Sumurjomblango, Watusalam, Coprayan	1	25.000	0	0	1	250.000	0	0					

4. Bidang Infrastruktur Dasar

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, termasuk masa pandemi COVID-19, sebagai berikut:

- a. Rendahnya akses rumah tangga terhadap sanitasi.
- b. Belum optimalnya layanan air minum bagi rumah tangga.
- c. Belum optimalnya pemenuhan rumah layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar, yaitu “Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman dan Livelihood” dengan indikator Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dan Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026.

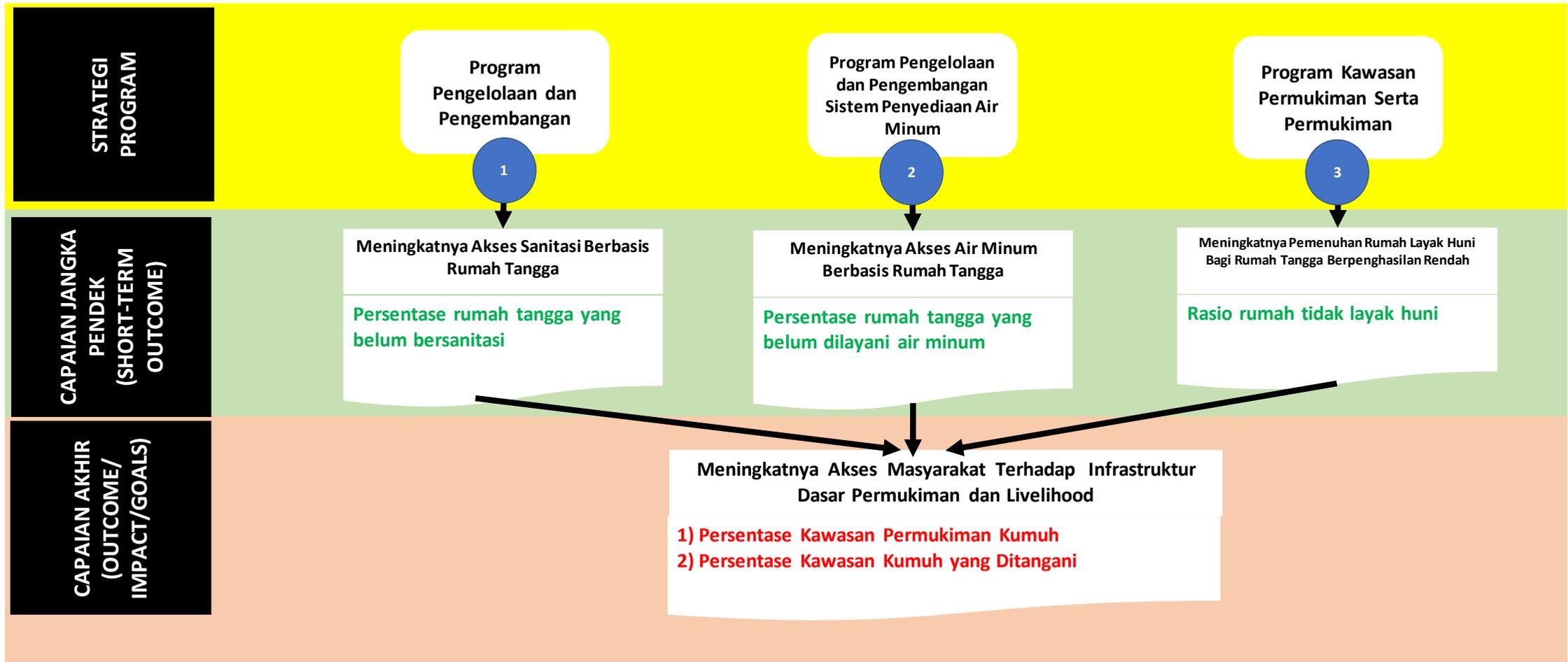
Tabel 4.16 Sasaran Akhir Bidang Infrastruktur Dasar Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Akhir (outcome/ impact/goals)	Capaian	Target						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman dan Livelihood								
1	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	8,81	28,94	30,32	31,7	33,08	34,46	35,84	
2	Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani	91,18	113,58	117,011	120,442	123,873	127,304	130,735	

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar didukung oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup mendukung

pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals) melalui 3 Program Prioritas. Berikut Theory of Change (ToC) Bidang Infrastruktur Dasar:

**Gambar 4.29 Theory of Change (ToC) Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
Bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Pekalongan**



3 program prioritas penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals), yaitu:

a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

1) Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan adalah program yang memiliki tujuan untuk mengembangkan perumahan menjadi lebih baik dan layak untuk dihuni. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mengembangkan perumahan adalah dengan melaksanakan program Pengembangan Perumahan. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh. Kegiatan penyadaran publik mengenai pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kawasan kumuh. Kegiatan ini dilakukan di Desa Tegaldowo dan Sijambe dengatotal anggaran selama empat tahun (2021-2024) sebesar Rp84.000.000.000.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Air limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Air limbah dapat dihasilkan dari limbah manusia yang berasal dari kotoran manusia, air yang digunakan untuk mencuci, limbah industri, sisa air irigasi yang tidak diseraptanaan, dll. Air-air limbah tersebut harus dikelola dengan baik dengan sistem air limbah. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mengelola dan mengembangkan sistem air limbah adalah dengan melaksanakan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penduduk yang terakses sanitasi yang layak. Kegiatan ini dilakukan di Desa Rengas, Desa Tangkil Kulon, Desa Gebangkerep,

Desa Sukorejo, Desa Wiroditan, dan Desa Ketanon Ageng, dengan total anggaran selama empat tahun (2021-2024), yaitu sebesar Rp4.000.000.000.

b) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dengan total anggaran selama empat tahun (2021-2024) sebesar Rp108.800.000.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah suatu sistem yang mengurus proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan sumber air baku (kualitas & kuantitas), transmisi air baku dari intake (sumber air baku) ke instalasi pengolahan air (IPA), teknologi instalasi Pengolahan Air/IPA yang efektif. Pengelolaan dan pengembangan SPAM dilakukan untuk menjamin dan menjaga ketersediaan air minum. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menjamin dan menjaga ketersediaan air minum adalah dengan melaksanakan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Pembangunan SPAM di kawasan pedesaan, yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah layanan sarana prasarana air minum yang layak, dengan total anggaran selama empat tahun (2021-2024).

4) Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukaan yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kawasan permukiman yang layak untuk dihuni adalah kawasan permukiman yang sehat, bersih, aman dan nyaman, tingkat kepadatan bangunan rendah. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mencegah berkembangnya permukiman kumuh adalah dengan melaksanakan program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan masing-masing 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha

(1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.

Perbaikan rumah tidak layak huni dilakukan di 19 Kecamatan dengan total anggaran selama empat tahun (2021-2024) sebesar Rp40.320.000.000.

b) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana/Relokasi Program Kabupaten/Kota

(1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah layak huni. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dilakukan di Pekuncen, Wonokerto Wetan, Sijambe, Tratebang, Semut dengan total anggaran selama empat tahun (2021-2024) sebesar Rp 10.150.000.000.

**Tabel 4.17 Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan
Bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026**

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah													Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu								
Meningkatnya Akses Sanitasi Berbasis Rumah Tangga				Cakupan pelayanan Sanitasi			91,85		95,81		99,77		100						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			Persentase rumah tangga yang belum bersanitasi			100	5.857.386.600	100	6.443.125.260	100	7.087.437.786	100	7.796.181.565	100	8.575.799.721	100	35.759.930.932	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah penduduk yang terakses sanitasi yang layak			19	5.857.386.600	23	6.443.125.260	30	7.087.437.786	37	7.796.181.565	44	8.575.799.721	153	35.759.930.932	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
			Pembangun	Jumlah		Rengas,	6	1.161.99	8	1.278.19	10	1.406.01	12	1.546.61	14	1.701.27	50	7.094.0	Dinas

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah													Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu
			an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	h penduduk yang terakses sanitasi yang layak		Tangkil Kulon, Gebangkerap, Sukorejo, Wiroditan, Ketanon Ageng		3.600		2.960		2.256		3.482		4.830		87.127	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah penduduk yang terakses sanitasi yang layak		Tanjungkulon, Sengare, Kalimojosari, Tenogo	13	4.695.393.000	15	5.164.932.300	20	5.681.425.530	25	6.249.568.083	30	6.874.524.891	103	28.665.843.804	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
				Jumlah penduduk yang terakses sanitasi yang layak		Sidosari, Wonoyoso, Sijambe, Randusari, Wuled, Pucung, Sidorejo, Bojong Lor, Karang Sari, Legokgunung, Kwagean, Getas, Rowokembu, Gondang, Wonorejo. Delegtukan g, Wiradesa, Kampil,		26.000.000.000		26.000.000.000		26.000.000.000		26.000.000.000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah													Perangkat Daerah		
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026			
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu									
						<i>Gumawang, Mayangan, Bener, Kemplong, Jrebengke mbang, Pagumengnmas, Karangdadap, Kebonrowo pucang, Kebonsari, Rogoselo, Ujung Negoro, Warulor, Jeruksari, Tegaldowo, Mulyorejo, Pecakaran, Api-api, Pesanggrahan, Wonokerto Wetan, Semut, Tratebang, Wonokerto Kulon</i>														
Meningkatnya Akses Air Minum Berbasis Rumah Tangga				Cakupan pelayanan air minum			93,74		97,13			100		100						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah													Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Persentase rumah tangga yang belum dilayani air minum			100	9.731.886.000	100	16.708.409.300	100	18.379.250.230	100	20.217.175.253	100	22.238.892.778	100	87.275.613.561	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota			Jumlah Layanan Sarana Prasarana Air Minum yang layak			41	9.731.886.000	45	16.708.409.300	50	18.379.250.230	55	20.217.175.253	60	22.238.892.778	251	87.275.613.561	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
			Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Layanan Sarana Prasarana Air Minum yang layak		Garungwiyoro, Trajumas, Karangpondang, Domiyang, Wonosido, Timbangsari, Mendolo, Songgodadi, Curugmuncar, Gumelem, Tlogohendro, Tlogopakis,	27	4.182.800.000	30	4.601.080.000	33	5.061.188.000	35	5.567.306.800	38	6.124.037.480	163	25.536.412.280	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah												Perangkat Daerah		
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025			Target 2026	
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu
						Kasimpar, Kayupuring, Talun, Krompeng, Pungangan, Wonosari, Sukosari, Sidomukti, Brengkolan g, Watupayung, Tengengkulon, Legokclile, Kemasan, Wangandowo, Kwagean, Sampih, Proto, Karangdowo, Tosaran, Karangjompoo, Warukidul, Petukangan, Kebonsari													
				Jumlah Layanan Sarana Prasarana Air Minum yang layak		Tanjungkulon, Wonosari, Gebangkerap, Kampil, Tangkil Kulon, Kalipancur		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
				Jumlah		Coprayan,		29.214.1		29.214.1		29.214.1		29.214.1					Dinas

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah												Perangkat Daerah								
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025			Target 2026							
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu						
				h Layanan Sarana Prasarana Air Minum yang layak		Sapugarut, Bligo, Pakumbulan, Watusalam, Paweden, Wiradesa, Pagumengnmas, Pegandon, Bugangan Kulu, Kalirejo, Rowocacing, Limbangan, Tunjungsi, Pododadi, Podosari, Krasakengen, Sijeruk, Lambanggelun, Kalimade, Windurojo, Sumublor, Sawangan, Lemahabang, Kaligawe, Sidosari, Luragung, Gembong, Kandangserang, Harjosari, Pajomblangan, Pait, Purworejo, Winduaji,		00.000		00.000		00.000		00.000											Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah													Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu
						<i>Bebel, Wringinagung, Kadipaten, Kampil, Bondansari, Pekuncen, Srinahan, Ujungnegoro, Karangjompoo</i>													
Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah				Rasio rumah tidak layak huni			6,45		5,36		4,28		3,19						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh			Rasio rumah tidak layak huni			6,45		5,36		4,28		3,19						Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10		Jumlah Rumah Layak Huni			150	2.625.000.000	170	6.025.000.000	250	47.875.000.000	150	5.474.000.000	160	47.235.000.000	170	47.448.500.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu											
		(Sepuluh) Ha																	an Hidup
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh	Jumlah Rumah Layak Huni	19 Kecamatan	Pantirejo	150	2.625.000.000	170	2.975.000.000	250	4.375.000.000	150	2.625.000.000	160	2.800.000.000	170	2.975.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
						Sawangan													
						Pekajangan													
						Limbangan													
						Mayangan													
						Kepatihan													
						Pekuncen													
						Bener													
						Kajen													
						Wonokerto Kulon													
						Tratebang													
						Sijambe													
						Lambangge lun													
						Tlogopakis													
						Yosorejo													
						Dororejo													
						Harjosari													
						Karangany ar													
						Mulyorejo													
						Jeruksari													
						Wonokerto													

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah													Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu
						Wetan													
						Kalipancur													
						Rogoselo													
						Kebonagung													
						Karanggodang													
						Karangsari													
						Sidomukti													
						Sidomukti													
						Kesesi													
						Bebel													
						Windurejo													
						Tengngwetan													
						Bulakpelem													
		Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban bencana/ Relokasi Program Kabupaten / Kota		Jumlah Rumah Layak Huni Korban Bencana			150.000.000		4.825.000.000		4.827.500.000		4.830.000.000		4.833.000.000		4.836.300.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Layak Huni Korban Bencana	Kecamatan dalam SK Kumuh	Pekuncen	Berapa target kinerja sub output nya? 100	150.000.000	Berapa target kinerja sub output nya? 100	900.000.000	Berapa target kinerja sub output nya? 100	900.000.000	Berapa target kinerja sub output nya? 100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
						Wonokerto													
						Wetan													
						Sjambe													

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah													Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu								
						<i>Tratebang</i>													
						<i>Semut</i>													
	Program Pengembangan Perumahan			Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani			87	1.358.727.000	87,14	2.494.599.700	87,29	1.894.059.670	87,43	2.758.465.637		3.819.312.201		4.101.243.421	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
		Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani			119	1.358.727.000	119	2.494.599.700	119	1.894.059.670	119	2.758.465.637	119	3.819.312.201	119	4.101.243.421	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
			<i>Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh</i>	<i>Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani</i>		<i>Tegaladowo</i>	119	1.358.727.000	119	1.494.599.700	119	1.644.059.670	119	1.808.465.637	119	1.989.312.201	119	2.188.243.421	<i>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup</i>
						<i>Sjambe</i>													

5. Bidang Ketahanan Pangan

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, termasuk masa pandemi COVID-19, sebagai berikut:

- a. Rendahnya konsumsi energi dan protein.
- b. Belum optimalnya pemenuhan keragaman konsumsi pangan.

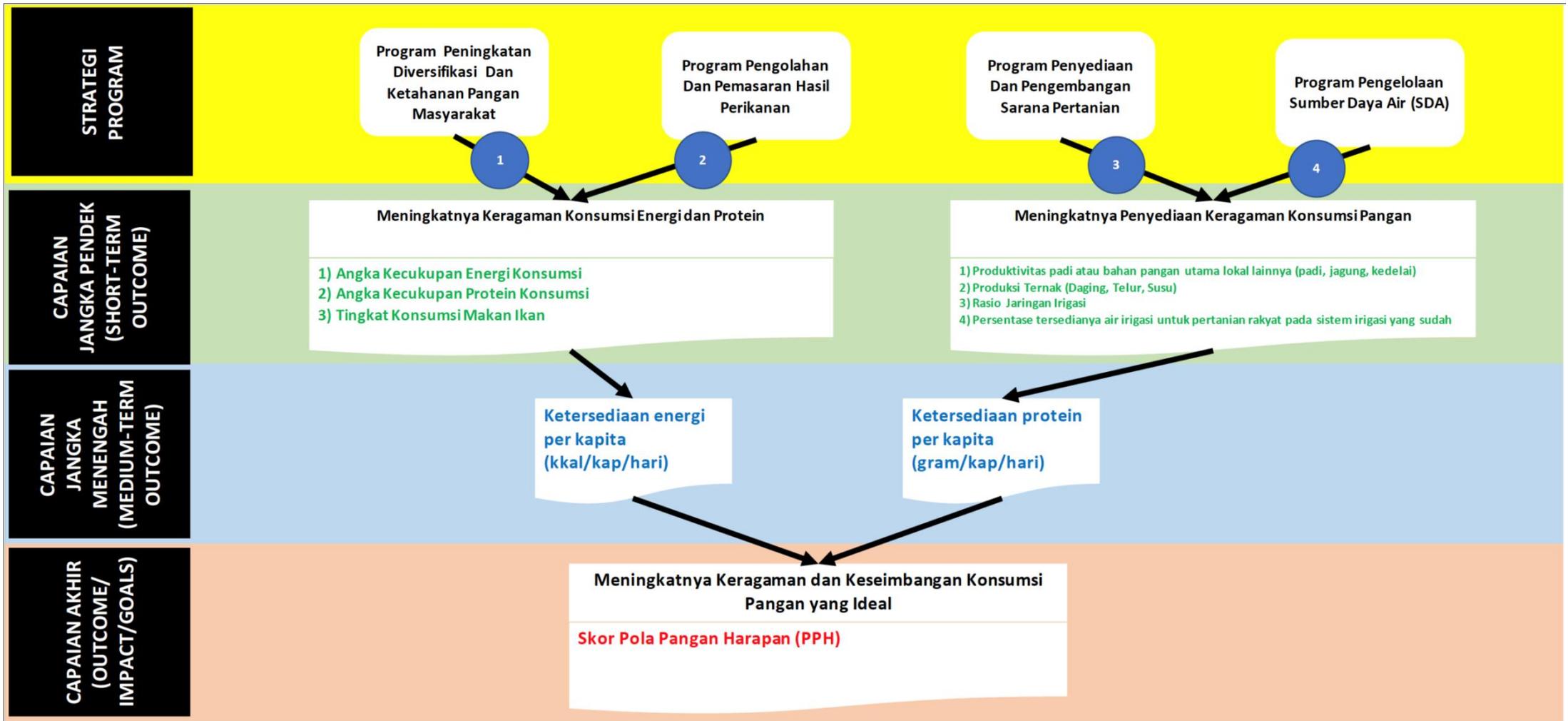
Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan, yaitu “Meningkatnya Keragaman dan Keseimbangan Konsumsi Pangan yang Ideal” dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026.

Tabel 4.18 Sasaran Akhir Bidang Ketahanan Pangan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Akhir (outcome/ impact/goals)	Capaian	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Meningkatnya Keragaman dan Keseimbangan Konsumsi Pangan yang Ideal							
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,6	86,79	87,56	88,33	89,1	89,86	90,63

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ketiga perangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals) melalui 4 Program Prioritas. Berikut Theory of Change (ToC) Bidang Ketahanan Pangan:

Gambar 4.30 Theory of Change (ToC) Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan



4 program prioritas penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals), yaitu:

a) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Sarana pertanian adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pertanian. Sarana pertanian terdiri atas bahan yang diantaranya benih, pupuk, pestisida, dll.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian adalah dengan melaksanakan program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dengan masing-masing 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a) Pengembangan Prasarana Pertanian

(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

Prasarana pendukung pertanian dinilai menjadi hal penting untuk turut mendukung pengembangan pertanian dilain sarana pertanian. Prasarana pendukung diantaranya adalah penguasaan dan pengelolaan air, sistem pembiayaan usaha, fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi, dll. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian ini dilakukan di Desa Nyamok, Desa Tanjungsari, Desa Karangrejo, Desa Karyomukti, dll. Total anggaran selama 4 tahun pada sub kegiatan ini sebesar Rp520.000.000.

b) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

(1) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan.

Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan Dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ini dilakukan di Desa Rejosari, Dadirejo, Sidorejo, Kadipaten, dan Karangjati. Total anggaran

selama 4 tahun pada sub kegiatan ini sebesar Rp260.000.000.

c) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

(1) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ini dilakukan di 8 (delapan) Desa dari 4 (empat) Kecamatan. Total anggaran selama 4 tahun pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.490.000.000

d) Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

(1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil.

Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil ini dilakukan di Desa Lambangelun, Desa Notogiwang, dan Desa Paninggaran. Total anggaran selama 4 tahun pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 710.000.000.

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Diversifikasi pangan adalah program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong untuk juga mengkonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi. Di Indonesia, diversifikasi pangan dimaksudkan agar masyarakat Indonesia tidak menganggap nasi sebagai satu-satunya makanan pokok yang tidak dapat digantikan oleh bahan pangan yang lain. Diversifikasi pangan merupakan salah satu cara untuk mencapai ketahanan pangan atau food security. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang untuk setiap saat dan setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya, baik secara fisik maupun ekonomi.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat adalah dengan melaksanakan program

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan masing-masing 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

(1) Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

Kegiatan ini dilakukan di Desa Kutorejo Kecamatan Kajen dan Desa Mulyorejo Kecamatan Kasesi. Total anggaran sub kegiatan tersebut selama empat tahun (2021-2024) sebesar Rp178.173.000.

b) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota

(1) Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota

Kegiatan ini dilakukan di Desa Kutorejo Kecamatan Kajen dan Desa Mulyorejo Kecamatan Kasesi. Total anggaran sub kegiatan tersebut selama empat tahun (2021-2024) sebesar Rp137.895.000.

3) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat adalah dengan melaksanakan program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Kegiatan tersebut kemudian dilaksanakan dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil. Total anggaran selama 3 (tiga) tahun (2022-2024) pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp86.500.000.

4) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat adalah dengan melaksanakan program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan masing-masing 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

(1) Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan ini dilakukan di 8 (delapan) Desa dari 4 (empat) Kecamatan. Total anggaran sub kegiatan tersebut selama empat tahun (2021-2024) sebesar Rp260.000.000.

b) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

(1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Kegiatan ini dilakukan di desa Lambangelun, Notogiwang, dan Panningaran, Kecamatan Panningaran. Total anggaran sub kegiatan tersebut selama 4(empat) tahun (2021-2024) sebesar Rp675.000.000.

b) Dinas Kelautan dan Perikanan

1) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dalam mengolah dan memasarkan hasil perikanan harus dilakukan sesuai dengan standar bagaimana produk hasil perikanan diolah dan dipasarkan dengan aman. Keamanan produk hasil perikanan mulai dari pabrik sampai ke tangan konsumen dipengaruhi oleh cara pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan tersebut.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menjamin keamanan dan kualitas hasil perikanan adalah dengan melaksanakan program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

(1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil

Kegiatan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro kecil. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp196.250.000.

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Pola pengelolaan sumber daya air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Tujuan pengelolaan sumber daya air adalah untuk keamanan dan ketahanan sumber daya air itu sendiri. Ketahanan air adalah ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas air untuk kehidupan, kesehatan, dan untuk keberlanjutan ekosistem itu sendiri.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menjamin ketahanan sumber daya air adalah dengan melaksanakan program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota, serta empat (empat) sub kegiatan, yaitu:

a) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

Peningkatan jaringan Irigasi permukaan adalah peningkatan jumlah jaringan untuk penerapan mendistribusikan air ke lahan pertanian dengan cara gravitasi (membiarkan air mengalir di permukaan lahan pertanian). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kajen dan Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini sebesar Rp2.238.816.400.

b) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Rehabilitasi jaringan Irigasi Permukaan adalah kegiatan rehab atau perbaikan jaringan untuk irigasi permukaan. Kegiatan ini dilakukan di Desa Brondong, Kec. Kesesi; Desa Bubak, Kec. Kandangserang; Desa Tambakroto, Kec. Kajen; Desa Pringsurat, Kec. Kajen, Desa Larikan, Kec. Doro. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini sebesar Rp15.317.950.000.

- c) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelola SDA kewenangan Kabupaten/Kota dilakukan di Kabupaten Pekalongan. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp800.000.000.

- d) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan ini dilakukan di 10 lokasi di Kabupaten Pekalongan. Total anggaran selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp1.982.660.300.

**Tabel 4.19 Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan
Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024**

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah								Perangkat Daerah		
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023			Target 2024	
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu
Meningkatnya Keragaman Konsumsi Energi dan Protein				Ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hari)			2.457,77		2.462,38		2.466,99		2.471,60		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Ketersediaan protein per kapita (gram/kap/hari)			71,38		71,89		72,41		72,92		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			Angka Kecukupan Energi Konsumsi			2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah										Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
				Angka Kecukupan Protein Konsumsi			57,00		57,00		57,00		57,00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Tercukupinya kebutuhan energi konsumsi perkapita			2100	40.673.000	2100	42.500.000	2100	45.000.000	2100	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Pemberdayaan Masyarakat	Tercukupinya kebutuhan energi	Kec. Kajen	Kutorejo	2100	40.673.000	2100	42.500.000	2100	45.000.000	2100	50.000.000	Dinas Ketahanan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah										Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
			<i>kat dalam Pengane karagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>konsumsi perkapita</i>											<i>Pangan dan Pertanian</i>
					<i>Kec. Kesesi</i>	<i>Mulyorejo</i>									
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Tercukupinya kebutuhan protein konsumsi perkapita			57	30.395.000	57	32.500.000	57	35.000.000	57	40.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			<i>Penguatan</i>	<i>Tercukupinya kebutuhan</i>	<i>Kec. Kajen</i>	<i>Kutorejo</i>	<i>57</i>	<i>30.395.0</i>	<i>57</i>	<i>32.500.000</i>	<i>57</i>	<i>35.000.000</i>	<i>57</i>	<i>40.000.000</i>	<i>Dinas Ketaha</i>

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah										Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
			<i>Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>protein konsumsi perkapita</i>				00								<i>nan Pangan dan Pertanian</i>
					<i>Kec. Kesesi</i>	<i>Mulyorejo</i>										
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan			Tingkat Konsumsi Makan Ikan			23,98		24,63		25,29		25,94			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha		Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan/Gemarikan (siswa SD)			0	0	150	22.500.000	200	30.000.000	200	34.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah										Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil													
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan/ Gemarikan (siswa SD)			0	0	150	22.500.000	200	30.000.000	200	34.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Penyediaan Keragaman				Ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hari)			2.457,77		2.462,38		2.466,99		2.471,60		Dinas Ketahanan Pangan dan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah									Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu
an Konsumsi Pangan															Pertanian
				Ketersediaan protein per kapita (gram/kap/hari)			71,38		71,89		72,41		72,92		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya:											Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				1) Padi			53,06		53,16		53,26		53,36		
				2) Jagung			47,31		47,48		47,65		47,82		
				3) Kedelai			11,03		11,36		11,70		12,05		
				Produksi Ternak:											Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah										Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
															ian
				1) Daging			9.35 7.56 7,00		9.49 7.93 1,00		9.638 .294, 00		9.778 .658, 00		
				2) Telur			5.73 0.82 1,00		5.75 9.47 5,00		5.788 .129, 00		5.816 .783, 00		
				3) Susu			357. 948, 00		358. 127, 00		358.3 06,00		358.4 13,00		
		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian		Meningkatnya produktivitas pada dan bahan pangan utama lainnya				50. 000 .00 0		60.000. 000		70.000. 000		80.000. 000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				1) Padi			53,0 6		53,1 6		53,26		53,36		
				2) Jagung			47,3 1		47,4 8		47,65		47,82		
				3) Kedelai			11,0 3		11,3 6		11,7		12,05		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasaran	1) Padi	Kec. Kajen	Nyamok	53,06	50.0 00.0 00	53,16	60.000. 000	53,26	70.000. 000	53,36	80.000. 000	Dinas Ketahanan Pangan dan

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah										Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
			a Pendukung Pertanian Lainnya												Pertanian
				2) Jagung	Kec. Kesesi	Tanjungsari	47,31		47,48		47,65		47,82		
				3) Kedelai	Kec. Sragi	Karangrejo	11,03		11,36		11,7		12,05		
					Kec. Bojonegara	Karyomukti									
						Ketanongeng									
						Sumub Lor									
						Sumub Kidul									
						Sumurjomblangbojo									
		Penerapan dan Penguasaan Persyaratan Tekni		Meningkatnya jumlah produksi hasil peternakan				150.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah									Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja		Pagu
		s Kesehatan Masyarakat Veteriner													
				1) Daging			9.357		9.497		9.638		9.778		
				2) Telur			5.731		5.755		5.788		5.816		
				3) Susu			357.948		358.127		358.306		358.413		
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1) Daging	Kec. Paninggaran	Lambanggelun	9.357.567	150.000.000	9.497.931	150.000.000	9.638.294	175.000.000	9.778.658	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				2) Telur	Kec. Paninggaran	Notogiwang	5.730.821		5.759.475		5.788.129		5.816.783		
				3) Susu	Kec. Paninggaran	Paninggaran	357.948		358.127		358.306		358.413		

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah										Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			Rasio Jaringan Irigasi			3,58		3,63		3,67		3,71		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya			84,33		86,00		92,36		98,73		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Prime													Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah										Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		r dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditangani	Kec. Kajen	Kajen	2 paket	2.238.816.400	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Kec.	Kalijoyo									

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah										Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
					Kajen										
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditangani	Kec. Kesesi	Brondong	5 paket	3.43 2.95 0.00 0	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Kec. Kandangsewang	Bubak									
					Kec. Kajen	Tambakroto									
					Kec. Kajen	Pringsura									
					Kec. Doro	Larikan									
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan					80	682.660.300	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah										Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan	Tersedianya informasi sda, inventarisasi sda dan papan larangan/himbauan			2 paket	200.000.000							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah										Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		
					Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
			Kabupaten/Kota												
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah titik lokasi jaringan irigasi tertangani rusak ringan			10 lokasi	482.660.300							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6. Bidang Sosial

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang sosial didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang, termasuk faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi supply/demand side, termasuk masa pandemi COVID-19, sebagai berikut:

- a. Rendahnya bantuan sosial bagi PMKS;
- b. Rendahnya fakir miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi;
- c. Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan.

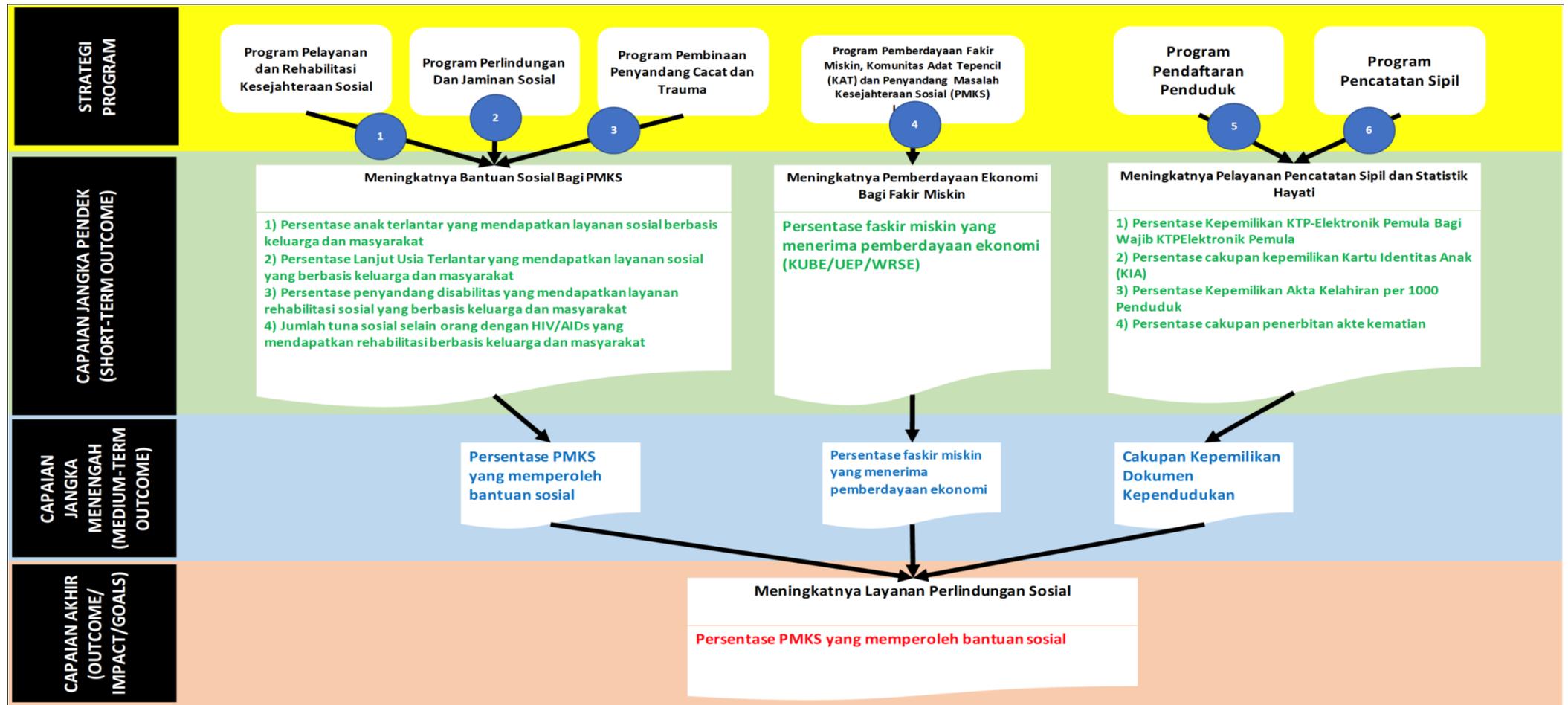
Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang sosial, yaitu “Meningkatnya Layanan Perlindungan Sosial” dengan indikator Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang sosial Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2024.

**Tabel 4.20 Sasaran Akhir Bidang Sosial
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun
2021-2024**

No	Sasaran Akhir (outcome/ impact/goals)	Capaian	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Layanan Perlindungan Sosial							
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	4,96	7,43	8,33	9,22	10,12	11,02	11,91

Indikasi program penanggulangan kemiskinan bidang sosial didukung oleh Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kedua peangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals) melalui 3 (tiga) Program Prioritas. Berikut Theory of Change (ToC) Bidang Sosial:

Gambar 4.31 Theory of Change (ToC) Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sosial Kabupaten Pekalongan



3 program prioritas penanggulangan kemiskinan bidang sosial dalam mendukung pencapaian capaian akhir (outcome/impact/goals), yaitu:

a. Dinas Sosial

1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin warganegaranya untuk memiliki kehidupan hidup dasar yang layak. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menghindari adanya guncangan dan kerentanan sosial adalah dengan melaksanakan program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:

a) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

(1) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini mencapai Rp7.024.750.000. Sub kegiatan ini adalah dilaksanakan di 19 desa dari 9 kecamatan, dengan sasaran penerima bantuan sebanyak 1.100 orang.

(2) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini mencapai Rp6.262.155.000. Sub kegiatan ini dilaksanakan di 9 desa dari 7 kecamatan, dengan sasaran penerima bantuan sebanyak 700 orang.

(3) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota

Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini mencapai

Rp3.400.000.000. Sub kegiatan ini dilaksanakan di 19 kecamatan.

(4) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini mencapai Rp2.600.000.000. Sub kegiatan ini dilaksanakan di 19 kecamatan di kabupaten Pekalongan.

b) Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar. Total alokasi anggaran yang dikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini mencapai Rp240.000.000, dan menysasar sebanyak 1000 anak terlantar dalam 4 tahun berjalannya kegiatan.

2) Program Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu tindakan pemulihan atau pemberian pelayan baik secara mental, fisik, maupun sosial terhadap pengguna narkoba, penyandang cacat, lanjut usia terlantar. Tindakan pemulihan diberikan kepada orang yang dilayani sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk membantunya pulih. Program tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:

a) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Asuhan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 5 sub kegiatan, yaitu:

(1) Penyediaan Permakanan

Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp187.840.000, dengan sasaran sebanyak 620 orang.

(2) Penyediaan Sandang

Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp50.808.000, dengan sasaran sebanyak 620 orang.

(3) Penyediaan Alat Bantu

Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp1.120.000.000, dengan sasaran sebanyak 800 orang.

(4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp40.000.000, dengan sasaran sebanyak 200 orang.

(5) Pemberian Layanan Rujukan

Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp80.000.000, dengan sasaran sebanyak 620 orang.

b) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:

(1) Penyediaan Permakanan

Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp319.152.000, dengan sasaran sebanyak 1.200 orang.

(2) Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp1.400.000.000, dengan sasaran sebanyak 1.200 orang.

(3) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp80.000.000, dengan sasaran sebanyak 1.200 orang.

3) Program Penanganan Bencana

Program tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Terdapat Sub Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp1.000.000.000, dengan sasaran pelaksanaan yaitu di 19 Kecamatan di kabupaten Pekalongan.

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Program Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Program ini akan dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sub kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan. Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini mencapai Rp1.108.986.000. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya jemput bola perekaman KTP-EI di 52 sekolah serta tersedianya blangko dan bahan penunjang pencetakan kartu identitas anak (KIA).

2) Program Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memasikan status perdata seseorang. Terdapat lima peristiwa hukum yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu: (1) kelahiran, (2) perkawinan, (3) perceraian, (4) kematian, (5) penggantian nama. Program ini akan dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Sipil dengan sub kegiatan Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil. Total anggaran yang dialokasikan selama empat tahun (2021-2024) untuk sub kegiatan ini mencapai Rp583.686.500. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya jemput bola pencatatan sipil di 56 desa 14 kecamatan.

**Tabel 4.20 Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan
Bidang Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026**

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu											
Meningkatnya Penanganan PMKS				Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)			5,24												Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																		Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota					0,32	2.347.088.600	0,30	4.556.608.000	0,37	4.787.288.346	0,45	5.041.036.066					Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah WRSE dan UEP yang mendapat layanan sosial	KEGIATAN UEP		12	709.262.600	12	2.780.000.000	12	2.858.018.886	12	2.943.839.660					Dinas Sosial
					1. Kec. Sragi	1. Ds. Tegalontar													Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026			
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu												
					2. Kec. Wiradesa	2. Kel. Gumawang														Dinas Sosial
					3. Kec. Wiradesa	3. Ds. Kamphil														Dinas Sosial
					4. Kec. Karanganyar	4. Ds. Karangpondan														Dinas Sosial
					5. Kec. Wonopringgo	5. Ds. Kwagean														Dinas Sosial
					6. Kec. Wonopringgo	6. Ds. Jetaklengkong														Dinas Sosial
					7. Kec. Kedu ngwuni	7. Ds. Watu sala														Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah		
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026				
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu													
						m															
					8. Kec. Buaran	8. Ds. Karangdowo															Dinas Sosial
					9. Kec. Buaran	9. Ds. Simbangwetan															Dinas Sosial
					KEGIATAN WRSE																Dinas Sosial
					1. Kec. Wiradesa	1. Kel. Kepatihan															Dinas Sosial
					2. Kec. Wonokerto	2. Ds. Bebel															Dinas Sosial
					3. Kec. Wonokerto	3. Ds. Wono kerton kulon															Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026			
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu												
					4. Kec. Wonokerto	4. Ds. Wonokerto wetan														Dinas Sosial
					5. Kec. Karanganyar	5. Ds. Karangandan														Dinas Sosial
					6. Kec. Tirto	6. Ds. Silirejo														Dinas Sosial
					7. Kec. Doro	7. Ds. Larikan														Dinas Sosial
					8. Kec. Doro	8. Ds. Bligorejo														Dinas Sosial
					9. Kec. Kedungwuni	9. Ds Karangdowo														Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026			
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
					10. Kec. Buaran	10.Ds. Simbangwetan														Dinas Sosial
					11. Kec. Buaran	11.Ds. Watu salam														Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KUBE yang mendapat layanan sosial	1. Kec. Wiradesa	1. Kel. Kepatihan	630	1.190.826.000	830	1.309.908.600	1030	1.440.899.460	1230	1.584.989.406						Dinas Sosial
					2. Kec. Bojong	2. Ds. Ketit														Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah		
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026				
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu													
						angkidul															
					3. Kec. Bojong	3. Ds. Ketitanglor															Dinas Sosial
					4. Kec. Bojong	4. Ds. Legoklile															Dinas Sosial
					5. Kec. Paninggaran	5. Ds. Botosari															Dinas Sosial
					6. Kec. Doro	6. Ds. Pungangan															Dinas Sosial
					7. Kec. Kedungwuni	7. Ds. Karangdowo															Dinas Sosial
					8. Kec. Wonoprin	8. Ds.															Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah		
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026				
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
					ggo	Legokgunung															
					9. Kec. Wonopringgo	9. Ds. Sampih															Dinas Sosial
					10. Kec. Karanganyar	10. Ds. Pedawang															Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Pendaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kecamatan yang melakukan update data, SLRT selama satu tahun	19 kec		19 kec	197.000.000	19 kec	216.700.000	19 kec	238.370.000	19 kec	262.207.000							Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
			Sub Kegiatan Pengelolan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kelayan PKH, santunan kematian, Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang mendapat bantuan sosial	19 kec		19 kec	250.000.000					Dinas Sosial						
		Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					43,29	35.172.500	43,29	46.689.750	86,58	59.358.725	100,00	73.294.597					Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
			Sub Kegiatan Pemanfaatan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah kelayan yang dipantau, monitoring dan evaluasi			60	35.172.500	120	38.689.750	180	42.558.725	240	46.814.597					Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																		Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		<i>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Asuhan</i>					28,00	494.000.200	11,46	670.100.220	16,83	739.310.242	22,21	815.441.266					<i>Dinas Sosial</i>
			Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	Jumlah kelayan yang mendapat layanan permak			150 orang	37.246.200	300 orang	40.970.820	450 orang	45.067.902	600 orang	49.574.692					<i>Dinas Sosial</i>

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026			
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
				anan di rumah singgah																
			Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah kelayan yang mendapat layanan sandang di rumah singgah			150 orang	12.700.000	30 orang	13.970.000	45 orang	525.624.000	846 orang	578.186.400						Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu			278 orang	434.400.000	44 orang	477.840.000	64 orang	280.000.000	200 orang	280.000.000						Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
			Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah kelayan yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga			30 orang	4.970.000	60 orang	5.467.000	90 orang	6.013.700	120 orang	6.615.070					Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah kelayan yang mendapat layanan rujukan			60 orang	4.684.000	160 orang	5.452.000	260 orang	6.297.640	360 orang	7.227.404					Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					1,70	730.384.500	3,13	803.422.950	4,48	921.165.245	5,83	1.028.681.769					Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	Jumlah kelayanan yang mendapat layanan permukiman			258 orang	635.900.000	516 orang	699.490.000	774 orang	769.439.000	1032 orang	846.382.900					Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	Jumlah kelayan yang mendapat layanan bimbingan sosial			450 orang	67.968.500	750 orang	74.765.350	1000 orang	82.241.885	1250 orang	90.466.073					Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah	
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026			
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		
			dan NAPZA																	
			Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah kelayan yang mendapat layanan pencarian / identifikasi keluarga			270 orang	26.516.000	540 orang	29.167.600	810 orang	32.084.360	1080 orang	35.292.796						Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCAN								100			100		100						Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah		
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026				
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu			
	A																				
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						167.424.200	78	200.909.240	118	237.742.584	158	278.259.262							Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna	Jumlah Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			38	167.424.200	76	184.166.720	114	202.583.392	152	222.841.731							Dinas Sosial

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
			Siaga Bencana																
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati				Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	5	15	92,33	462.487.000	93,68	462.487.000	94,29	472.273.500	95	472.273.500					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pendaftaran Penduduk			Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik Pemula Bagi Wajib KTP-Elektronik	8	24	100	230.417.000	100	230.417.000	100	253.458.700	100	253.458.700					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
				Pemula															
				Persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	5	30	100	299.435.000	100	299.435.000	100	269.491.500	100	185.491.500					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah KTP-elektronik yang tercatat	19	83	85	57.192.000	90	67.192.000	95	67.152.000	100	70.152.000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
				Jumlah kartu identitas anak (KIA) yang tercetak	8	87	70	56.929.000	85	56.929.000	90	60.929.000	100	61.925.000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya jemput bola perekaman KTP-El di 52 sekolah	11	35	52	146.677.000	52	142.677.000	52	136.677.000	52	146.655.000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Tersedianya blangko dan bahan penunjang penceta	10	80	85	145.350.000	90	145.350.000	95	125.350.000	100	120.250.000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
				kan kartu identitas anak (KIA)															
	Program Pencatatan Sipil			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	5	33	90	215.423.000	95	215.250.000	99	265.250.000	100	265.250.000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase cakupan penerbitan akte kematian	4	11	100	146.677.000	100	146.677.000	100	146.677.000	100	146.677.000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran Jangka Menengah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Inovasi Dalam Upaya Pemecahan Masalah														Perangkat Daerah
					Lokasi Prioritas		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		
					Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	4	20	60	150.150.000	62	150.150.000	62	154.150.000	65	155.250.000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Jumlah akta kematian yang diterbitkan	8	28	100	57.250.000	100	57.250.000	100	57.250.000	100	57.250.000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Terlaksananya jemput bola pencatatan sipil di 56 desa 14 kecamatan	9	32	56	146.677.000	56	144.765.000	56	146.567.500	56	145.677.000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

G. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah dan organisasi sosial di seluruh dunia makin menghadapi tekanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan jika pemerintah mengetahui apa kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraannya. Sistem pemantauan dan evaluasi yang berfungsi baik memberikan alat dan kemampuan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan tersebut.

Pemantauan dan evaluasi bertujuan menghasilkan informasi mengenai kemajuan dan kualitas pelaksanaan pelayanan dan program; mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaan pelayanan dan program; memberikan penilaian terhadap keberhasilan pelayanan dan program, dari segi output, manfaat maupun dampaknya; dan menjelaskan keberhasilan, kekurangan atau kegagalan pelayanan dan program.

Pemantauan program dan evaluasi program berbeda dalam setidaknya tiga hal pokok, yaitu fokus, pemanfaatan informasi, dan pelaksanaannya. Fokus pemantauan adalah pada proses, dengan membandingkan pelaksanaan dengan rencana/prosedur yang sudah ditentukan. Sedangkan, evaluasi meletakkan fokus pada keluaran, hasil dan dampak: mengacu pada tujuan, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program, dan menggunakan kelompok kontrol. Informasi hasil pemantauan digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan program. Sedangkan, informasi hasil evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan masa depan program. Pemantauan dilaksanakan oleh pengelola program atau pemangku kepentingan lain dari program yang bersangkutan. Sedangkan, evaluasi lebih sering dilakukan oleh lembaga di luar pengelola program, khususnya lembaga non-pemerintah.

Pemantauan menyediakan informasi tentang pelaksanaan suatu kebijakan atau program, yang diperlukan untuk tujuan pengendalian program. Informasi yang dimaksud berkaitan dengan pertanyaan pokok (1) apakah program dan tahapannya dilaksanakan sesuai disain dan prosedur; (2) apakah program atau tahapan program dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan; (3) apakah anggaran program terserap sesuai dengan rencana; dan (4) apa masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, baik yang telah diantisipasi maupun yang belum untuk selanjutnya dicoba diatasi.

Proses pemantauan akan menghasilkan informasi berupa analisis kebutuhan dan ketersediaan sumber daya; analisis

indikator kinerja kunci dan implementasi program. Sebagai dasar untuk mengukur kuantitas, kualitas dan penargetan keluaran (output). Informasi tersebut juga membantu pemerintah dalam memahami sebab keberhasilan, kelemahan maupun kegagalan program.

Pemantauan akan mendukung pengambilan kebijakan. Informasi yang didapatkan sebagai hasil pemantauan membantu pemerintah dengan menyediakan bukti-bukti yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan dan program, baik dari segi biaya maupun hasil/dampak. Pemantauan membantu pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan pada tingkat sektor, program dan proyek, dalam mengidentifikasi permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Manfaat lain yang tak kalah penting dari pemantauan adalah meningkatkan transparansi dan menerapkan prinsip akuntabilitas publik. Informasi hasil pemantauan menyediakan bukti dasar tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat

1. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi TKPK Kabupaten/Kota dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota bahwa salah satu fungsi TKPK Kabupaten/Kota adalah penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam hal efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi TKPK Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan. Sekretariat TKPK Provinsi dan Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.

Dalam hal pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota, disebutkan dalam

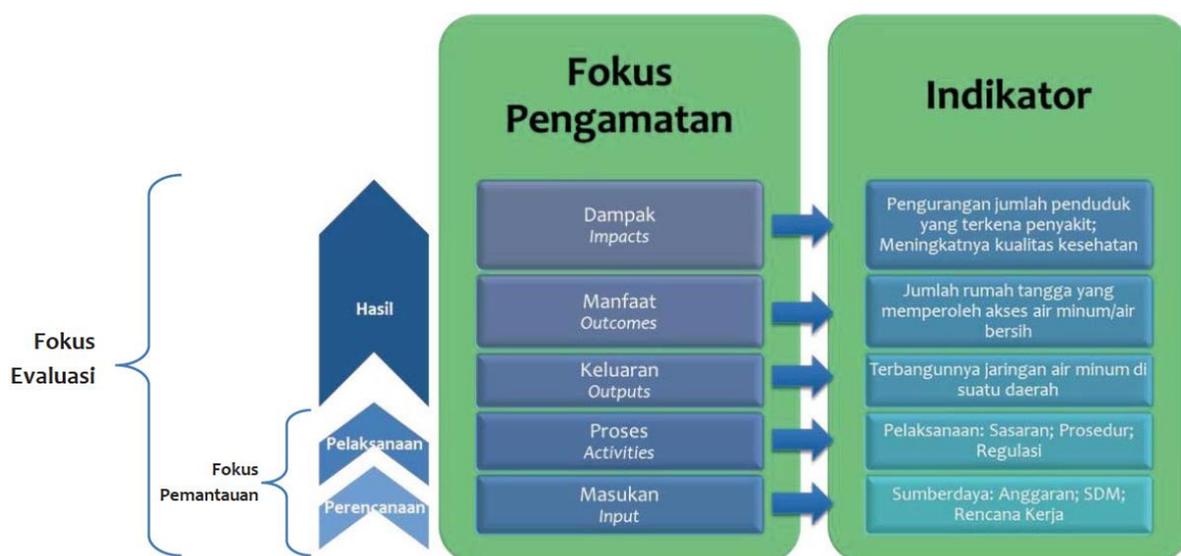
Pasal 24 dan Pasal 25 bahwa Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk memberi gambaran kondisi kemiskinan secara nyata dan kinerja kebijakan secara objektif. Laporan yang dihasilkan oleh berbagai pihak perlu diolah dan dikonsolidasikan agar komprehensif dan lengkap. Konsolidasi laporan hasil pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan juga dilakukan terhadap hasil laporan lembaga swadaya masyarakat, media massa, perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

2. Metode Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan dengan mengamati tahapan perencanaan, pelaksanaan dan hasil program. Dalam setiap tahapan, terdapat fokus pengamatan dengan indikator tertentu menurut jenis program. Seperti terlihat pada Gambar 8.1, dalam tahapan perencanaan, fokus pengamatan adalah masukan (input) program dengan indikator sumberdaya yang mencakup anggaran, sumberdaya manusia dan rencana kerja.

Gambar 4.31 Fokus dan Indikator Pemantauan



Dalam tahapan pelaksanaan, fokus pengamatan adalah proses (kegiatan) program, dengan indikator pelaksanaan seperti pencapaian sasaran, penerapan prosedur dan regulasi. Sedangkan

dalam tahap pasca- pelaksanaan, fokus pengamatan adalah hasil program, dengan indikator hasil keluaran atau output program.

Logika yang menghubungkan masing-masing fokus pengamatan, dari masukan (input) sampai dampak (impact) program dapat lebih mudah dibangun dengan menggunakan model pernyataan kondisi “If- Then”, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 8.2. Proses pemantauan dilakukan pada focus masukan, kegiatan dan hasil (seperti yang tercantum di dalam kotak). Kegiatan yang tercantum di luar kotak dalam gambar tersebut merupakan proses evaluasi. Rangkaian logika yang digunakan adalah sama, antara pemantauan dan evaluasi.

Gambar 4.32 Model Pernyataan Kondisi “If-Then”



Ada beberapa pertanyaan utama yang perlu diajukan baik kepada pelaksana program maupun penerima manfaatnya, untuk memperoleh informasi kunci yang dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Kepada Pelaksana Program

- 1) Apa tujuan utama program tersebut?
- 2) Kapan program tersebut dimulai, bagaimana progress dan kapan rencana program tersebut berakhir?
- 3) Berapa anggaran yang telah disediakan untuk mendukung program tersebut? Berapa yang terserap?
- 4) Apa sasaran dari program tersebut?
- 5) Berapa banyak kelompok / individu sasaran dari program tersebut?
- 6) Apa kriteria dari kelompok / individu sasaran dari program tersebut?
- 7) Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut?

b. Kepada Penerima Manfaat Program

- (1) Apa manfaat program?
- (2) Siapa saja yang berpartisipasi dalam program? Bagaimana partisipasi perempuan di dalamnya? Bagaimana partisipasi kelompok sasaran lainnya?
- (3) Bagaimana pendapat mereka tentang program tersebut?

Tolok ukur pelaksanaan pemantauan adalah rangkaian indikator kinerja program, meliputi target output dan outcome suatu program. Sedangkan tolok ukur evaluasi adalah indikator kinerja capaian program penanggulangan kemiskinan setiap tahun atau akhir dari suatu periode program. Selain itu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi :

- a. Obyek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan, sejak proses perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan;
- b. Sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan;
- c. Metode pemantauan dan evaluasi, ditentukan dan dilakukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja dengan semangat memperbaiki kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Secara umum, kegiatan pemantauan dan evaluasi ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah kebijakan dan program yang direncanakan dalam perangkat daerah dapat dilaksanakan/direalisasi dalam proses perencanaan dan penganggaran?
- b. Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang direncanakan?
- c. Apakah indikator kinerja program penanggulangan kemiskinan yang meliputi keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berhasil dilaksanakan? Jika berhasil faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya? dan apabila tidak berhasil, hal-hal apa saja yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut mengapa?
- d. Apakah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan daerah perlu dilanjutkan tanpa perbaikan, dilanjutkan dengan

perbaikan atau merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berbeda?

- e. Apakah hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan bahan umpan balik bagi peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan upaya penanggulangan kemiskinan untuk periode sekarang maupun yang akan datang?

Pada prinsipnya evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam program penanggulangan Kemiskinan. Penghitungan capaian kinerja memperhatikan karakteristik indikator, yaitu sebagai berikut.

- a. **Indikator Invers**, yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka capaian kinerja maka kondisinya semakin baik. Persentase capaian target untuk indikator positif dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. **Indikator Convers**, yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka capaian kinerja maka kondisinya justru semakin jelek.

Persentase capaian target untuk indikator negatif dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

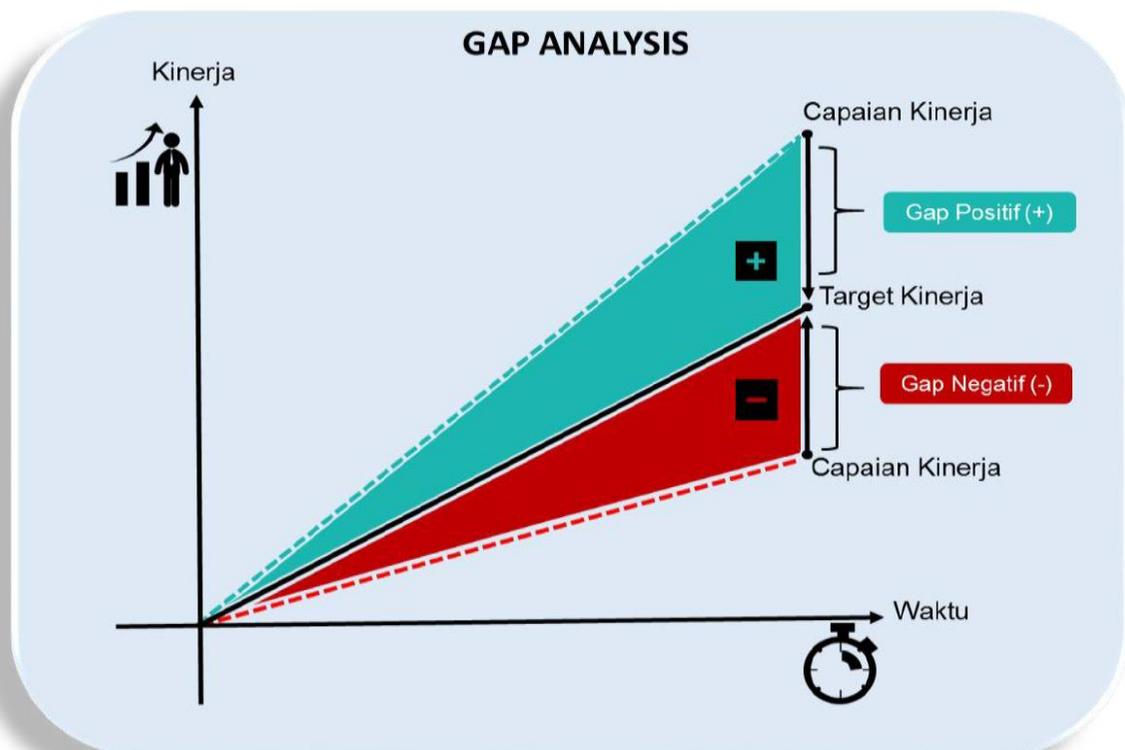
$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Teknik analisis yang digunakan dalam kegiatan evaluasi program penanggulangan kemiskinan, yaitu Gap Analysis. Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan, antara lain menggunakan aplikasi e-monev yang memantau pelaksanaan rencana pembangunan secara triwulanan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam early warning system.

Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan menggunakan metode Gap Analysis. Metode ini membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai). Gap dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda

dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Dengan kata lain Gap Analysis merupakan langkah untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya, sebagaimana tergambar berikut ini:

Gambar 4.33 Gap Analysis Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap analysis digunakan untuk membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target kinerja tahun 2018 pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam program penanggulangan Kemiskinan. Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). Gap bernilai (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya gap akan bernilai (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Metode Gap analysis atau “analisis kesenjangan” ini bermanfaat untuk :

- Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
- Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
- Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

Langkah-langkah utama yang perlu dilakukan dalam *Gap Analysis* sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
- 2) Melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
- 3) Reviu permasalahan/faktor keberhasilan dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan/faktor keberhasilan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
- 4) Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* negatif.
- 5) Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.

Gambar 4.34 Langkah-Langkah Pelaksanaan Gap Analysis



Evaluasi pengukuran kinerja dapat dilakukan terhadap keseluruhan dokumen perencanaan, karena sifatnya yang lebih sederhana yaitu hanya dengan membandingkan capaian dengan target sehingga tidak membutuhkan analisis yang rumit. Fokus evaluasi ditujukan untuk mengetahui hasil capaian kinerja

pembangunan, identifikasi permasalahan, dan tindak lanjut yang direkomendasikan.

Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan up to date. Mekanisme pengumpulan data biasanya menggunakan penelaahan dokumen (document review), data survei yang dilakukan sendiri maupun hasil survei yang dilakukan oleh lembaga lain seperti BPS, World Bank, UNDP dan sebagainya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, evaluasi pengukuran kinerja tidak hanya membandingkan capaian dan target namun juga perlu menjelaskan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan suatu kebijakan/program/kegiatan maupun menjelaskan permasalahan yang menyebabkan kebijakan/program/kegiatan tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Analisis ini sangat penting sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya serta pengambilan kebijakan atas pelaksanaan program/kegiatan, apakah program/kegiatan tersebut akan dilanjutkan, dihentikan atau dikembangkan?

Dalam rangka memudahkan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan program maka perlu dibuat notifikasi capaian kinerja berdasarkan capaian indikator masing-masing program. Teknik penilaian status capaian kinerja terhadap target akhir program penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 4.35 Tabel Kriteria Notifikasi Capaian Kinerja

Notifikasi	Warna	Kriteria Notifikasi	Kategori
	Hijau	Apabila target tercapai $\geq 95\%$	Sudah tercapai atau <i>On Track/ On Trend</i>
	Kuning	Apabila mencapai target $< 95\%$ dan $\geq 75\%$	Perlu kerja keras
	Merah	Apabila target mencapai $< 75\%$	Sulit tercapai

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN 2021-2026.

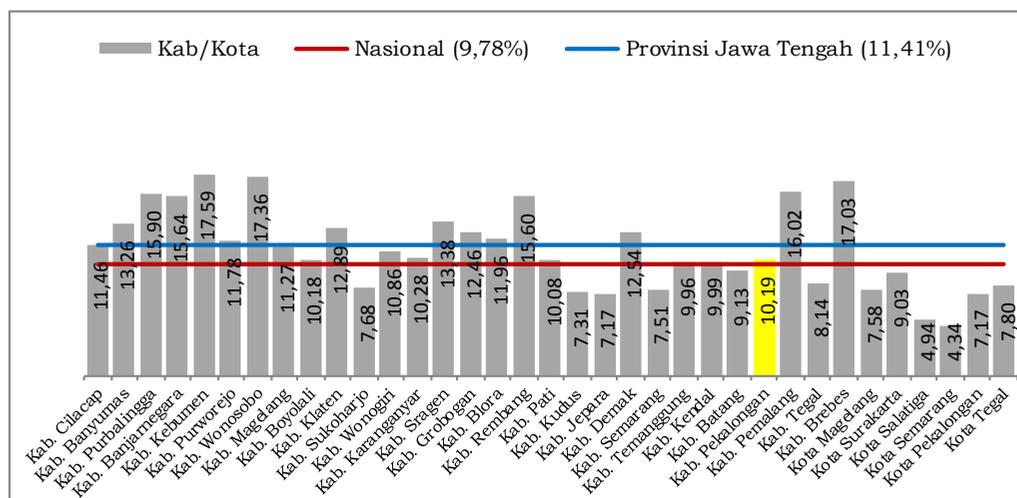
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Pekalongan. Permasalahan kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan masalah sosial dan kemanusiaan. Permasalahan kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia antara lain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan.

Selama ini upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai program pembangunan, baik skala nasional, regional, maupun daerah. Namun ketepatan program dan sasaran masih belum optimal. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS, kemiskinan Kabupaten Pekalongan sebesar 10,19% di tahun 2020. Angka tersebut menunjukkan Kabupaten Pekalongan berada pada zona kuning, yaitu di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (11,41%) dan di atas rata-rata Nasional (9,78%). Persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan menempati posisi ke-15 dibandingkan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2020



Sumber : BPS Tahun 2020, Data di Olah

Kemiskinan juga menjadi isu global. Hal ini ditunjukkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)* bahwa Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Untuk mencapai target tersebut diperlukan terobosan/inovasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi berbagai pihak.

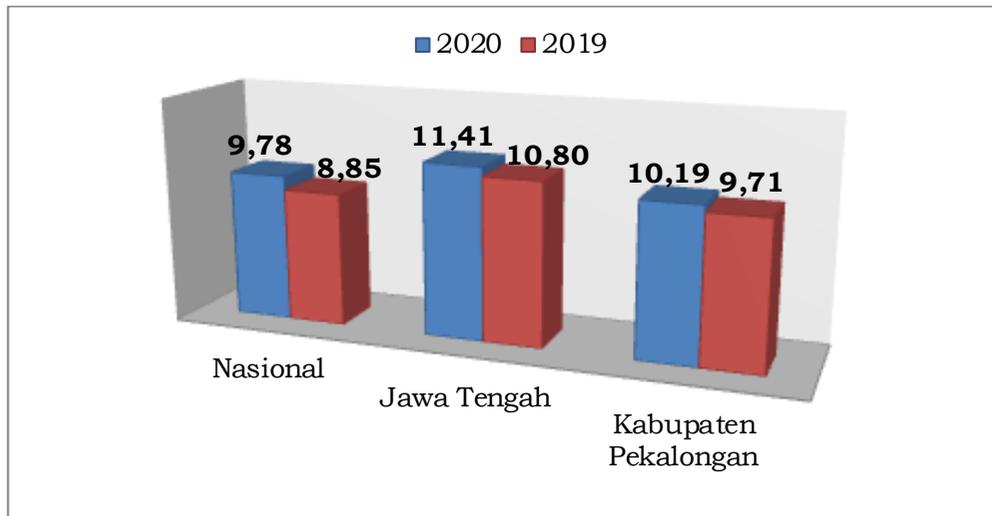
Saat ini seluruh dunia sedang mencurahkan energi dan sumberdayanya untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan tak terkecuali Kabupaten Pekalongan. Data tim gugus tugas Covid-19 Kabupaten Pekalongan pada bulan Oktober tahun 2020 mencapai 248 kasus terkonfirmasi positif dengan 12 orang meninggal dunia, 171 sembuh, 45 orang menjalani isolasi mandiri, dan 20 orang masih di rawat. ¹

Prospek pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat, tingkat kesenjangan melebar, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengakibatkan tingginya pekerja yang menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Tingginya pekerja ter-PHK tersebut, masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan keterbatasan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berpotensi menambah pengangguran.

Penyebaran wabah Covid-19 berdampak juga terhadap pencapaian tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan Nasional tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,93% di banding tahun 2019. Di Jawa Tengah, persentase penduduk miskin tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,61% dibanding tahun 2019 dan untuk Kabupaten Pekalongan persentase penduduk miskin tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,48% dibandingkan tahun 2019. Berikut ini data capaian tingkat kemiskinan sebagai berikut :

¹ <https://jateng.tribunnews.com/2020/10/16/update-kasus-covid-19-di-kabupaten-pekalongan-kamis-15-oktober-2020?page=1> Di akses tanggal 02 November 2021

Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Tahun 2020



Sumber : BPS Tahun 2020, Data di Olah

Pandemi Covid-19 menghantam seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi karena pendapatan masyarakat, utamanya masyarakat ekonomi kelas bawah yang menurun.² Melonjaknya angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh naiknya harga eceran komoditas pokok, seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir. Selain persoalan harga sembako yang naik dan memberikan kontribusi besar pada profil kemiskinan nasional, sektor pariwisata ikut menyumbang tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2020.³

Namun pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan melalui pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya diperluas dan indeks bantuan yang dinaikkan, antara lain :

1. Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditingkatkan indeks bantuannya sebesar 25 persen serta penyaluran dilakukan setiap bulan;
2. Program Sembako yang diperluas menjadi 20 juta KPM dengan indeks bantuan yang meningkat menjadi Rp200.000/KPM/bulan;
3. Bantuan sosial tunai selama 3 bulan bagi 9 juta KPM di luar wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

²<https://www.gatra.com/detail/news/484716/ekonomi/akibat-covid-angka-kemiskinan-indonesia-naik-2642-juta>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

³<https://www.republika.id/posts/8625/waspada-ledakan-kemiskinan>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

4. Bantuan sosial khusus bagi keluarga terdampak di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, bagi 1,9 juta KPM selama 3 bulan;
5. Bantuan pembebasan serta pengurangan tarif listrik 450 VA dan 900 VA bagi penduduk miskin dan rentan;
6. Pemanfaatan Dana Desa untuk mengurangi dampak Covid-19. .

Dampak dari Covid 19 tidak hanya merusak struktur kekuatan sumber dayanya dari sisi Kesehatan, namun juga berdampak pada struktur ekonomi dan Sosial. Jumlah penduduk miskin diperkirakan meningkat akibat merosotnya pertumbuhan ekonomi, padahal sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah berupaya melalui berbagai terobosan untuk menurunkan prosentase kemiskinan menuju single digit. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD 2018-2023 pada akhir periode ditargetkan menjadi sebesar 7,48% hingga 6,48%. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri menargetkan penurunan angka kemiskinan pada kondisi kinerja akhir RPJMD 2016-2021 pada tahun 2021 menjadi sebesar 7,10%. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera menyusun strategi pemulihan dampak pandemi covid-19 dengan melibatkan berbagai unsur stakeholders dan pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat, memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dimana masyarakat mampu memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang merupakan penjabaran pembangunan daerah dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Keberadaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
 22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 24. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 25. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;
 26. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;

27. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus;
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
34. Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah:

1. Sebagai referensi dalam memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama (*mainstreaming*) dalam penyusunan program kerja tahun 2021-2026 di Kabupaten Pekalongan.

2. Sebagai pedoman dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan peran perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.
3. Sebagai pedoman dalam menentukan target yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menanggulangi kemiskinan.

Tujuan dari disusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah:

1. Menggambarkan kondisi umum kemiskinan Kabupaten Pekalongan saat ini dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Pekalongan;
3. Menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

D. Sasaran

Sasaran disusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah:

1. Tersedianya analisa data dan informasi kondisi kemiskinan konsumsi dan non konsumsi dalam menentukan prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan.
2. Tersedianya strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah lima tahun kedepan.
3. Tersedianya panduan bagi para pemangku kepentingan dalam mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pekalongan meliputi :

1. Mendiskripsikan tentang kondisi kemiskinan konsumsi dan non konsumsi periode lima tahun terakhir;
2. Melakukan analisis dimensi kemiskinan dalam menentukan prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan;
3. Memanfaatkan data mikro untuk menentukan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
4. Melakukan tinjauan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Pekalongan dalam rangka penanggulangan kemiskinan;

5. Melakukan kajian anggaran perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penanggulangan kemiskinan;
6. Menyusun isu strategis dan rencana aksi daerah dalam penanggulangan kemiskinan; dan
7. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi dalam penanggulangan kemiskinan.

F. Sistematika

Sistematika dari dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah:

- BAB I. PENDAHULUAN, memuat mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kegiatan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pekalongan.
- BAB II. KONDISI UMUM DAERAH, memuat aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat meliputi fokus kesejahteraan dan pemertaan ekonomi termasuk didalamnya situasi Pandemi COVID-19 di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan, serta fokus kesejahteraan sosial.
- BAB III. PROFIL KEMISKINAN DAERAH, memuat mengenai kondisi kemiskinan konsumsi, dan upaya penanggulangan kemiskinan bagi penduduk terdampak COVID-19 di Kabupaten Pekalongan, serta kondisi kemiskinan non konsumsi Kabupaten Pekalongan meliputi Bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, Ketahanan Pangan dan Sosial, termasuk didalamnya faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi penyedia layanan (supply side) dan penerima manfaat (demand side), serta dampak pandemi COVID-19 tiap bidang.
- BAB IV. PRIORITAS PROGRAM, memuat tinjauan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan, analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan, isu strategis dan rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2024, serta sistem monitoring dan evaluasi.
- BAB V. LOKASI PRIORITAS, memuat analisis prioritas wilayah intervensi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, meliputi Bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, Ketahanan Pangan dan Sosial.

BAB VI. PENUTUP, memuat mengenai harapan dukungan dan komitmen Bappeda dan Litbang, serta perangkat daerah terkait dalam implementasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

A. Aspek Geografis dan Demografis

1. Kondisi Geografis

Letak Geografis Kabupaten Pekalongan berada antara 109° - $109^{\circ}78'$ Bujur Timur dan antara 6° - $7^{\circ}23'$ Lintang Selatan. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

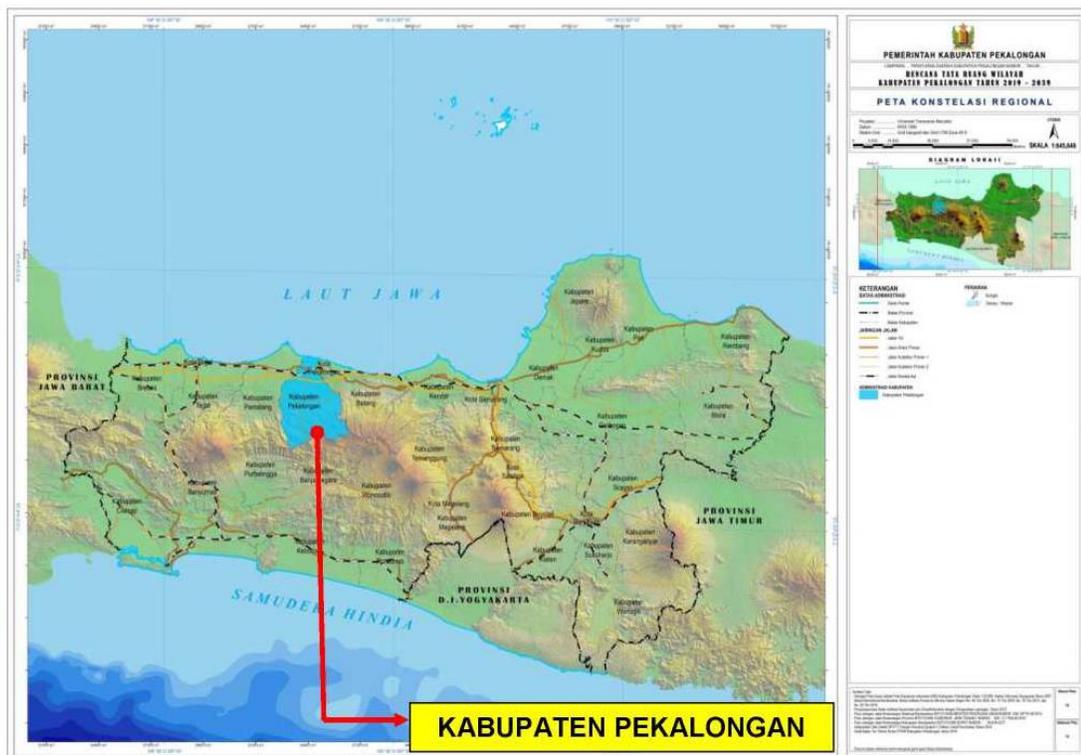
Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Pekalongan.

Sebelah Timur : Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan.

Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga.

Sebelah Barat : Kabupaten Pemasang.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Pekalongan



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2011 - 2031

Kondisi geografis yang berdekatan antar wilayah dimungkinkan memiliki kesamaan karakteristik dalam hal kemiskinan. Perbandingan jumlah dan persentase penduduk miskin antara Kabupaten Pekalongan dengan kab / kota sekitar pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten / Kota Sekitar Tahun 2020

No	Kab / Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
1	Kab. Pekalongan	10,19	91,90
2	Kab. Batang	9,13	70,60
3	Kab. Banjarnegara	15,64	144,90
4	Kab. Pemalang	7,17	22,20
5	Kota Pekalongan	15,90	209,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Kabupaten Pekalongan memiliki luas wilayah sebesar 836,15 Km² yang terbagi dalam 19 kecamatan, 272 desa dan 13 kelurahan. Dari 285 desa dan kelurahan 16,14% (46 desa/kelurahan) diantaranya memiliki tingkat kesejahteraan rendah (desa/kelurahan merah). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Desa & Kelurahan Per Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Dengan Tingkat Kesejahteraannya

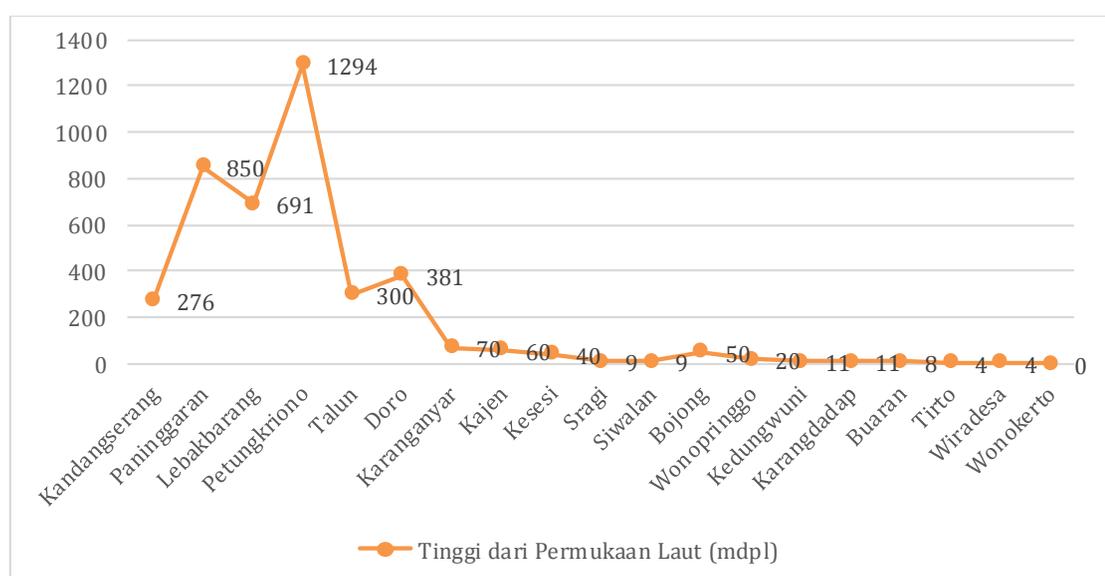
No	Kecamatan	Jumlah Desa & Kelurahan			Tingkat Kesejahteraan			% Desa / Kel. Merah
		Jumlah	Desa	Kel.	Merah	Kuning	Hijau	
1	Kandangserang	14	14	0	2	5	7	14,29
2	Paninggaran	15	15	0	4	7	4	26,67
3	Lebakbarang	11	11	0	2	4	5	18,18
4	Petungkriyono	9	9	0	2	1	6	22,22
5	Talun	10	10	0	1	2	7	10,00
6	Doro	14	14	0	3	5	6	21,43
7	Karanganyar	15	15	0	4	2	9	26,67
8	Kajen	25	24	1	1	6	18	4,00
9	Kesesi	23	23	0	2	1	20	8,70
10	Sragi	17	16	1	1	1	15	5,88
11	Siwalan	13	13	0	3	0	10	23,08
12	Bojong	22	22	0	1	4	17	4,55
13	Wonopringgo	14	14	0	2	3	9	14,29
14	Kedungwuni	19	16	3	3	1	15	15,79
15	Karangdadap	11	11	0	2	2	7	18,18
16	Buaran	10	7	3	4	3	3	40,00
17	Tirto	16	16	0	2	7	7	12,50
18	Wiradesa	16	11	5	1	1	14	6,25
19	Wonokerto	11	11	0	6	1	4	54,55
	JUMLAH	285	272	13	46	56	183	16,14

Sumber : DTKS Oktober 2020, diolah

2. Kondisi Topografi

Secara topografi wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, terdapat 73 desa/kelurahan (25,61%) yang berada di dataran tinggi dan sebanyak 212 desa/kelurahan (76,84%) yang lain berada di dataran rendah. Kondisi topografi di Kabupaten Pekalongan dapat ditunjukkan pada gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pekalongan



Sumber: Buku Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2020, BPS Kabupaten Pekalongan 2020

Tingkat kesejahteraan desa/kelurahan dapat juga dilihat berdasarkan topografi. di Kabupaten Pekalongan berdasarkan topografi. 14 desa/kelurahan merah berada di dataran tinggi dan 32 desa/kelurahan merah lainnya berada di dataran rendah. Tingkat kesejahteraan desa/kelurahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Tingkat Kesejahteraan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Topografi

Topografi	Total		Merah		Kuning		Hijau	
	Desa / Kel	%	Desa / Kel	%	Desa / Kel	%	Desa / Kel	%
Dataran Tinggi	73	25,61	14	4,91	24	8,42	35	12,28
Dataran Rendah	212	74,39	32	11,23	32	11,23	148	51,93
JUMLAH	285	100	46	16,14	56	19,65	183	64,21

Sumber: DTKS Oktober 2020, diolah

Kelerengan lahan di wilayah Kabupaten Pekalongan cukup bervariasi. Secara umum rona kelerengan di Pekalongan merupakan pegunungan dibagian selatan yang melandai ke arah utara (pantai). Keragaman kelerengan di Kabupaten Pekalongan bervariasi mulai dari 0-2 % yang terbentang dari bagian utara hingga bagian tengah, kelerengan 2-15 % berada di bagian tengah (Kecamatan Doro dan Talun), sedangkan kelerengan 15-40% terdapat di bagian selatan Kecamatan Talun, Doro, sebagian Kecamatan Kandangserang dan Paninggaran. Untuk wilayah dengan kelerengan lebih dari 40 % meliputi sebagian besar Kecamatan Lebakbarang, Petungkriyono, bagian utara dan selatan Kecamatan Paninggaran, bagian barat Kecamatan Kajen dan bagian selatan Kecamatan Kandangserang.

Kondisi topografi mempunyai keterkaitan terhadap kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 42 - 45 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 - 2040, terdapat 3 Kawasan Rawan Bencana yaitu Kawasan Rawan Banjir dan Genangan; Kawasan Rawan Tanah Longsor; dan Kawasan Bencana Lainnya. Daftar kecamatan yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana dapat ditunjukkan dalam tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Pekalongan

No	Rawan Banjir dan Genangan	Rawan Tanah Longsor		Rawan Bencana Lainnya
		Longsor Perbukitan	Longsor Sungai	
1	Bojong	Doro	Karanganyar	Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial
2	Buaran	Kajen	Kedungwuni	
3	Kajen	Karanganyar	Kesesi	
4	Karanganyar	Kandangserang	Sragi	
5	Karangdadap	Kesesi	Wonopringgo	
6	Kedungwuni	Lebakbarang		
7	Kesesi	Paninggaran		
8	Siwalan	Petungkriyono		
9	Sragi	Talun		
10	Tirto			
11	Wiradesa			
12	Wonokerto			
13	Wonopringgo			

Sumber : Perda Kab. Pekalongan No. 3 Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya keterkaitan antara topografi dan jenis bencana yang terjadi. Bencana banjir dan genangan terjadi di daerah pesisir serta dataran rendah. Sedangkan bencana longsor terjadi di daerah dataran tinggi, kecuali longsor sungai yang dialami oleh daerah yang dilalui aliran sungai walau didataran rendah. Untuk bencana lainnya (seperti COVID-19) dapat terjadi disemua wilayah Kabupaten Pekalongan tanpa mengenal topografi.

3. Kondisi Geologi

Kondisi geologi lingkungan di Kabupaten Pekalongan secara umum terbagi atas beberapa daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Daerah Endapan Aluvial

1) Aluvium, yang terletak pada ketinggian 0 - 25 m dpl

Daerah Aluvium meliputi Kecamatan Sragi, Wiradesa, Tirto, Buaran, Kedungwuni, Doro, Wonopringgo, Karanganyar, Kajen, Kesesi dan Bojong dengan luas keseluruhan 25.138,95 Ha atau sebesar 30,23 % dari luas keseluruhan. Kawasan ini cukup sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian namun harus didukung oleh pengairan atau irigasi yang memadai. Untuk mendukung potensi pertanian yang ada di kawasan ini maka kecamatan-kecamatan tersebut menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan.

Dukungan terhadap potensi pertanian pada kecamatan-kecamatan tersebut diatas akan membantu upaya peningkatan kesejahteraan penduduk miskin karena terdapat 20.142 penduduk desil 1 - 4 (11,06 %) yang bermata pencaharian di bidang pertanian. Adapun jumlah penduduk miskin pada daerah Aluvium dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Desil 1 - 4 Bermata Pencaharian di Sektor Pertanian Pada Daerah Aluvium

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Desil 1 - 4	Pertanian (Padi & Palawija)	
		Jiwa	Jiwa	%
1	Buaran	11.620	123	1,06
2	Bojong	20.064	2.438	12,15
3	Doro	9.487	1.571	16,56
4	Kajen	18.713	3.289	17,58

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Desil 1 - 4	Pertanian (Padi & Palawija)	
		Jiwa	Jiwa	%
5	Karanganyar	9.198	1.724	18,74
6	Kedungwuni	23.129	617	2,67
7	Kesesi	19.056	5.461	28,66
8	Sragi	19.246	3.496	18,16
9	Tirto	24.137	582	2,41
10	Wiradesa	14.590	451	3,09
11	Wonopringgo	12.819	390	3,04
	JUMLAH	182.059	20.142	11,06

Sumber : DTKS Oktober 2020, diolah

2) Aluvium Facies Gunung Api, terlelak pada ketinggian antara 25 – 500 dpl

Struktur geologi ini meliputi daerah - daerah di Kecamatan Petungkriyono, Talun, Kandangserang, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni; luas cakupan wilayahnya seluas 12.970,62 Ha atau sekitar 14,45 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Daerah ini merupakan lahan dengan kualitas yang baik bagi pengembangan pertanian karena memiliki sifat menyerap dan menampung air, namun perlu diperhatikan dalam pengembangannya harus tetap memperhatikan kelayakan/kesesuaian lahan.

Pengembangan pertanian pada daerah berstruktur Aluvium Facies Gunung Api akan mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan terdapat 19.258 (20,37 %) penduduk desil 1 – 4 yang berada pada kecamatan dengan struktur geologi jenis ini. Rincian jumlah penduduk desil 1 – 4 pada kecamatan berstruktur Aluvium Facies Gunung Api dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Desil 1 – 4 Bermata Pencaharian di Sektor Pertanian Pada Daerah Aluvium Facies Gunung Api

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Desil 1 - 4	Pertanian (Padi & Palawija)	
		Jiwa	Jiwa	%
1	Kajen	18.713	3.289	17,58
2	Kandangserang	12.323	6.417	52,07

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Desil 1 - 4	Pertanian (Padi & Palawija)	
3	Kedungwuni	23.129	617	2,67
4	Kesesi	19.056	5.461	28,66
5	Petungkriyono	3.059	2.132	69,70
6	Talun	5.446	952	17,48
7	Wonopringgo	12.819	390	3,04
	JUMLAH	94.545	19.258	20,37

Sumber : DTKS Oktober 2020, diolah

b. Daerah Hasil Gunung Api Kwarter Tua

Daerah ini terletak pada daerah dengan ketinggian sekitar 500 meter dpl atau lebih. Struktur geologi ini terdapat di Kecamatan Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono, Talun, Doro, Karanganyar, Kajen, Kesesi, dan Karanganyar; dengan luas cakupan wilayahnya sebesar 17.681,25 Ha atau sekitar 19,70 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Umumnya bersifat kurang subur, dengan kondisi topografi relatif kasar dimana pelapukan dari daerah ini mudah terbawa oleh hanyutan sungai yang melintasi kawasan tersebut yang berdampak pada penurunan tingkat kesuburan lahan. Karena sifatnya tersebut maka pengembangan di daerah ini diprioritaskan pada pengembangan kegiatan yang mengarah pada perlindungan tanah serta mengurangi dan mencegah kekritisian lahan dengan mengembangkannya sebagai kawasan lindung, hutan produksi terbatas atau hutan rakyat.

Pengembangan Daerah Hasil Gunung Api Kwarter Tua sebagai kawasan lindung, hutan produksi terbatas atau hutan rakyat dapat dijadikan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan karena pada daerah ini terdapat 1.560 (2,79 %) penduduk desil 1 – 4 yang memiliki mata pencaharian pada sektor kehutanan dan pertanian lainnya. Selengkapny data tersebut dapat ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Desil 1 – 4 Bermata Pencaharian di Sektor Kehutanan dan Pertanian Lain Pada Daerah Gunung Api Kwarter Tua

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Desil 1 - 4	Kehutanan & Pertanian Lain	
		Jiwa	Jiwa	%

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Desil 1 - 4	Kehutanan & Pertanian Lain	
1	Doro	7.431	493	6,63
2	Kajen	15.154	128	0,84
3	Karanganyar	7.277	202	2,78
4	Kesesi	13.496	87	0,64
5	Lebakbarang	1.743	100	5,74
6	Paninggaran	6.313	327	5,18
7	Petungkriyono	404	2	0,50
8	Talun	4.050	221	5,46
	JUMLAH	55.868	1.560	2,79

Sumber : DTKS Oktober 2020, diolah

c. Daerah Miosen Facies Sedimen

Terdapat pada daerah dengan ketinggian lebih dari 500 m dpl atau pun lebih dari 1000 m dpl, Pada umumnya merupakan daerah dengan potensi kehutanan dengan total luasan mencapai 18.850,00 Ha atau sekitar 20,26 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Terletak di Kecamatan Kesesi, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono, Karanganyar dan Kajen. Untuk mendukung potensi tersebut maka pengembangan diarahkan pada kegiatan perkebunan, hutan tanaman keras, hutan produksi dan hutan rakyat.

Kegiatan pengembangan perkebunan, hutan tanaman keras, hutan produksi dan hutan rakyat di kecamatan dengan struktur geologi Miosen Facies Sedimen dapat dijadikan upaya pengentasan kemiskinan karena pada kecamatan-kecamatan tersebut terdapat 1.337 orang (2,60 %) penduduk desil 1 – 4 yang bekerja pada sektor kehutanan dan pertanian lain serta 1.338 orang (2,60 %) yang bekerja pada sektor perkebunan. Rincian per kecamatan dari data tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Desil 1 – 4 Bermata Pencarian di Sektor Kehutanan & Pertanian Lain dan Perkebunan Pada Daerah Miosen Facies Sedimen

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Desil 1 - 4	Kehutanan & Pertanian Lain		Perkebunan	
			Jiwa	%	Jiwa	%
1	Kajen	7.431	493	6,63	216	2,91
2	Karanganyar	15.154	128	0,84	170	1,12

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Desil 1 - 4	Kehutanan & Pertanian Lain		Perkebunan	
3	Kesesi	7.277	202	2,78	29	0,40
4	Lebakbarang	13.496	87	0,64	266	1,97
5	Paninggaran	1.743	100	5,74	634	36,37
6	Petungkriyono	6.313	327	5,18	23	0,36
	JUMLAH	51.414	1.337	2,60	1.338	2,60

Sumber : DTKS Oktober 2020, diolah

4. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 - 2020. Pada tahun 2020 berdasarkan data BPS Kabupaten Pekalongan sebesar 968.821 jiwa, dengan laju pertumbuhan per tahun sebesar 7,92%. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan tahun 2020 BPS melaksanakan sensus penduduk sedangkan tahun sebelumnya hanya berdasarkan proyeksi. Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2020 sebesar 103,02 %. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Pekalongan lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 - 2020 (jiwa)

No	Variabel	Sat	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	880.092	886.197	891.892	897.711	968.821
	Laki - Laki	Jiwa	437.203	440.207	443.009	445.790	491.607
	Perempuan	Jiwa	442.889	445.990	448.883	451.921	477.214
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,70	0,69	0,64	0,65	7,92
3	Rasio Jenis Kelamin	%	98,72	98,70	98,69	98,64	103,02

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020, diolah

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dengan usia 15 -64 tahun sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 0 - 14 tahun yang ditambah penduduk berusia 65 tahun keatas. Rasio ketergantungan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 adalah sebesar 43,22 %. Hal ini berarti 100 orang penduduk Kabupaten Pekalongan usia

kerja mempunyai tanggungan 44 orang yang belum dan atau tidak produktif. Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan yang merupakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	40.953	38.804	79.757
5 – 9	39.779	37.941	77.720
10 – 14	39.664	37.035	76.699
15 – 19	40.217	38.179	78.396
20 – 24	43.445	40.996	84.441
25 – 29	44.922	41.519	86.441
30 – 34	42.620	39.178	81.798
35 – 39	38.487	36.226	74.713
40 – 44	34.671	34.127	68.798
45 – 49	30.759	30.577	61.336
50 – 54	27.092	27.939	55.031
55 – 59	23.815	24.095	47.910
60 – 64	18.536	19.035	37.571
65 – 69	12.959	13.909	26.868
70 – 74	7.752	8.814	16.566
75+	5.936	8.840	14.776
Jumlah	491.607	477.214	968.821
Bukan Angkatan Kerja	147.043	145.343	292.386
Angkatan Kerja	344.564	331.871	676.435
Rasio Ketergantungan			43,22

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020, diolah

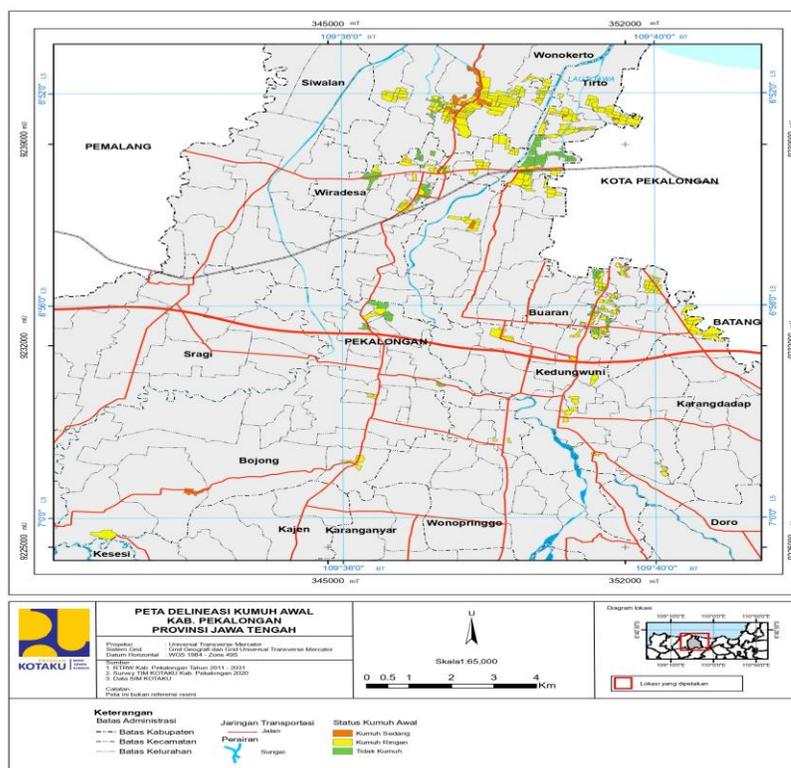
Kabupaten Pekalongan memiliki luas wilayah sebesar 836,15 Km². Dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sejumlah 968.821 jiwa maka diperoleh kepadatan penduduk sebesar 1.158,67 Jiwa/Km². Kecamatan Kedungwuni merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 100.796 jiwa pada tahun 2020, sedangkan untuk jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Lebakbarang dengan 11.116 jiwa. Namun demikian kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Buaran yaitu sebesar 4.928,93 Jiwa/Km² dengan jumlah penduduk 47.022 jiwa dan luas wilayah 9,54 Km², sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Petungkriyono yaitu sebesar 179,09 Jiwa/Km² dengan jumlah penduduk 13.179 jiwa dan luas wilayah 73,59 Km². Data kepadatan penduduk per kecamatan dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pekalongan Per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Km ² / Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Kandangserang	60,55	18.005	17.740	35.745	590,34
Paningsgaran	92,99	21.259	20.578	41.837	449,91
Lebakbarang	58,20	5.602	5.514	11.116	191,00
Petungkriyono	73,59	6.706	6.473	13.179	179,09
Talun	58,57	15.740	14.927	30.667	523,60
Doro	68,45	23.063	22.144	45.207	660,44
Karanganyar	63,48	22.903	22.185	45.088	710,27
Kajen	75,15	36.964	36.103	73.067	972,28
Kesesi	68,51	36.160	35.548	71.708	1.046,68
Sragi	32,40	32.816	32.635	65.451	2.020,09
Siwalan	25,91	20.726	20.721	41.447	1.599,65
Bojong	40,06	37.970	36.711	74.681	1.864,23
Wonopringgo	18,80	24.079	23.577	47.656	2.534,89
Kedungwuni	22,93	51.341	49.455	100.796	4.395,81
Karandangdap	21,00	21.209	20.046	41.255	1.964,52
Buaran	9,54	23.956	23.066	47.022	4.928,93
Tirto	17,39	38.175	36.512	74.687	4.294,82
Wiradesa	12,70	31.438	30.701	62.139	4.892,83
Wonokerto	15,91	23.495	22.578	46.073	2.895,85
JUMLAH	836,15	491.607	477.214	968.821	1.158,67

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020, diolah

Gambar 2.3 Peta Kawasan Kumuh Kab. Pekalongan



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2011 - 2031

Gambar 2.3 menunjukkan kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan yang tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2031. Kepadatan penduduk yang tidak terkontrol dapat menjadi salah satu faktor penyebab pemukiman kumuh. Penanganan kumuh merupakan isu strategis yang tertuang dalam dokumen SDG's pada goals 11 yaitu pada tahun 2030 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh.

5. Kondisi Pandemi COVID-19

Saat ini pada tahun 2020, kejadian global yang luar biasa, yaitu Pandemi COVID-19 telah memicu serangkaian tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh negara-negara untuk menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 dan mengurangi kondisi terburuk akibat pandemi COVID-19, yaitu Kasus Kematian. Pada awal Maret 2020, coronavirus telah dikonfirmasi penyebarannya di Indonesia. Pada 11 Maret 2020, ketika jumlah kasus di seluruh dunia mencapai lebih dari 127.000 dan angka kematian telah melewati 4.700 orang, WHO menyatakan wabah global corona virus sebagai pandemi dan, pada bulan April 2020, pandemi telah menyebar ke semua provinsi di Indonesia.¹

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran virus Covid-19 antara lain dengan sosialisasi dan pendisiplinan adaptasi kebiasaan baru serta menerapkan sistem mikro zonasi di tiap-tiap desa. Sistem mikro zonasi desa ini merupakan sistem pengerucutan zona keamanan daerah yang bertujuan untuk menurunkan angka penyebaran virus Covid-19.² Usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan diapresiasi oleh Satgas Covid Pusat karena sampai dengan Desember 2020 kenaikan kasus Covid di Kabupaten Pekalongan masih berada di peringkat 5 terendah di Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu angka kesembuhan mencapai 78,78 % sehingga bisa dikatakan tingkat kesembuhan pasien Covid di Kabupaten Pekalongan cukup tinggi dan angka kematiannya berada di angka 4,24 % yang masuk dalam kategori rendah.³

¹ www.covid19.go.id dan <https://www.dw.com/en/coronavirus-timeline-of-the-global-spread-of-covid-19/g-52145412>

² <https://pekalongankab.go.id/index.php/berita-lokal/12099-tekan-angka-penyebaran-covid-19-pemkab-siap-terapkan-sistem-mikro-zonasi-di-kabupaten-pekalongan>

³ <https://pekalongankab.go.id/index.php/berita-lokal/12049-satgas-covid-pusat-apresiasi-pemkab>

⁴ BPS Susenas, diolah dengan analisis SEPAKAT Bappenas

Meski Kabupaten Pekalongan mendapatkan apresiasi terkait penanganan Covid, namun pandemi ini tetap memberikan dampak negatif, termasuk dalam bidang perekonomian. Angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan yang telah mencapai 9,71 % pada tahun 2019, kembali naik menjadi 10,19 % pada tahun 2020. Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pekalongan dari 4,43 % pada tahun 2019 menjadi 6,97 % di tahun 2020.⁴

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi atau *economic growth*, merupakan proses kenaikan output per kapita yang dimiliki suatu daerah dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi suatu daerah yang terjadi dalam periode tertentu atau akumulasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi juga di definisikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu.

Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan, termasuk Indonesia. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar -2,07 %, jauh dibawah pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 5,02 % pada tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga terjadi diwilayah Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Pekalongan. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07
Prov. Jawa Tengah	5,25	5,26	5,30	5,40	-2,65
Kab. Pekalongan	5,19	5,44	5,76	5,36	-1,89

Sumber : BPS 2020, diolah

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dialami Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebesar -1,89 %

merupakan yang paling parah jika dibandingkan dengan Kabupaten / Kota sekitar. Perlambatan yang paling ringan dialami oleh Kabupaten Pemalang yaitu sebesar -0,66 %. Perbandingan tersebut dapat disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 2.13 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten / Kota Sekitar Tahun 2016 – 2020

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Pekalongan	5,19	5,44	5,76	5,36	-1,89
Kab. Batang	5,03	5,55	5,72	5,39	-1,29
Kab. Banjarnegara	5,44	5,65	5,67	5,60	-1,32
Kab. Pemalang	5,43	5,61	5,69	5,80	-0,66
Kota Pekalongan	5,36	5,32	5,69	5,50	-1,87

Sumber : BPS 2020, diolah

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan dialami oleh hampir semua sektor. Sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 31,18 point dimana pada tahun 2019 mampu tumbuh 9,87 % namun pada tahun 2020 mengalami perlambatan menjadi -21,32 %. Namun ada sektor yang tetap mampu tumbuh walau pada masa pandemi ditahun 2020 yaitu sektor Informasi dan Komunikasi (3,00 point); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (5,23 point). Perbandingan laju pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Pekalongan antara tahun 2019 dan tahun 2020 dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14 Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dan Tahun 2020

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	Selisih
H	Transportasi dan Pergudangan	9,87	-21,32	-31,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,00	-1,49	-12,48
M,N	Jasa Perusahaan	10,33	-2,03	-12,36
B	Pertambangan dan Penggalian	9,01	-2,62	-11,63
P	Jasa Pendidikan	9,03	-2,19	-11,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,51	-2,26	-9,77
C	Industri Pengolahan	4,63	-3,91	-8,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,71	-2,05	-7,76
F	Konstruksi	4,56	-3,13	-7,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,94	2,76	-4,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	3,03	-1,12	-4,16

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	Selisih
	Jaminan Sosial Wajib			
L	Real Estat	4,24	0,52	-3,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	1,35	-1,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,23	4,17	-1,06
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,44	1,04	-0,40
J	Informasi dan Komunikasi	13,02	16,02	3,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,13	12,35	5,23
H	Transportasi dan Pergudangan	9,87	-	-31,18
			21,32	
	PDRB	5,36	-1,89	-7,24

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, diolah

b. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. Tahun dasar yang digunakan saat ini adalah tahun 2010.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Pekalongan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Ecer: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Kontruksi; dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Pekalongan. Pada tahun 2020 sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 7.010,93 milyar rupiah (31,07 %); sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 3.878,72 milyar rupiah (16,48 %); sektor Perdagangan Besar dan Ecer: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3.059,50 milyar rupiah (13,50 %); sedangkan sektor Konstruksi memberikan dukungan sebesar 1.546,62 milyar rupiah (6,96 %) dan sektor Jasa Pendidikan menyokong 1.509,30 milyar rupiah (6,65 %). Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.15 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian,	3.443,49	3.491,88	3.638,85	3.767,42	3.878,72

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
	Kehutanan dan Perikanan					
B	Pertambangan dan Penggalian	642,61	797,19	914,88	997,95	990,31
C	Industri Pengolahan	5.705,51	6.106,28	6.625,83	7.102,50	7.010,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,66	28,67	31,07	32,82	33,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,98	7,39	7,53	8,19	8,52
F	Konstruksi	1.148,00	1.314,98	1.488,51	1.589,76	1.546,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.442,29	2.636,68	2.856,93	3.086,29	3.059,50
H	Transportasi dan Pergudangan	441,99	481,79	499,83	556,44	450,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	946,28	1.020,69	1.111,35	1.212,68	1.197,71
J	Informasi dan Komunikasi	342,99	407,50	448,42	506,40	588,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	459,32	505,75	539,75	565,54	568,64
L	Real Estat	248,04	269,83	286,39	303,51	307,62
M,N	Jasa Perusahaan	53,08	59,40	67,21	76,02	76,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	615,93	651,71	689,07	717,23	722,21
P	Jasa Pendidikan	1.117,81	1.236,80	1.361,80	1.520,66	1.509,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	246,90	269,84	295,72	320,31	363,88
R,S,T,U	Jasa Lainnya	369,42	405,19	440,58	493,36	490,21
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		18.256,30	19.709,23	21.314,31	22.857,06	22.803,19

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, data diolah

Tabel 2.16 Distribusi PDRB Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,45	18,89	17,72	17,07	16,48
B	Pertambangan dan Penggalian	3,43	3,53	4,04	4,29	4,37
C	Industri Pengolahan	31,24	31,30	30,98	31,09	31,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,14	0,15	0,15	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	6,15	6,30	6,67	6,98	6,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,26	13,40	13,38	13,40	13,50
H	Transportasi dan Pergudangan	2,46	2,42	2,44	2,35	2,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,05	5,19	5,18	5,21	5,31
J	Informasi dan Komunikasi	1,87	1,88	2,07	2,10	2,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,46	2,52	2,57	2,53	2,47
L	Real Estat	1,35	1,36	1,37	1,34	1,33
M,N	Jasa Perusahaan	0,28	0,29	0,30	0,32	0,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,35	3,38	3,31	3,23	3,14
P	Jasa Pendidikan	6,18	6,13	6,28	6,39	6,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1,32	1,35	1,37	1,39	1,40

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
	Sosial					
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,97	2,03	2,06	2,07	2,16
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, data diolah

Seperti yang ditampilkan pada tabel 2.15, tahun 2016 agregasi ekonomi Kabupaten Pekalongan telah menembus level di atas 18,23 triliun rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2019 yang mencapai 22,86 triliun rupiah. Tapi pada tahun 2020 turun menjadi 22,80 triliun sebagai akibat terjadinya pandemi Covid-19.

Penghitungan PDRB selain menggunakan pendekatan produksi, masih ada 2 pendekatan yang lain yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Walaupun berbeda pendekatan tapi hasilnya tetap sama. Namun yang biasa disediakan oleh BPS adalah pendekatan produksi dan pendapatan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan hasil dari penghitungan pendekatan produksi. PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua jumlah produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor netto (ekspor dikurangi impor). PDRB menurut pendekatan pengeluaran juga penghitungannya dibagi 2 yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Berdasarkan PDRB dengan pendekatan pengeluaran dapat diketahui bahwa penggerak utama perekonomian Kabupaten Pekalongan adalah Konsumsi Rumah Tangga. Kontribusi jenis pengeluaran ini pada tahun 2020 sebesar 17.294,59 milyar rupiah (75,78 %). Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berkontribusi sebesar 1.791,44 milyar rupiah (8,21 %). Nilai impor Kabupaten Pekalongan lebih besar dibanding nilai eksportnya. Pada tahun 2020 selisih nilainya mencapai -2.317,38 milyar rupiah (-12,03%). Data selengkapnya dapat ditunjukkan melalui tabel berikut.

**Tabel 2.17 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)**

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	14.447,97	15.432,33	16.323,15	17.322,22	17.294,59
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	290,56	311,66	346,57	393,33	390,40
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.659,47	1.715,31	1.797,04	1.877,49	1.791,44
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.912,45	4.466,79	5.174,33	5.621,64	5.237,97
Perubahan Inventori	251,12	276,08	374,41	391,11	406,18
Net Ekspor	-2.305,29	-2.492,94	-2.701,19	-2.748,73	-2.317,38
PDRB	18.256,30	19.709,23	21.314,31	22.857,06	22.803,19

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, data diolah

**Tabel 2.18 Distribusi PDRB Kabupaten Pekalongan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (%)**

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	81,74	79,14	78,30	76,58	75,78
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,64	1,59	1,58	1,63	1,72
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,59	9,09	8,70	8,43	8,21
Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,09	21,43	22,66	24,28	24,59
Perubahan Inventori	2,09	1,38	1,40	1,76	1,71
Net Ekspor	-16,14	-12,63	-12,65	-12,67	-12,03
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, data diolah

Semua jenis pengeluaran mengalami penurunan pada tahun 2020 kecuali Perubahan Inventori yang meningkat sebesar 3,85 % dari tahun 2019. Perubahan Inventori adalah jenis pengeluaran yang menggambarkan bagian investasi yang berbentuk barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku dan bahan penolong. Peningkatan jenis pengeluaran ini terjadi dengan beberapa kemungkinan antara lain karena kelesuan pasar sehingga barang-barang tersebut diatas belum masuk dalam proses produksi dan terserap pasar. Bisa juga ada karena pada akhir periode para produsen mulai bersiap untuk

menggenjot produksi untuk mengantisipasi perkiraan pasar yang mulai bergerak.

c. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan gambaran kemakmuran penduduk suatu daerah. Hal ini dikarenakan cara mengetahui PDRB Per Kapita adalah membagi PDRB daerah tersebut dengan jumlah penduduknya. Sedangkan sebagaimana diketahui bahwa PDRB adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan kegiatan ekonomi pada suatu wilayah pada suatu periode. Sama seperti PDRB sebagai dasar penghitungannya, PDRB Per Kapita juga terbagi menjadi 2 yaitu PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku dan PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan. PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku menggambarkan kemampuan ekonomi penduduk pada saat ini, sedangkan PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan kemampuan ekonomi penduduk tiap tahunnya karena menghilangkan faktor inflasi dalam penghitungannya.

PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan cenderung meningkat tiap tahunnya. Penurunan terjadi pada tahun 2020 sebagai akibat terjadinya pandemic COVID-19 yang juga memberikan dampak pada perekonomian sehingga PDRB mengalami perlambatan. Penurunan ini semakin besar dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk. PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebesar 23,54 juta rupiah per kapita lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai 25,46 juta rupiah per kapita. Jika dilihat dari pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan pada tahun 2020, Kabupaten Pekalongan mengalami kemerosotan yang cukup besar. PDRB Per Kapita pada tahun 2019 masih tumbuh sebesar 4,67 %, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -9,09 %. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Data / Informasi	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	Jiwa	880.092	886.197	891.892	897.711	968.821
PDRB Atas Harga Berlaku	Milyar Rupiah	18.256,30	19.709,23	21.314,31	22.857,06	22.803,19
PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku	Juta Rupiah Per Kapita	20,74	22,24	23,90	25,46	23,54
PDRB Atas	Milyar	13.923,67	14.681,15	15.526,84	16.358,37	16.049,53

Data / Informasi	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Harga Konstan	Rupiah					
PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan	Juta Rupiah Per Kapita	15,82	16,57	17,41	18,22	16,57
Pertumbuhan	%	4,46	4,71	5,09	4,67	-9,09

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, data diolah

d. Inflasi

Inflasi merupakan angka yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja belum bisa disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Inflasi di Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari 2016 – 2020 cenderung menurun. Angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,01. Inflasi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebesar 2,36. Angka ini lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah yang hanya 1,56 dan juga lebih tinggi dibanding nasional yang mencapai angka 1,68. Perkembangan selengkapnya dapat terlihat pada gambar berikut.

Tabel 2.20 Perbandingan Inflasi Antara Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68
Prov. Jawa Tengah	2,36	3,71	2,82	2,81	1,56
Kab. Pekalongan	2,86	4,01	2,83	2,8	2,36

Sumber : BPS 2020, data diolah

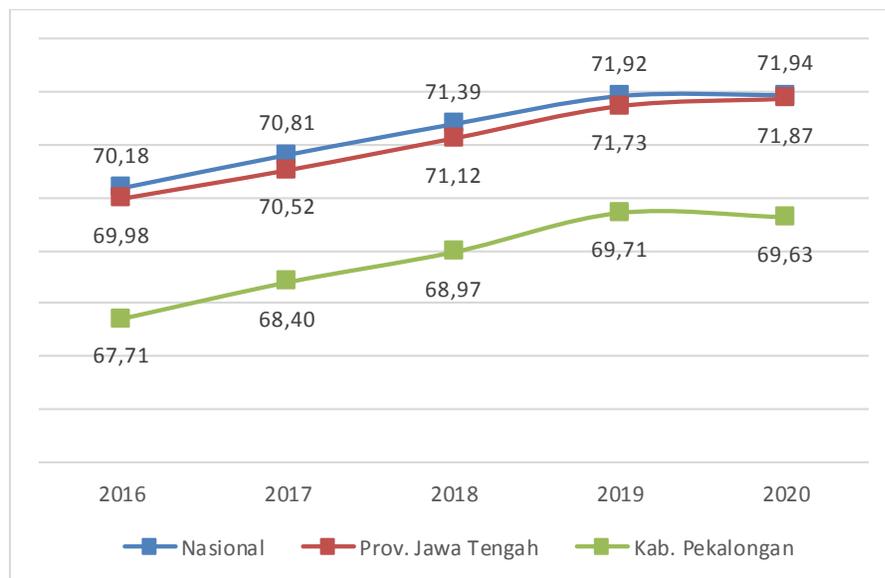
2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Pekalongan ditunjukkan dengan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dikarenakan IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu Umur Panjang dan Sehat; Pengetahuan; dan Standar Hidup Layak. Dimensi Umur Panjang dan Sehat diwakili oleh indikator Angka Harapan Hidup; dimensi Pengetahuan diukur menggunakan indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-

rata Lama Sekolah; sedangkan dimensi Standar Hidup Layak diukur dengan Pengeluaran Per Kapita.

Capaian IPM Kabupaten Pekalongan rentang tahun 2016 hingga 2019 semakin meningkat, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Capaian tahun 2020 sebesar 69,63 masih lebih rendah dibanding capaian tahun 2019 yang mencapai 69,71. Penurunan ini banyak dipengaruhi karena menurunnya indikator Pengeluaran Per Kapita yang pada tahun 2020 hanya sebesar 10,31 juta rupiah per kapita per tahun, lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai 10,51 juta rupiah per kapita per tahun. Sedangkan 3 indikator yang lainnya tetap mengalami peningkatan. Capaian IPM ditahun 2020 sebesar 69,63 menjadikan Kabupaten Pekalongan berada dibawah Jawa Tengah dan Nasional. Perbandingan capaian IPM antara Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat ditunjukkan pada grafik berikut.

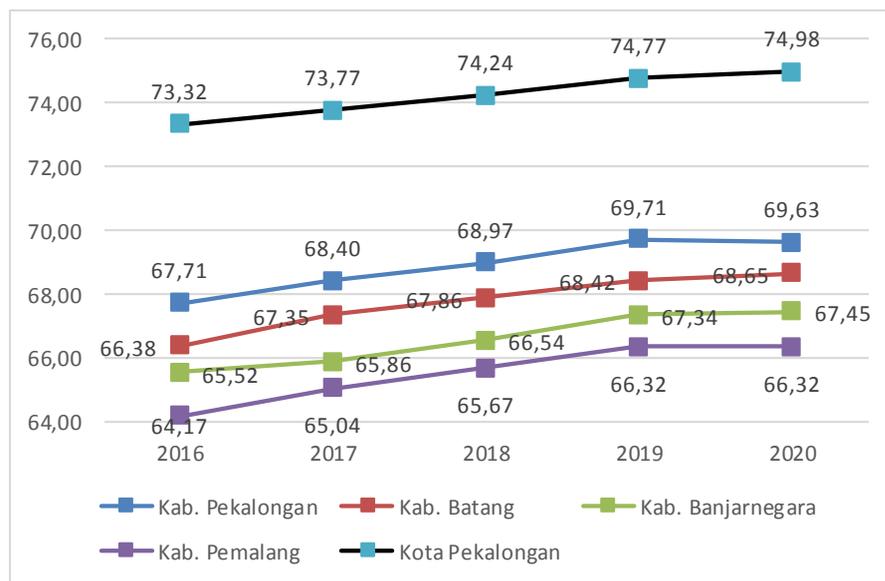
Gambar 2.4 Perbandingan Capaian IPM Antara Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS 2020, data diolah

Diantara kabupaten dan kota sekitar, hanya Kabupaten Pekalongan yang mengalami penurunan capaian IPM ditahun 2020. Namun demikian jika dibandingkan dengan capaian kabupaten dan kota tersebut, capaian Kabupaten Pekalongan masih berada diurutan kedua setelah Kota Pekalongan. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.5 Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten / Kota Sekitar Tahun 2016 – 2020



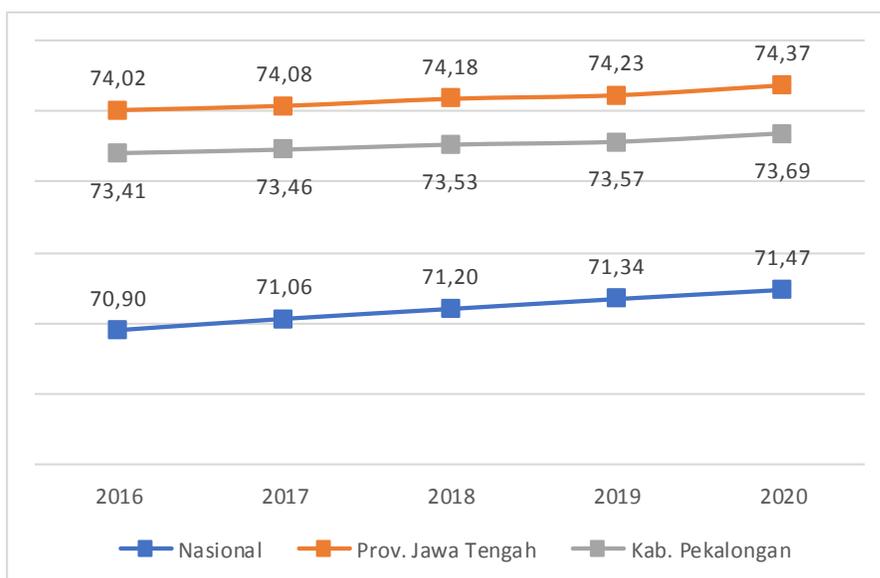
Sumber : BPS 2020, data diolah

Gambaran indikator pembentuk IPM Kabupaten Pekalongan secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pekalongan secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Capaian angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020 terus meningkat. Dari sebesar 73,41 tahun pada tahun 2016 meningkat menjadi 73,69 tahun pada tahun 2020. Capaian AHH Kabupaten Pekalongan berada diatas nasional namun masih dibawah capaian AHH Provinsi Jawa Tengah. Perbandingan capaian tersebut dapat ditunjukkan melalui grafik berikut.

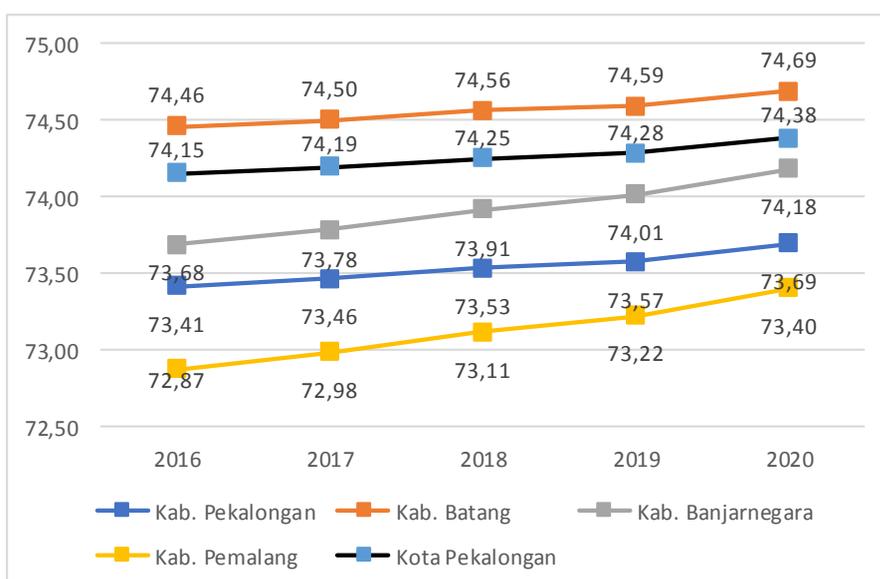
Gambar 2.6 Perbandingan Capaian Angka Harapan Hidup Antara Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS 2020, data diolah

Capaian AHH Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar 73,69 tahun berada diurutan ke 4 jika dibandingkan capaian kabupaten / kota sekitar. Capaian tertinggi diraih oleh Kabupaten Batang dengan 74,69 tahun dan yang paling rendah adalah Kabupaten Pemalang yang mencapai 73,40 tahun. Perbandingan capaian AHH Kabupaten Pekalongan dan kabupaten / kota sekitarnya ditunjukkan grafik berikut.

Gambar 2.7 Perbandingan Capaian AHH Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten / Kota Sekitar Tahun 2016 – 2020

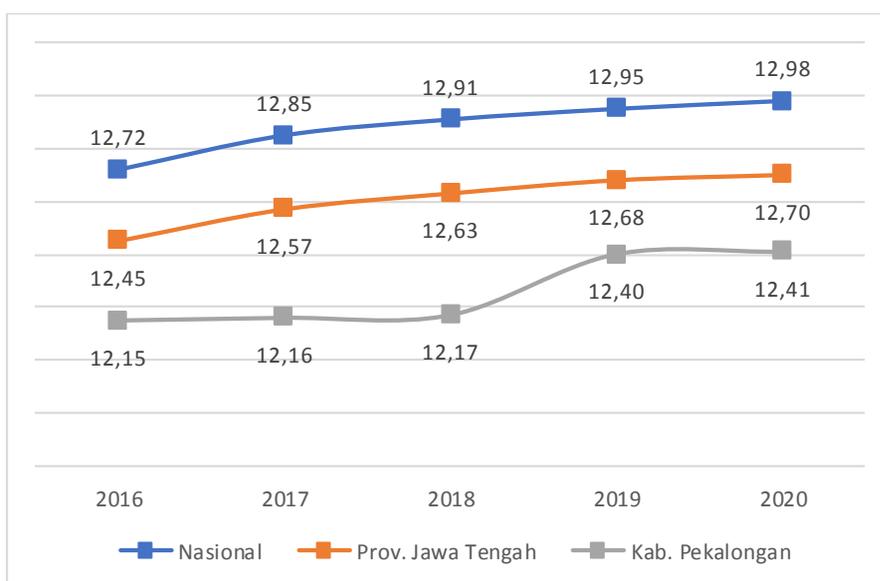


Sumber : BPS 2020, data diolah

b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2016 - 2020 semakin meningkat setiap tahunnya. Dari hanya 12,15 tahun pada tahun 2016 menjadi 12,41 tahun pada tahun 2020. Namun peningkatan yang diraih belum bisa membuat posisi Kabupaten Pekalongan diatas HLS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Berikut grafik Perkembangan capaian HLS Kabupaten Pekalongan serta perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Gambar 2.8 Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah Antara Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2020

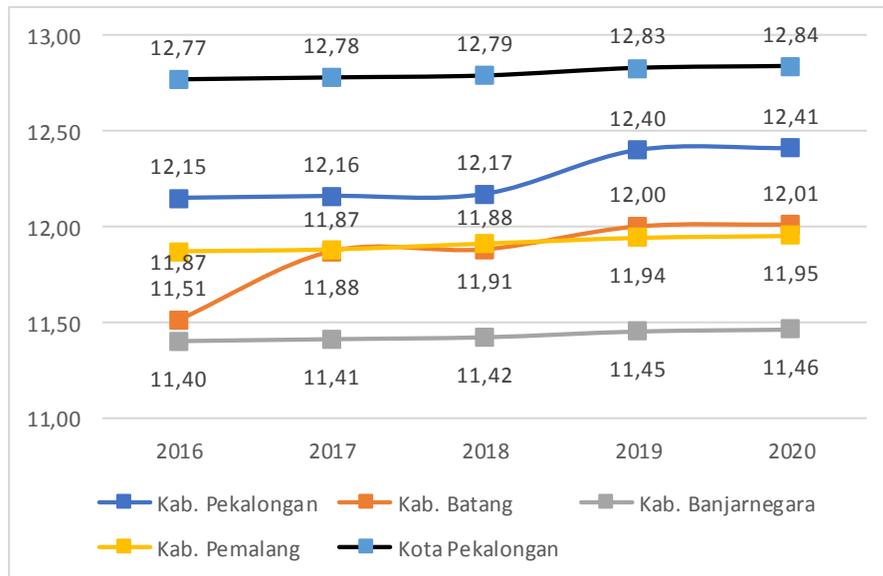


Sumber : BPS 2020, data diolah

Hingga tahun 2020 capaian indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan masih berada di urutan paling bawah jika dibandingkan dengan capaian kabupaten / kota sekitar. Daerah sekitar yang memiliki capaian HLS paling tinggi adalah Kota Pekalongan dengan capaian di tahun 2020 sebesar 12,84 tahun. Namun untuk daerah yang peningkatan capaian HLS terbaik adalah Kabupaten Batang yang pada tahun 2016 hanya sebesar 11,51 tahun, namun pada tahun 2020 telah mencapai 12,01 tahun. Grafik berikut menampilkan

perkembangan capaian HLS Kabupaten Pekalongan dan daerah sekitar dalam kurun waktu 2016 – 2020.

Gambar 2.9 Perbandingan Capaian HLS Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten / Kota Sekitar Tahun 2016 – 2020

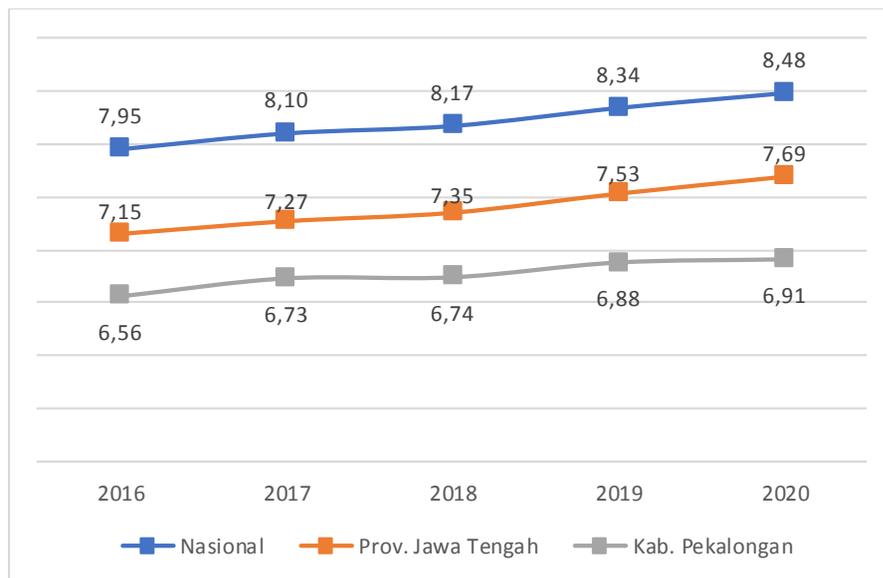


Sumber : BPS 2020, data diolah

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pekalongan menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu 2016 - 2020 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 6,56 tahun pada tahun 2016 menjadi 6,91 tahun pada tahun 2020. Sama seperti indikator HLS, peningkatan capaian RLS yang diraih Kabupaten Pekalongan masih belum menjadikannya lebih tinggi daripada capaian RLS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Perbandingannya dapat disimak melalui grafik berikut.

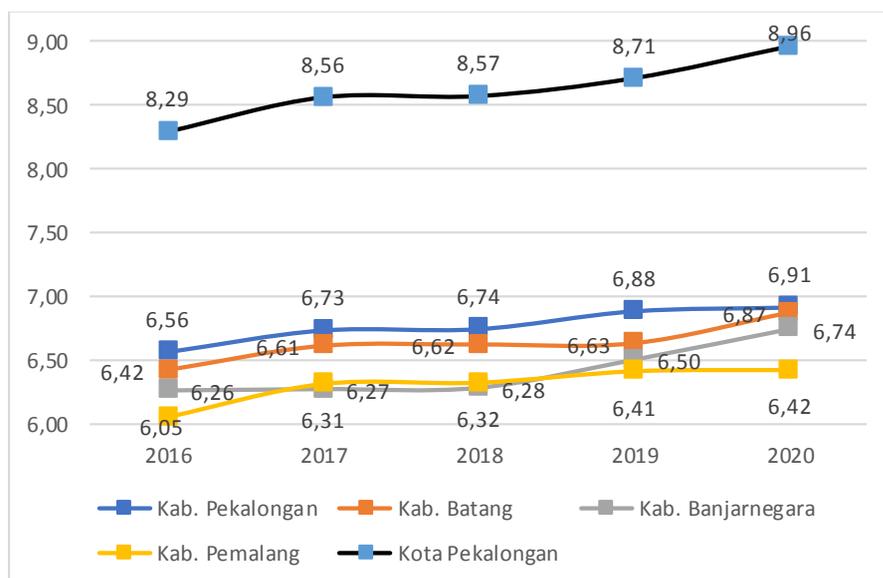
Gambar 2.10 Perbandingan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Antara Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS 2020, data diolah

Capaian RLS Kabupaten Pekalongan berada diperingkat ke 4 diantara kabupaten / kota sekitar. Capaian tertinggi diraih oleh Kota Pekalongan dengan capaian di tahun 2020 sebesar 8,96 tahun dan capaian terendah adalah capaian Kabupaten Pemalang yaitu sebesar 6,05 tahun. Perbandingan capaian RLS Kabupaten Pekalongan dan kabupaten / kota sekitar ditampilkan grafik berikut.

Gambar 2.11 Perbandingan Capaian RLS Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten / Kota Sekitar Tahun 2016 – 2020

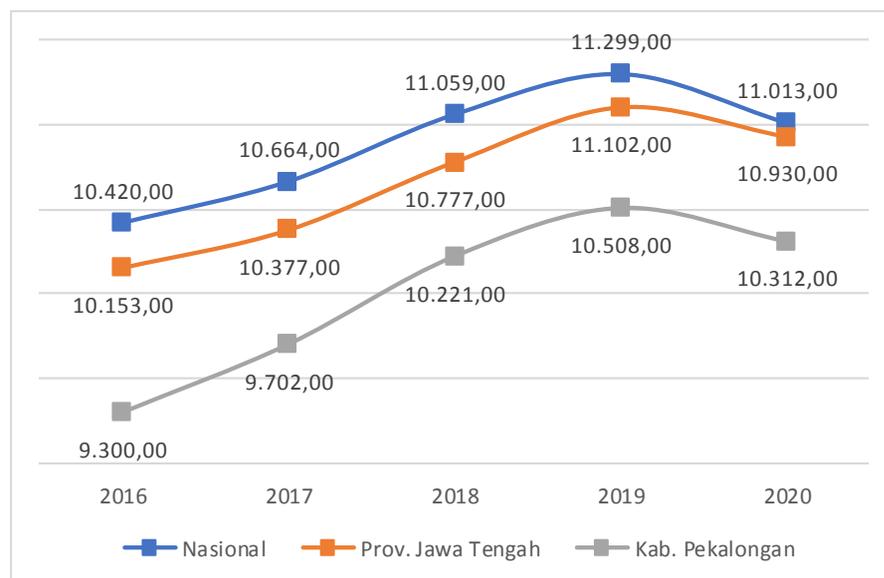


Sumber : BPS 2020, data diolah

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita Kabupaten Pekalongan selama tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 9.300.000 per kapita per tahun. Pengeluaran per kapita paling tinggi pada periode tersebut ada pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 10.508.000 per kapita per tahun. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 10.312.000 per kapita per tahun. Capaian ini masih dibawah pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Perbandingannya dapat disajikan dalam grafik berikut.

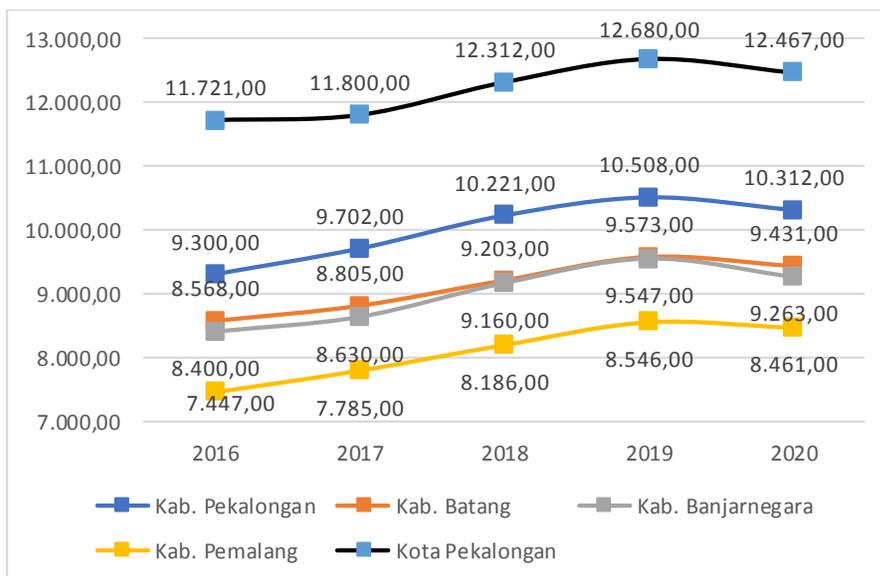
Gambar 2.12 Perbandingan Capaian Pengeluaran Per Kapita Antara Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS 2020, data diolah

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Pekalongan berada di urutan kedua jika dibandingkan dengan capaian kabupaten / kota sekitar. Kota Pekalongan menduduki posisi paling tinggi dan Kabupaten Pemasang berada di posisi paling bawah. Perbandingan pengeluaran per kapita tersebut dapat ditunjukkan melalui grafik berikut.

Gambar 2.13 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten / Kota Sekitar Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS 2020, data diolah

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

A. Kondisi Kemiskinan

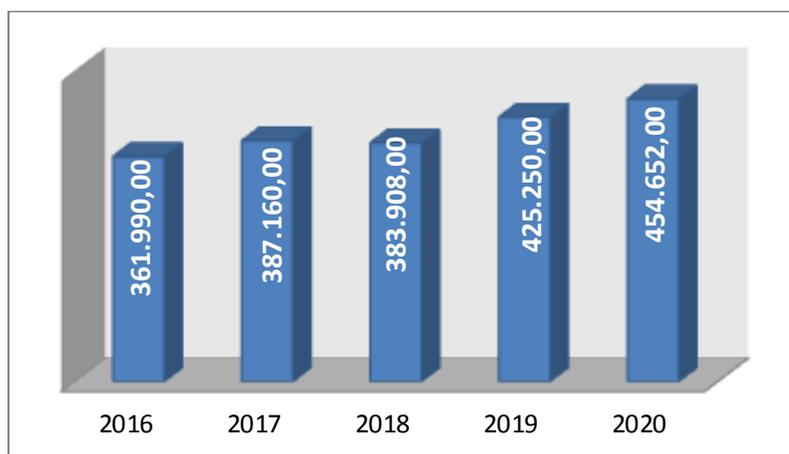
1. Kemiskinan

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi isu global. Rumusan Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan isu tentang pemberantasan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan yang harus tercapai pada tahun 2030. Isu-isu pembangunan di Indonesia juga menempatkan kemiskinan, ketidakmerataan antar golongan, disparitas regional, dan kekerasan sosial sebagai isu yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang di tahun 2030.

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang di pakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin menghitung Garis Kemiskinan (GK) nasional yang kemudian menjadi ukuran pencapaian pembangunan setiap tahun. Berdasarkan data yang di publikasikan BPS bahwa perkembangan Garis Kemiskinan Nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan tiap tahun nya . Perkembangan nya Garis Kemiskinan Nasional lima dalam tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 92.662, dapat dilihat pada tahun 2016 Garis Kemiskinan Nasional sebesar 454.652 dan di tahun 2020 sebesar 454.652.

Gambar 3.1 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Nasional Tahun 2016-2020

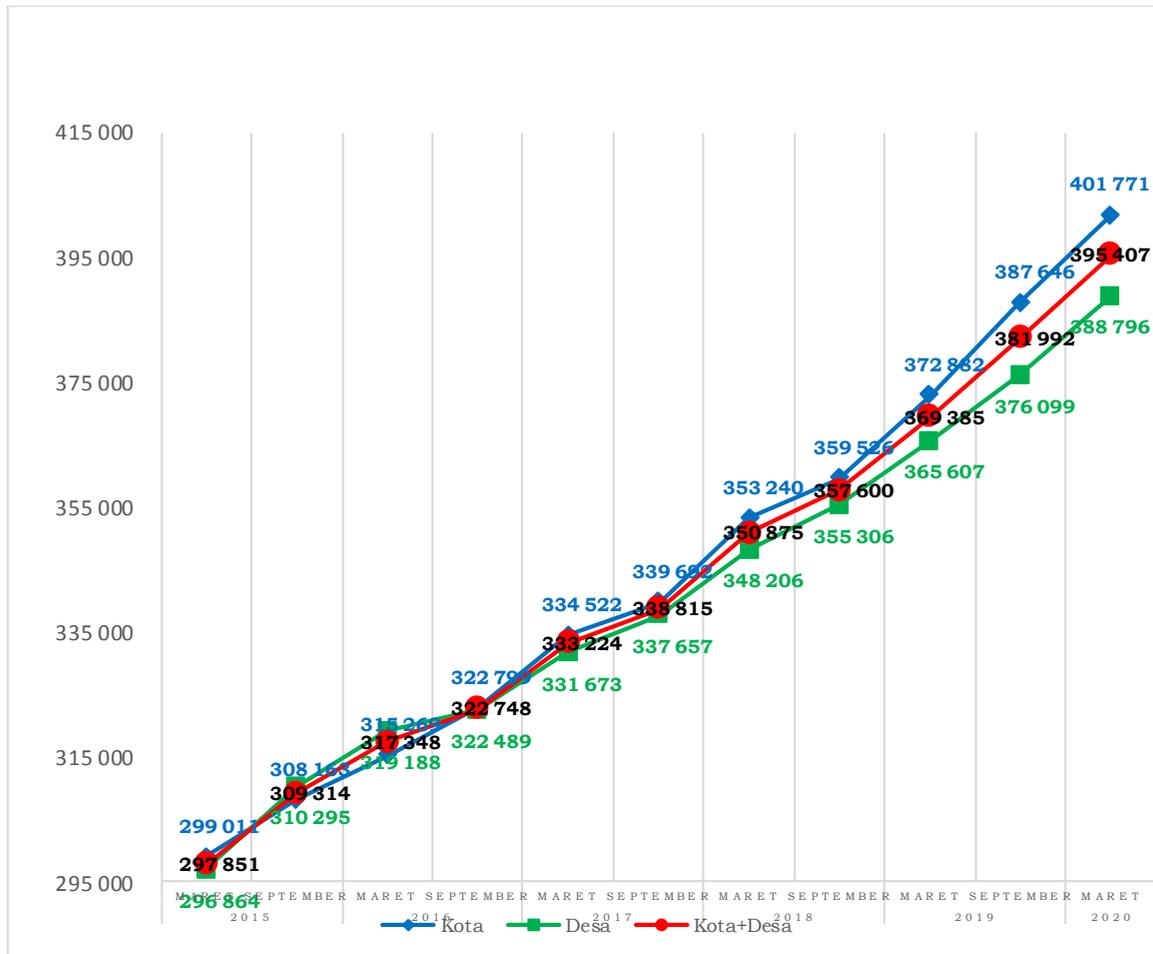


Sumber: BPS Nasional, 2016-2020

Selanjutnya Garis kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2019 sebesar Rp. 381.992,00 per-kapita per bulan, meningkat 6,82% dibandingkan dengan September 2018 yang mencapai Rp. 357.600,00 perkapita per bulan. Pada periode waktu yang sama, garis kemiskinan daerah perkotaan sebesar Rp. 387.646,00 per kapita per bulan atau naik 7,82% dari tahun 2018 (Rp.359.526,00 per kapita per bulan). Garis kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 5,85% menjadi sebesar Rp. 376.099,00 per kapita per bulan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 355.306,00 per kapita per bulan.

Selama periode September 2019-Maret 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,51 persen, yaitu dari Rp. 381.992,- per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp. 395.407,- per kapita per bulan pada Maret 2020. Sementara itu Garis Kemiskinan selama periode Maret 2019-Maret 2020 naik sebesar 7,04 persen, yaitu dari Rp. 369.385,- per kapita per bulan menjadi Rp. 395.407,- per kapita per bulan.

GAMBAR 3.2 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Kategori Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015-2020

Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2019 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

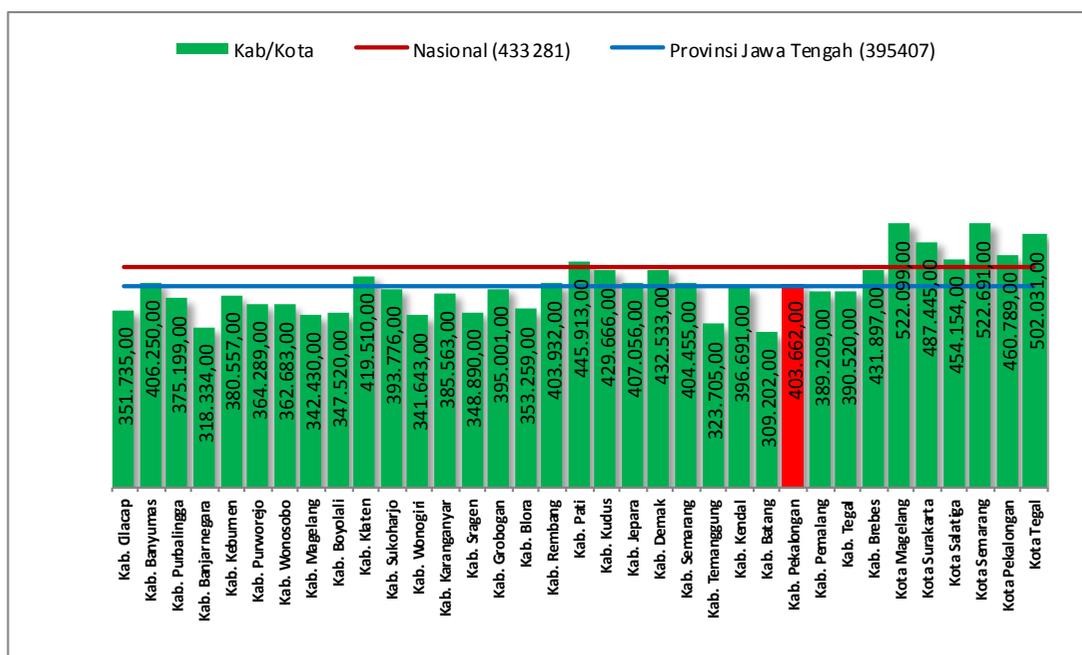
- a. Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi, terdapat di 15 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Banjarnegara, Temanggung, Magelang, Wonogiri, Boyolali, Sragen, Blora, Cilacap, Wonosobo, Purworejo, Purbalingga, Kebumen, Karanganyar dan Tegal;
- b. Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 16 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kendal, Pemalang, Grobogan, Sukoharjo, Semarang, Pekalongan, Rembang, Banyumas,

Jepara, Klaten, Kudus, Demak, Brebes, Pati, Kota Salatiga dan Kota Pekalongan;

- c. Garis Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang berada di atas garis kemiskinan nasional, terdapat di 4 kota, yaitu Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Magelang.

Kabupaten/Kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Batang sebesar Rp. 309.202,- per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi adalah Kota Magelang sebesar Rp. 522.099,- per kapita per bulan. Selanjutnya Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan pada maret 2020 sebesar 403.662 menempati posisi ke 19 lebih tinggi dibandingkan untuk wilayah lainnya .

**Gambar 3.3 GarisKemiskinan
(Rp/Kapita/Bulan)Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 (Maret)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Komponen yang mempengaruhi garis kemiskinan adalah bahan makanan dan non makanan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar (dominan) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan tahun 2019 (September) baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, dan gula pasir. Komoditi lainnya relatif berbeda antara

perkotaan dan perdesaan. Untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan perumahan, bensin, listrik pendidikan, kesehatan dan perlengkapan mandi.

Pada Maret 2020, jenis komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras memberi sumbangan sebesar 20,52 persen di perkotaan dan 22,99 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (11,51 persen di perkotaan dan 10,09 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (4,54 persen di perkotaan dan 4,27 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,11 persen di perkotaan dan 3,09 persen di perdesaan), gula pasir (3,11 persen di perkotaan dan 2,94 persen di perdesaan) dan seterusnya. Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar, baik pada GK perkotaan maupun perdesaan, meliputi perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

Tabel 3.1 Komoditi Makanan dan Bukan Makanan Yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan Di Jawa Tengah, Maret 2020

Komoditi	Perkotaan (%)	Komoditi	Perdesaan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	73,54	Makanan	75,30
Beras	20,52	Beras	22,99
Rokok kretek filter	11,51	Rokok kretek filter	10,09
Telur ayam ras	4,54	Telur ayam ras	4,27
Daging ayam ras	4,11	Daging ayam ras	3,09
Gula pasir	3,11	Gula pasir	2,94
Mie instan	2,42	Tempe	2,61
Tempe	2,29	Mie instan	2,28
Kue basah	1,96	Tahu	2,19
Tahu	1,93	Bawang merah	2,12
Kue kering/biskuit	1,75	Kue basah	2,08
Komoditi makanan lainnya	19,41	Komoditi makanan lainnya	20,65
Bukan Makanan	26,46	Bukan Makanan	24,70
Perumahan	6,37	Perumahan	6,91
Bensin	4,63	Bensin	3,97
Listrik	3,04	Listrik	2,03
Pendidikan	2,31	Pendidikan	1,38
Perlengkapan mandi	1,26	Kesehatan	1,19
Komoditi non makanan lainnya	8,87	Komoditi non makanan lainnya	9,22
Total	100,00	Total	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Selama kurun waktu 2015-2020 kemiskinan di Jawa Tengah konsisten menurun. Namun demikian terjadi kenaikan di tahun 2020 akibat pandemi covid 19, kenaikan tersebut terlihat dari penduduk miskin tahun 2019 (September) sebanyak 3,679,40 ribu orang. dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret tahun 2020 berjumlah 3,980,90 ribu orang, maka jumlah penduduk miskin Jawa Tengah bertambah 301,50 ribu orang.

Demikian juga pada periode September 2019–Maret 2020 secara persentase penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan data bulan September 2019. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 8,99 % menjadi 10,09 %, sementara di perdesaan naik dari 12,26 % menjadi 12,80 %.

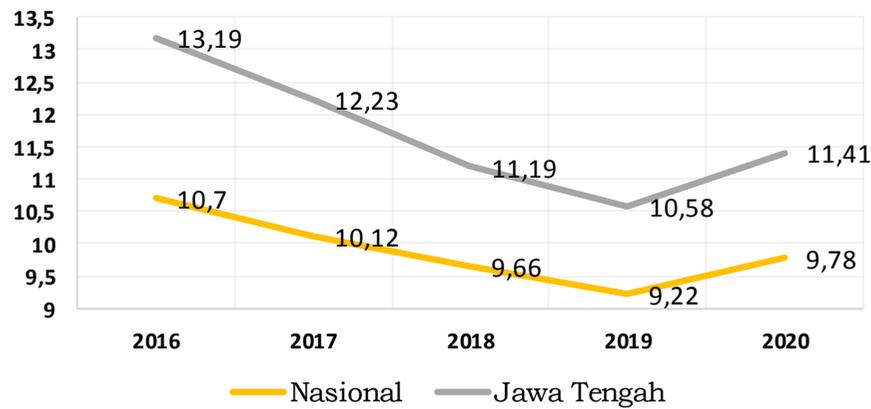
Tabel 3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020

Tahun	Bulan	Jumlah (Ribubiwa)			Persentase (%)		
		Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2015	Maret	1.837,19	2.739,85	4.577,04	11,85	15,05	13,58
	September	1.789,57	2.716,21	4.505,78	11,5	14,86	13,32
2016	Maret	1.824,08	2.682,81	4.506,89	11,44	14,89	13,27
	September	1.879,55	2.614,20	4.493,75	11,38	14,88	13,19
2017	Maret	1.889,09	2.561,63	4.450,72	11,21	14,77	13,01
	September	1.815,58	2.381,92	4.197,49	10,55	13,92	12,23
2018	Maret	1.716,16	2.181,04	3.897,20	9,73	12,99	11,32
	September	1.709,56	2.157,86	3.867,42	9,67	12,8	11,19
2019	Maret	1.633,96	2.109,26	3.743,23	9,20	12,48	10,80
	September	1.602,26	2.077,15	3.679,40	8,99	12,26	10,58
2020	Maret	1.805,65	2.175,25	3.980,90	10,09	12,80	11,41

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Prosentase tingkat kemiskinan Jawa Tengah pada tahun 2016 - 2020 masih berada di atas nasional, seperti terlihat pada gambar berikut.

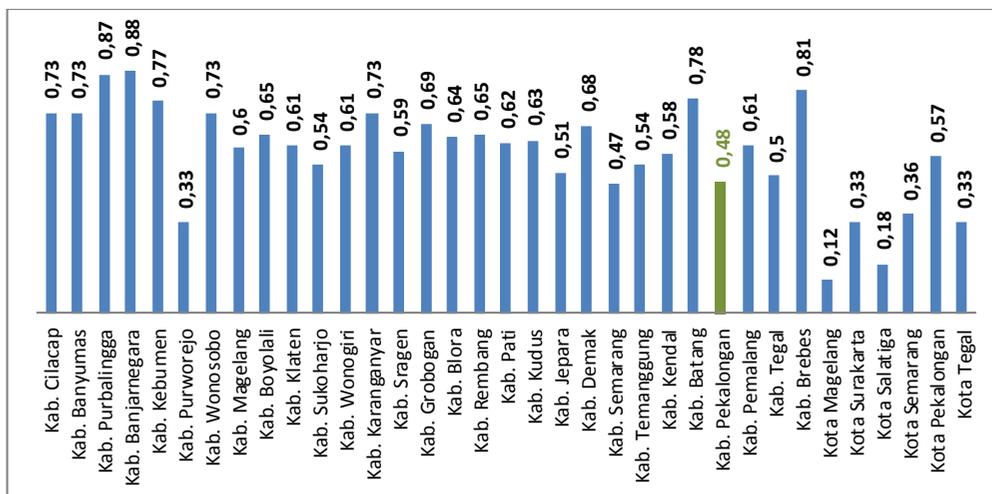
Gambar 3.4. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (%)



Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Apabila dilihat dari rata-rata kinerja penurunan kemiskinan kabupaten/kota se Jawa Tengah pada tahun 2020, Kabupaten Banjarnegara merupakan kabupaten dengan kinerja penurunan yang paling tinggi sebesar 0,88 persen, dan terendah adalah Kabupaten Magelang (0,12 persen). Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Pekalongan rata-rata kinerja penurunan penduduk miskin di tahun 2020 sebesar 0,48 persen berada di posisi ke tujuh lebih tinggi dibandingkan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3.5 Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (%)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020, di olah

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan Perlengkapan mandi. Pada tahun 2020 (Maret) garis kemiskinan Kabupaten Pekalongan sebesar Rp.395.407 kapita/bulan mengalami kenaikan dari tahun 2016, yaitu sebesar Rp.341.648 kapita/bulan

Gambar 3.6. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016- Maret 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)

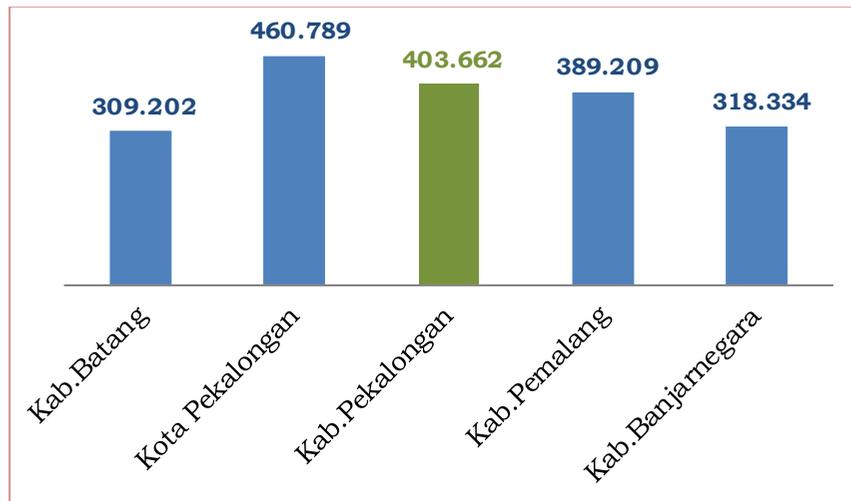


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020, diolah

Garis kemiskinan Kabupaten Pekalongan Maret 2020 sebesar Rp.395.407,-/kapita/bulan berada setara dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah Rp.395.407,-/kapita/bulan dan di bawah Nasional Rp.454.652,-/kapita/bulan, serta menempati urutan kedua tertinggi dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya. Posisi tertinggi ditempati Kota Pekalongan sebesar Rp.460.789,-/kapita/bulan dan posisi terendah Kabupaten Batang Rp.309.202,-/kapita/bulan. Ini menunjukkan biaya hidup di Kabupaten Pekalongan lebih mahal jika dibandingkan dengan Kabupaten lain

disektiarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

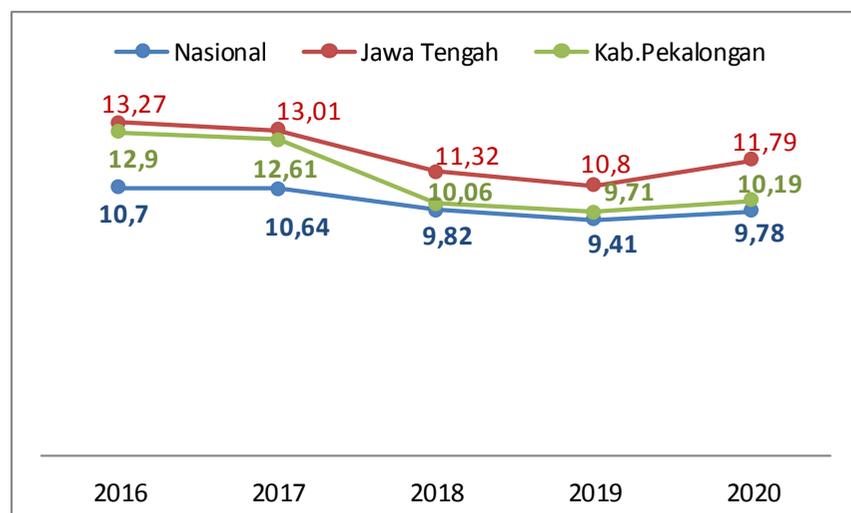
Gambar 3.7. Posisi relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Maret 2020



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020, di olah

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan pada periode lima tahun terakhir (2016-Maret 2020), pada tahun 2016 persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan mencapai 12,9% dan pada Maret 2020 menurun menjadi sebesar 10,19%. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami penurunan.

Gambar 3.8. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – Maret 2020(%)

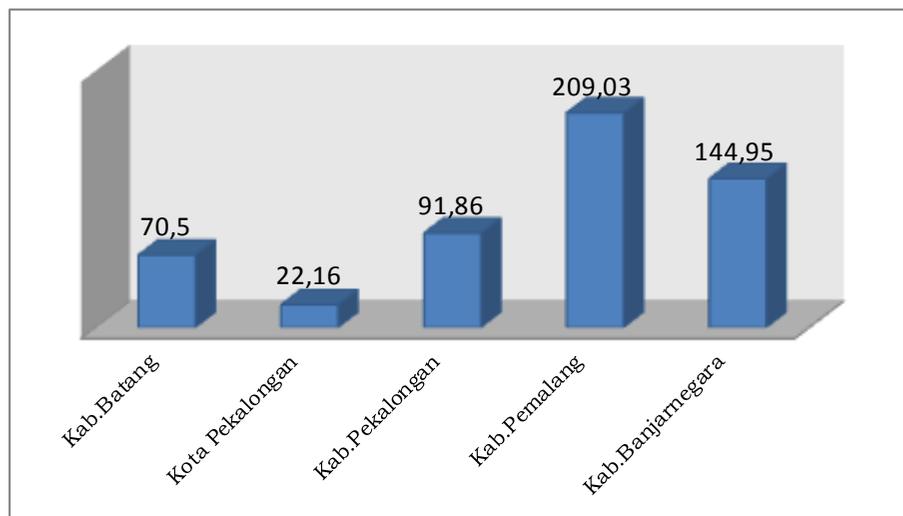


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020, di olah

Persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan Maret 2020 sebesar 10,19% berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa

Tengah 11,79% dan di atas rata-rata Nasional 9,78%. Selanjutnya persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan dengan Kabupaten atau Kota disekitarnya menempati urutan terendah ketiga setelah Kota Pekalongan (7,17%). Posisi tertinggi Kabupaten Pemalang sebesar 16,02% dan posisi terendah Kabupaten Batang sebesar 9,13%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

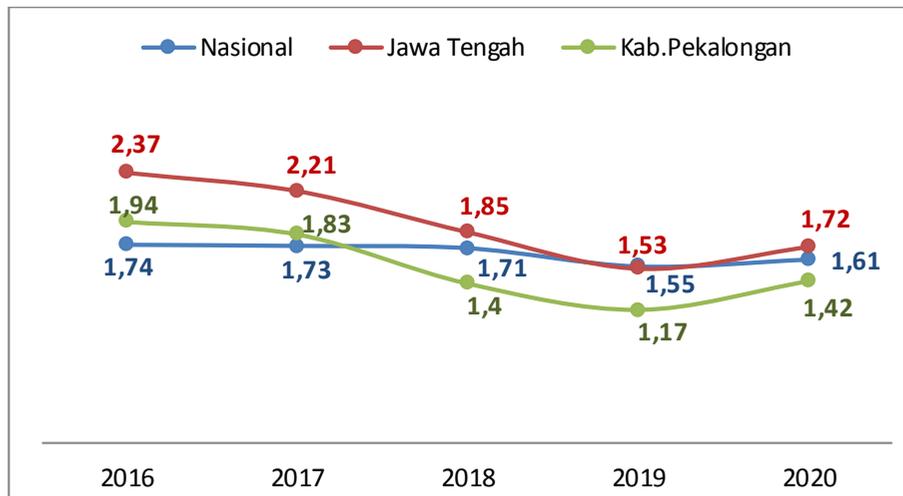
Gambar 3.9. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan Maret 2020(jiwa)



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Kabupaten Pekalongan tahun 2016 hingga maret 2020 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 1,94 menurun menjadi sebesar 1,42 pada Maret 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini

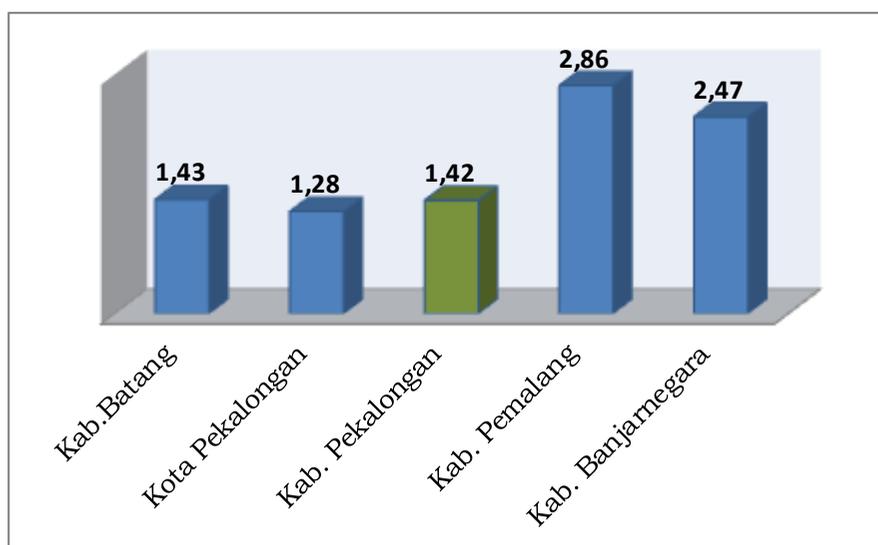
Gambar 3.10. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – Maret 2020



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pekalongan Maret 2020 sebesar 1,42 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,72 dan Nasional 1,61. Serta dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota disekitarnya berada di posisi ketiga setelah Kota Pekalongan (1,42). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan cukup rendah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Jawa Tengah.

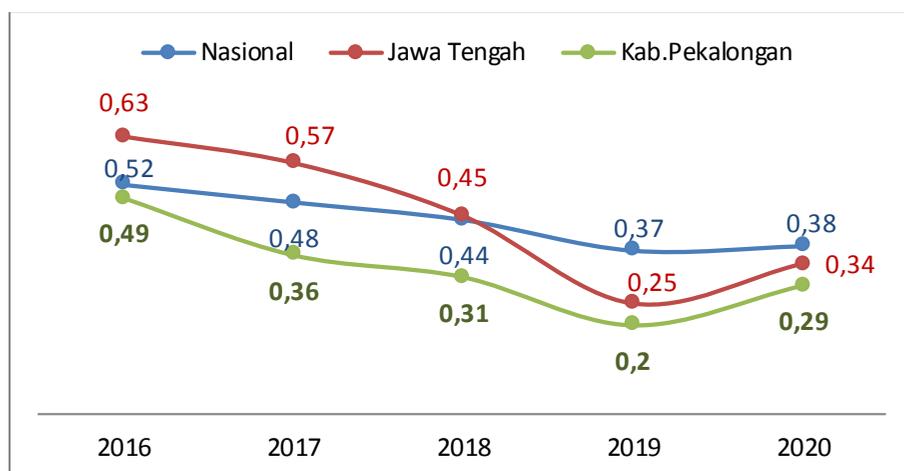
Gambar 3.11. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan Maret 2020



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020 maret) di Kabupaten Pekalongan menunjukkan tren penurunan 0,49 tahun 2016 menjadi 0,29 pada maret 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

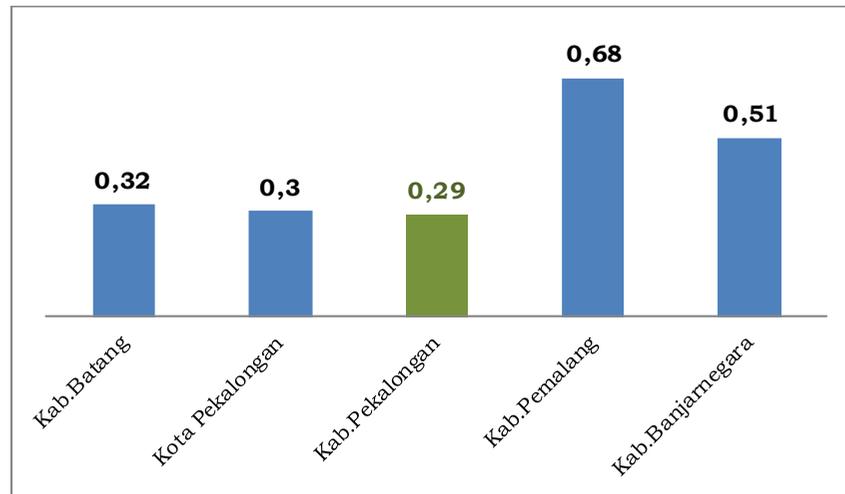
Gambar 3.12. Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – Maret 2020



Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2020

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pekalongan maret 2019 sebesar 0,20 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,34 dan Nasional sebesar 0,38. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitarnya posisi tertinggi Kabupaten Banjarnegara 0,51, sedangkan posisi terendah Kabupaten Batang sebesar 0,32. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.13. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan Maret 2020



Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2020

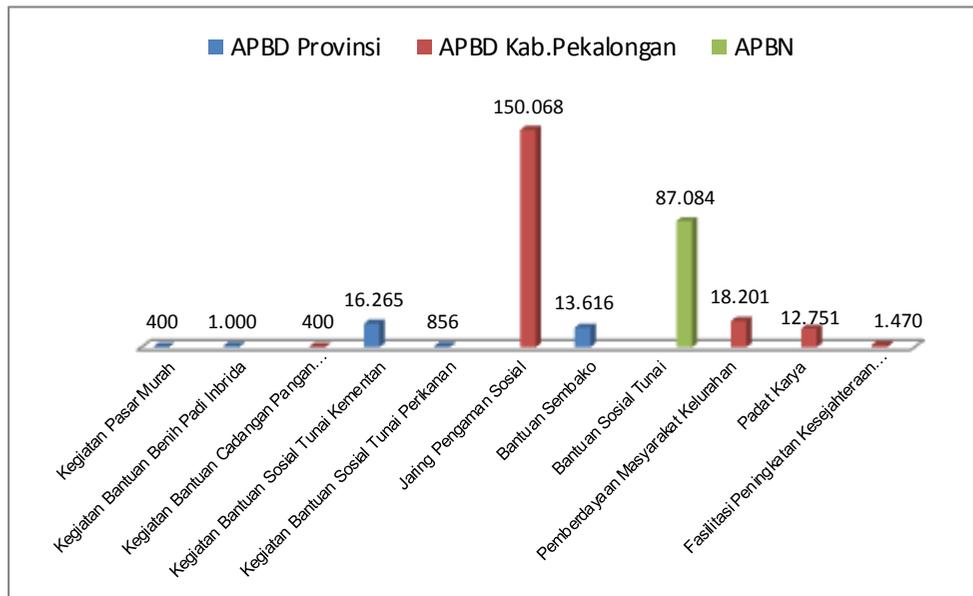
Secara umum, pada periode 2006–Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020.

Prioritas kegiatan setidaknya memenuhi unsur pencegahan dan penanganan Covid-19, yang meliputi: (1) Pemberdayaan masyarakat, seperti pencegahan Covid-19 melalui disinfeksi lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan permukiman, dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita); (2) Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan kewenangan desa, seperti penyediaan fasilitas umum sebagai ruang isolasi dengan mengikuti persyaratan teknis dari dinas kesehatan, penyediaan air bersih, pengolahan sampah, perbaikan aliran sungai dan irigasi, serta pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala desa; (3) Pemanfaatan lahan untuk menjaga kebutuhan pangan, termasuk di kawasan hutan, seperti untuk pertanian, perhutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Jaring Pengaman Sosial (JPS) masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Pekalongan dialokasikan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Pekalongan, serta dana Desa. Pendanaan APBN dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 33.781 KK, BPNT/Sembako

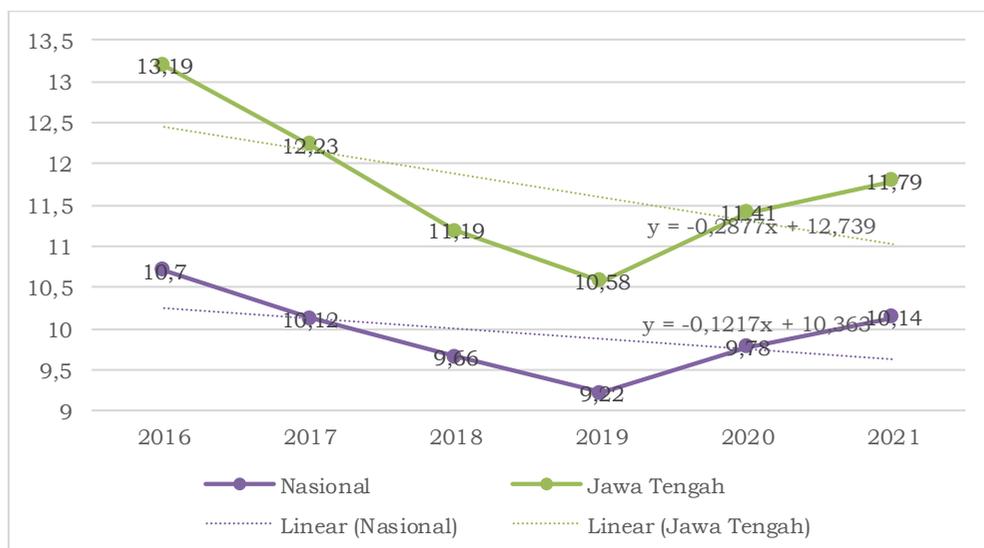
sebanyak 55.508 KK, BLT Kemensos sebanyak 32.460 KK, serta Kartu Pra Kerja. Pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah dialokasi untuk bantuan sosial sebanyak 8.846 KK, APBD Kabupaten Pekalongan untuk bantuan sosial sebanyak 75.034 KK, serta Dana Desa dialokasikan untuk BLT.

Gambar 3.14. Gambaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Pekalongan Di Masa Pandemi COVID-19



Melihat perkembangan tingkat kemiskinan Nasional dan Jawa Tengah pada tahun 2016 hingga tahun 2021, diperoleh fungsi linier Nasional, yaitu $y = -0,1217x + 10,363$ dan fungsi linier Jawa Tengah, yaitu $y = -0,2877x + 12,739$, seperti terlihat pada Gambar berikut.

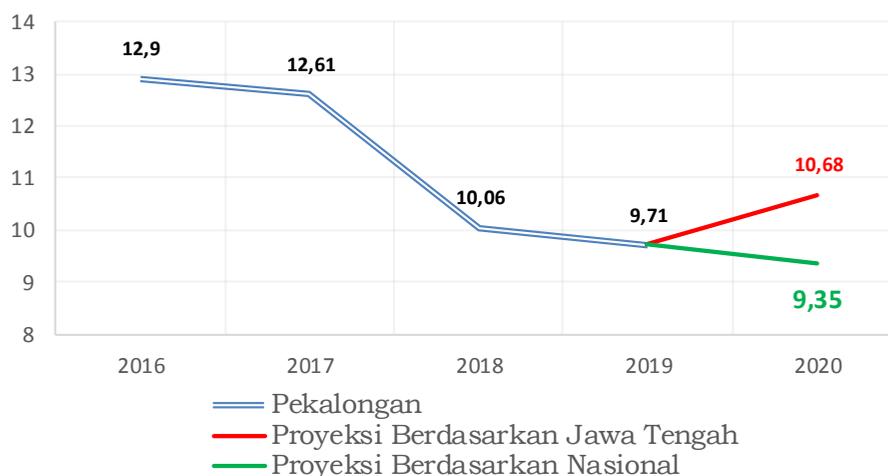
Gambar 3.15. Fungsi Linier Persentase Penduduk Miskin Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021, diolah

Tingkat kemiskinan Kabupaten Pekalongan dengan melihat fungsi linier Nasional diprediksikan (hasil peramalan ke 5) pada 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 9,63%, sedangkan melihat fungsi linier Jawa Tengah diprediksikan (hasil peramalan ke 5) pada 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 11,01%, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.16. Prediksi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan (Hasil Peramalan ke 5) Pada Maret 2020 berdasarkan Fungsi Linier Persentase Penduduk Miskin Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2016-2020



Sumber : BPS KabupatenPekalongan, 2020, diolah

Persoalan kemiskinan perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Angka kemiskinan yang dirilis BPS pada Maret 2020 belum sepenuhnya mencerminkan dampak pandemic COVID-19 karena Indonesia baru terpapar pada awal Maret 2020. Tingkat kemiskinan kemiskinan masih dapat bertambah dan membawa Indonesia kejurang resesi.¹

Kasus positif COVID-19 di Indonesia terdeteksi pada 2 Maret 2020 yang menginfeksi dua warga Depok, Jawa Barat. Pada 10 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan

¹<https://www.republika.id/posts/8625/waspadai-ledakan-kemiskinan>. Diakses tanggal 25 Agustus 2021.

pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kemudian diikuti daerah-daerah lain, sehingga angka kemiskinan yang dirilis BPS pada Maret 2020 belum menggambarkan penambahan kemiskinan di bulan setelahnya akibat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terjadi perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi, dan pendapatan dari semua lapisan masyarakat menurun.

BPS sesuai jadwal rutin pada 15 Januari 2021 akan merilis angka kemiskinan pada September 2020. Pemerintah perlu lebih fokus dalam penanganan persoalan kemiskinan tanpa langkah yang tepat bisa terjadi ledakan angka kemiskinan, termasuk implementasi program perlindungan sosial, didalamnya terdapat program Jaring Pengaman Sosial bagi rumah tangga miskin dan insentif bagi UMKM terdampak COVID-19 yang menampung banyak pekerja sektor informal perlu dilakukan evaluasi terutama ketepatan sasaran program, mengingat belum optimalnya pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

2. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "**absolute poverty measure**" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4%.

Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Sesuai data dari Kementerian Keuangan, anggaran terkait kemiskinan di tahun anggaran 2021

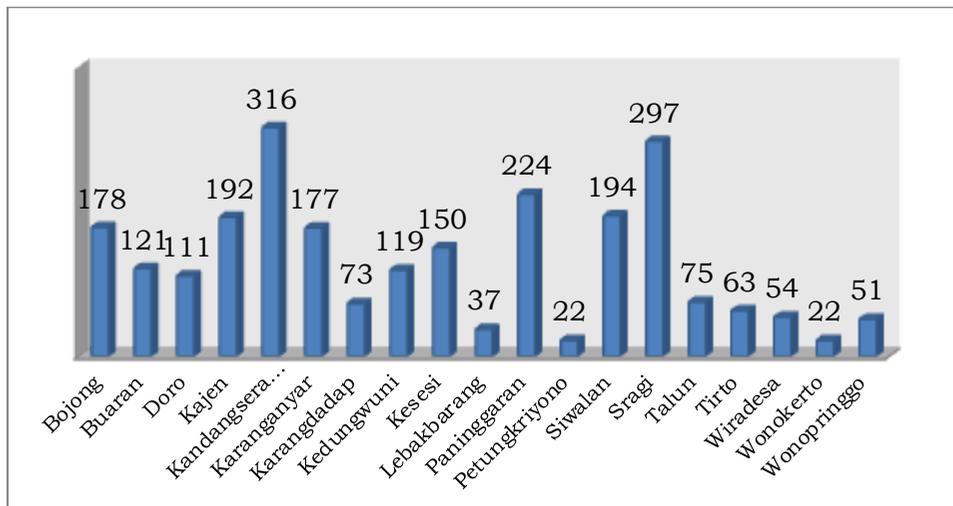
mencapai Rp.526 triliun. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 ditargetkan dapat mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Pada tahun 2021 ini upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 Provinsi dan diprioritaskan pada 35 Kabupaten yang telah mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin secara nasional yang berjumlah 10,4 juta jiwa, yang berarti pada tahun 2021 ini akan mensasar 2,1 juta jiwa atau 899 ribu rumah tangga. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Berdasarkan data DTKS yang telah di olah pada tahun 2020 untuk wilayah Kabupaten Pekalongan rumah tangga dalam kelompok kondisi 10% terendah (sangat miskin) sebanyak 2.476 rumah tangga dengan angka tertinggi di wilayah Kecamatan Kandangserang sebanyak 316 rumah tangga dan angka terendah di wilayah kecamatan Petungkriyono dan Wonokerto sebanyak 22 rumah tangga, hal ini dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar 3.17. Jumlah Rumah Tangga Dalam Kelompok Dengan Kondisi 10% terendah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020



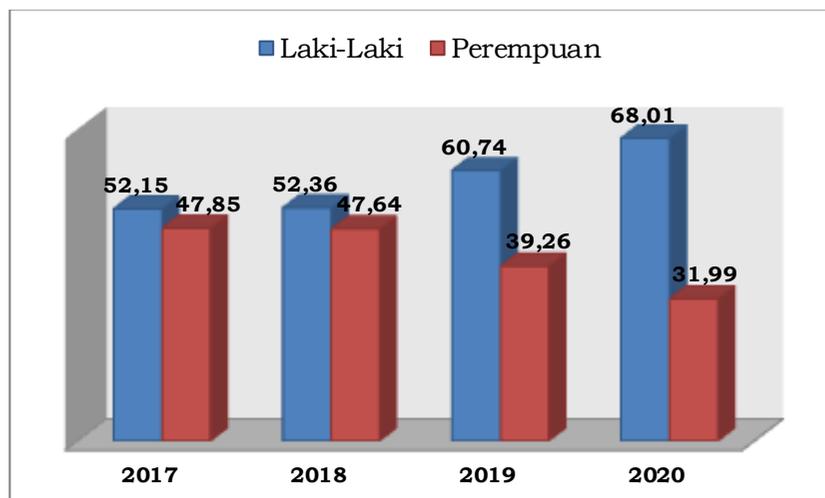
Sumber : DTKS Oktober 2020, diolah

3. Dimensi Penanggulangan Kemiskinan

a. Bidang Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan. Penanganan permasalahan di sektor ketenagakerjaan dilakukan dalam rangka mengurangi angka pengangguran di dalam program pengentasan kemiskinan. Data Sakernas yang diolah SEPAKAT pada tahun 2020 pengangguran di Kabupaten Pekalongan berdasarkan jenis kelamin bahwa angka pengangguran laki-laki sebesar 68,01% lebih besar dibandingkan angka pengangguran perempuan sebesar 31,99%. Angka pengangguran di Kabupaten Pekalongan berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar 3.18. Perkembangan Angka Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020



Sumber : Susenas 2020, diolah

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa angka pengangguran di Kabupaten Pekalongan berdasarkan jenis kelamin dalam perkembangannya pada tahun 2017 hingga 2020 cenderung mengalami kenaikan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan mengalami penurunan. Angka pengangguran ini berpotensi meningkat akibat pandemi Covid-19 terutama penduduk yang bekerja pada sektor-sektor rentan terhadap guncangan Covid-19 seperti : manufaktur, perdagangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya di Kabupaten Pekalongan angka penduduk yang bekerja dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Angka Penduduk yang Bekerja Pada Sektor-Sektor Rentan Guncangan Covid Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

Sektor	2017	2018	2019	2020
Jasa Masyarakat Sosial dan Personal	11,53	10,48	11,76	11,66
Keuangan dan Asuransi	1,26	1,11	1,69	1,7
Konstruksi	6,66	6,25	6,76	6,51
Listrik Gas dan Air	0,3	0,32	0,11	0,12
Manufaktur	38,67	40,32	38,63	37,46
Perdagangan Restoran dan Perhotelan	20,86	20,98	24,31	24,76
Pertambangan dan Penggalian	0,54	0,6	0,47	0,34
Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perikanan	16,18	16,25	14,02	15,9
Transportasi Pergudangan dan Komunikasi	4,01	3,71	2,25	1,54
total	100	100	100	100

Sumber : Susenas 2020, diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka penduduk yang bekerja di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 mayoritas bekerja di sektor manufaktur sebesar 37,46%, perdagangan, restoran dan perhotelan sebesar 24,76%, pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan sebesar 15,9%, jasa masyarakat sosial dan personal sebesar 11,66%. Jika melihat kecenderungan dalam lima tahun terakhir maka sektor transportasi perhubungan dan komunikasi mengalami

penurunan, sedangkan sektor perdagangan merupakan sektor yang mengalami peningkatan. Dari beberapa sektor dari penduduk yang bekerja pasti nantinya akan mendapatkan pendapatan rata-rata. Pendapatan rata-rata merupakan total upah/gaji/pendapatan bersih yang diterima selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama baik berupa uang maupun barang. Mayoritas penduduk di Kabupaten Pekalongan bekerja di sektor manufaktur sebesar 38,63%, namun dalam pendapatan rata-rata nya untuk sektor manufaktur terkecil ketiga sebesar Rp.717.465. Berikut ini data pendapatan rata-rata dari beberapa sektor pekerjaan di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4 Pendapatan Rata-Rata Beberapa Sektor Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020

Sektor	2017	2018	2019	2020
Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perikanan	608.381	644.628	672.661	1.135.863
Pertambangan dan Penggalian	512.997	888.715	637.470	-
Manufaktur	576.689	707.215	717.465	712.506
Listrik Gas dan Air	1.286.685	1.404.211	1.065.085	670.228
Konstruksi	962.062	1.074.212	964.227	842.398
Perdagangan Restoran dan Perhotelan	873.811	802.592	835.611	822.698
Transportasi Pergudangan dan Komunikasi	1.503.912	1.115.692	1.043.215	1.071.218
Keuangan dan Asuransi	1.700.548	1.701.255	1.799.752	1.314.947
Jasa Masyarakat Sosial dan Personal	1.305.525	1.353.469	1.239.559	1.245.623
total	9.330.610	9.691.990	8.975.045	7.815.481

Sumber : Susenas 2020, diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan rata-rata dari beberapa sektor di Kabupaten Pekalongan dalam empat tahun terakhir tren nya cenderung mengalami fluktuatif. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel bahwa jumlah pendapatan rata-rata di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017 sebesar Rp 9.330.610 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 7.815.481. Selanjutnya pendapatan rata-rata di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 yang mengalami capaian tertinggi pada sektor keuangan dan asuransi sebesar Rp. 1.314.947, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. - merupakan capaian terendah dalam pendapatan rata-rata.

Dalam perkembangan pendapatan rata-rata di Kabupaten Pekalongan selama empat tahun terakhir pula sektor-sektor dengan pendapatan tertinggi diantaranya : sektor keuangan dan asuransi, sektor jasa masyarakat sosial dan personal, dan pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan. Sementara

empat sektor dengan pendapatan rata-rata terendah diantaranya : sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas, dan air, Manufaktur, dan Kontruksi.

Berbicara aspek ketenagakerjaan dalam mengurangi jumlah angka pengangguran dapat dilihat melalui karakteristik pengangguran di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini meliputi beberapa indikator diantaranya :

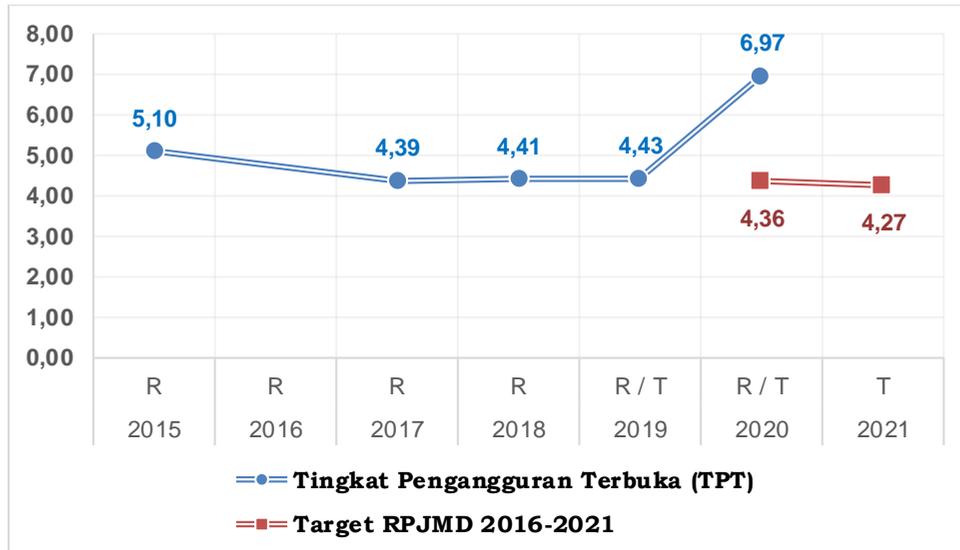
- 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); dan
- 2) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Sesuai dengan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), indikasi adanya tingkat pengangguran terbuka terdiri dari empat komponen, yaitu *Pertama*, mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan; *Kedua*, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha. *Ketiga*, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. *Keempat*, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.²Data statistik (Badan Pusat Statistik) yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan Fluktuatif yaitu dari 2016 sebesar 6,56%, tahun 2017 sebesar 4,39%, tahun 2018 sebesar 4,41%, tahun 2019 sebesar 4,43%, dan pada tahun 2020 sebesar 6,97%. Namun kondisi ini dibandingkan target tahun 2020 dalam RPJMD 2016-2021 sebesar 4,36% dengan kinerja sebesar 159,86%  (sudah on track/in trend), hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut.

²<https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>. Diakses tanggal 26 Agustus 2020

**Gambar 3.19. Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)-
Indikator Utama Bidang Ketenagakerjaan Dalam Rangka
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun
2016-2020**



Sumber :Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja-BPS, 2020, diolah

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (supply side) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. kelebihan dari sisi supply side dikurangi dengan demand side (pengangguran). BPS menyebutnya dengan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).³

Dalam rasio kesempatan kerja di Kabupaten Pekalongan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas dari tahun 2015 hingga tahun 2020 menunjukkan kenaikan, yaitu dari 9,30% menjadi 69,23%. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang kerja di Kabupaten Pekalongan cukup memadai terhadap penduduk usia kerja yang ada. Disamping itu kondisi rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2020 dibandingkan target tahun 2020 dalam RPJMD 2016-2021 sebesar 55,11% dengan kinerja sebesar 125,62%  (sudah on track/in trend). Kinerja rasio kesempatan kerja terhadap

³BPS.Sistem Rujukan Statistik (Sirusa). Diakses tanggal 26 Agustus 2020.

penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.20. Kinerja Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja-Indikator Utama Bidang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020



Sumber :Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja-BPS, 2020, diolah

Pencapaian indikator utama pada aspek ketenagakerjaan ini (tingkat pengangguran terbuka dan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja) memberikan pandangan mengenai adanya lapangan kerja produktif/penyerapan tenaga kerja telah berkembang seiring dengan waktu. Definisi lapangan kerja produktif dan lawannya (pekerja miskin dan pengangguran) menjadikan keterkaitan antara lapangan kerja produktif dan pekerjaan yang layak di satu sisi dan pengentasan kemiskinan di sisi lain secara sangat eksplisit.

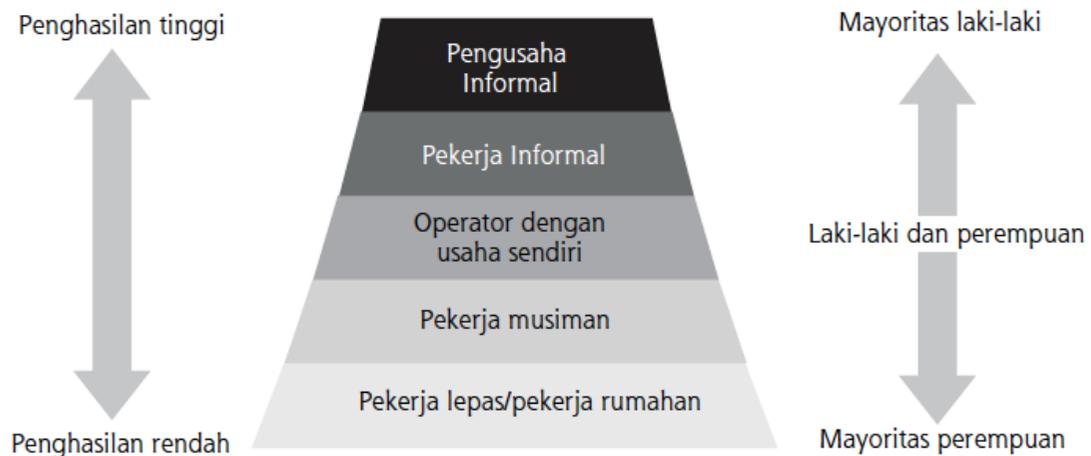
Status sebagai pekerja tidak memberikan jaminan bahwa seseorang akan sejahtera dan status sebagai penganggur tidak selalu berarti miskin. Fenomena adanya orang yang telah bekerja namun masih tergolong miskin itu disebut sebagai pekerja miskin. Menurut International Labour Organization (ILO), pekerja miskin adalah anggota rumah tangga yang bekerja namun pendapatan/pengeluaran per kapitanya berada dibawah garis kemiskinan⁴

⁴ Arif Rahman, Lalu Ardani Aulia, “Kajian Karakteristik Pekerja Miskin” 2019 , hal.2

Chen (2007) memberikan sudut pandang yang menarik terkait dengan segmentasi ekonomi informal. Ekonomi informal terdiri dari berbagai lapisan dan segmen yang dapat memengaruhi pendapatan dalam sektor tersebut. Di bagian paling bawah piramida adalah *outworker* (pekerja lepas) industrial atau pekerja rumahan, dan pekerja lepas diupah. Mereka sering dikontrak oleh perusahaan dengan cara kontrak (*outsourcing*). Di atas kategori-kategori itu adalah operator yang berusahasendiri. Di piramida atas adalah karyawan informal dan pengusaha informal.

Segmentasi ekonomi informal juga mewakili tingkat penghasilan yang diperoleh. Pekerja lepas berada dalam posisi paling terakhir dalam hal penghasilan, sementara pengusaha informal pada posisi tertinggi. Segmentasi ini juga memiliki dimensi gender. Perempuan menguasai informalitas di segmen bawah, sementara laki-laki mendominasi segmen atas.

Gambar 3.21. Segmentasi Ekonomi Informal. Chen (2007)⁵



Pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek ketenagakerjaan pada akhir tahun 2019 dibandingkan target tahun 2019 dalam RPJMD Tahun 2016-2021, bahwa 6 indikator sudah on track/in trend naik, yaitu Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan; Persentase Kinerja Koperasi dan UMKM aktif; Persentase jumlah usaha mikro kecil terhadap jumlah UMKM; Tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah; Rata-rata Pendapatan Nelayan; dan Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Sedangkan 1 indikator sulit

⁵Organisasi Perburuhan Internasional/ILO. Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi. 2010

tercapai menurun, yaitu Persentase Penerapan teknologi bagi petani. Pencapaian indikator pendukung tersebut dipengaruhi adanya faktor/determinan penyebab kemiskinan dalam pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek ketenagakerjaan sebagai berikut:

Penyedia Layanan/ Supply Side	Penerima Manfaat/ Demand Side	Masa Pandemi COVID-19
<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan yang dilaksanakan untuk para pencari kerja di wilayah kabupaten dan kecamatan • Pengadaan peralatan pelatihan untuk menunjang pelaksanaan pelatihan • Pelatihan yang dilaksanakan untuk masyarakat pasca pelatihan perlu diberikan bantuan sarana usaha sesuai bidang kejurannya • Perusahaan bisa mendapatkan calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan di perusahaan dan pencari kerja bisa mendapatkan informasi lowongan kerja sesuai dengan kemampuannya/skil • sarana dan prasarana untuk pelayanan online kurang memadai dan terbatasnya SDM • Banyaknya kesempatan kerja di Perusahaan di berbagai sektor atau lapangan usaha tapi tidak diminati pencari kerja • Banyak Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dengan sistem kontrak (outsourcing) sehingga tidak diminati pencari kerja • masih Banyaknya PMI (Pekerja Migran Indonesia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya pendaftar pelatihan yang belum bisa terserap untuk mengikuti pelatihan di BLK • Masih adanya peralatan di beberapa kejuruan yang belum lengkap dan ada beberapa yang rusak dan harus diganti • ketampilan /keahlian yang sudah dimiliki tidak bisa dikembangkan karena tidak memiliki sarana usaha/toolkit • masih adanya pencari kerja yang tidak menguasai teknologi karena untuk bursa kerjanya sudah memakai sistem online • masih adanya pencari kerja yang tidak menguasai teknologi karena untuk bursa kerjanya sudah memakai sistem online • dengan adanya PMI (Pekerja Migran Indonesia) ilegal jika terjadi permasalahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan paket pelatihan • Pengurangan pagu anggaran sehingga peralatan yang akan diadakan dikurangi dan dipilih yang paling mendesak • untuk usaha secara mandiri otomatis berkurang • Pencari kerja bisa mendapatkan informasi bursa kerja secara online • Tahun 2020 diadakan job fair tapi dengan protokol kesehatan • karena adanya pandemi covid maka banyak PMI yang dipulangkan sebelum kontrak kerja berakhir dan PMI non prosedural yang dipulangkan dan penundaan keberangkatan CPMI • Penundaan transmigrasi pada tahun 2020 dan adanya Pengiriman/dialihkan di tahun berikutnya

Penyedia Layanan/ Supply Side	Penerima Manfaat/ Demand Side	Masa Pandemi COVID-19
<p>yang bekerja keluar negeri secara non prosedural/ilegal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program penempatan transmigrasi • Alokasi daerah tujuan/daerah penempatan yang kurang diminati 	<p>maka pemerintah kesulitan mencari identitasnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya alokasi yang diberikan pemerintah pusat • Adanya informasi yang bisa mempengaruhi bagi calon transmigran yang mau diberangkatkan 	
<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas SDM Pembina Koperasi tidak proporsional dengan jumlah koperasi yang dibina, serta belum memiliki teknologi informasi pemantauan data kelembagaan koperasi • Fasilitasi dari dinas hanya sebatas pembinaan dan pelatihan sehingga berapa persen koperasi binaan yang telah mendapatkan pembiayaan dari perbankan belum bisa terukur secara akurat, namun selama ini beberapa koperasi sudah mendapatkan fasilitasi pembiayaan dari LPDB • Fasilitasi kemitraan UMKM, pelatihan dan bantuan telah diberikan kepada UMKM, namun kurang optimal pemanfaatannya karena kurangnya pendampingan yang disebabkan kurangnya jumlah SDM pembina UMKM • Fasilitasi kemudahan untuk mendapatkan izin IUMK sebagai legalitas usaha dan databasenya 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM Pengurus Koperasi yang belum memiliki kompetensi perkoperasian, adanya koperasi yang dibentuk untuk kepentingan tertentu (mendapatkan bantuan) sehingga setelah tujuan tercapai kinerja berhenti • Koperasi sudah mendapatkan pembiayaan dengan mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan perbankan, namun adanya anggota yang anggurannya kurang lancar menyebabkan kredit tidak lancar. • Belum optimalnya UMKM dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran. • Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat IUMK dan persepsi masyarakat yang tidak tepat 	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi di Kabupaten Pekalongan menjadi tidak aktif karena tidak bisa RAT secara luring dan banyaknya angsuran anggota yang macet. • Banyak pihak perbankan tidak bisa memberikan pembiayaan kepada koperasi karena pandemi. • Karena pandemi sebagian besar UMKM omsetnya menurun dan tidak sedikit UMKM yang berhenti produksi • Beberapa bantuan diberikan baik dari provinsi maupun Pemkab antara lain bansos JPE bahan baku produksi berupa terigu, telur, gula dalam 2 tahap (provinsi). Percepatan pembelian masker sekitar 240 rb masker. JPE bahan baku untuk PKL sebanyak 850 PKL. • Menurunnya perekonomian masyarakat akibat pandemi • Menurunnya perekonomian

Penyedia Layanan/ Supply Side	Penerima Manfaat/ Demand Side	Masa Pandemi COVID-19
<p>menjadi dasar pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM pembina industri 	<p>terhadap perizinan yang identik dengan bantuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran IKM untuk melakukan inovasi produknya 	<p>masyarakat akibat pandemi</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya sasaran yang tersebar di seluruh desa dengan jumlah sasaran 20 calon wirausaha muda • Pelatihan yang dilaksanakan selama ini cakupannya pada tingkat Kabupaten dengan jumlah sasaran 100 pemuda dan hanya sebanyak 30 pemuda yang memiliki usaha, seperti batik dan multimedia (30%). 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan keterampilan, peralatan usaha, produksi manual dan pemasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan produksi akibat pesanan berkurang.
<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penyediaan sarana prasarana percontohan budidaya air tawar yang dapat berimpact pada : 1. Peningkatan pengetahuan skill dan keterampilan, 2. kenaikan produksi ikan dan 3. peningkatan kesejahteraan pembudidaya • Masih kurangnya sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Kurang beragamnya aneka produk olahan ikan, kurangnya permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya prioritas budidaya ikan masyarakat pembudidaya (budidaya ikan hanya sebagai usaha sampingan saja belum ke jenjang budidaya ikan secara intensif) • Pemanfaatan oleh masyarakat pengolah dan pemasar ikan belum optimal karena keterbatasan anggaran sarana dan prasarana bantuan pemerintah, keterbatasan keterampilan pengolah dan pemasar ikan, keterbatasan modal pengolah dan pemasar ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Covid dalam pelaksanaan pembinaan penyuluhan/sekolah lapang lebih diperketat dari jumlah peserta cara pelaksanaan (lebih ke personal / kelompok pembudidaya) • Pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya produksi pengolah dan pemasar ikan sekitar 10% - 20% sehingga berakibat pada pendapatan pengolah dan pemasar ikan juga turun
<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua bentuk kegiatan

Penyedia Layanan/ Supply Side	Penerima Manfaat/ Demand Side	Masa Pandemi COVID-19
<p>yang menunjang peningkatan produktivitas padi dan bahan pangan lokal yang berupa jalan usaha tani, jaringan irigasi dan dam parit belum sepenuhnya tersedia untuk seluruh lahan pertanian di Kabupaten Pekalongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan dari dinas pertanian terkait alat semprot hama belum merata ke semua kelompok tani • Harga jual ke PG Sragi lebih rendah dibandingkan harga di luar PG Sragi • Apabila bantuan berupa hewan ternak, kesulitan dalam pencatatan aset. Tetapi apabila ada proposal permohonan bantuan hewan ternak akan diteruskan ke DPKAD, bantuan yang keluar berupa uang bukan hewan ternak. Bantuan berupa uang rawan diselenggarakan (dibelikan hewan ternak apa tidak) 	<p>kelompok tani yang belum bisa menjadi sasaran pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian dikarenakan belum berbadan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gangguan hama dan OPT (organisme pengganggu tanaman); stok pestisida di Kab Pekalongan belum mencukupi kebutuhan keseluruhan lahan pertanian • Yang diitung sebagai angka di dinas adalah jumlah produksi yang masuk ke PG. Sragi sedandhkan masih banyak petani yang menjual tebu di luar PG. Sragi • Pengetahuan masyarakat belum merata terkait ilmu berternak 	<p>yang mengumpulkan orang, diskusi, pelatihan tidak diperbolehkan selama covid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua bentuk kegiatan yang mengumpulkan orang, diskusi, pelatihan tidak diperbolehkan selama covid. • Semua bentuk kegiatan yang mengumpulkan orang, diskusi, pelatihan tidak diperbolehkan selama covid. • Adanya pandemi covid, kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dibatasi. Kegiatan di dinas pertanian banyak mengumpulkan orang seperti : peningkatan mutu ternak, worksop, pelatihan, bantuan bibit, peningkatan SDM petani ternak dsb.

Secara rinci pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.5. Kinerja Indikator Pendukung Bidang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	SATUAN	REALISASI					TARGET TAHUN 2019	KINERJA SAAT INI
				2016	2017	2018	2019	2020	RPJMD 2016-2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	2,81	22,87	50,54	58,66	30,95	27,00	217,26 ↑
2	Persentase Kinerja Koperasi dan UMKM aktif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	48,12	48,30	49,50	46,58	37,18	49,70	93,72 ↑
3	Persentase jumlah usaha mikro kecil terhadap jumlah UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	87,75	70,00	83,00	83,79	85	88,30	94,89 ↑
4	Tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	0,08	0,10	0,14	0,58	0,6	0,15	386,67 ↑
5	Rata-rata Pendapatan Nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp/Bulan	961.623	1.020.900	1.179.787	1.291.621	1.403.178	1.216.114	106,21 ↑
6	Rata-rata pendapatan pembudidayaan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp/Bulan	1.614.506	1.803.051	1.961.685	2.026.438	2.156.844	2.010.877	100,77 ↑
7	Persentase Penerapan teknologi bagi petani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	%					37,54	31,58*	37,49 ↓

b. Bidang Pendidikan

Selama ini, kemiskinan lebih sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, karena aspek tersebut merupakan salah satu aspek yang paling mudah diamati, diukur, dan dibandingkan. Padahal kemiskinan berkaitan juga dengan berbagai aspek lain, seperti : aspek sosial, budaya, pendidikan, sosial politik, lingkungan (alam dan geografis), kesehatan, agama, dan budi pekerti.

Ada berbagai hal yang menjadi faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa. Tidak terkecuali, keadilan dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dan kepercayaan diri, maupun kemandirian.

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Bila kebutuhan pokok seseorang tidak terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa hal itulah salah satu penyebab kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang kurang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan dalam dunia kerja, Pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itu, terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan yang disebabkan oleh tingkat Pendidikan yang rendah ini.

Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan, walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membebaskan uang bayaran di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP), namun komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah. Biaya yang harus dikeluarkan orang miskin untuk menyekolahkan anaknya juga

harus termasuk biaya kehilangan dari pendapatan (opportunity cost) jika anak mereka bekerja.

Selama ini pemerintah telah banyak melakukan pengentasan kemiskinan dengan mengeluarkan berbagai macam program. Akan tetapi, program pemerintah juga tidak mungkin cepat mengatasi kemiskinan di Indonesia karena dana yang tersedia terbatas. Pemerintah telah memberi kesempatan melalui program sekolah gratis sampai SMA sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mulai berpikir bahwa pendidikan merupakan sarana untuk bisa keluar dari masalah kemiskinan.

Pendidikan sangat krusial bagi tiap individu dan semestinya menjadi individu yang berpendidikan terwariskan dari generasi ke generasi sebagai investasi dalam memasuki dunia kerja dan perekonomian global yang semakin dinamis dari masa ke masa. Betapa tidak demikian, karena rendahnya kualitas pendidikan akan menyebabkan seseorang hanya mampu mengakses lapangan kerja dengan produktivitas dan upah (pendapatan) yang rendah sehingga kemampuan untuk meningkatkan standar hidup menjadi terhambat dan kecenderungan menjadi miskin meningkat. Menurut Jeffrey Sachs didalam bukunya *The End of Poverty*, salah satu mekanisme dalam penuntasan kemiskinan ialah pengembangan human capital terutama pendidikan dan kesehatan (Sachs, 2005). Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara pernah pula mengemukakan bahwa hakikat pendidikan adalah sebagai usaha orang tua bagi anak-anaknya untuk menyokong kemajuan hidupnya, dalam arti memperbaiki tumbuhnya kekuatan ruhani dan jasmani yang ada pada anak-anaknya (Darmaning tyas, 1999).

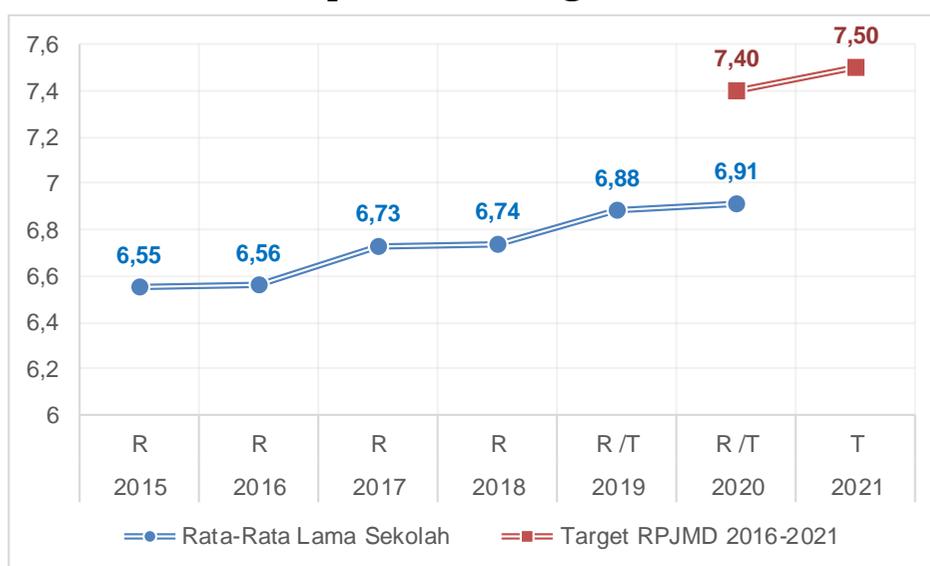
Ultimate goals pada aspek pendidikan ditunjukkan dengan 2 indikator, yaitu:

- 1) Rata-Rata Lama Sekolah; dan
- 2) Angka Harapan Lama Sekolah.

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pekalongan menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari tahun 2016

sebesar 6,56 tahun menjadi 6,91 tahun pada tahun 2020. Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 6,91 tahun atau setara hingga kelas VIII. Kondisi rata-rata lama sekolah tahun 2020 sebesar 6,91 dibandingkan target tahun 2020 dalam RPJMD 2016-2021 sebesar 7,40% dengan kinerja sebesar 93,38% (sudah on track/in trend). Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.22. Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah-Indikator Utama Bidang Pendidikan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020



Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan-BPS, 2020, diolah

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu sebesar 12,15 tahun (tahun2016) meningkat menjadi 12,41 tahun (tahun 2020). Ini berarti, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2020, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,41 tahun atau minimal jenjang Diploma I.

Kondisi harapan lama sekolah tahun 2020 sebesar 12,41% dibandingkan target tahun 2020 dalam RPJMD 2016-2021 sebesar 12% dengan kinerja sebesar 103,42%  (sudah on track/in trend). Perkembangan harapan lama sekolah di

Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.23. Kinerja Harapan Lama Sekolah-Indikator Utama Bidang Pendidikan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020



Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan-BPS, 2020, diolah

Dengan gambaran ini, upaya mendorong masyarakat agar meningkatkan pendidikan yang ditempuh ditambah kualitas pendidikan yang baik harus selalu digaungkan. Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, ataupun mampu menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Fakta lain yang perlu disadari bahwa karakteristik penduduk hampir miskin mayoritas bekerja di sektor informal yang rentan jatuh dan berkubang dalam kemiskinan. Sementara itu, untuk masuk dan bekerja di sektor formal yang mampu mengakses lapangan kerja dengan produktivitas dan upah (pendapatan) yang tinggi pada umumnya dibutuhkan pendidikan yang lebih tinggi. Perlu diyakini bahwa pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif kehidupan bernegara, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bagi setiap warganya, setidaknya untuk jenjang pendidikan dasar. Karena itu penyediaan akses pada pendidikan, khususnya pendidikan dasar sudah harus menjadi komitmen

Pemerintah Daerah. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang selama ini tidak bisa sekolah atau drop out karena berbagai alasan.

Informasi berbagai program, seperti Program Indonesia Pintar penting untuk dapat terinformasikan hingga masyarakat terbawah sehingga masyarakat tidak khawatir dan gamang untuk memutuskan anaknya agar sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Perlu disadari pula bahwa, di tengah penerapan tata kehidupan yang baru di masa pandemi Covid-19, guna mengerek pertumbuhan ekonomi, harus ditopang dan diperlukan pula tenaga kerja terdidik, yang punya pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

Kesenjangan kian memburuk dengan kedatangan pandemi COVID-19 adanya penutupan sekolah. Sementara anak-anak dari keluarga yang memiliki sarana laptop, ponsel dan internet masih dapat melanjutkan sekolah, sedangkan anak-anak lainnya terputus sama sekali.

Untuk hal ini, Pemerintah harus benar-benar mampu menyediakan layanan pendidikan kepada setiap warganya secara merata dan adil. Jika tidak, bangsa Indonesia akan mengalami keterbelakangan yang membuat kehidupan masyarakat makin jauh dari sejahtera. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah adalah dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek pendidikan pada akhir tahun 2019 dibandingkan target tahun 2019 dalam RPJMD Tahun 2016-2021, bahwa 4 indikator sudah on track/in trend meningkat, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; Angka partisipasi kasar (APK) PAUD; dan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun. Kondisi pencapaian indikator pendukung dipengaruhi adanya faktor/determinan penyebab kemiskinan dalam pencapaian

indikator pendukung dari indikator utama aspek pendidikan yaitu:

Penyedia Layanan/ Supply Side	Penerima Manfaat/ Demand Side	Masa Pandemi COVID-19
<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sarana prasarana dan tenaga kependidikan • Tidak memadainya akses pendukung dan jarak sekolah • Belum optimalnya informasi pentingnya sekolah bagi orang tua dan masyarakat • Belum optimalnya bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin • Belum optimalnya pengembalian anak tidak bersekolah ke sekolah. • Belum optimalnya penyelenggaraan biaya sekolah gratis bagi masyarakat miskin • Belum optimalnya fasilitasi pengawasan dan pengendalian informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat Kelompok difable yang tidak bersekolah khususnya di daerah terpencil • Kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pengajar belum merata. • Terdapat anak tidak bersekolah karena bekerja • Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat • Kurangnya motivasi anak untuk bersekolah • Masih terdapat anak dengan identitas kependudukan ataupun keluarga yang tidak jelas. • Minat bersekolah rendah terutama di wilayah pergunungan • Terdapat stigma bahwa sekolah tidak dapat menjawab permasalahan ekonomi keluarga • Terkendala biaya operasional • Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak • Perilaku kenakalan remaja dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sementara waktu sekolah tatap muka tidak dilakukan, sekolah dilakukan secara daring/online • Minim kapasitasnya ke siapan tenaga kependidikan dan siswa dalam implementasi sekolah daring/online • Rendahnya sarana sekolah dalam menyelenggarakan sekolah daring/online • Rendahnya kepemilikan sarana siswa dalam mengikuti sekolah daring/online • Belum seluruh Pemerintah Desa dapat memberikan akses dan sarana bagi anak sekolah dalam menghadapi sekolah daring/online • Rendahnya keterlibatan Pemerintah Desa, Guru dan orang tua, serta keluarga dalam pengawasan dan bimbingan pada siswa pada masa pandemi COVID-19

Penyedia Layanan/ Supply Side	Penerima Manfaat/ Demand Side	Masa Pandemi COVID-19
	pergaulan bebas	
<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan perpustakaan masih sebatas standar dan kemampuan perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya budaya masyarakat dalam pembiasaan gemar membaca serta tergiat untuk melakukan literasi informasi secara optimal di perpustakaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kunjungan pada perpustakaan daerah. • Belum adanya ke siapan dalam penyediaan literasi online perpustakaan daerah.

Secara rinci pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.6. Kinerja Indikator Pendukung Bidang Pendidikan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
Pekalongan Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	SATUAN	REALISASI					TARGET TAHUN 2020	KINERJA SAAT INI
				2016	2017	2018	2019	2020	RPJMD 2016- 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	92,63	92,65	92,67	92,75	96,57	93,20	99,52 ↑
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	81,35	81,36	81,37	81,46	77,93	83,00	98,14 ↑
3	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	52,38	68,01	69,1	70	71,02	70	100,00 ↑
4	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pengunjung	53.819	53.151	55.936	71.699	14469	51.600	138,95 ↑

c. Bidang Kesehatan

Di dalam pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan kesehatan yang dimaksud merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia.

Kesehatan dapat mempengaruhi tingkat fungsional seseorang, baik dari segi fisiologis, psikologis dan dimensi sosiokultural. Bersamaan dengan aspek pendidikan, kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Setiap orang berhak atas kesehatan tanpa adanya perbedaan ras, paham politil, agaman, kondisi sosial maupun ekonomi. Pemerintah bertanggungjawab ats kesehatan penduduk melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang mendukung. Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Dalam hal ini, Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Untuk Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangun kesehatan di daerah tersebut.

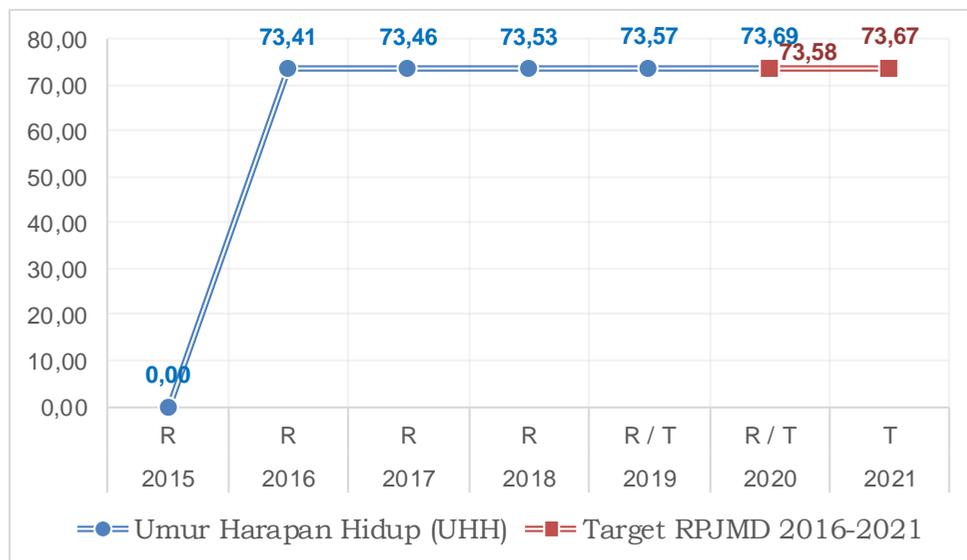
Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama,

dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi.

Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pekalongan secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Capaian rata-rata angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari sebesar 73,41 tahun (tahun 2016) meningkat menjadi 73,69 tahun (tahun 2020). Data ini menunjukkan bayi yang lahirtahun 2019 memiliki angka harapan hidup73,57 tahun, lebih lama 0,28 tahun dibandingkan bayi yang lahir tahun 2016.

Kondisi angka harapan hidup tahun 2019 sebesar 73,69% dibandingkan target tahun 2020 dalam RPJMD 2016-2021 sebesar 73,58% dengan kinerja sebesar 100,15% ▲ (sudah on track/in trend). Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.24. Kinerja Angka Harapan Hidup-Indikator Utama Bidang Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020



Sumber :Dinas Kesehatan-BPS, 2020, diolah

Dari sifatnya yang multidimensi, dimungkinkan akan terdapat permasalahan akses yang rendah terhadap layanan kesehatan dalam kemiskinan. Korelasi antara kemiskinan dan kesehatan bukanlah suatu hubungan yang sederhana, dan merupakan suatu hubungan timbal balik yang tidak dapat

dipisahkan antara keduanya. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan kemiskinan dan kemiskinan berpotensi besar membawa pada status kesehatan yang rendah. Sebagaimana dinyatakan oleh World Bank (2002) bahwa kemiskinan dan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menghabiskan tabungan rumah tangga sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan. Sebaliknya, orang miskin pada gilirannya akan terkena risiko pribadi dan lingkungan yang lebih besar, kekurangan gizi, dan kemampuan yang rendah untuk mengakses fasilitas kesehatan.⁶

Kemiskinan dapat menempatkan seseorang pada kondisi kesehatan yang tidak menguntungkan. Beberapa alasan yang dapat menjadi penyebab terjadinya hal ini adalah keterbatasan akses kelompok miskin terhadap perolehan informasi dan layanan kesehatan yang memadai, rendahnya pengetahuan dan perilaku hidup yang tidak mengindahkan kesehatan. Kelaparan yang menyertai kemiskinan menambah lemahnya daya tahan tubuh si miskin sehingga kelompok miskin semakin sulit keluar dari status kesehatan yang rendah. Sebaliknya, kesehatan juga memegang peranan besar dalam merubah status individual seseorang menjadi miskin atau mengangkatnya dari kemiskinan. Kondisi kesehatan yang buruk menyebabkan berkurangnya produktivitas. Produktivitas yang menurun mengakibatkan semakin terbatasnya penghasilan yang diperoleh. Apabila kemudian yang dihadapi adalah kasus katastropik⁷, maka dibutuhkan sumber pembiayaan yang lebih besar untuk menutup ongkos pengobatan. Pada titik ini, buruknya kondisi kesehatan berakibat lebih berat bagi kelompok miskin karena aset utama yang dimiliki kelompok miskin adalah tenaga untuk bekerja. Kondisi ini cepat atau lambat mendorong yang bersangkutan dalam jebakan lingkaran kemiskinan atau memperdalam status kemiskinannya.

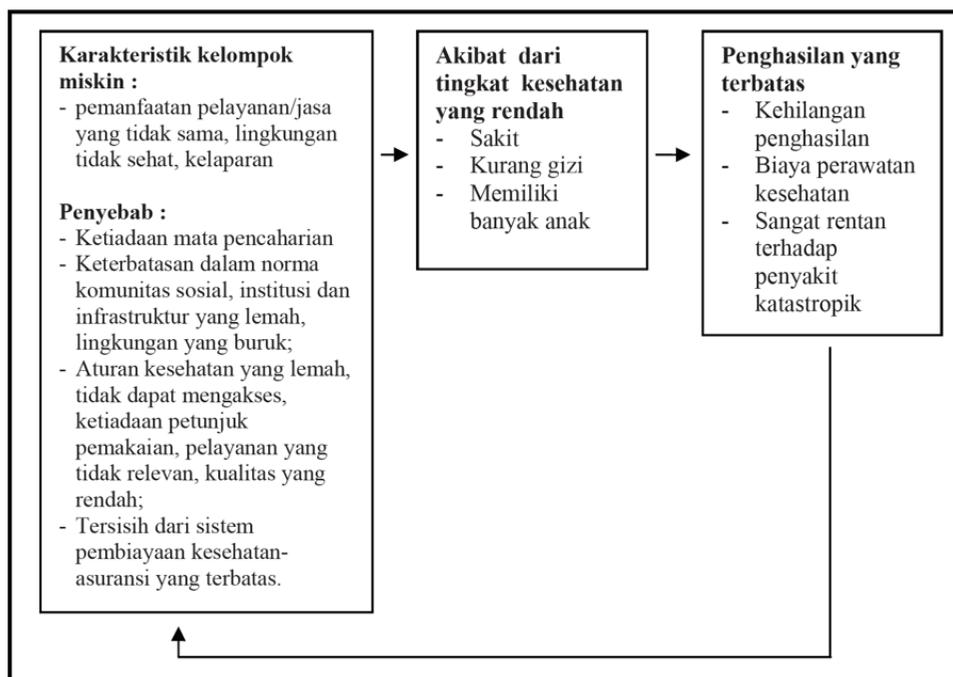
Wagstaff (2002) mencontohkan dalam lingkup makro, kondisi kesehatan masyarakat di negara- negara miskin pada umumnya tidak sebaik masyarakat di negara tidak miskin, demikian pula dalam lingkup mikro, anak-anak dari keluarga

⁶World Bank, *Dying for Change : Poor People's Experience of health and Ill- Health*, 2002

⁷Katastropik adalah suatu kasus yang terjadi bila perbandingan pengeluaran dari kantong sendiri (out- of- pocket) untuk kesehatan dengan kapasitas membayar yang dimiliki rumah tangga lebih dari 40 persen (Nadjib. 2009. 168)

miskin akan memiliki tingkat kesehatan yang tidak seberuntung teman-temannya dari keluarga kaya ataupun teman-temannya yang tinggal di negara yang tidak miskin. Secara singkat, Wagstaff (2002) menggambarkan hubungan antara kemiskinan dan kesehatan. Kemiskinan berdampak pada buruknya kondisi kesehatan kelompok miskin karena bagi mereka kesehatan adalah suatu barang mewah dan kesehatan tidak jauh lebih penting dibanding dengan bagaimana mencari uang dan menikmati sesuap nasi setiap harinya. Sementara kondisi kesehatan yang buruk dan tidak tertangani dapat menjebak seseorang pada lingkaran kemiskinan.⁸

Gambar 3.25 Hubungan antara kemiskinan dan kesehatan⁹



Pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek kesehatan pada akhir tahun 2019 dibandingkan target tahun 2019 dalam RPJMD Tahun 2016-2021, bahwa 4 indikator sudah on track/in trend meningkat, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB); Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI); Cakupan Peserta KB Aktif; dan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*). 1 indikator perlu upaya keras ➡, yaitu Cakupan rumah tangga ber perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta 2 indikator sulit tercapai menurun, yaitu Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan

⁸Wagstaff, Adam, Poverty and health Sector Inequalities, 2002

⁹Ibid.

sesuai standar; dan Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Kondisi pencapaian indikator pendukung dipengaruhi adanya faktor/determinan penyebab kemiskinan dalam pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek kesehatan yaitu:

Penyedia Layanan/ Supply Side	Penerima Manfaat/ Demand Side	Masa Pandemi COVID-19
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sarana dan prasarana NICU/PICU yang terbatas sehingga anak harus digabung dengan pelayanan umum • SDM Nakes yang masih terbatas baik dari sisi jumlah maupun keahlian • Perbup tentang pencegahan stunting • Strata posyandu Dasar dan Pratama cukup tinggi, jumlah tenaga kader kesehatan masih kurang • Keterbatasan jumlah SDM yang dapat digunakan sebagai surveyor terhadap jumlah balita stunting • Keterbatasan kualitas SDM yang bertugas untuk mengukur TB dan BB bayi menyebabkan hasil pengukuran masih dipertanyakan 	<ul style="list-style-type: none"> • BBLR yang disebabkan oleh asupan ibu kurang • Pernikahan usia dini • Anemia dan KEK • Kelahiran prematur • Masyarakat seringkali menolak kunjungan rumah balita sakit • Pola perilaku masyarakat dalam menyediakan ketersediaan makan dan asupan gizi seimbang bagi anak masih belum baik • Presisi dan akurasi dalam pengukuran sebagian besar dilakukan oleh kader sehingga banyak terjadi bias hasil • Tuntutan pekerjaan menyebabkan orang tua harus meninggalkan bayi kepada simbah sehingga asupan ASI sudah tidak diberikan • Preeklamsia dan perdarahan • K1 pada trimester 3 menyebabkan tidak masuk K4 pada akhir tahun • persalinan dilakukan bulan akhir tahun • Posyandu lansia masih sedikit 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan dibatasi dan tetap melaksanakan protokol kesehatan • Belum optimalnya kunjungan rumah balita sakit dan posyandu sesuai protokol kesehatan • Belum optimalnya pendampingan petugas dalam penimbangan balita di rumah, posyandu dengan protokol kesehatan, dan kunjungan rumah untuk distribusi kapsul vitamin A • Belum optimalnya perawatan dan pemulihan status gizi balita gizi buruk • Rendahnya cakupan pemberian PMT balita gizi kurang

Penyedia Layanan/ Supply Side	Penerima Manfaat/ Demand Side	Masa Pandemi COVID-19
<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan/ KIE ke desa masih kurang dikarenakan tenaga Penyuluh KB sangat minim hanya 37 orang melayani 285 desa idealnya 1 PLKB mengampu 2-4 Desa. *2) Dukungan untuk pelatihan / peningkatan SDM, administrasi, media KIE dan operasional pada kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKS) sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan Poktan-poktan masih kurang karena tingkat ekonomi, pengetahuan, kesadaran masih kurang • Masih Rendahnya Pengetahuan dan Pemahaman tentang 8 Fungsi Keluarga serta Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan • Masih Sedikitnya Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL, PIK Remaja dan PPKS. • Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Generasi Berencana Pada Usia Remaja (10-24 Th) masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi penurunan KIE karena pertemuan/ kontak dengan masyarakat menurun dratis, sedangkan pemanfaatan Medsos, Teknologi Modern tidak maksimal karena keterbatasan kepemilikan, biaya operasional (misal beli pulsa dll).

Secara rinci pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek kesehatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.7. Kinerja Indikator Pendukung Bidang Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	REALISASI					TARGET TAHUN 2020	KINERJA SAAT INI
				2016	2017	2018	2019	2020	RPJMD 2016-2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	(11)	(12)
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Dinas Kesehatan	Per 1000 KH	10,99	8,35	7,16	8,70	6,47	10,00	135,3 ↑
2	Angka Kematian Ibu	Dinas Kesehatan	Per 100.000 KH	115,02	102,01	68,51	60,45	66,43	87,5	124,08 ↑
3	Cakupan rumah tangga ber perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Dinas Kesehatan	%	75,50	66,80	78,40	67,90		75,00	90,53 →
4	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining	Dinas Kesehatan	%	49,51	90,40	63,30	74,60	73,8	100,00	73,8 ■

NO	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	REALISASI					TARGET TAHUN 2020	KINERJA SAAT INI
				2016	2017	2018	2019	2020	RPJMD 2016-2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	(11)	(12)
	kesehatan sesuai standar									
5	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	%	9,50	30,07	75,74	73,92	53,22	100,00	53,22 
6	Cakupan Peserta KB Aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		80,22	82,64	81,86	80,86	80,42	80,72	99,62 

NO	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	REALISASI					TARGET TAHUN 2020	KINERJA SAAT INI
				2016	2017	2018	2019	2020	RPJMD 2016-2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	(11)	(12)
7	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	10,10	8,40	8,99	8,89	8,68	9,50	91,36 

d. Bidang Infrastruktur Dasar

Fenomena kemiskinan di perkotaan dan perdesaan tidak terlepas dari lapisan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhannya. Sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka hanya memprioritaskan kebutuhan primer (pangan) untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki keterbatasan terhadap akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi yang baik serta perumahan yang layak huni. Kemiskinan terjadi karena orang miskin tidak memiliki akses sebagai sumber pendapatan, juga karena struktursosial ekonomi tidak membuka peluang bagi orang miskin untuk keluar dari lingkungan kemiskinan yang tidak berujung pangkal (Mubyarto, 2003)¹⁰.

Permukiman kumuh dapat timbul karena beberapa hal, seperti kondisi bangunan yang tidak layak huni akibat kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memadai, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu memiliki air bersih, sanitasi yang baik serta perumahan yang layak huni.

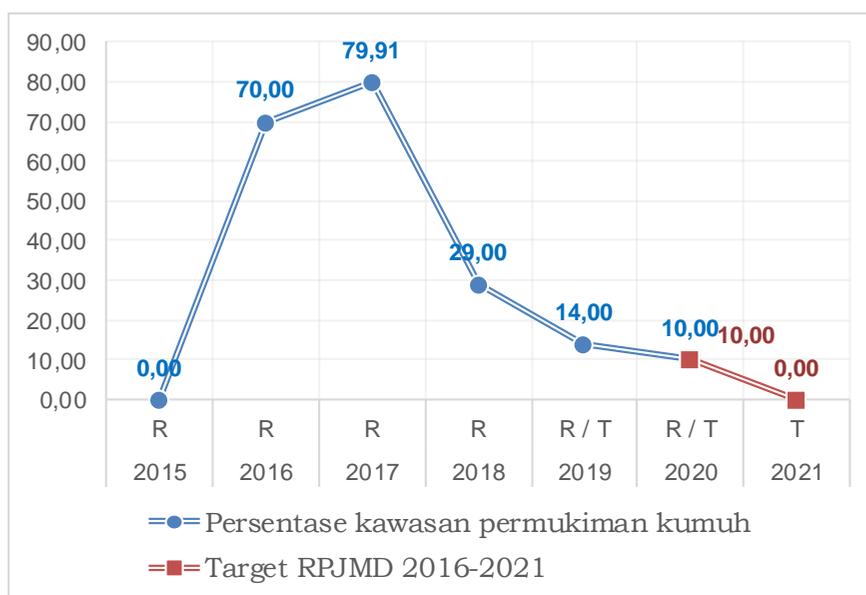
Masalahnya, bagi masyarakat miskin, tidak dapat mengabaikan begitu saja kebutuhan akan rumah dan tempat tinggal karena masalah ini penting dalam dan bagi kehidupan sosial ekonomi, tetapi di satu sisi ketidakmampuan untuk mengeluarkan biaya prioritas bagi pengembangan dan pemeliharaan rumah dan lingkungan permukimannya agar layak untuk dihuni. Semakin kecil bagian dari penghasilan yang dapat disisihkan guna pembiayaan pemeliharaan rumah dan fasilitas permukiman, semakin kumuh pula kondisi permukimannya. Hal tersebut yang menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh.

Capaian kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuatif, tahun 2016 kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan sebesar 70% dan pada tahun 2020 sebesar 10%. Meskipun mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya, akan tetapi belum memenuhi target 100-0-100 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dimana luas kawasan kumuh ditargetkan 0 % ditahun 2020.

¹⁰Mubyarto. (2003). Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.

Namun kondisi persentase permukiman kawasan kumuh tahun 2020 sebesar 10% dibandingkan target tahun 2020 dalam RPJMD 2016-2021 sebesar 10% dengan kinerja sebesar 100%  (sudah on track/in trend). Perkembangan permukiman kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.26. Capaian Kawasan Permukiman Kumuh- Indikator Utama Bidang Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2020



Sumber :Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, 2020, diolah

Rata-rata pengurangan/penanganan kawasan kumuh setiap tahunnya adalah sebesar 191, 79 Ha/ tahun selama jangka waktu 3 tahun, tahun 2020 persentase kawasan kumuh yang ditangani sudah mencapai sebesar 91,18%. Hal ini dikarenakan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan baru berjalan efektif mulai tahun 2017, dimana pengurangannya sebanyak 538,21 Ha.

Namun kondisi persentase kawasan kumuh yang ditangani tahun 2020 dibandingkan target tahun 2020 dalam RPJMD 2016-2021 sebesar 100% dengan  kinerja sebesar 91,18% (perlu upaya keras). Perkembangan persentase kawasan kumuh yang ditangani di Kabupaten Pekalongan tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut. Perlu upaya keras

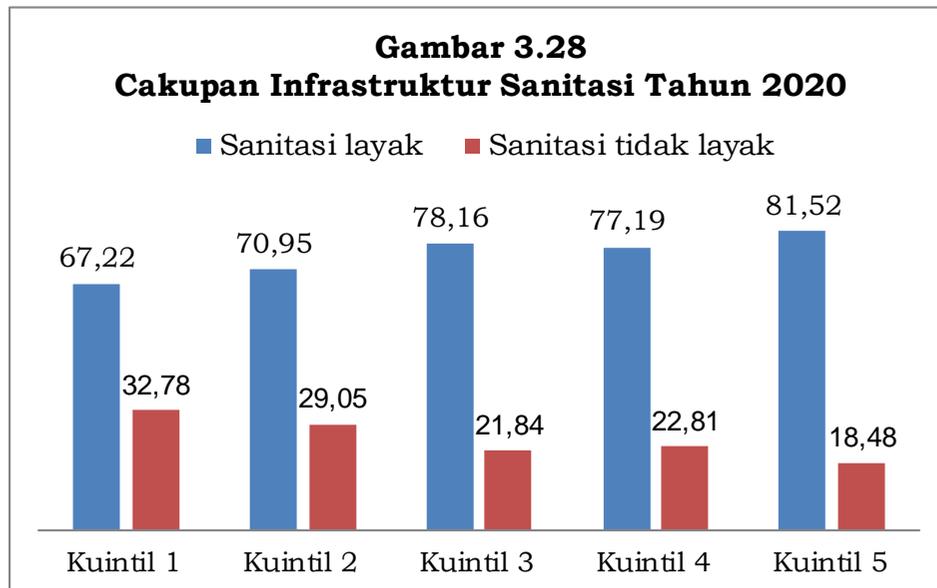
Gambar 3.27. Kinerja Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani-Indikator Utama Bidang Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020



Sumber :Dinas Perumahan Rakyat, KawasanPermukiman, dan Lingkungan Hidup, 2020, diolah

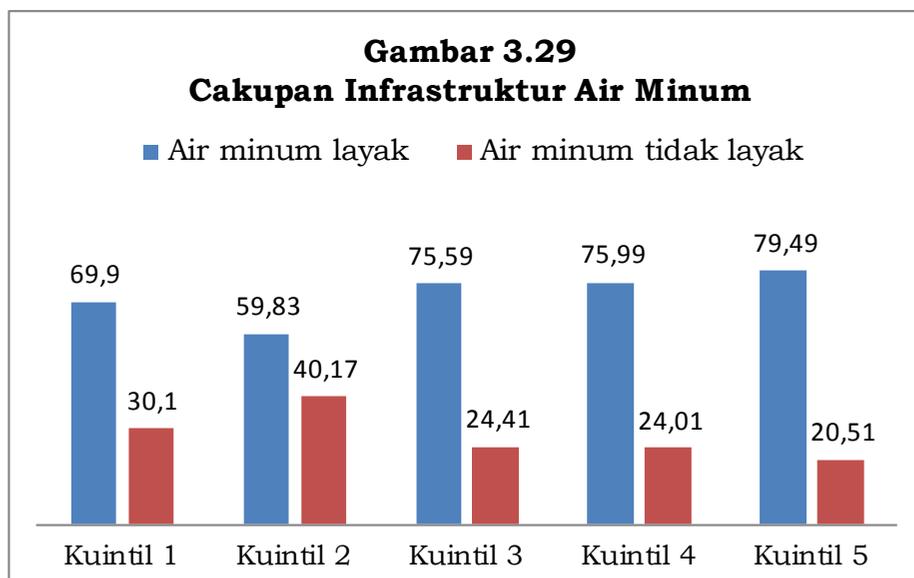
Jika pertumbuhan lingkungan permukiman kumuh ini dibiarkan, derajat kualitas hidup masyarakat miskin akan tetap rendah. Akan mudah menyebabkan kebakaran, memberi peluang tindakan kriminalitas, terganggunya norma tata susila, tidak teraturnya tata guna tanah dan sering menimbulkan banjir yang akhirnya menimbulkan degradasi lingkungan yang semakin parah. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah perlu memberikan fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan, revitalisasi kawasan, dan peningkatan kualitas permukiman serta penyediaan rumah murah. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut perlu dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai dengan operasi dan pemeliharaan infrastruktur.

Berdasarkan data Susenas 2020, cakupan Infrastruktur sanitasi layak dan Infrastruktur air minum layak di Kabupaten Pekalongan menunjukkan adanya ketimpangan antara kelompok miskin dan kelompok lebih sejahtera. Cakupan Infrastruktur sanitasi dapat dilihat dalam gambar berikut



Sumber :Susenas 2020, diolah SEPAKAT Bappenas

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Infrastruktur Sanitasi terbagi menjadi 2 diantaranya : Sanitasi layak dan Sanitasi tidak layak. Pada Kuintil 1 merupakan 20% kelompok termiskin. Kelompok termiskin yang belum mengakses sanitasi layak pada tahun 2020 sebesar 32,78%, sedangkan yang sudah mengakses sanitasi layak sebesar 67,22%. Selanjutnya cakupan Infrastruktur Air minum dapat di lihat dalam gambar sebagai berikut :



Sumber :Susenas 2020, diolah SEPAKAT Bappenas

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Kuintil 1 yang merupakan 20% kelompok termiskin. Kelompok termiskin yang belum mengakses air minum pada tahun 2020 sebesar 30,1%, sedangkan yang sudah mengakses air minum layak sebesar 69,9%.

Evaluasi capaian indikator pendukung dari indikator utama aspek infrastruktur dasar pada akhir tahun 2019 dibandingkan target tahun 2019 dalam RPJMD Tahun 2016-2021, bahwa terdapat 3 indikator perlu upaya keras yaitu Cakupan pelayanan Sanitasi; Cakupan pelayanan air minum; dan Rasio rumah tidak layak huni. Kondisi pencapaian indikator pendukung dipengaruhi adanya faktor/determinan penyebab kemiskinan dalam pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek infrastruktur dasar yaitu:

Penyedia Layanan/ Supply Side	Penerima Manfaat/ Demand Side	Masa Pandemi COVID-19
<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana sanitasi; • Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana sanitasi. • Sarana dan prasarana penyediaan air minum pada beberapa lokasi masih hidrant sehingga tidak bisa menghitung capaian indikatornya. • Adanya pengurangan debit di daerah mata air karena penggantian vegetasi sehingga debit berkurang, serta adanya pengurangan debit pada sumur dalam. • Banyaknya cakupan jumlah RTLH yang perlu ditangani.. • Sulitnya justifikasi perangkat daerah terhadap hasil verifikasi penerima RTLH (minimal 2 komponen struktur yang rusak dari atap, lantai, dan dinding), namun kenyataan dilapangan hanya rusak 1 parah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap sanitasi/kebiasan masyarakat yang BAB di sembarang tempat. • Penurunan tanah menjadi tinggi di daerah pesisir sehingga rob naik, serta letak sumber air dengan wilayah layanan terlalu jauh. • Secara sosial ekonomi masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan Rumah Layak Huni 	<ul style="list-style-type: none"> • Recofusing anggaran dari Pemerintah Pusat; • Perubahan perilaku masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan meningkat (mencuci tangan, dan menggunakan sarana sanitasi) • Kesadaran masyarakat terkait penggunaan air bersih meningkat • Swadaya RTLH dari masyarakat berkurang dibandingkan dengan sebelum COVID-19, keterbatasan anggaran Pemerintah yang hanya merupakan sharing dana antara pemerintah dan masyarakat.

Secara rinci pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek infrastruktur dasar dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.8. Kinerja Indikator Pendukung Bidang Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	SATUAN	REALISASI					TARGET TAHUN 2020	KINERJA SAAT INI
				2016	2017	2018	2019	2020	RPJMD 2016-2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Cakupan pelayanan Sanitasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	69,71	76,49	79,00	84,41	86,06	100	86,06 
2	Cakupan pelayanan air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	77,23	77,58	85,71	86,51	87,83	100	87,83 
3	Rasio rumah tidak layak huni	Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	%	11,06	9,80	9,07	7,07	7,08	7,00	101,14 

e. Bidang Ketahanan Pangan

Situasi kemiskinan tidak hanya didasarkan atas permasalahan pendapatan atau ekonomi belaka. Lebih lanjut daripada itu, permasalahan kemiskinan perlu dilihat dari aspek kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Permasalahan yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar salah satunya terbatasnya kecukupan dan mutu pangan.

Berdasarkan General Comment 12 dari the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) hak atas pangan (the right to food) telah diakui secara internasional sebagai salah satu hak dasar umat manusia. Hak atas pangan adalah merupakan kewajiban negara untuk dapat menyediakan pangan yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya, bagi seluruh penduduknya sehingga bisa memenuhi standar hidup yang layak.

Di Indonesia pengakuan hak atas pangan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, yang menyatakan “bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional”. Terbatasnya kecukupan dan kelayakan mutu pangan berkaitan erat dengan masalah ketersediaan pangan (the availability of food), daya beli dan akses kepada pangan, dan ketergantungan yang tinggi pada salah satu jenis pangan, seperti beras misalnya. Di samping itu, perilaku dan budaya yang membedakan perlakuan dalam pengaturan dan pembagian makan antaranggota keluarga juga berpengaruh terhadap pemenuhan kecukupan pangan.

Tidak tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai dapat diartikan sebagai telah terjadinya kemiskinan karena ada hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan maka ketersediaan pangan yang kemudian dikenal sebagai ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya strategis dalam penanggulangan masalah kemiskinan. The World Food Summit (WFS) menyatakan ketahanan pangan dapat terwujud saat semua orang setiap saat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhannya dan juga pemenuhan pangan bagi kehidupan yang sehat. Empat

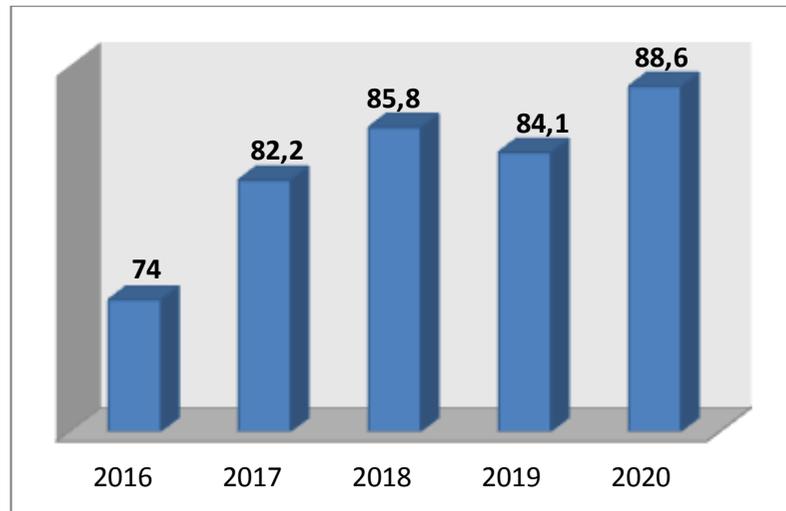
pilar utama dari ketahanan pangan ini adalah ketersediaan pangan, stabilitas suplai pangan, akses, dan pemanfaatan pangan.

Acuan untuk menilai tingkat keragaman ketersediaan pangan, yaitu Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai PPH ideal. Kinerja keragaman ketersediaan pangan pada suatu waktu dapat dinilai dengan metode PPH. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri, (2) impor pangan dan (3) pengelolaan cadangan pangan. Mengingat penduduk yang cukup besar dengan kemampuan ekonomi yang relatif lemah, serta kemauan untuk menjadi bangsa yang mandiri, bangsa Indonesia telah sepakat untuk memenuhi sebesar mungkin kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri (Deptan,2005)¹¹.

Ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan cukup baik. Pangan yang dikonsumsi rumah tangga terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis dengan satuan yang berbeda, sehingga dilakukan konversi ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama. Selanjutnya dihitung asupan energi menurut kelompok pangan per kapita/hari. Setelah itu dilanjutkan dengan menghitung skor PPH. PPH hasil perhitungan selanjutnya digolongkan berdasarkan empat kategori yaitu sangat kurang (< 55), kurang (55 – 69), cukup (70 – 84) dan baik (>85). Dengan Skor PPH pada tahun 2020 sebesar 88,6 termasuk dalam kategori cukup. Perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.

¹¹DEPTAN. Pedoman umum Pengembangan Konsumsi Pangan : <http://iptek.apiji.or.id/artikel/pangan/DEPTAN>. DEPTAN. 2006.

**Gambar 3.29. Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH)-
Indikator Utama Bidang Ketahanan Pangan Dalam Rangka
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan
Tahun 2016-2020**



*Sumber :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,
2020, diolah*

Kondisi Skor PPH Kabupaten Pekalongan perlu adanya upaya untuk meningkatkan pola pangan dengan menambah konsumsi pangan. Ada sembilan kelompok pangan yang digunakan untuk menghitung PPH yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, buah dan sayur serta lain-lain. Pangan yang dikonsumsi rumah tangga terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis dengan satuan yang berbeda, sehingga dilakukan konversi ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama. Selanjutnya dihitung asupan energi menurut kelompok pangan per kapita/hari. Standar Kebutuhann energi penduduk sebesar 2.000 kkal per hari dan kebutuhan protein sebesar 52 gram protein per hari.

Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi masalah bagi masyarakat miskin. Permasalahan kecukupan antara lain terlihat dari rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Bila kerawanan pangan diukur dengan kriteria kebutuhan konsumsi minimum sebesar 2.100 Kkal per hari berdasarkan garis kemiskinan makanan, maka hal tersebut dialami oleh 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam akses/keterjangkauan bahan pangan.

Di samping karena masalah ketersediaan dan akses terhadap pangan, masalah kecukupan pangan dipengaruhi pula oleh pola konsumsi yang bertumpu ada beras sebagai bahan pangan pokok. Pola konsumsi seperti itu menyebabkan ketergantungan masyarakat pada beras. Pada masyarakat tertentu menyebabkan adanya peralihan konsumsi pangan dari bukan beras menjadi beras. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengganggu ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, ketergantungan pada beras juga melemahkan inisiatif untuk melakukan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan selain beras seperti jagung, sagu, ubi jalar, dan bahan pangan lainnya yang dapat diproduksi secara lokal.

Perbedaan perlakuan dalam pengaturan dan pembagian makan antar anggota keluarga juga berpengaruh terhadap pemenuhan kecukupan pangan. Pembagian makanan masih dipengaruhi oleh perilaku dan budaya masyarakat di beberapa daerah yang mengutamakan bapak dan anak laki-laki lalu anak perempuan, dan terakhir ibu. Pola pembagian makan seperti itu juga berdampak pada buruknya kondisi gizi keluarga, terutama kondisi gizi ibu hamil yang dapat mengakibatkan kematian ibu pada waktu melahirkan dan setelah melahirkan.

Masalah kecukupan pangan juga dialami oleh petani penghasil pangan termasuk petani padi. Penyebab utamanya adalah fluktuasi harga yang terjadi pada saat musim panen dan musim paceklik yang tidak menguntungkan mereka. Impor beras yang dilakukan untuk menutup kebutuhan beras dan menjaga stabilitas harga seringkali tidak tepat waktu sehingga merugikan petani penghasil beras. Kepemilikan lahan yang sempit (kurang dari 1 ha), dukungan prasarana dan sarana yang terbatas, dan harga jual yang tidak pasti, mereka tidak memperoleh surplus yang memadai untuk mencukupi kebutuhan menjelang musim panen berikutnya. Mereka cenderung hidup secara subsisten yang menghambat mereka untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Masalah lain yang juga mempengaruhi ketahanan masyarakat dalam menghadapi masalah kerawanan pangan adalah kemampuan menyediakan cadangan pangan untuk mengatasi musim paceklik. Saat ini, sebagian besar lumbung pangan milik masyarakat tidak berfungsi karena tidak dikelola dengan baik dan lemahnya dukungan dari pemerintah.

Upaya mengentaskan kemiskinan termasuk didalamnya upaya mewujudkan ketahanan pangan pada masyarakat miskin

perlu dilakukan dengan pemberdayaan (empowerment) masyarakat petani agar mereka mengenali potensi dirinya sehingga mampu secara mandiri menemukenali dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui: (1) meningkatkan kemampuan dalam kegiatan on-farm, off-farm dan non-farm; (2) meningkatkan kemampuan dalam mengelola ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, dan kerawanan pangan; serta (3) meningkatkan kemampuan kelembagaan pangan untuk mengembangkan usahanya.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan diharapkan daya beli rumah tangga mengakses bahan pangan akan meningkat. Peningkatan daya beli rumah tangga memberikan kesempatan memilih (freedom to choose) pangan yang beragam sesuai selera, termasuk untuk pemenuhan kecukupan gizi yang dapat mendukung hidup sehat dan produktif.

Dalam pendekatan *right based approach* dalam hal bidang pangan, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah startegis, diantaranya:

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan local;
- 2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan dan pangan gender keluarga;
- 3) Meningkatkan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi;
- 4) Menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi dan harga pangan;
- 5) Meningkatkan pendapatan petani pangan dan sekaligus melindungi produk pangan dalam negeri dari pangan impor;
- 6) Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan;
- 7) Menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok rentan akibat goncangan ekonomi, sosial dan bencana alam.

Pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek ketahanan pangan pada akhir tahun 2019 dibandingkan target tahun 2019 dalam RPJMD Tahun 2016-2021, bahwa 1 indikator perlu upaya keras , yaitu ketersediaan energi per kapita (kcal/kap/hari) dan 1 indikator sudah on track/in trend

↑, yaitu ketersediaan protein per kapita (gram/kap/hari). Kondisi pencapaian indikator pendukung dipengaruhi adanya faktor/determinan penyebab kemiskinan dalam pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek ketahanan pangan yaitu:

Penyedia Layanan/ Supply Side	Penerima Manfaat/ Demand Side	Masa Pandemi COVID-19
<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan cakupan sasaran kegiatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. • Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana seluruh lahan pertanian yang menunjang peningkatan produktivitas padi dan bahan pangan lokal yang berupa jalan usaha tani, jaringan irigasi dan dam parit. • Belum optimalnya pemeliharaan bibit indukan akibat biaya dan waktu dalam penyediaan bibit ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum seluruh kelompok tani berbadan hukum sehingga berimplikasi pada cakupan sasaran bantuan/pelatihan. • Beragamnya kapasitas SDM Kelompok tani yang mendapatkan pelatihan. • Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya aktivitas mengumpulkan orang, diskusi, pelatihan akibat pembatasan selama COVID-19, seperti peningkatan mutu ternak, worksop, pelatihan, bantuan bibit, peningkatan SDM petani ternak dan sebagainya.

Secara rinci pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek ketahanan pangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.9.
Kinerja Indikator Pendukung Bidang Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
Pekalongan Tahun 2016-2020

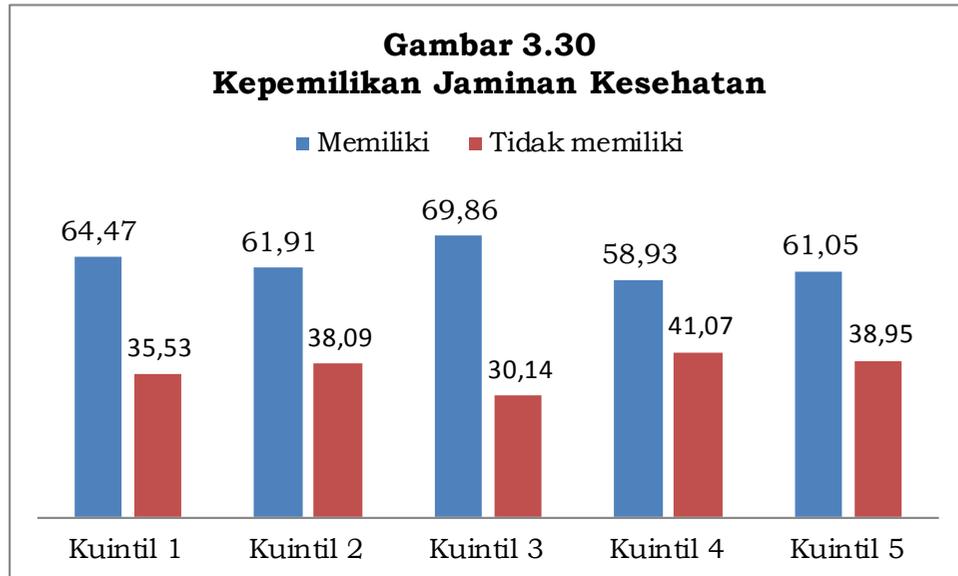
NO	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	SATUAN	REALISASI					TARGET TAHUN 2020	KINERJA SAAT INI
				2016	2017	2018	2019	2020	RPJMD 2016-2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
1	Ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hari)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(kkal/kap/hari)	2.434,750	2.425,570	2.343,300	2.343,300	2,600,00	2.575,00	100,97  Akan Tercapai
2	Ketersediaan protein per kapita (gram/kap/hari)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(gr/kap/hari)	68,70	69,04	67,09	70,51	73,2	71,5	102,377  sudah on track/in trend

f. Bidang Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. PMKS merupakan salah satu indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Hal tersebut disebabkan PMKS berkaitan erat dengan kemiskinan. Adanya PMKS (Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Balita Terlantar, Anak Jalanan, Lanjut Usia Terlantar, Pengemis, Gelandangan, Korban Narkoba, Tuna Susila, Eks Narapidana, Penyandang Cacat, Anak dengan Kedistabilan, Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Anak Korban Tindak Kekerasan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Kelompok Minoritas, Pemulung, Korban Kekerasan, ODHA, Trafficking dan Anak membutuhkan Perlindungan Khusus) menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Demikian halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Berbagai strategi penanggulangan PMKS ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan baik dalam bentuk pelayanan, bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial maupun perlindungan sosial. Namun rendahnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menyediakan bantuan sosial bagi PMKS untuk mencapai hidup layak menimbulkan permasalahan yang berdampak terhadap kemiskinan.

Penanganan terhadap PMKS di Kabupaten Pekalongan melalui program jaminan kesehatan dan program jaminan sosial. Program jaminan kesehatan adalah jaminan yang diberikan oleh baik dari pemerintah pusat atau daerah maupun dari swasta untuk menjamin penduduk agar dapat mengakses pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan umumnya menjamin pemegang manfaat untuk dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan biaya terjangkau. Penduduk miskin dan rentan umumnya memiliki kemampuan membayar yang rendah, sehingga biaya jasa kesehatan menjadi penghalang bagi penduduk miskin dan rentan. Keberadaan jaminan kesehatan akan mengurangi halangan dalam bentuk biaya bagi penduduk miskin dan rentan. Sehingga, penduduk miskin dan rentan dapat menjaga kesehatan yang akan berpengaruh langsung pada produktivitas aktivitas mereka.

Berdasarkan data Susenas pada tahun 2020 Kepemilikan jaminan kesehatan baru mencapai angka 58% dan tidak ada ketimpangan antar kelompok miskin dan kelompok kaya. Meskipun demikian perlu ada perhatian khusus terhadap kuintil 1 yang merupakan 20% kelompok termiskin di Kabupaten Pekalongan dimana cakupan jaminannya hanya 64,47%. Kelompok miskin dan rentan ini merupakan kelompok yang paling rawan mendapatkan shock. Berikut ini data kepemilikan jaminan kesehatan tahun 2020 sebagai berikut :

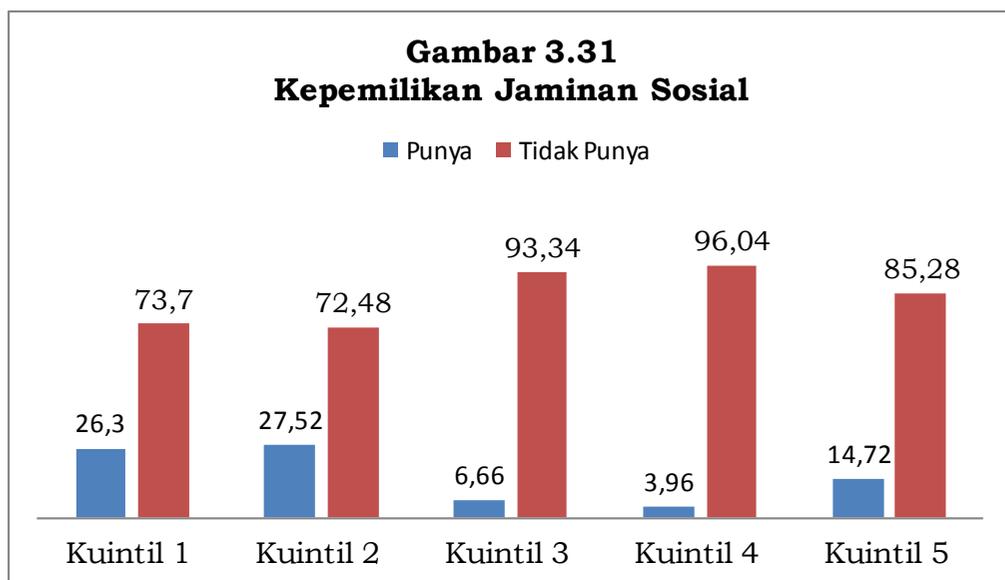


Sumber :Susenas 2020, diolah SEPAKAT Bappenas

Penanganan terhadap PMKS di Kabupaten Pekalongan selanjutnya melalui program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah jaminan yang diberikan, baik dari pemerintah pusat atau daerah maupun swasta untuk melindungi penduduknya saat mereka mengalami shock yang berakibat meningkatnya keterbatasan akses terhadap hal yang menjamin dirinya dapat hidup dengan layak. Jaminan sosial ditunjukan untuk mencegah penduduk yang tidak miskin untuk jatuh miskin jika kalau terjadi shock, misalnya : bantuan langsung tunai diberikan karena masyarakat akan menghadapi peningkatan biaya hidup karena dicabut atau kurangnya nilai subsidi tertentu tergantung pada program jaminannya. Jaminan sosial dapat berupa program menyeluruh yang sarannya adalah seluruh penduduk.

Analisis terhadap kepemilikan jaminan sosial digunakan untuk menunjukkan apakah penduduk suatu daerah, khususnya mereka yang miskin dan rentan sudah terlindungi dari shock yang mungkin terjadi dan berpotensi menyebabkan penduduk

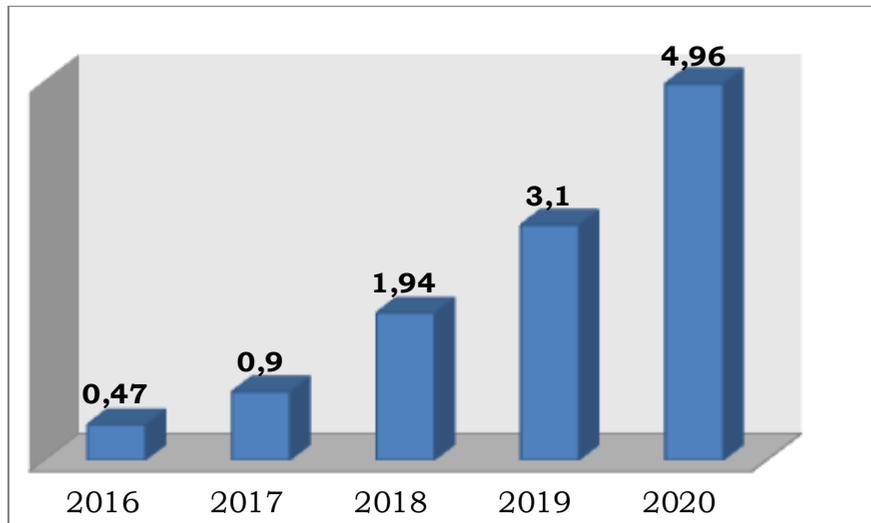
yang tergolong hampir miskin menjadi jatuh miskin. Berdasarkan data Susenas pada tahun 2020 kepemilikan jaminan sosial tergolong masih cukup rendah. Pada kuintil 1 yang merupakan 20% kelompok termiskin di Kabupaten Pekalongan hanya 26,3% yang memiliki jaminan sosial berupa : jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan kartu keluarga sejahtera dalam rumah tangga. Berikut ini data jaminan sosial disajikan dalam gambar sebagai berikut



Sumber :Susenas 2020, diolah SEPAKAT Bappenas

Penanganan terhadap PMKS di Kabupaten Pekalonganyang ada masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih sangat rendahnya capaian kinerja pemberian bantuan maupun pemberdayaan terhadap PMKS yang ada, yaitu hingga tahun 2019 masih sebesar 3,10%. Meskipun demikian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ada peningkatan sebesar 4.49% dalam upaya peningkatan pelayanan/penanganan terhadap PMKS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Perkembangan skorPolaPanganHarapan (PPH) di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.32 Kinerja Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial-Indikator Utama Bidang Sosial Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2020



Sumber :DinasSosial, 2020, diolah

Melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menyediakan bantuan sosial bagi PMKS yang sifatnya urgent dan emergency di masih kurang mendapat perhatian sehingga penanganannya tidak optimal. Hal itu disebabkan tidak adanya sarana prasarana tempat penampungan/shelter bagi PMKS yang mendapat bantuan layanan, belum dimilikinya panti maupun rumah singgah yang dapat menampung permasalahan sosial, kurangnya SDM profesional bidang sosial.

Penanganan PMKS di Kabupaten Pekalongan perlu terus dilakukan melalui bimbingan sosial dan mental, pelatihan dan keterampilan, bantuan pelayanan kemiskinan, bantuan langsung untuk masyarakat miskin dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan atau keahlian PMKS serta untuk meningkatkan taraf hidup yang layak. Selain itu, permasalahan kepemilikan identitas hukum pada masyarakat miskin juga perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada penguatan kualitas layanan dasar. Dalam hal ini, identitas hukum menjadi pintu masuk akses layanan dasar bagi masyarakat miskin, termasuk mengingat belum optimalnya pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu segera mengambil langkah-langkah strategis verifikasi dan validasi DTKS baik melalui dukungan APBD Kabupaten/Kota maupun APB Desa melalui pemanfaatan dana desa, mengingat penggunaan dana desa untuk verifikasi dan validasi data

kemiskinan desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek sosial pada akhir tahun 2019 dibandingkan target tahun 2019 dalam RPJMD Tahun 2016-2021, bahwa 3 indikator sudah on track/in trend meningkat, yaitu persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; persentase faskir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi (KUBE/UEP/WRSE); dan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Kondisi pencapaian indikator pendukung dipengaruhi adanya faktor/determinan penyebab kemiskinan dalam pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek sosial yaitu:

Penyedia Layanan/ Supply Side	Penerima Manfaat/ Demand Side	Masa Pandemi COVID-19
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak seluruh kecamatan terdapat keberadaan LKSA untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat dan APBD Provinsi melalui LKSA. Sementara ini Pemerintah Kabupaten tidak ada bantuan untuk LKSA. • Bantuan pemberian makanan tambahan dari Pemerintah Kabupaten tidak diberikan secara rutin (penyaluran dilakukan setahun sekali). Bantuan masih sebatas respon terhadap kasus, bukan merupakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kepedulian masyarakat dan keluarga terhadap anak terlantar dan lanjut usia. • Rendahnya kapasitas dan kemauan penyandang Disabilitas dalam berusaha. • Masih ada warga dari beberapa wilayah yang tidak mengajukan bantuan sosial santunan kematian, disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya jauhnya akses menuju Dinas Sosial, warga merasa pengurusan keperluan pemakaman merupakan kewajiban keluarga sehingga tidak memerlukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dilakukan aktivitas temu penguatan anak maupun mengadakan pelatihan bagi KPM dalam pemanfaatan bantuan selama masa pandemi COVID-19. • Rendahnya cakupan pelayanan terhadap lanjut usia selama pandemi COVID-19, hanya 17 orang masing-masing Rp.200.000,- setahun. • Ekonomi menurun dan daya beli masyarakat rendah sehingga berdampak terhadap usaha

Penyedia Layanan/ Supply Side	Penerima Manfaat/ Demand Side	Masa Pandemi COVID-19
<p>jaminan sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas dialihkan untuk penanganan COVID-19. • Belum optimalnya penyediaan kebutuhan sosial fakir miskin mengingat cakupan yang banyak. 	<p>bantuan dari pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya pemanfaatan bantuan oleh KPM sehingga terdapat usaha dari KPM tidak berkembang. 	<p>yang dijalankan oleh penyandang disabilitas maupun usaha dari KPM selama masa pandemi COVID-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial tidak bisa mengadakan pelatihan sehingga KPM tidak bisa memanfaatkan bantuan secara maksimal
<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan alat perekaman KTP-el karena faktor kerusakan (perlu penggantian baru). • Rendahnya kuantitas tenaga pelayanan adminduk akibat pensiun dan meninggal dunia. • Rendahnya kapasitas pe tugas pengelola layanan adminduk berbasis daring/online. • Kurangnya SDM untuk melaksanakan percepatan penerbitan KIA melalui kerjasama pelayanan dengan instansi terkait. • Kurangnya tenaga dan sarana prasarana untuk melaksanakan re-entry dokumen akta kelahiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat untuk menggunakan layanan adminduk berbasis online / daring. • Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus pembuatan KIA • Masih terdapatnya masyarakat yang belum memanfaatkan layanan jemput bola penerbitan akta kelahiran • Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus pembuatan akta kematian bagi anggota keluarga yang meninggal dunia 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan pelayanan tatap muka dengan pelayanan online, faktor sarana dan tingkat pengetahuan dan penyesuaian masyarakat/adaptasi layanan baru sangat mempengaruhi layanan IT selama masa pandemi COVID-19. • Kegiatan penerapan kartu identitas anak (KIA) tidak dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran.

Penyedia Layanan/ Supply Side	Penerima Manfaat/ Demand Side	Masa Pandemi COVID-19
<p>yang kedalam database SIAK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sosialisasi dan peningkatan kerjasama penerbitan akta kematian dengan instansi-instansi terkait. 		

Secara rinci pencapaian indikator pendukung dari indikator utama aspek sosial dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.10 Kinerja Indikator Pendukung Bidang Sosial Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	SATUAN	REALISASI					TARGET TAHUN 2019	KINERJA SAAT INI
				2016	2017	2018	2019	2020	RPJMD 2016-2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Dinas Sosial	%	0,47	0,90	1,94	3,10	4,96	3,96	125,25 
2	Persentase faskir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi (KUBE/UEP/WRSE)	Dinas Sosial	%	0,03	0,10	0,24	0,37	0,45	0,35	128,57 
3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	70,10	70,83	76,16	85,89	86,78	92,33	93,98 

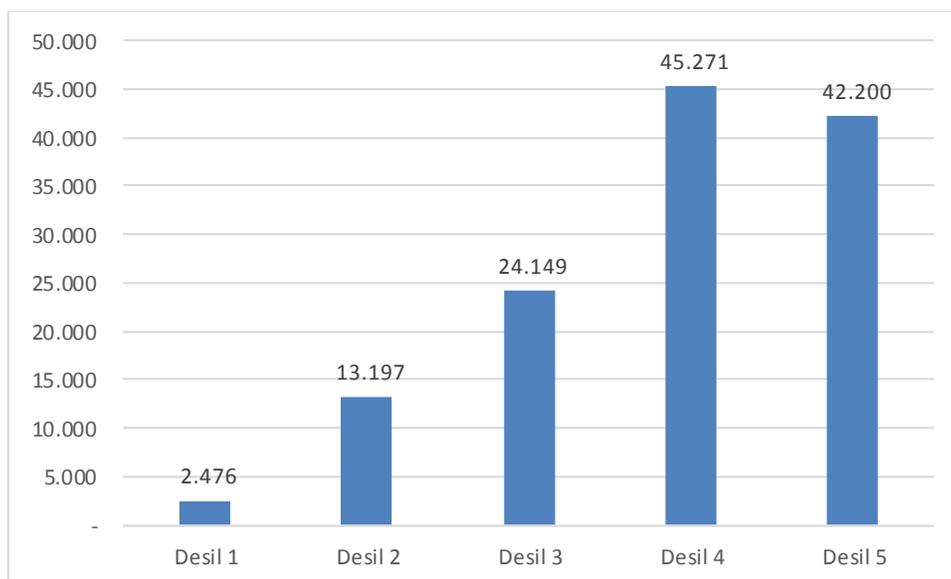
BAB V

LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sasaran intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ditunjukkan berdasarkan indikator kemiskinan hasil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 (Semester 2). Sasaran intervensi program penanggulangan kemiskinan dengan melihat dari permasalahan yang dihadapi. Perangkat daerah sebagai pengampu urusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan perlu mencermati kondisi indikator yang menjadi sasaran program dan kegiatannya.

Berdasarkan hasil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 (Semester 2), jumlah rumah tangga dilihat berdasarkan status kesejahteraannya dikelompokkan ke dalam 5 desil. Pada kelompok desil 1 dengan jumlah rumah tangga sebanyak 2.476 ruta, kelompok desil 2 sebanyak 13.197 ruta, kelompok desil 3 terdapat sebanyak 24.149 ruta, kelompok desil 4 terdapat sebanyak 45.271 ruta dan kelompok desil 5 terdapat sebanyak 42.200 ruta. Total jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kabupaten Pekalongan sebanyak 127.293 ruta.

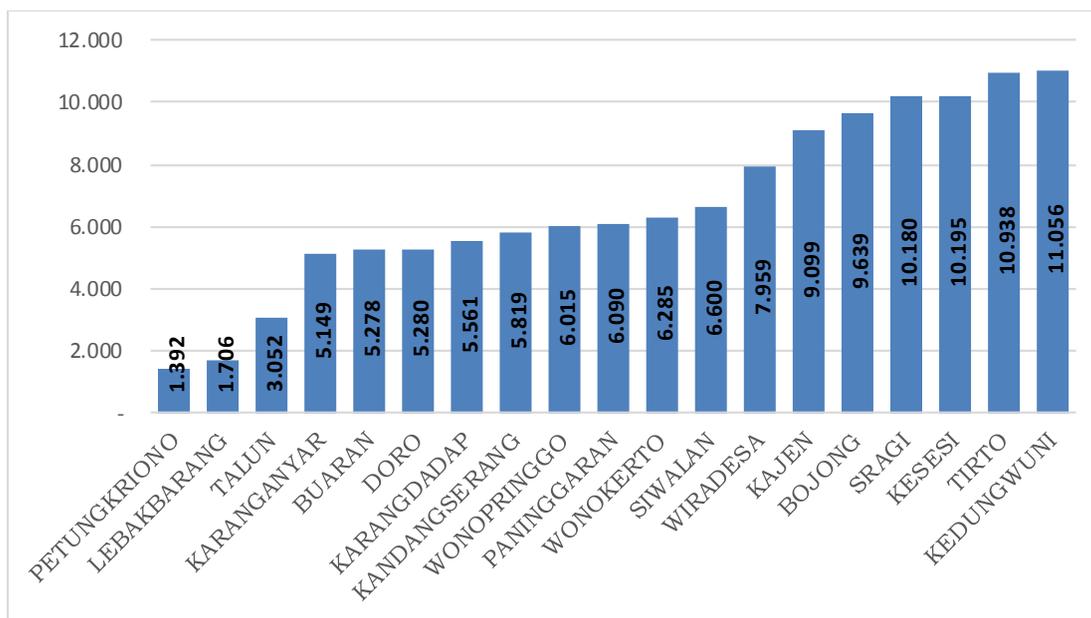
Gambar 5.1 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Status Kesejahteraan 50% Terendah Kabupaten Pekalongan



Sumber : Data DTKS Oktober 2020, Di Olah

Dilihat berdasarkan persebarannya ditingkat kecamatan, jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kabupaten Pekalongan posisi tertinggi di Kecamatan Kedungwuni sebanyak 11.056 ruta, diikuti 5 tertinggi lainnya, yaitu Kecamatan Tirto, Kesesi, Sragi, dan Bojong. Sedangkan jumlah rumah tangga miskin menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kabupaten Pekalongan posisi terendah berada di Kecamatan Petungkriono sebanyak 1.392 ruta dan Lebakbarang sebanyak 1.706 ruta. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 5.2 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Status Kesejahteraan 50% Terendah dan Kecamatan di Kabupaten Pekalongan



Selengkapnya persebaran Rumah Tangga Berdasarkan Status Kesejahteraan 50% Terendah masing-masing desil pada setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Status Kesejahteraan 40% Terendah dan Kecamatan di Kabupaten Pekalongan

No	Nama Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 5
		Ruta	Ruta	Ruta	Ruta	Ruta
1	Bojong	178	1.033	1.998	3.372	3.058
2	Buaran	121	645	1.187	1.800	1.525
3	Doro	111	555	1.085	1.912	1.617
4	Kajen	192	1.047	1.920	3.309	2.631
5	Kandangserang	316	1.073	1.304	1.912	1.214
6	Karanganyar	177	698	1.016	1.813	1.445
7	Karangdadap	73	602	1.164	2.072	1.650
8	Kedungwuni	119	985	2.101	4.194	3.657
9	Kesesi	150	956	1.869	3.530	3.690
10	Lebakbarang	37	224	395	622	428
11	Paningsgaran	224	1.096	1.483	2.072	1.215
12	Petungkriono	22	160	317	532	361
13	Siwalan	194	658	1.145	2.265	2.338
14	Sragi	297	1.142	1.774	3.511	3.456
15	Talun	75	426	667	1.121	763
16	Tirto	63	783	1.803	4.086	4.203
17	Wiradesa	54	443	1.171	2.752	3.539
18	Wonokerto	22	260	765	2.250	2.988
19	Wonopringgo	51	411	985	2.146	2.422
	Kabupaten Pekalongan	2.476	13.197	24.149	45.271	42.200

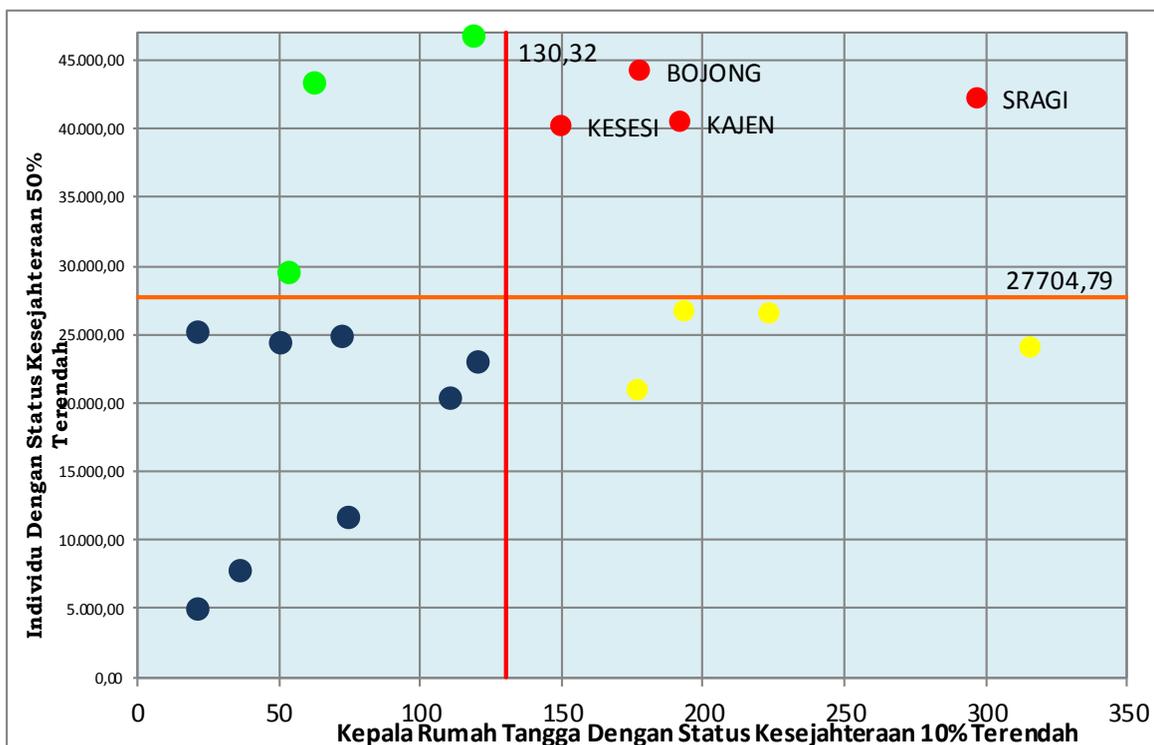
Sesuai kebijakan Laboratorium kemiskinan, bahwa penentuan lokasi prioritas menggunakan dasar data Basis Data Terpadu (BDT) atau saat ini disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial. Perangkat Daerah terkait dalam memilih lokasi prioritas dari hasil kuadran perlu mempertajam melalui pendekatan laboratorium kemiskinan, pendekatan topografi wilayah, serta dipertajam dengan PPA (Participatory Poverty Assessment).

A. Lokasi Prioritas Tingkat Kecamatan Program Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan analisis kuadran, kecamatan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) terdapat 4 kecamatan termasuk pada kemiskinan tinggi (merah) dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah, yaitu Kecamatan Sragi, Bojong, Kajen dan Kesesi . Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan dapat dikonsentrasikan pada kecamatan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.3 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Kecamatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat kecamatan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah pada setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.2 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Kecamatan
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan**

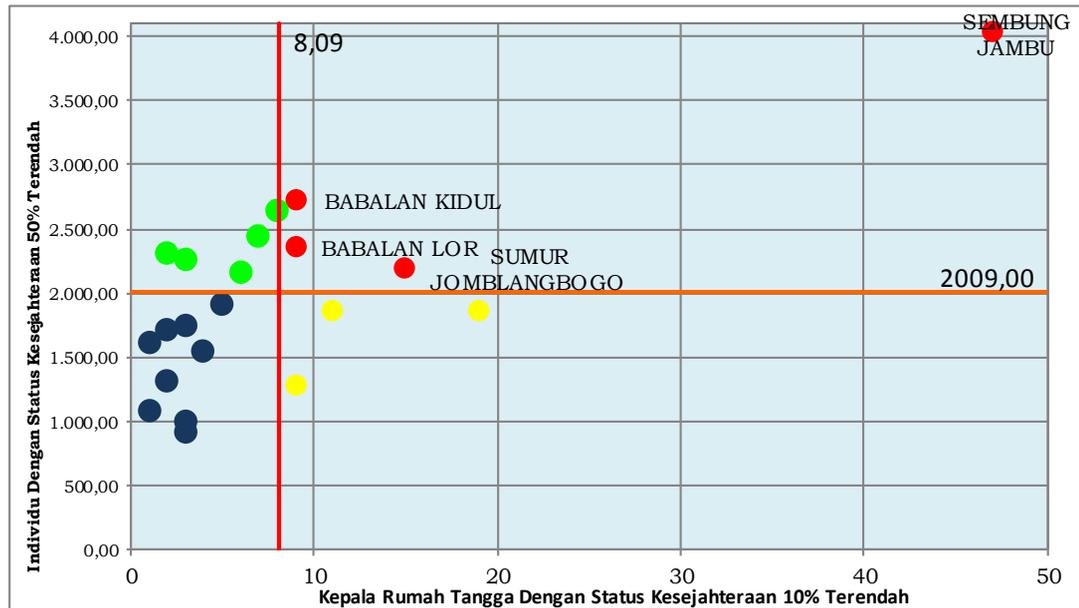
No	Kecamatan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1	Sragi	297	42.229	1
2	Kajen	192	40.411	1
3	Bojong	178	44.198	1
4	Kesesi	150	40.168	1
5	Kandangserang	316	24.040	2
6	Paninggaran	224	26.512	2
7	Siwalan	194	26.735	2
8	Karanganyar	177	20.945	2
9	Kedungwuni	119	46.651	3
10	Tirto	63	43.230	3
11	Wiradesa	54	29.501	3
12	Buaran	121	22.957	4
13	Doro	111	20.267	4
14	Talun	75	11.588	4
15	Karangdadap	73	24.839	4
16	Wonopringgo	51	24.352	4
17	Lebakbarang	37	7.686	4
18	Petungkriono	22	4.917	4
19	Wonokerto	22	25.165	4

B. Lokasi Prioritas Tingkat Desa/Kelurahan Program Penanggulangan Kemiskinan

1. Kecamatan Bojong

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Bojong, yaitu Sembung Jambu, Sumur Jomblangbogo, Babalan Kidul, Babalan Lor dan Kalipancur. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Bojong dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.4 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Bojong



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Bojong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Bojong

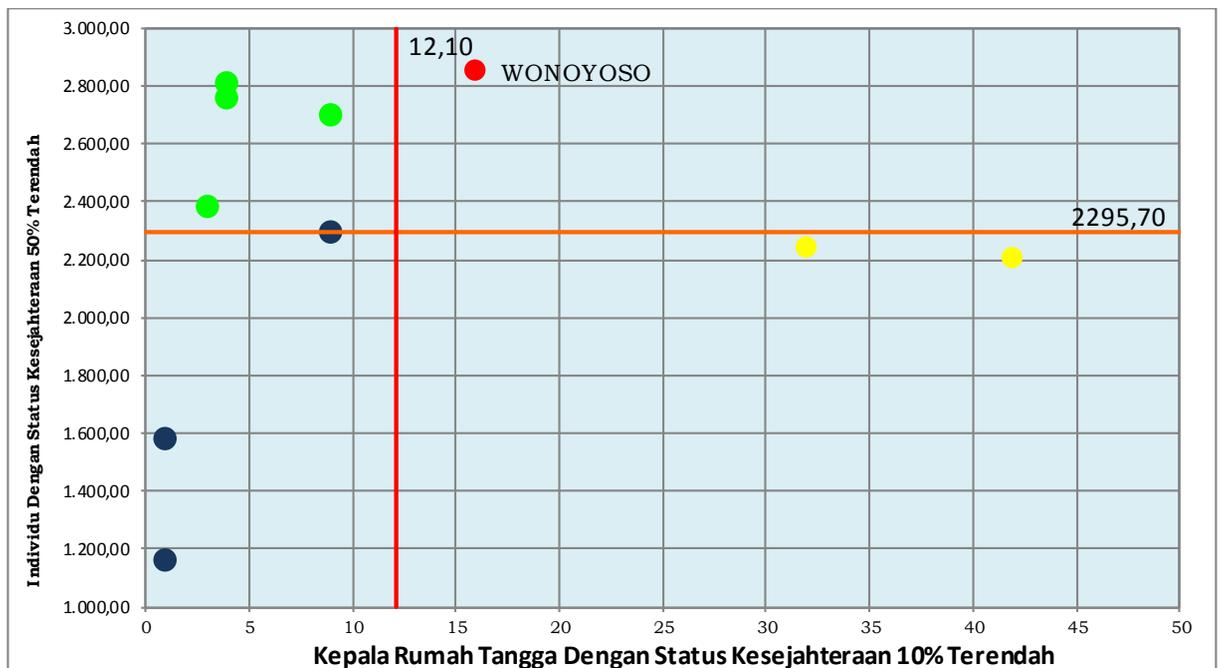
No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Sembung Jambu	47	3227	1
2.	Sumur Jomblangbogo	15	4038	1
3.	Babalan Kidul	9	2191	1
4.	Babalan Lor	9	2720	1
5.	Kalipancur	9	2352	1
6.	Duwet	19	1867	2
7.	Kemasan	11	1865	2
8.	Bojonglor	9	1274	2
9.	Menjangan	8	2649	3
10.	Jajar Wayang	7	2445	3
11.	Bojong Wetan	6	2154	3
12.	Randu Muktiwaren	3	2262	3
13.	Wiroditan	2	2316	3
14.	Legok Clile	5	1919	4
15.	Karangsari	4	1547	4
16.	Bukur	3	1750	4

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
17.	Pantianom	3	912	4
18.	Rejosari	3	999	4
19.	Bojong Minggir	2	1705	4
20.	Ketitang Kidul	2	1311	4
21.	Ketitanglor	1	1079	4
22.	Wangandowo	1	1616	4

2. Kecamatan Buaran

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Buaran, yaitu Wonoyoso. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Buaran dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.5 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Buaran



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Buaran dapat dilihat pada tabel berikut.

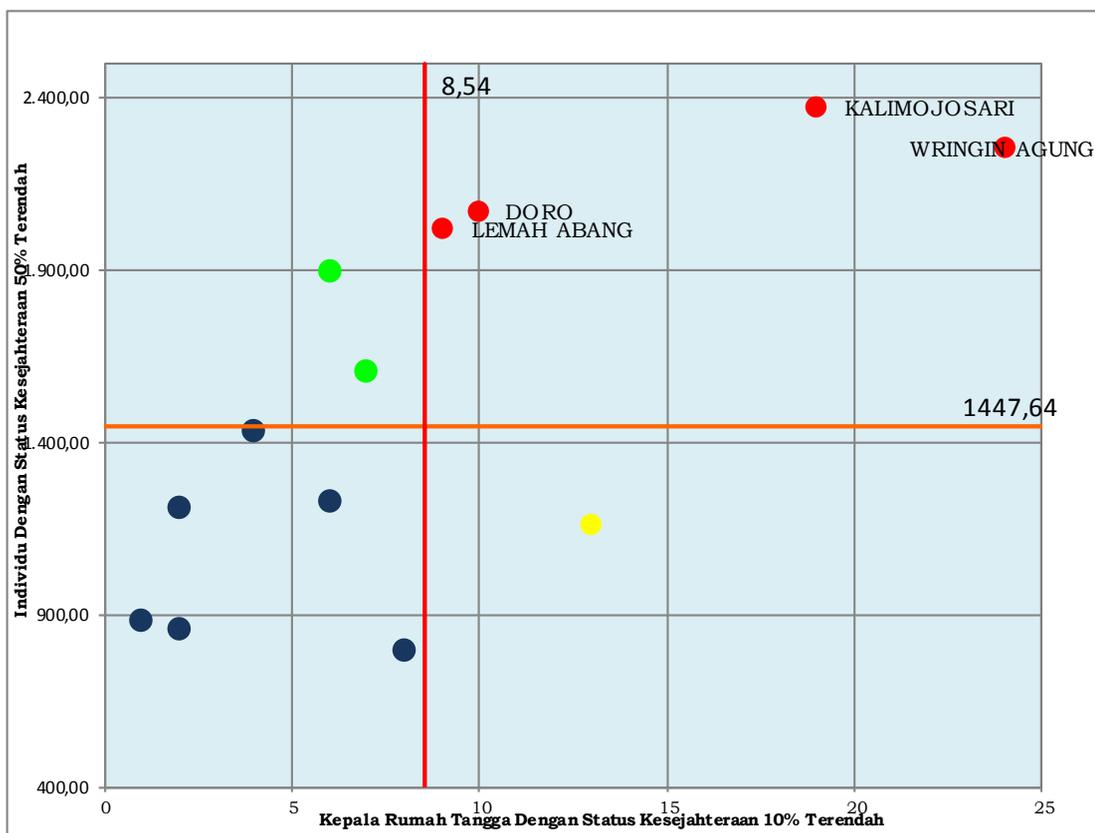
Tabel 5.4 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Buaran

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Wonoyoso	16	2854	1
2.	Kertijayan	42	2202	2
3.	Pakumbulan	32	2238	2
4.	Coprayan	9	2695	3
5.	Simbang Kulon	4	2757	3
6.	Simbang Wetan	4	2806	3
7.	Paweden	3	2379	3
8.	Watusalam	9	2293	4
9.	Bligo	1	1577	4
10.	Sapugarut	1	1156	4

3. Kecamatan Doro

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Doro, yaitu Wringin Agung, Kalimojosari, Doro, dan Lemah Abang. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Doro dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Grafik 5.6 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Doro



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Doro dapat dilihat pada tabel berikut.

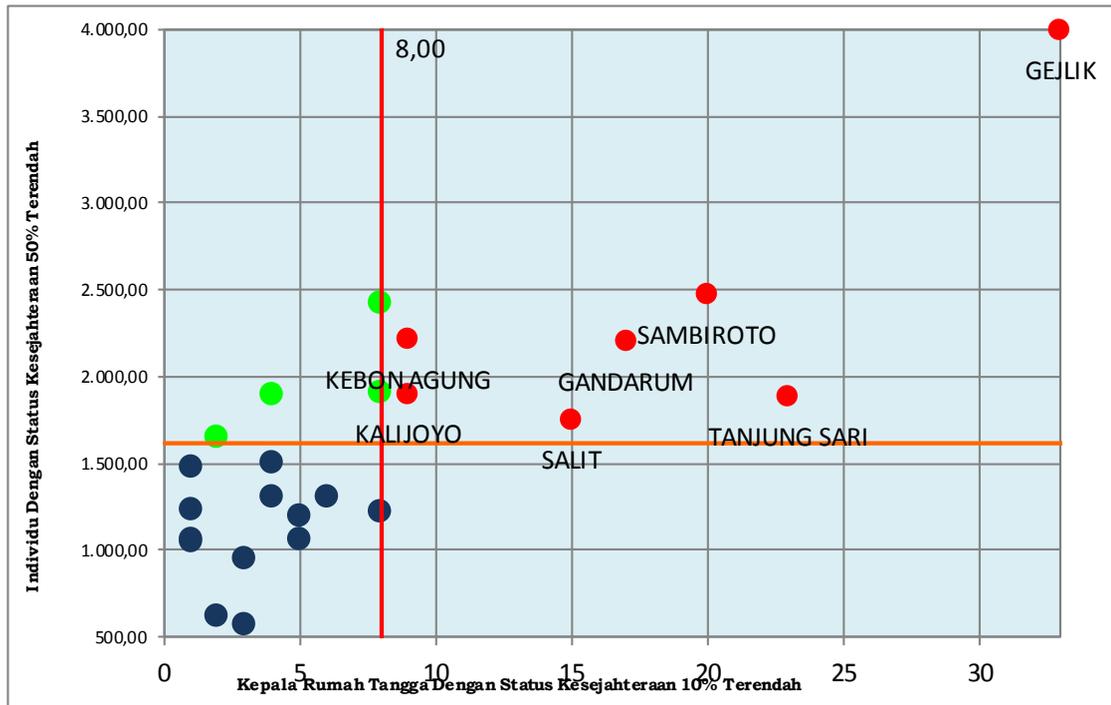
Tabel 5.5 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Doro

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Wringin Agung	24	2254	1
2.	Kalimojosari	19	2371	1
3.	Doro	10	2070	1
4.	Lemah Abang	9	2019	1
5.	Dororejo	13	1159	2
6.	Bligorejo	7	1607	3
7.	Rogoselo	6	1897	3
8.	Pungangan	8	796	4
9.	Sawangan	6	1224	4
10.	Harjosari	4	1429	4
11.	Kutosari	2	1211	4
12.	Larikan	2	859	4
13.	Sidoarjo	1	880	4
14.	Randusari	0	491	4

4. Kecamatan Kajen

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Kajen, yaitu Gejlik, Tanjung Sari, Sambiroto, Gandarum, Salit, Kalijoyo dan Kebon Agung. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Kajen dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.7 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Kajen



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Kajen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Kajen

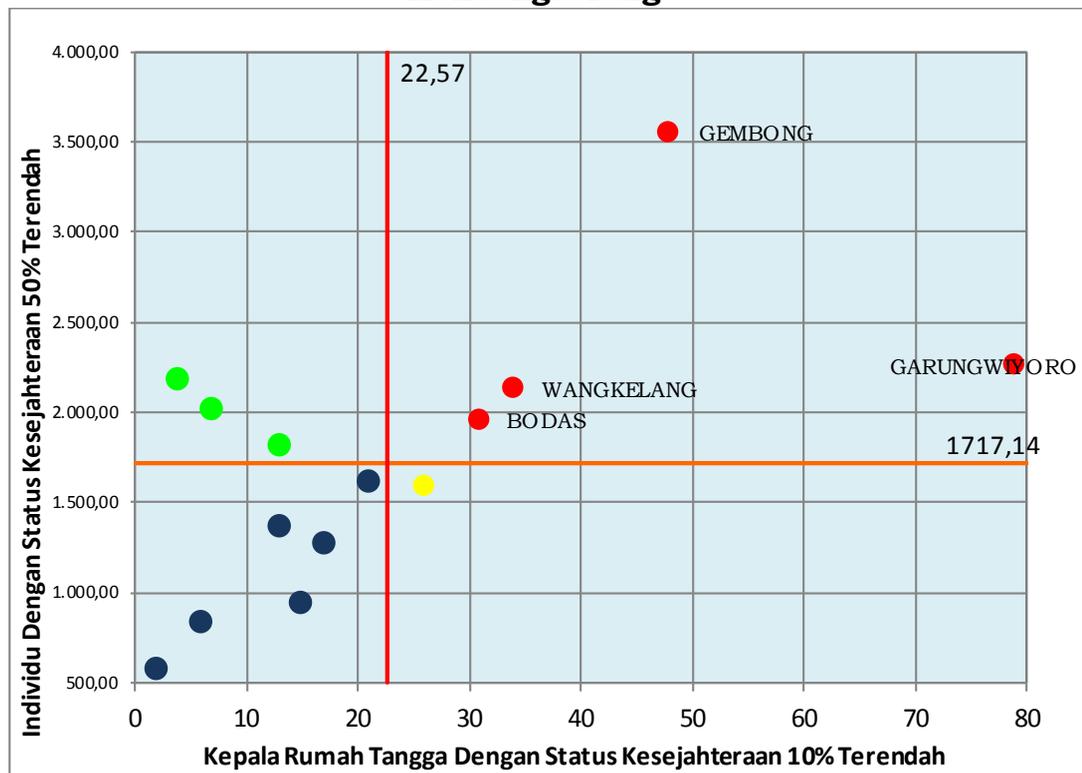
No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Gejlik	33	3995	1
2.	Tanjung Sari	23	1888	1
3.	Sambiroto	20	2474	1
4.	Gandarum	17	2202	1
5.	Salit	15	1754	1
6.	Kalijoyo	9	1906	1
7.	Kebon Agung	9	2214	1
8.	Pekiringan Alit	8	2424	3
9.	Rowolaku	8	1914	3
10.	Kutorejo	4	1903	3
11.	Nyamok	2	1659	3
12.	Kutorojo	8	1228	4
13.	Linggoasri	6	1312	4

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
14.	Kajongan	5	1205	4
15.	Pringsurat	5	1071	4
16.	Pekiringan Ageng	4	1311	4
17.	Sabarwangi	4	1504	4
18.	Brengkolang	3	577	4
19.	Tambakroto	3	953	4
20.	Sokoyoso	2	622	4
21.	Sangkan Joyo	1	1069	4
22.	Sinangoh Prendeng	1	1480	4
23.	Tanjung Kulon	1	1237	4
24.	Wonorejo	1	1049	4
25.	Kajen		1460	4

5. Kecamatan Kandangserang

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Kandangserang, yaitu Garungwiyoro, Gembong, Wangkelang dan Bodas. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Kandangserang dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.8 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Kandangserang



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Kandangserang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Kandangserang

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Garungwiyoro	79	2256	1
2.	Gembong	48	3549	1
3.	Wangkelang	34	2124	1
4.	Bodas	31	1952	1
5.	Karanggondang	26	1591	2
6.	Bojongkoneng	13	1816	3
7.	Luragung	7	2015	3
8.	Lambur	4	2172	3
9.	Sukoharjo	21	1607	4
10.	Klesem	17	1269	4
11.	Bubak	15	931	4
12.	Trajumas	13	1356	4
13.	Tajur	6	830	4
14.	Kandangserang	2	572	4

6. Kecamatan Karanganyar

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Karanganyar, yaitu Karangsari, Pedawang, Lolong dan Legok Kalong. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Karanganyar dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.9 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Karanganyar



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Karanganyar

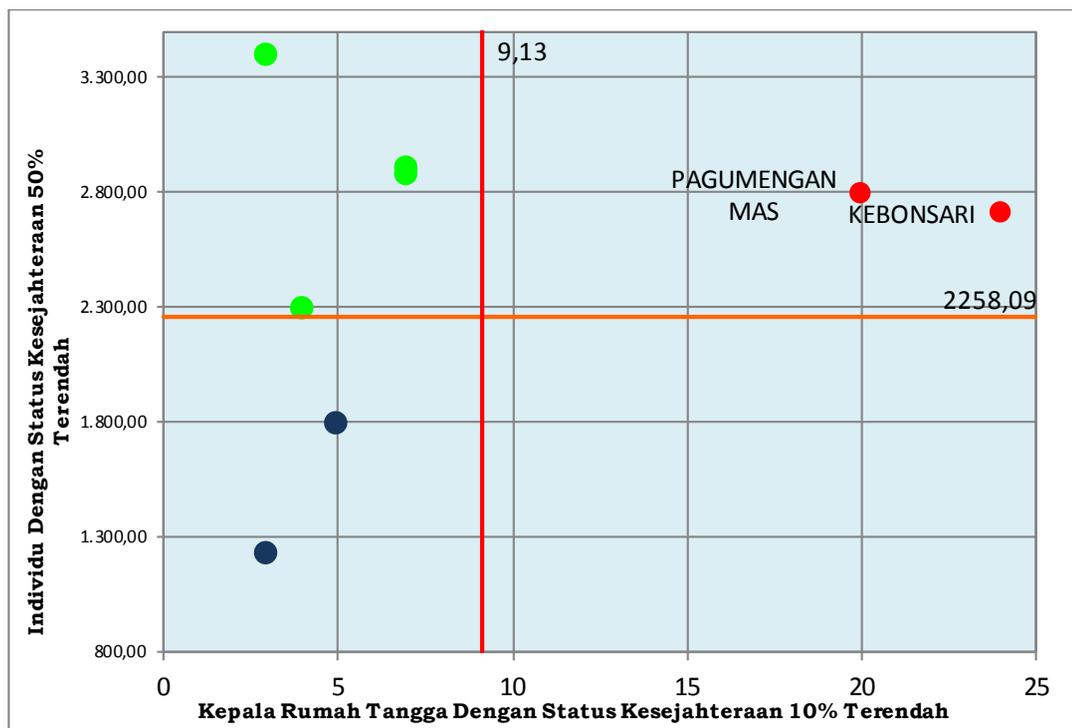
No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Karangsari	43	2003	1
2.	Pedawang	33	1484	1
3.	Lolong	18	1430	1
4.	Legok Kalong	16	2223	1
5.	Banjarejo	20	1382	2
6.	Sidomukti	7	1658	3
7.	Kayugeritan	6	2123	3
8.	Pododadi	9	1267	4
9.	Sukosari	6	1351	4
10.	Kutosari	5	656	4
11.	Wonosari	4	660	4
12.	Gutomo	3	1200	4

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
13.	Karang Gondang	3	1154	4
14.	Limbanan	3	1154	4
15.	Kulu	1	1200	4

7. Kecamatan Karangdadap

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Karangdadap, yaitu Kebonsari dan Pagumengan Mas. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Karangdadap dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.10 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Karangdadap



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Karangdadap dapat dilihat pada tabel berikut.

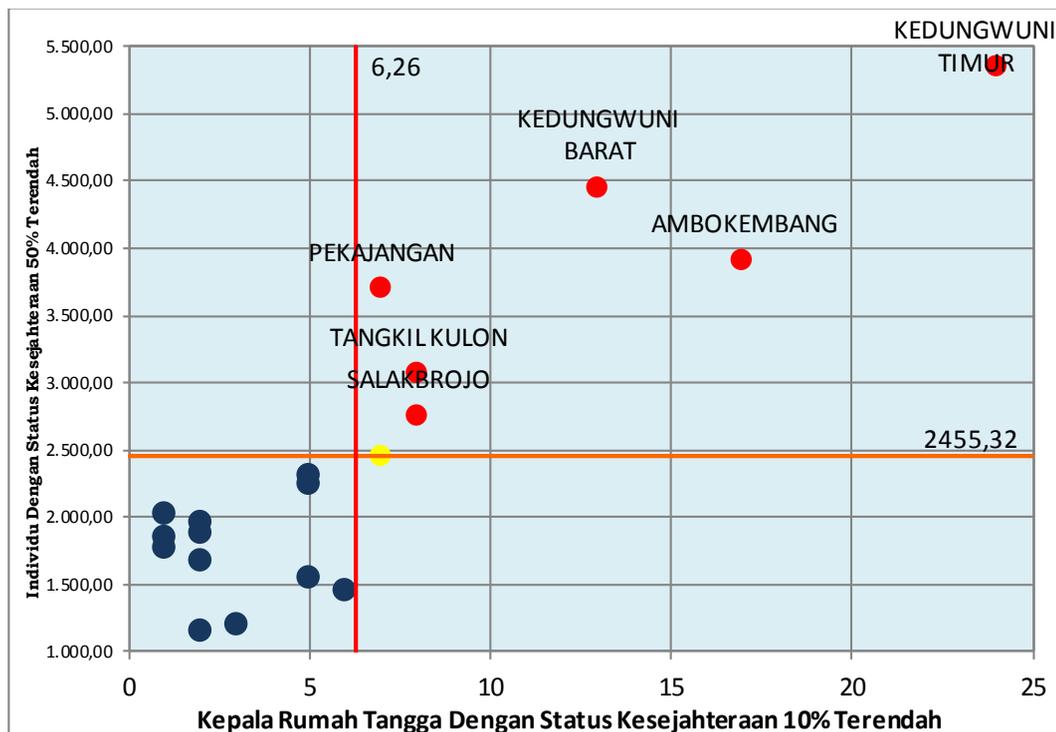
Tabel 5.9 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Karangdadap

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Kebonsari	24	2713	1
2.	Pagumengan Mas	20	2791	1
3.	Jrebeng Kembang	7	2907	3
4.	Karangdadap	7	2877	3
5.	Kalilembu	4	2288	3
6.	Kebonrowopucang	3	3394	3
7.	Logandeng	5	1788	4
8.	Pangkah	3	1227	4
9.	Kaligawe		890	4
10.	Kedungkebo		1730	4
11.	Pegandon		2234	4

8. Kecamatan Kedungwuni

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Kedungwuni, yaitu Kedungwuni Timur, Ambokembang, Kedungwuni Barat, Salakbrojo, Tangkil Kulon dan Pekajangan. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Kedungwuni dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.11 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Kedungwuni



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Kedungwuni dapat dilihat pada tabel berikut.

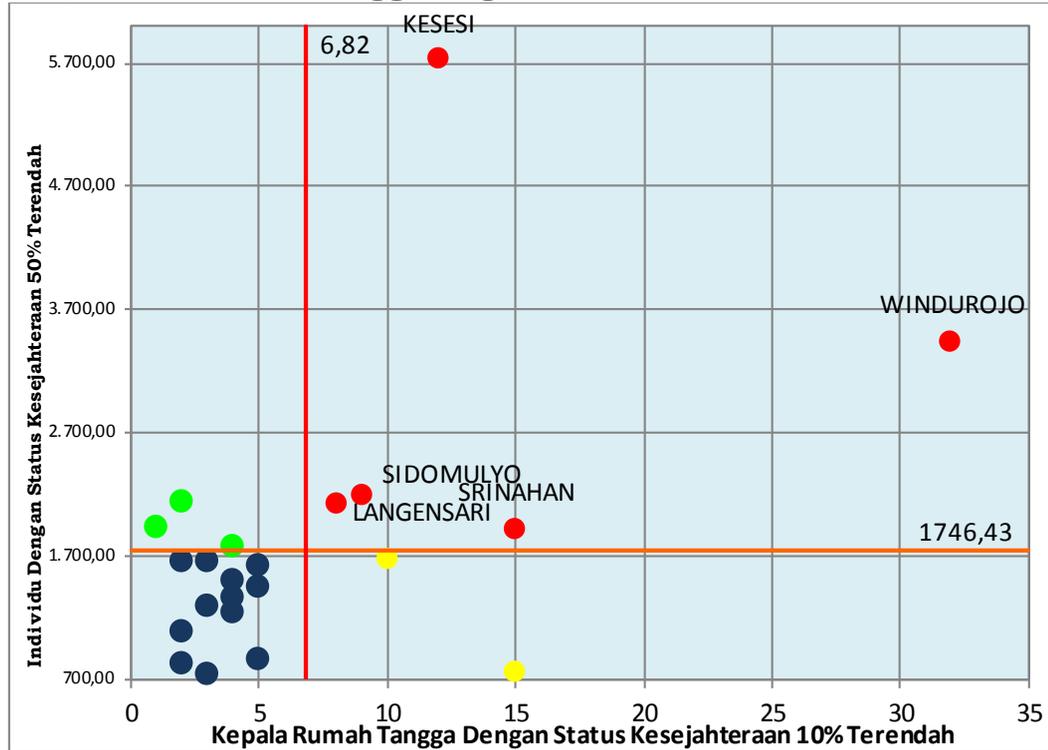
Tabel 5.10 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Kedungwuni

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Kedungwuni Timur	24	5349	1
2.	Ambokembang	17	3905	1
3.	Kedungwuni Barat	13	4446	1
4.	Salakbrojo	8	2747	1
5.	Tangkil Kulon	8	3060	1
6.	Pekajangan	7	3695	1
7.	Rengas	7	2451	2
8.	Bugangan	6	1443	4
9.	Podod	5	2307	4
10.	Proto	5	1546	4
11.	Tangkil Tengah	5	2235	4
12.	Rowocacing	3	1193	4
13.	Karangdowo	2	1871	4
14.	Kedungpatangewu	2	1665	4
15.	Pajomblangan	2	1963	4
16.	Tosaran	2	1146	4
17.	Kwayangan	1	1838	4
18.	Langkap	1	2017	4
19.	Pakisputih	1	1774	4

9. Kecamatan Kesesi

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Kesesi, yaitu Windurojo, Srinahan, Kesesi, Sidomulyo dan Langensari. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Kesesi dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.12 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Kesesi



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Kesesi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.11 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Kesesi

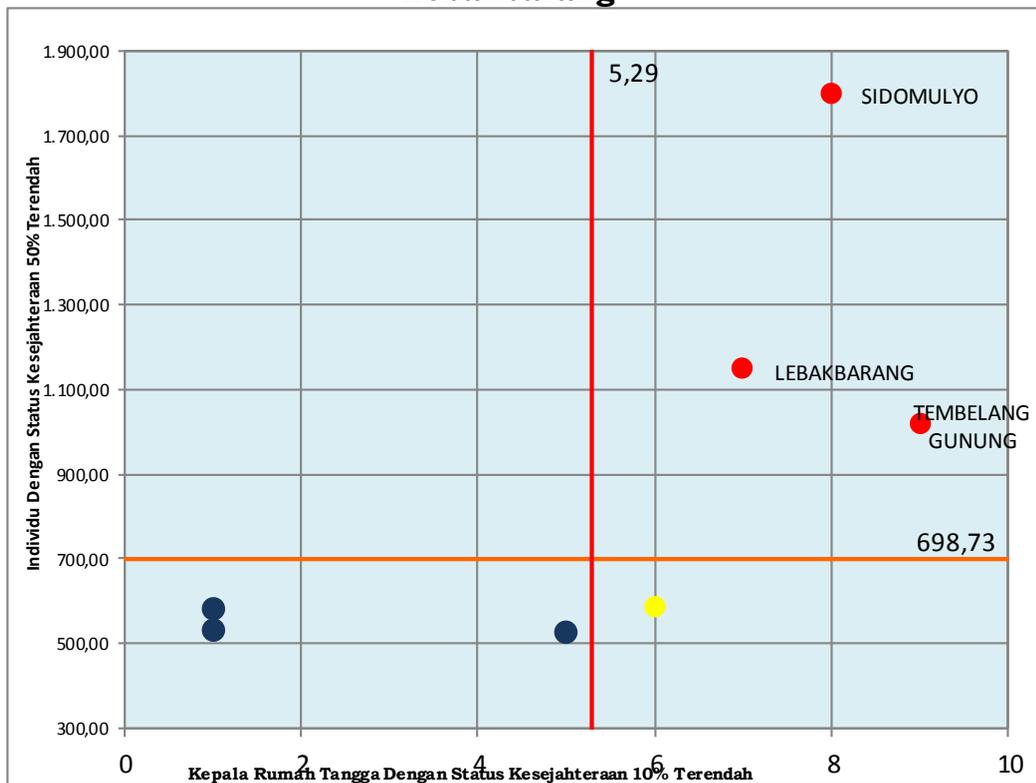
No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Windurojo	32	3430	1
2.	Srinahan	15	1907	1
3.	Kesesi	12	5721	1
4.	Sidomulyo	9	2176	1
5.	Langensari	8	2113	1
6.	Brondong	15	747	2
7.	Kwasen	10	1666	2
8.	Podosari	4	1769	3
9.	Krandon	2	2133	3
10.	Jagung	1	1930	3
11.	Karyomukti	5	851	4
12.	Kwigaran	5	1439	4
13.	Pantirejo	5	1622	4

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
14.	Kaibahan	4	1487	4
15.	Kalimade	4	1233	4
16.	Ujung Negoro	4	1361	4
17.	Karangrejo	3	1285	4
18.	Sidosari	3	1645	4
19.	Watugajah	3	728	4
20.	Mulyorejo	2	1654	4
21.	Ponolawen	2	1084	4
22.	Watupayung	2	816	4
23.	Sukorejo		1371	4

10. Kecamatan Lebakbarang

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Lebakbarang, yaitu Tembelang Gunung, Sidomulyo dan Lebakbarang. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Lebakbarang dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.13 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Lebakbarang



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Lebakbarang dapat dilihat pada tabel berikut.

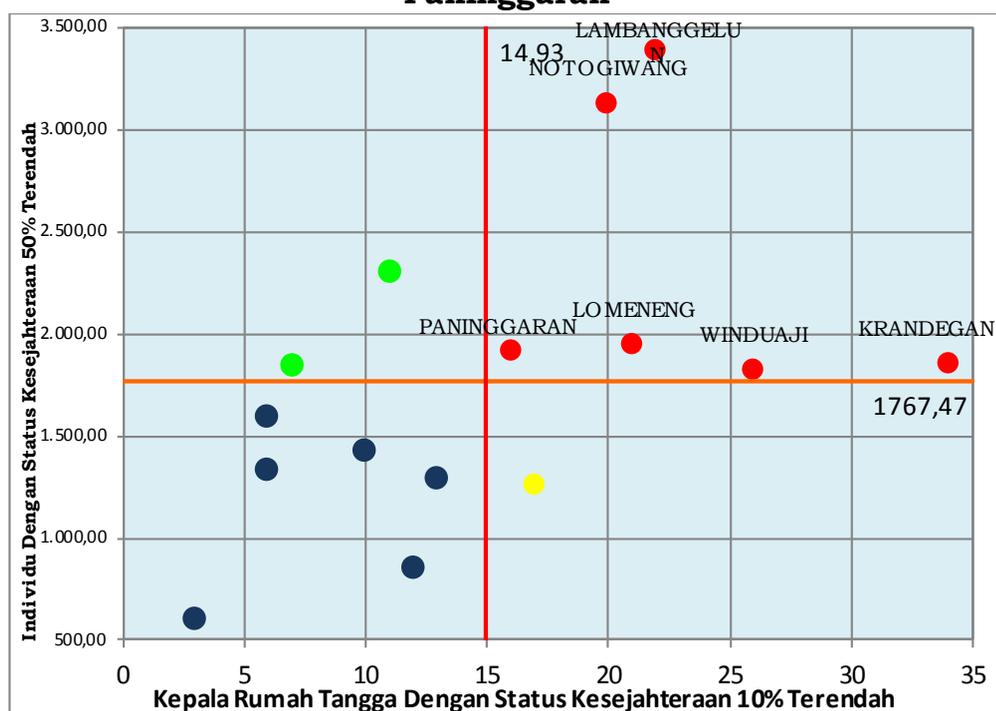
Tabel 5.12 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Lebakbarang

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Tembelang Gunung	9	1019	1
2.	Sidomulyo	8	1801	1
3.	Lebakbarang	7	1147	1
4.	Pamutuh	6	588	2
5.	Timbangsari	5	526	4
6.	Bantar Kulon	1	529	4
7.	Mendolo	1	580	4
8.	Depok		387	4
9.	Kapundutan		337	4
10.	Kutorembet		372	4
11.	Wonosido		400	4

11. Kecamatan Paninggaran

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Paninggaran, yaitu Krandegan, Winduaji, Lambanggalun, Lomeneng, Notogiwang dan Paninggaran. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Paninggaran dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.14 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Paninggaran



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Paninggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.13 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Paninggaran

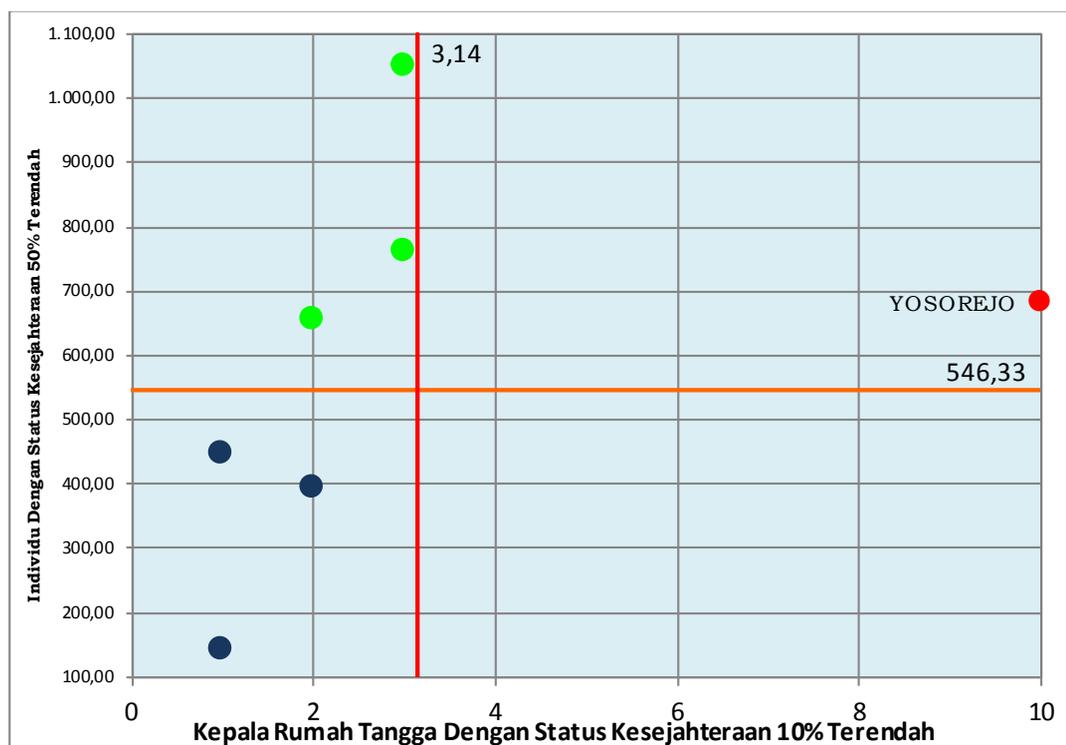
No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Krandegan	34	1849	1
2.	Winduaji	26	1820	1
3.	Lambanggelun	22	3388	1
4.	Lomeneng	21	1943	1
5.	Notogiwang	20	3123	1
6.	Paninggaran	16	1908	1
7.	Kaliombo	17	1254	2
8.	Werdi	11	2303	3
9.	Domiyang	7	1837	3
10.	Tangeran	13	1289	4
11.	Kaliboja	12	849	4
12.	Botosari	10	1427	4

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
13.	Sawangan	6	1593	4
14.	Tenogo	6	1330	4
15.	Bedagung	3	599	4

12. Kecamatan Petungkriono

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Petungkriono, yaitu Yosorejo. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Petungkriono dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.15 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Petungkriono



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Petungkriono dapat dilihat pada tabel berikut.

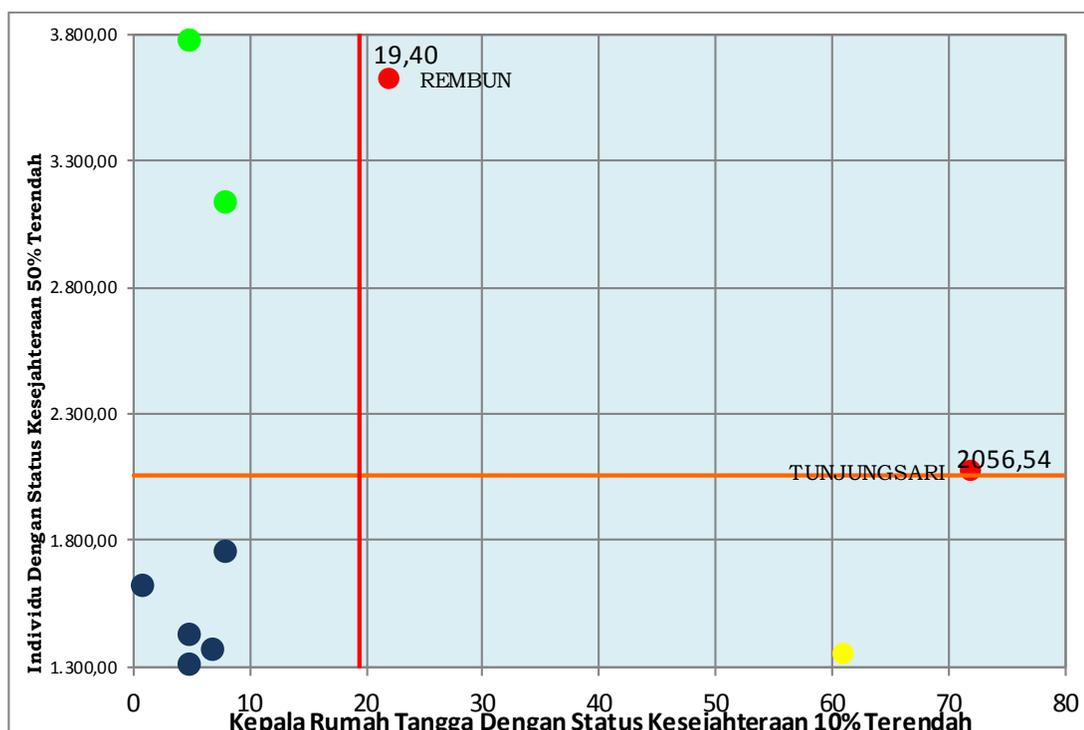
Tabel 5.14 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Petungkriono

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Yosorejo	10	681	1
2.	Tlogohendro	3	763	3
3.	Tlogopakis	3	1050	3
4.	Simego	2	655	3
5.	Kasimpar	2	393	4
6.	Curugmuncar	1	141	4
7.	Kayupuring	1	446	4
8.	Gumelem		296	4
9.	Songgodadi		492	4

13. Kecamatan Siwalan

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Siwalan, yaitu Tunjungsari dan Rembun. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Siwalan dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.16 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Siwalan



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Siwalan dapat dilihat pada tabel berikut.

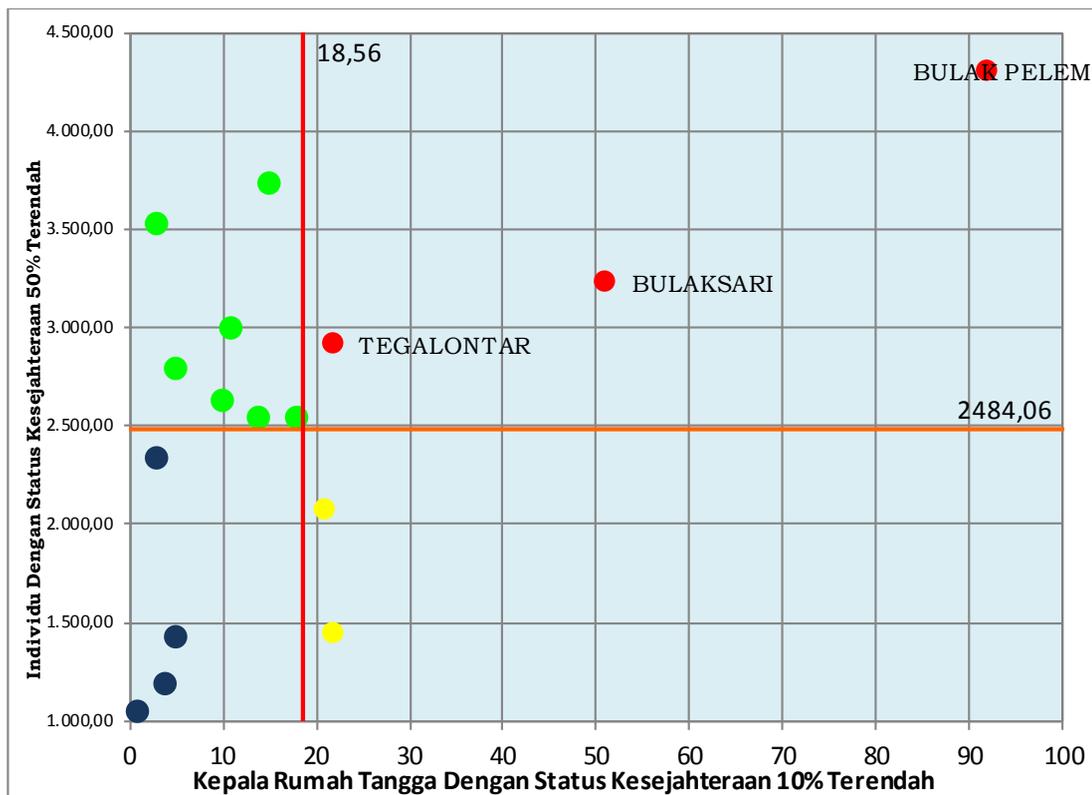
Tabel 5.15 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Siwalan

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Tunjungsari	72	2072	1
2.	Rembun	22	3622	1
3.	Tengeng Wetan	61	1351	2
4.	Siwalan	8	3132	3
5.	Tengengkulon	5	3770	3
6.	Mejasem		2549	3
7.	Blimbing Wuluh	8	1753	4
8.	Boyo Teluk	7	1369	4
9.	Depok	5	1307	4
10.	Wonosari	5	1422	4
11.	Pait	1	1617	4
12.	Blacanan		1327	4
13.	Yosorejo		1444	4

14. Kecamatan Sragi

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Sragi, yaitu Bulak Pelem, Bulaksari dan Tegalontar. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Sragi dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.17 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Sragi



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Sragi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.16 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Sragi

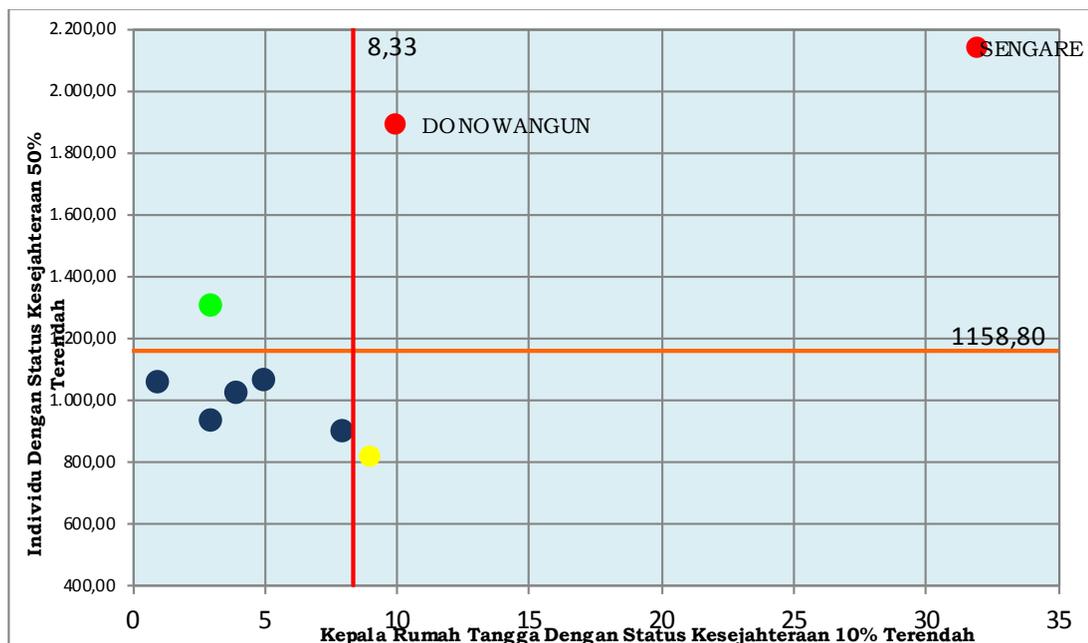
No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Bulak Pelem	92	4307	1
2.	Bulaksari	51	3228	1
3.	Tegalontar	22	2917	1
4.	Mrican	22	1440	2
5.	Gebangkerep	21	2065	2
6.	Klunjukan	18	2533	3
7.	Krasakageng	15	3725	3
8.	Sumub Lor	14	2541	3
9.	Kalijambe	11	2994	3
10.	Tegal Suruh	10	2619	3
11.	Purworejo	5	2788	3
12.	Sragi	3	3520	3

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
13.	Sumub Kidul	5	1423	4
14.	Ketanon Ageng	4	1179	4
15.	Sijeruk	3	2335	4
16.	Purwodadi	1	1045	4
17.	Kedungjaran		1570	4

15. Kecamatan Talun

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Talun, yaitu Sengare dan Donowangun. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Talun dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.18 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Talun



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Talun dapat dilihat pada tabel berikut.

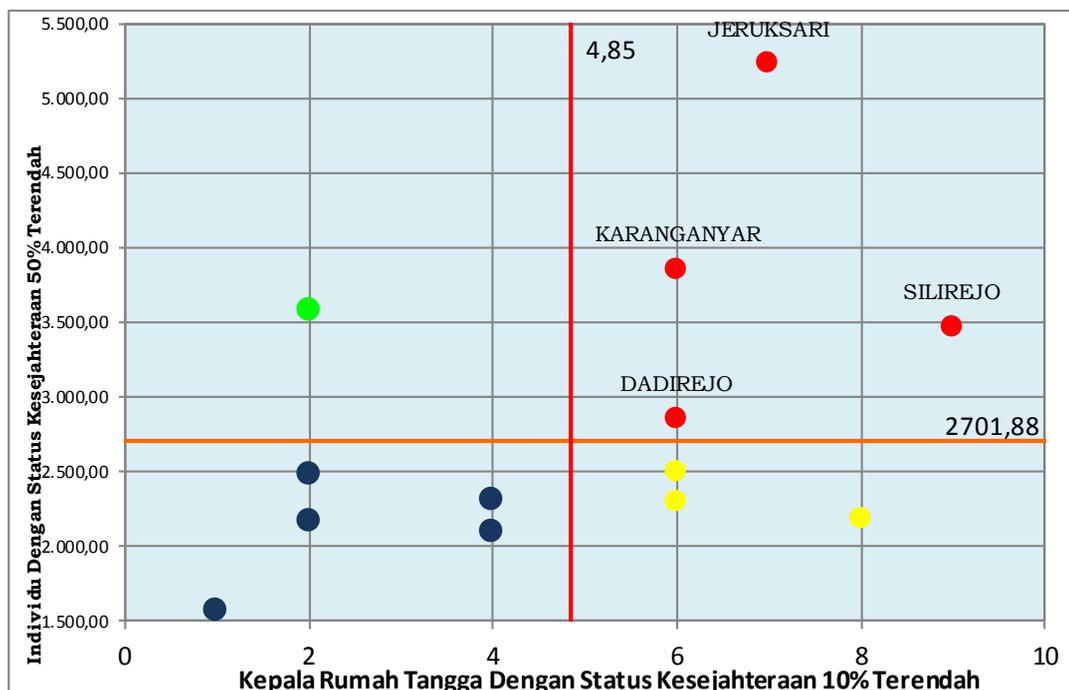
Tabel 5.17 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Talun

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Sengare	32	2134	1
2.	Donowangun	10	1887	1
3.	Batarsari	9	815	2
4.	Talun	3	1303	3
5.	Kalirejo	8	894	4
6.	Krompeng	5	1064	4
7.	Mesoyi	4	1020	4
8.	Banjarsari	3	931	4
9.	Karangasem	1	1056	4
10.	Jolotigo		484	4

16. Kecamatan Tirto

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Tirto, yaitu Silirejo, Jeruksari, Dadirejo dan Karanganyar. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Tirto dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.19 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Tirto



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Tirto dapat dilihat pada tabel berikut.

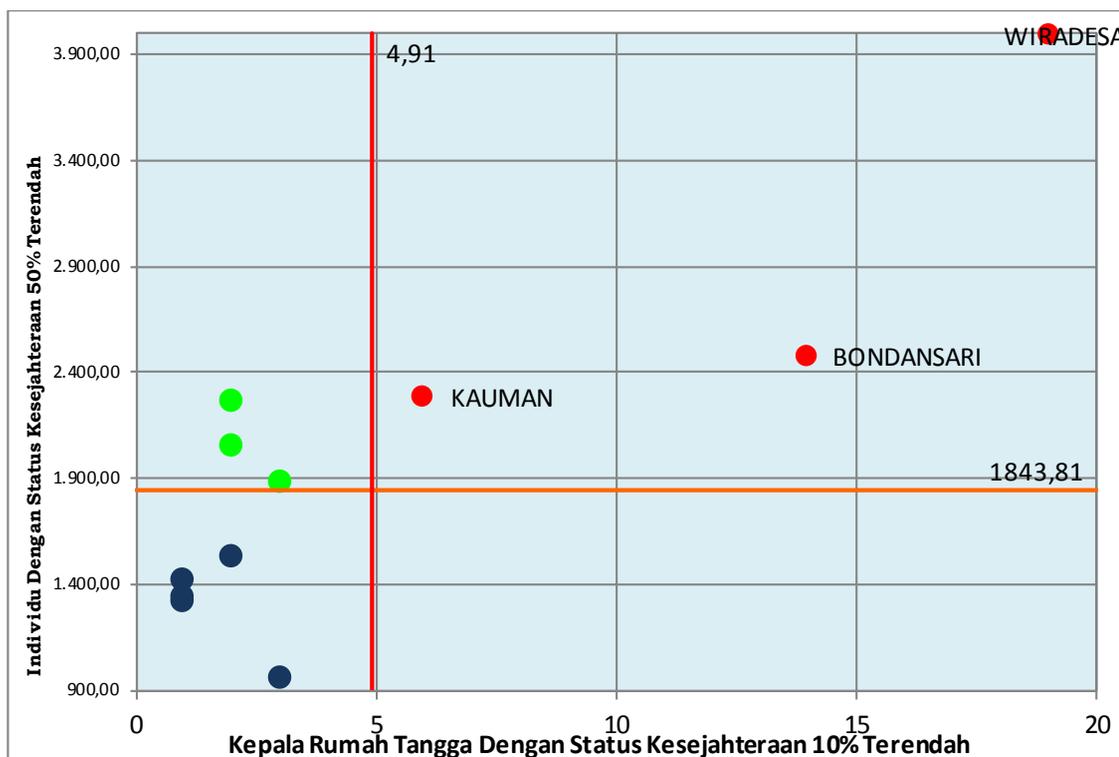
Tabel 5.18 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Tirto

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Silirejo	9	3471	1
2.	Jeruksari	7	5231	1
3.	Dadirejo	6	2858	1
4.	Karanganyar	6	3858	1
5.	Curug	8	2182	2
6.	Mulyorejo	6	2491	2
7.	Pacar	6	2304	2
8.	Samborejo	2	3575	3
9.	Pandanarum		2882	3
10.	Pucung	4	2307	4
11.	Sidorejo	4	2099	4
12.	Karangjampo	2	2165	4
13.	Ngalian	2	2478	4
14.	Wuled	1	1570	4
15.	Tanjung		1922	4
16.	Tegaldowo		1837	4

17. Kecamatan Wiradesa

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Wiradesa, yaitu Wiradesa, Bondansari dan Kauman. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Wiradesa dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.20 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Wiradesa



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Wiradesa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.19 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Wiradesa

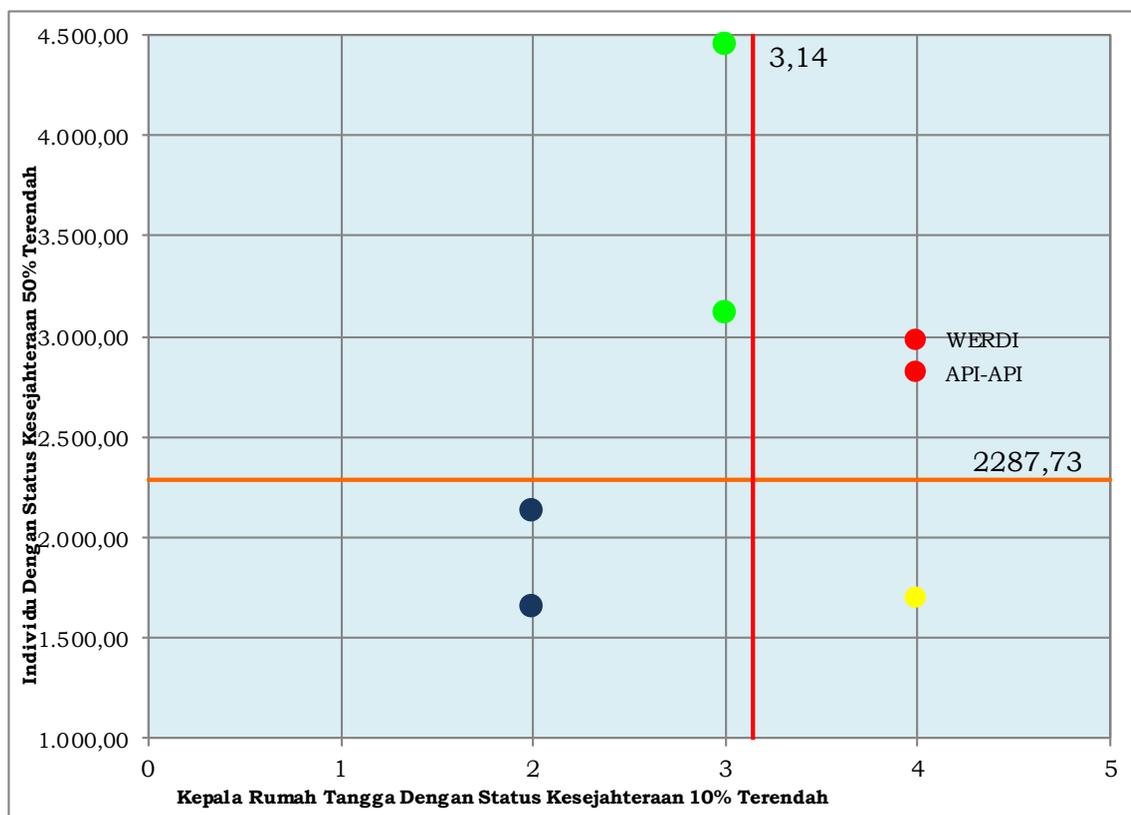
No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Wiradesa	19	3988	1
2.	Bondansari	14	2476	1
3.	Kauman	6	2283	1
4.	Pekuncen	3	1877	3
5.	Bener	2	2049	3
6.	Warulor	2	2265	3
7.	Kadipaten		1882	3
8.	Kampil		2010	3
9.	Karangjati	3	955	4

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
10.	Kepatihan	2	1528	4
11.	Gumawang	1	1319	4
12.	Petukangan	1	1335	4
13.	Warukidul	1	1417	4
14.	Delegtukang		1075	4
15.	Kemplong		1810	4
16.	Mayangan		1232	4

18. Kecamatan Wonokerto

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Wonokerto, yaitu Api-Api dan Werdi. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Wonokerto dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.21 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Wonokerto



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status

kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Wonokerto dapat dilihat pada tabel berikut.

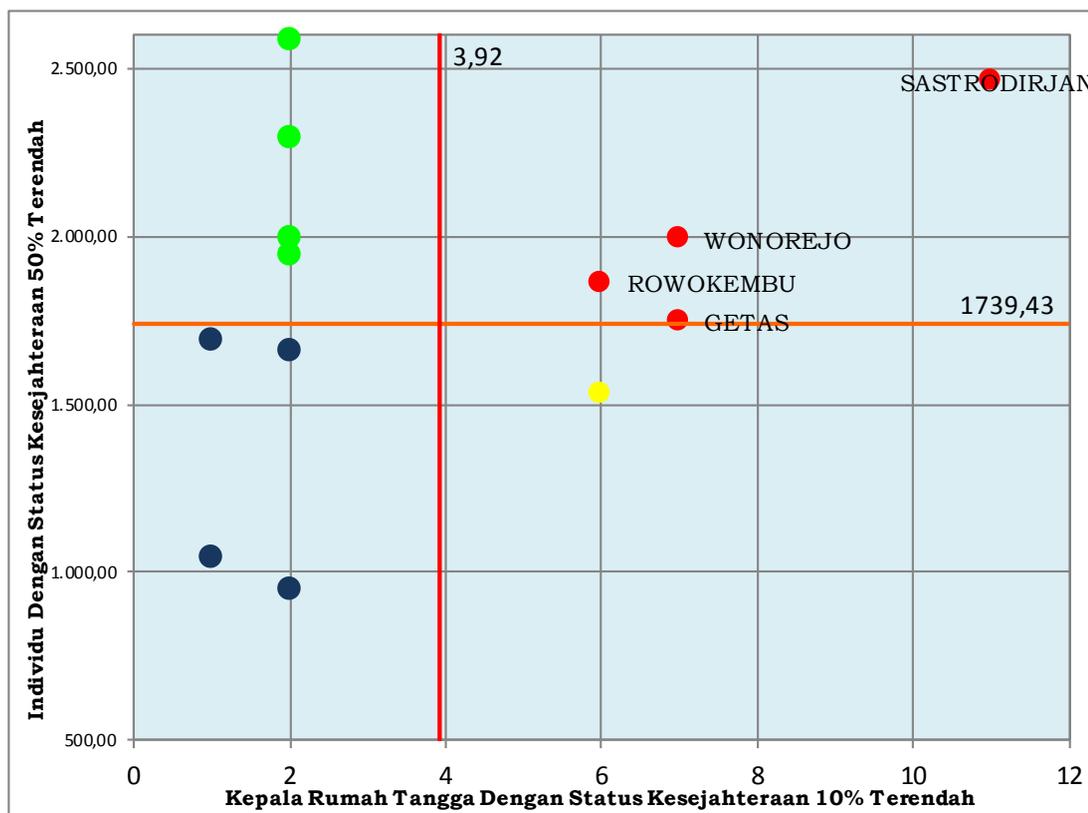
Tabel 5.20 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Wonokerto

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Api-Api	4	2822	1
2.	Werdi	4	2990	1
3.	Wonokerto Wetan	4	1709	2
4.	Bebel	3	4461	3
5.	Rowoyoso	3	3118	3
6.	Sijambe		2498	3
7.	Pecakaran	2	1663	4
8.	Wanokerto Kulon	2	2141	4
9.	Pesanggrahan		1495	4
10.	Semut		1044	4
11.	Tratebang		1224	4

19. Kecamatan Wonopringgo

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Wonopringgo, yaitu Sastrodirjan, Getas, Wonorejo dan Rowokembu. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Wonopringgo dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.

Gambar 5.22 Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Wonopringgo



Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 50% terendah di Kecamatan Wonopringgo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.21 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Wonopringgo

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
1.	Sastrodirjan	11	2464	1
2.	Getas	7	1751	1
3.	Wonorejo	7	1995	1
4.	Rowokembu	6	1865	1
5.	Surabayan	6	1537	2
6.	Galang Pengampon	2	2586	3
7.	Jetak Kidul	2	2294	3
8.	Kwagean	2	1996	3

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah	
9.	Legok Gunung	2	1945	3
10.	Jetak Lengkong	2	954	4
11.	Wonopringgo	2	1664	4
12.	Gondang	1	1049	4
13.	Pegaden Tengah	1	1694	4
14.	Sampih		558	4

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 dilakukan untuk meningkatkan awareness para pemangku kepentingan terhadap kebijakan pencapaian penurunan angka kemiskinan yang merupakan isu yang berlaku universal baik secara Global, Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Kota. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) bahwa Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Pada tingkat Nasional dalam RPJMN 2020-2024, Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020-2024 bahwa Tingkat kemiskinan sendiri diharapkan menurun menjadi 6,0–7,0% pada tahun 2024. Tingkat Provinsi, Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD 2018-2023 pada akhir periode ditargetkan menjadi sebesar 7,48% hingga 6,48%.

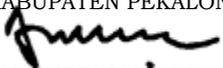
Pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri target penurunan angka kemiskinan ditetapkan pada tahun 2026 menjadi 5,19%. Oleh karena itu, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026 diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menentukan prioritas pembangunan kedepan, terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan.

Implementasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2026 dapat terwujud apabila terintegrasi pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2026 perlu komitmen dalam koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah pengampu urusan lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Hal ini penting mengingat masalah kemiskinan bersifat kompleks dan saling overlapping satu dengan lainnya, terutama bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan, serta kondisi luar biasa pandemi COVID-19 yang mendorong pada pengurangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 3 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 57

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
NIP. 19680517 198903 1 009